



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang merupakan rawan bencana alam yang memiliki potensi ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologis;
 - b. bahwa pada setiap kejadian bencana perlu adanya efektifitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana diperlukan rencana untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi situasi darurat bencana perlu menyusun rencana kontinjensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan rencana kontinjensi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
11. Rencana Kontinjensi adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan :
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha serta masyarakat;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana menjadi rencana operasional;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah dalam penanganan darurat bencana; dan
 - d. sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan bencana.

BAB III RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Bagian Kesatu Sifat Rencana Kontinjensi

Pasal 3

- (1) Sifat Rencana Kontinjensi Bencana :
 - a. partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana kontinjensi bencana yang bersifat partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana melibatkan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, Perguruan Tinggi dan media.

- (3) Rencana Kontinjensi Bencana yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
- a. Bencana Gunung Api Slamet;
 - b. Bencana Gunung Api Merapi;
 - c. Bencana Gempa Bumi Sesar Kendeng;
 - d. Bencana Tsunami ; dan
 - e. Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo.
- (2) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi terdampak sebagai berikut :
- a. Bencana Gunung Api Slamet :
 1. Kabupaten Pemalang;
 2. Kabupaten Tegal;
 3. Kabupaten Brebes;
 4. Kabupaten Banyumas; dan
 5. Kabupaten Purbalingga.
 - b. Bencana Gunung Api Merapi :
 1. Kabupaten Magelang;
 2. Kabupaten Klaten; dan
 3. Kabupaten Boyolali.
 - c. Bencana Gempa Bumi Sesar Kendeng :
 1. Kabupaten Semarang; dan
 2. Kota Semarang.
 - d. Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo :
 1. Kabupaten Boyolali;
 2. Kabupaten Klaten;
 3. Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kabupaten Wonogiri;
 5. Kabupaten Karanganyar;
 6. Kabupaten Sragen;
 7. Kabupaten Blora;
 8. Kabupaten Rembang; dan
 9. Kota Surakarta.
 - e. Bencana Tsunami :
 1. Kabupaten Cilacap ;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Purworejo; dan
 4. Kabupaten Wonogiri.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dunia usaha dan masyarakat bersama-sama menyelenggarakan pengurangan risiko bencana;

- (4) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rencana Kontinjensi Bencana diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat baik secara keseluruhan ataupun sebagian sesuai dengan kondisi faktual.
- (5) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 5

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dan pemutakhiran dokumen rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama untuk semua jenis bencana ataupun dilakukan secara terpisah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- (3) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengoordinasikan Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi dan pemutakhiran terhadap Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. situasi (scenario kejadian yang meliputi wilayah dan masyarakat terdampak);
 - b. struktur organisasi fungsi dan tugas masing-masing *stakeholder* ; dan
 - c. sumber daya manusia dan peralatan.
- (5) Hasil Evaluasi terhadap Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP.197110207 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KONTINJENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG API SLAMET

1.1. Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

Gunung Api Slamet merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 7 14,30'LS dan 109 12,30'BT. Secara administratif, Gunung Api Slamet mencakup beberapa daerah diantaranya Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga. Sektor barat - barat laut termasuk wilayah Kabupaten Brebes, sektor utara termasuk wilayah Kabupaten Tegal, sektor timurlaut - tenggara termasuk wilayah Kabupaten Purbalingga dan sektor selatan - baratdaya termasuk wilayah Kabupaten Banyumas. Ketinggian gunung tersebut mencapai 3.432 m dpl dengan tipe strato.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebutkan adanya 44 kali letusan Gunung Api Slamet baik berupa letusan abu, lava, ataupun semburan lava sejak tahun 1772 hingga 2009. Berdasarkan histori letusan, tipe letusan Gunung Api Slamet umumnya letusan abu disertai lontaran sekoria dan batu pijar selama beberapa hari kecuali kejadian luar biasa mencapai beberapa minggu. Pada tanggal 9 Agustus 2019, status Gunung Api Slamet meningkat ke level WASPADA ditandai dengan 942 kali gempa hembusan selama 15-61 detik, dan 1 kali gempa tremor menerus beramplitudo 0,5-2 mm. Melalui pengamatan visual, Gunung Api Slamet ditutupi Kabut 0-1 dan asap kawah tidak teramati. Status level WASPADA diturunkan ke status NORMAL pada tanggal 9 Oktober 2020 (satu tahun kemudian) ditandai dengan turunnya aktivitas kegempaan menjadi 58 kali gempa hembusan selama 10-28 detik dan asap kawah teramati dengan tebal tinggi 50 meter dari puncak.

Untuk saat ini (per tanggal 23 Juni 2021), Gunung Api Slamet masih pada level NORMAL dengan 133 kali kejadian gempa hembusan selama 8-22 detik, suhu udara 21,6-26,4 C, visual gunung terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III, dan asap kawah masih teramati dengan tebal tinggi 100 meter dari puncak.

Pada kawasan Gunung Api Slamet, terbagi menjadi 3 zona

berdasarkan tingkat kerawanan bencana yakni Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, II, dan III. Beberapa area di kelima Kabupaten yang ada di sekitar gunung tergolong ke dalam zona kawasan rawan bencana gunung api terdiri dari 10 kecamatan 32 desa. KRB I didefinisikan sebagai daerah yang berpotensi terlanda aliran lahar hujan, terutama di daerah pinggiran sungai yang berhulu di Gunung Api Slamet seperti Kali Gung, Kali Pelus, Kali Ponggawa, Kali Sat, dan Kali Alurjero. KRB II didefinisikan sebagai daerah berpotensi terlanda aliran lava, awan panas, dan lahar dingin. Daerah tersebut diperkirakan berjarak radius 5 km dari kawah aktif di puncak Gunung Api Slamet dan diperpanjang ke alur lembah. KRB III didefinisikan sebagai daerah berpotensi terancam aliran lava, gas racun, dan awan panas dengan radius 2 km dari puncak Gunung Api Slamet.

Keberadaan aktivitas manusia pada lereng-lereng gunung mengakibatkan risiko tinggi saat terjadi bencana gunung api. Kegiatan pertanian menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar sehingga perekonomian akan terganggu jika terjadi letusan dan menyebabkan kerugian materiil dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dalam membangun wawasan warga sekitar gunung dan mempersiapkan kelembagaan yang siap tangguh bencana dengan merencanakan skenario-skenario kejadian letusan Gunung Api Slamet melalui Rencana Kontingensi.

1.2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Pengembangan skenario kejadian bencana merupakan narasi deskriptif yang menjelaskan hasil penelitian dan analisis dari para ahli/ilmuwan/ narasumber (dalam hal ini PVMBG) yang berkompeten di bidangnya terutama mengenai kajian atau prediksi intensitas kejadian bencana dan luasan daerah yang akan terdampak, serta mekanisme proses terjadinya bencana. Hal ini penting untuk mendapatkan skenario kejadian berdasarkan data ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (*scientific*), serta potensi bencana data terkini (*update*). Kejelian serta kedalaman pengembangan skenario akan menentukan detail penyusunan rencana kontingensi.

Pengembangan skenario ini akan terkait erat dengan prosedur yang akan dilakukan oleh petugas ataupun masyarakat pada saat situasi darurat bencana. Pada ancaman bencana tertentu bisa diuraikan tentang peringatan yang akan dikeluarkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan skala ancaman bencana. Skenario kejadian yang dipilih selanjutnya dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama. Dapat berupa skenario terburuk (*worst case scenario*) atau skenario yang paling

mungkin terjadi (*most probable scenario*).

Dalam pengembangan skenario perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Waktu kejadian, contoh : kejadian gempa bumi di pagi hari atau di malam hari akan menimbulkan banyak korban karena sebagian besar penduduk beraktivitas di dalam gedung/rumah
- 2) Intensitas bencana; kekuatan bencana misalnya besaran gempabumi dengan ukuran SR pada kedalaman yang dangkal, atau banjir dengan ketinggian air dalam meter
- 3) Durasi kejadian bencana yang dihitung atas dasar :
 - Lamanya kejadian bencana, misalnya banjir yang terjadi dalam waktu 4 hari
 - Berulangnya kejadian bencana, misalnya terjadi banjir beberapa kali dalam satu periode sesudah surut
- 4) Lokasi ancaman
- 5) Luasan wilayah terdampak
- 6) Potensi bencana ikutan (*collateral*)

1.2.1. Skenario Kejadian

A. Skenario Normal (level I) menjadi Waspada (level II)

Berdasarkan Peta KRB Gunungapi Slamet dan catatan sejarah erupsinya, maka pengembangan skenario disusun sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status Gunungapi Slamet dari Normal (level I) menjadi Waspada (level II) pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 10.00 WIB. Peningkatan status tersebut didasarkan pada beberapa hal antara lain:
 - a. Pengamatan visual yang menyebutkan telah teramati Cuaca terang-mendung, angin tenang. Gunung tertutup kabut 0I-0III, pada saat tampak teramati asap putih tipis-tebal setinggi 25-600 m dari puncak. Hujan gerimis-deras.
 - b. Pengamatan kegempaan yang menyebutkan telah terjadi ratusan kali gempa hembusan dan puluhan kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dan gempa Vulkanik Dalam (VA).
- 2) Berdasarkan kondisi tersebut maka PVMBG memberikan rekomendasi berupa :
 - a. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan tidak melakukan aktivitas pada radius 2 km dari Kawah G. Slamet.

- b. Masyarakat di sekitar G. Slamet diharap tenang tidak terpancing isu-isu tentang erupsi G. Slamet, dan agar senantiasa mengikuti arahan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga yang senantiasa mendapat laporan tentang aktivitas G. Slamet.
- c. Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos PGA Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.
- d. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga dalam memberikan informasi tentang kegiatan G. Slamet.

B. Skenario Waspada (level II) menjadi Siaga (level III)

Berdasarkan Peta KRB Gunungapi Slamet dan catatan sejarah erupsinya, maka pengembangan skenario disusun sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status Gunungapi Slamet dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) pada tanggal 30 April 2014 pukul 10.00 WIB. Peningkatan status tersebut didasarkan pada beberapa hal antara lain:
 - a. Pengamatan visual yang menyebutkan telah teramati asap kecoklatan sedang hingga tebal setinggi kurang lebih 200 – 1000 meter dari puncak diiringi dengan suara dentuman dan gemuruh yang keras dan terus menerus.
 - b. Pengamatan kegempaan yang menyebutkan telah terjadi ratusan kali gempa hembusan dan puluhan kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dan gempa Vulkanik Dalam (VA).
- 2) Berdasarkan kondisi tersebut maka PVMBG memberikan rekomendasi berupa :
 - a. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan tidak melakukan aktivitas pada radius 4 km dari kawah Gunung Api Slamet.
 - b. Masyarakat di sekitar Gunungapi Slamet diharap tenang tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunungapi Slamet, dan agar senantiasa mengikuti arahan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang senantiasa mendapat laporan tentang

aktivitas Gunungapi Slamet.

- c. Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos PGA Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.
- d. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan memonitor persiapan-persiapan yang diperlukan
- e. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Purbalingga dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunungapi Slamet.
- f. Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan meningkatkan pemantauan secara intensif guna melakukan evaluasi kegiatan Gunungapi Slamet dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.
- g. Status kegiatan Gunungapi Slamet akan dinaikkan atau diturunkan jika terjadi peningkatan/penurunan aktivitas vulkanik.
- h. Berdasarkan data yang ada, maka hingga tanggal 12 Agustus 2014, Gunungapi Slamet masih dalam status SIAGA. Hingga saat ini masih terjadi letusan-letusan yang utamanya mengarah ke Barat-Barat Laut. Analisis data dilakukan terus menerus untuk mengevaluasi aktivitas gunungapi secara real-time.

C. Skenario Siaga (level III) Menjadi Awasi (level IV)

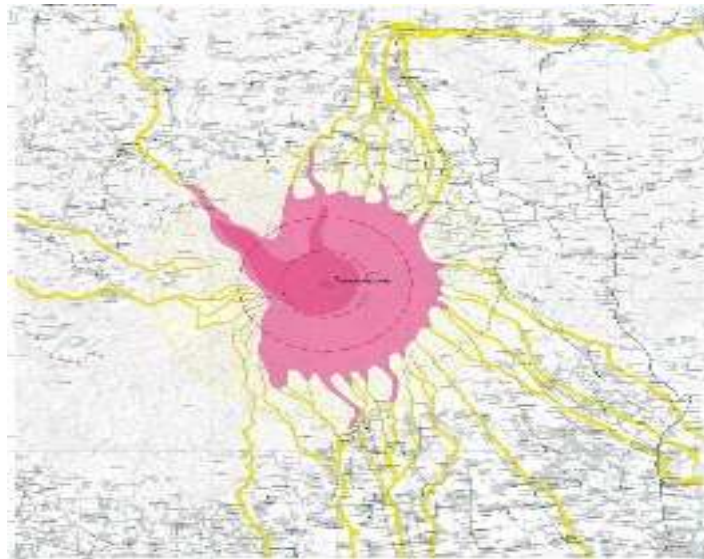
- 1) Peningkatan Status Gunungapi Slamet dari Siaga (level III) menjadi Awasi (level IV) terjadi pada tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WIB. Peningkatan status tersebut didasarkan pada beberapa hal antara lain:
 - a. Pengamatan visual yang menyebutkan telah teramati asap kehitaman pekat dengan ketebalan tebal hingga sangat tebal setinggi kurang lebih 1000 -1500 meter dari puncak diiringi dengan suara dentuman dan gemuruh yang keras dan terus menerus dengan suara yang sangat keras hingga terdengar pada jarak 10 – 20 km dari puncak.
 - b. Telah terjadi beberapa kali lontaran batu pijar ke arah Kabupaten Purbalingga, hingga mencapai 3 km dari puncak.

Awan panas sudah menuruni lereng memasuki sungai yang berhulu di puncak hingga mencapai jarak 4 km daripuncak.

- c. Pengamatan kegempaan yang menyebutkan telah terjadi ribuan kali gempa hambusan, ratusan kali tremor harmonik dan ratusan kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dan gempa Vulkanik Dalam(VA).
 - d. Telah terjadi deformasi tubuh Gunungapi Slamet yang terus mengalami inflasi. Aktivitas erupsi terus berlangsung dengan produk jatuhan piroklastik berupa lontaran batu dan hujan abu semakin tinggi mencapai jarak 5 Km daripuncak.
- 2) Berdasarkan kondisi tersebut PVMBG memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Melakukan evakuasi bagi warga ke tempat aman terutama di Desa Serang, Desa Kutabawa di Kecamatan Karangreja, Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Dukuh Kutabarang Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dan Desa Cendana, Desa Karangjengkol, Desa Karangcegak, desa Candinata, Dukuh Simpar Desa Cadiwulan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
 - b. Dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun pada radius 8 – 12 km dari Kawah Gunungapi Slamet.
 - c. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat evakuasi masyarakat dalam radius 8 – 12km.
 - d. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Purbalingga dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunungapi Slamet.
- 3) Para Kepala Desa di 5 kabupaten terdampak agar melakukan evakuasi warga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TEA) yang telah ditetapkan.
- 4) Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan armada yang telah dipersiapkan oleh masyarakat dan berbagai pihak. Pelaksanaan evakuasi dikoordinasikan bersama Tim Siaga Bencana Desa beserta seluruh relawan desa yang terlibat. Warga melakukan evakuasi telah mempersiapkan diri dengan tas darurat (emergency bag). Evakuasi juga dilakukan terhadap hewan ternak berupa sapi dan kambing dengan menggunakan armada yang telah dipersiapkan.

Letusan yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari

karakter Slamet Muda. Komposisi magma: basaltic-to-basaltic andesitic ($\text{SiO}_2 \sim 50 \text{ wt\%}$) Encer. Tipe letusan utama : Strombolian (hingga Vulcanian), kekuatan letusan (Volcanic Explosivity Index/VEI) berkisar 1-2 dari skala 7 (letusan cenderung lemah) dgn ketinggian kolom letusan maksimal $\sim 5 \text{ km}$, volume letusan antara 10.000-1.000.000 m^3 . Letusan utama: Letusan abu dan Lava pijar. Letusan tipe ini frekuensi letusannya lebih tinggi. Dalam sejarah, Slamet telah meletus 45 kali. Di luar Indonesia, gunungapi yang setipe dengan G. Slamet seperti Paricutin-Mexico meletus secara menerus selama 9 tahun, Stromboli-Italia terus meletus semenjak ribuan tahun, dll.



Gambar 1. Kawasan Bencana Gunungapi Slamet

1.2.2. Cakupan Wilayah Terdampak

1.2.3.a. Kabupaten Banyumas

Tabel 1. Cakupan Daerah Terdampak di Kab. Banyumas

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak	
1	Banyumas	Kedungbanteng	Melung	2.241	1.925	
			Baturaden	Ketenger	3.319	2.987
			Kemutuglor	4.933	4.440	
			Karangmangu	2.857	2.571	
			Karangsalam	2.511	2.260	
2	Sumbang	Melung	Sikapat	4.117	2.059	
			Gandatapa	8.053	8.053	
			Kotayasa	9.724	9.724	
			Limpakuwus	4.911	4.911	
Total penduduk terdampak Kabupaten Banyumas				42.666	38.930	

1.2.3.b. Kabupaten Purbalingga

Tabel 2. Cakupan Daerah Terdampak di Kab. Purbalingga

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
1	Purbalingga	Karangreja	Kutabawa	6.371	6.371
			Serang	7.609	7.249
		Mrebet	Sangkanayu	5.141	4.915
			Penghalusan	6.597	200
			Binangun	4.137	1.125
		Bojongsari	Bumisari	7.731	200
		Kutasari	Karang Jengkol	4.300	1.727
			Candinata	5.864	1.070
			Cendana	5.167	1.297
			Candiwulan	5.643	214
	Total penduduk terdampak Kabupaten Purbalingga			58.560	24.368

1.2.3.c. Kabupaten Pemalang

Tabel 3. Cakupan Daerah Terdampak di Kab. Pemalang

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
1	Pemalang	Pulosari	Clekatakan	6.433	6.433
			Batursari	3.352	3.352
			Penakir	5.641	5.641
			Gunungsari	4.188	4.188
			Jurangmangu	1.332	1.332
			Gambuhan	8.065	1.800
			Karangsari	6.332	6.332
			Siremeng	5.684	1.204
	Total penduduk terdampak Kabupaten Pemalang			34.594	23.849

1.2.3.d. Kabupaten Tegal

Tabel 4. Cakupan Daerah Terdampak di Kab. Tegal

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
1	Tegal	Bumijawa	Batumirah	4453	3000
			Sigedong	7102	5000
			Guci	4086	3500
		Bojong	Kedawung	2821	2000
			Dukuh Tengah	2926	1000
			Rembul	9194	4000
			Tuwel	9739	2500
	Total penduduk terdampak Kabupaten Tegal			40.321	21.000

1.2.3.e. Brebes

Tabel 5. Cakupan Daerah Terdampak di Kab. Brebes

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
1	Brebes	Sirampog	Dawuhan	9.874	2.827
			Batursari	3.188	702
2		Paguyangan	Igirlanceng	3.029	3.029
			Pandansari	9.874	2.827
Total penduduk terdampak Kabupaten Brebes				23.484	10.532

1.2.3.f. Bahaya Primer

Bahaya primer Gunung Api Slamet berupa bahaya langsung akibat letusan yakni luncuran awan panas, lontaran piroklastik (bom vulkanik, lapilli, pasir, dan abu) dan mungkin aliran lava.

1.2.3.g. Bahaya Sekunder

Bahaya sekunder Gunung Api Slamet berupa bahaya tidak langsung akibat letusan yakni lahar hujan yang terjadi setelah letusan apabila turun hujan di sekitar puncak gunung.

1.2.3.h. Bahaya Tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan Gunungapi api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan), membakar dan merusak lingkungan yang terlanda. Turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.

1.2.3. Asumsi Dampak Kejadian

1.2.4.a. Aspek Kependudukan

Tabel 6. Asumsi Korban Terdampak Erupsi Gunung Api Slamet di Lima Kabupaten

A. Kabupaten Pemalang						
Di Kabupaten Pemalang, letusan Gunung Api Slamet diasumsikan mengakibatkan sebanyak 6 jiwa meninggal, 0 orang hilang, 159 orang luka ringan, 34 orang luka berat, dan 21.042 orang mengungsi.						
No.	Desa/Kelurahan	Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
		Ringan	Berat			
1	Clekatakan	43	8	1	0	6.433
2	Batursari	35	6	1	0	3.352
3	Penakir	20	7	1	0	5.641
4	Gunungsari	15	4	1	0	4.188
5	Jurangmangu	13	5	1	0	1.332
6	Gambuhan	10	2	1	0	24
7	Karangsari	9	0	0	0	50
8	Siremeng	14	2	0	0	22

B. Kabupaten Brebes

Di Kabupaten Brebes, letusan Gunung Api Slamet diasumsikan mengakibatkan sebanyak 9 jiwa meninggal, 12 orang hilang, 2.319 orang luka ringan, 615 orang luka berat, dan 7.577 orang mengungsi.

No.	Desa/Kelurahan	Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
		Ringan	Berat			
1	Dawuhan	622	165	2	3	2.035
2	Batursari	155	41	1	1	505
3	Igirlanceng	875	232	3	4	2.860
4	Pandansari	667	177	3	4	2.178

C. Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas, letusan Gunung Api Slamet diasumsikan mengakibatkan sebanyak 10 jiwa meninggal, 22 orang hilang, 262 orang luka ringan, 86 orang luka berat, dan 37.554 orang mengungsi.

No.	Desa/Kelurahan	Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
		Ringan	Berat			
1	Melung	18	38	0	1	1.846
2	Ketenger	14	3	1	4	2.866
3	Kemutuglor	21	3	0	4	4.262
4	Karangmangu	27	2	0	4	2.467
5	Karangsalam	9	2	1	4	2.169
6	Sikapat	39	2	2	1	1.973
7	Gandatapa	39	8	2	0	7.890
8	Kotayasa	47	9	1	0	9.334
9	Limpakuwus	48	19	3	4	4.747

D. Kabupaten Tegal

Di Kabupaten Tegal, letusan Gunung Api Slamet diasumsikan mengakibatkan sebanyak 5 jiwa meninggal, 5 orang hilang, 15.700 orang luka ringan, 3.820 orang luka berat dan 17.441 orang mengungsi.

No.	Desa/Kelurahan	Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
		Ringan	Berat			
1	Kedawung	675	75	1	1	750
2	Dukuh Tengah	2.337	2.337	1	1	2.596
3	Rembul	2.895	321	1	1	3.215
4	Guci	3.700	411	1	1	4.111
5	Sigedong	6.093	676	1	1	6.769

E. Kabupaten Purbalingga

Di Kabupaten Purbalingga, letusan Gunung Api Slamet diasumsikan mengakibatkan sebanyak 7 jiwa meninggal, 100 orang hilang, 4.549 orang luka ringan dan 20.569 orang mengungsi.

No.	Desa/Kelurahan	Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
		Ringan	Berat			
1	Jumlah total	4.549		7	100	20.569

1.2.4.b. Aspek Fisik

Tabel 7. Asumsi Dampak Sarana dan Prasarana Erupsi Gunung Api Slamet di Lima Kabupaten

A. Kabupaten Pemalang				
<p>Sarana dan prasarana fisik terdampak akibat letusan Gunung Api Slamet meliputi sarpras listrik, air, sarpras transportasi, sarpras komunikasi, sarpras kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk.</p> <p>Di Kabupaten Pemalang, jaringan listrik dan sumber air mengalami rusak berat, 2 jembatan rusak berat, 1 unit puskesmas rusak berat, 58 fasilitas sekolah rusak berat, 4 kantor pemerintahan rusak berat, serta 36 tempat ibadah mengalami rusak berat.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
A Sarana Prasarana				
1	Jaringan listrik		√	14 Hari
2	Air (sumur, sumber air lain)		√	14 Hari
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan	1	2	
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas	1	1	14 hari
B Fasilitas Umum				
1	Sekolah			
	- TK/PAUD		30 Unit	14 hari
	- SD		20 Unit	14 hari
	- SMP/MTs		6 Unit	14 hari
	- SMA/SMK/MA		2 Unit	14 hari
2	Kantor pemerintahan	4	4	14 hari
3	Pasar		1	14 hari
4	SPBU			
5	Tempat ibadah		36	30 hari
C Rumah Penduduk				
		N/A	N/A	
B. Kabupaten Brebes				
<p>Sarana dan prasarana fisik terdampak akibat letusan Gunung Api Slamet meliputi 120 tiang listrik rusak berat, 6 km pipa air rusak berat, sarpras transportasi, 8 tower BTS rusak berat, 6 sekolah rusak berat, 2 kantor pemerintahan rusak berat, 1 pasar rusak berat dan 320 rumah penduduk rusak berat.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
A Sarana Prasarana				
1	Jaringan listrik	180 tiang	120 tiang	7 hari

		9 km kabel	6 km kabel	
2	Air (sumur, sumber air lain)	6 km pipa	6 km pipa	14 hari
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan			
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS		8 tower	7 hari
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
B	Fasilitas Umum			
1	Sekolah	10	6	14 hari
	- TK/PAUD			
	- SD			
	- SMP/MTs			
	- SMA/SMK/MA			
2	Kantor pemerintahan	3	2	7 hari
3	Pasar		1	14 hari
4	SPBU			
5	Tempat ibadah			
C	Rumah Penduduk	640	320	14 hari
C. Kabupaten Banyumas				
Sarana dan prasarana fisik terdampak akibat letusan Gunung Api Slamet meliputi sarpras listrik, air, sarpras transportasi, sarpras komunikasi, sarpras kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk. Di Kabupaten Banyumas terdapat 1 jembatan rusak berat dan 1 rusak ringan, 1 puskesmas rusak berat dan 1 rusak ringan, 12 fasilitas sekolah rusak ringan dan 7 rusak berat, 5 kantor pemerintahan rusak ringan dan 1 rusak berat, serta 44 tempat ibadah mengalami rusak ringan dan 27 rusak berat.				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
A	Sarana Prasarana			
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan		1	1
	- Bandara		0	0
	- Pelabuhan		0	0
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas		1	1
B	Fasilitas Umum			
1	Sekolah			

- TK/PAUD	10	5	14 hari
- SD	1	1	14 hari
- SMP/MTs	1	1	14 hari
- SMA/SMK/MA	5	1	7 hari
2 Kantor pemerintahan			
3 Pasar			
4 SPBU	44	27	7 hari
5 Tempat ibadah			

C Rumah Penduduk

D. Kabupaten Tegal

Sarana dan prasarana fisik terdampak akibat letusan Gunung Api Slamet meliputi sarpras listrik, air, sarpras transportasi, sarpras komunikasi, sarpras kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk. Di Kabupaten Tegal terdapat 73 Km mengalami rusak berat, semua sumur mengalami kerusakan berat, 6 SD rusak berat, 4 kantor pemerintahan rusak berat, 15 tempat ibadah rusak berat, dan 5.000 rumah penduduk rusak berat.

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
A	Sarana Prasarana			
1	Jaringan listrik	50 Km	73 Km	
2	Air (sumur, sumber airlain)		Semua sumur	-
3	Prasarana transportasi	-	-	-
	- Jalan	40	10	-
	- Jembatan	12	-	-
	- Bandara	-	-	-
	- Pelabuhan	-	-	-
	- Terminal	-	-	-
4	Sarana komunikasi	-	-	-
	- BTS	-	-	-
	- Jaringan telepon, dll	-	-	-
5	Rumah sakit	-	-	-
6	Puskesmas	2 unit	-	-
B	Fasilitas Umum			
1	Sekolah			
	- TK/PAUD	-	-	-
	- SD	24 Unit	6 unit	-
	- SMP/MTs	5 Unit	-	-
	- SMA/SMK/MA	3 Unit	-	-
2	Kantor pemerintahan	6	4	Kantor desa
3	Pasar	2 unit	-	-
4	SPBU	1 Unit	-	-
5	Tempat ibadah	45 unit	15 Unit	-
C	Rumah Penduduk	5.000unit	5.000 unit	

E. Kabupaten Purbalingga

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 20 km jalan rusak ringan dan 23 km jalan rusak berat, 15 jembatan rusak ringan dan 8 rusak berat, 45 fasilitas sekolah rusak ringan dan 5 rusak berat, 37 kantor pemerintahan rusak ringan, 2 pasar rusak ringan, 37 tempat ibadah mengalami rusak ringan dan 7 rusak berat serta 1.290 rumah penduduk rusak ringan dan 246 rumah penduduk rusak berat.

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
A	Sarana Prasarana			
1	Jaringan listrik	-	-	-
2	Air (sumur, sumber airlain)	-	-	-
3	Prasarana transportasi	-	-	-
	- Jalan	20 km	23 km	-
	- Jembatan	15	8	-
	- Bandara	-	-	-
	- Pelabuhan	-	-	-
	- Terminal	-	1	-
4	Sarana komunikasi	-	-	-
	- BTS	-	-	-
	- Jaringan telepon, dll	-	-	-
5	Rumah sakit	-	-	-
6	Puskesmas	-	-	-
	Pustu (Puskesmas			
7	Pembantu)	-	2	-
8	PKD	7	4	-
B	Fasilitas Umum			
1	Sekolah	-	-	-
	- TK/PAUD	11	5	-
	- SD	30	-	-
	- SMP/MTs	4	-	-
	- SMA/SMK/MA	-	-	-
2	Kantor pemerintahan	37	-	-
3	Pasar	2	-	-
4	SPBU/Pertashop	-	1	-
5	Tempat ibadah	37	7	-
C	Rumah Penduduk	1.290	246	-

1.2.4.c. Aspek Dampak Ekonomi

Tabel 8. Asumsi Dampak Ekonomi Erupsi Gunung Api Slamet di Lima Kabupaten

A. Kabupaten Pemalang				
Akibat kejadian letusan Gunung Api Slamet berdampak pada aktivitas ekonomi warga terutama pertanian dan pariwisata. Sistem distribusi hasil komoditas pokok akan terganggu dan daya tarik wisata berkurang. Di Kabupaten Pemalang, 1 pasar tradisional rusak ringan, 166,84 ha sawah rusak ringan, 4.217,17 ha tegalan/kebun rusak ringan dan 306 ternak besar (sapi/kambing) terancam.				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	Pasar tradisional	1	-	1
2	Warung	-	-	-
3	Lahan sawah	166.84 ha	-	166.84 ha
4	Tegalan/Kebun	4.217,17 ha	-	4.217,17 ha
5	Ternak			
6	- Ternak besar	306 ekor	-	30 Ekor
		4 ekor	-	-
7	- Unggas	9.836 ekor	-	90 Ekor

8	Industri	-	-	-
9	Tempat wisata	-	-	-
B. Kabupaten Brebes				
<p>Akibat kejadian letusan Gunung Api Slamet berdampak pada aktivitas ekonomi warga terutama pertanian dan pariwisata. Sistem distribusi hasil komoditas pokok akan terganggu dan daya tarik wisata berkurang. Di Kabupaten Brebes, 1 pasar tradisional rusak berat, 178 warung rusak berat, 60 ha sawah rusak ringan, 120 ha tegalan/kebun rusak berat dan 5.440 ternak besar (sapi/kambing) terancam kelas berat, 10 unggas terancam kelas berat, dan 3 tempat wisata rusak berat.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	Pasar tradisional	3	1	14 hari
2	Warung	251	178	14 hari
3	Lahan sawah	90 ha	60 ha	14 hari
4	Tegalan/Kebun	180 ha	120 ha	14 hari
5	Ternak			
6	- Ternak besar	700	5.440	
7	- Unggas	1.300	10.350	
8	Industri			
9	Tempat wisata	3	3	14 hari
C. Kabupaten Banyumas				
<p>Akibat kejadian letusan Gunung Api Slamet berdampak pada aktivitas ekonomi warga terutama pertanian dan pariwisata. Sistem distribusi hasil komoditas pokok akan terganggu dan daya tarik wisata berkurang. Di Kabupaten Banyumas, 2 pasar tradisional rusak ringan, 104,2 ha sawah rusak ringan dan 208,4 ha sawah rusak berat, 189,6 ha tegalan/kebun rusak ringan dan 879,2 ha rusak berat.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	Pasar tradisional	2		7 hari
2	Warung	-	-	-
3	Lahan sawah	104,2	208,4	7 hari
4	Tegalan/Kebun	189,6	379,2	7 hari
5	Ternak	-	-	-
6	- Ternak besar	-	-	-
7	- Unggas	-	-	-
8	Industri	-	-	-
9	Tempat wisata	-	-	-
D. Kabupaten Tegal				
<p>Akibat kejadian letusan Gunung Api Slamet berdampak pada aktivitas ekonomi warga terutama pertanian dan pariwisata. Sistem distribusi hasil komoditas pokok akan terganggu dan daya tarik wisata berkurang. Di Kabupaten Tegal, 1 pasar tradisional rusak berat, 21 warung rusak berat, 20 ha sawah rusak ringan, 7 tempat ternak besar (sapi/kambing) rusak berat, dan 1 tempat wisata rusak berat.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan
		Ringan	Berat	

				(Hari)
1	Pasar tradisional	1	1	
2	Warung	65	21	
3	Lahan sawah	40	20	
4	Tegalan/Kebun	-	-	
5	Ternak	-	-	
6	- Ternak besar	20	7	Tempat
7	- Unggas	6	-	Tempat
8	Industri	1	-	
9	Tempat wisata	-	1	

E. Kabupaten Purbalingga

Dampak pada aspek ekonomi meliputi terganggunya kegiatan perekonomian/perdagangan serta akses penduduk pada pangan, dapat berupa: kerusakan pasar tradisional, gagal panen, dan lain-lain.

Akibat kejadian letusan Gunung Api Slamet berdampak pada aktivitas ekonomi warga terutama pertanian dan pariwisata. Sistem distribusi hasil komoditas pokok akan terganggu dan daya tarik wisata berkurang. Di Kabupaten Purbalingga, 2 pasar tradisional rusak ringan, 78,18 ha sawah rusak ringan, 668 ternak besar (sapi/kambing) terancam.

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	Pasar tradisional	2	-	-
2	Warung	72	40	-
3	Lahan sawah	78,18	-	-
4	Tegalan/Kebun	-	-	-
5	Ternak	-	-	-
6	- Ternak besar	-	-	668 terancam
7	- Unggas	-	-	-
8	Industri	-	-	-
9	Tempat wisata	1	3	-

1.2.4.d. Aspek Lingkungan

Tabel 9. Tabel 4. Asumsi Dampak Lingkungan Akibat Erupsi Gunung Api Slamet di Lima Kabupaten

A. Kabupaten Pemalang				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Pencemaran air	-	√	-
2	Pencemaran udara	-	√	-
3	Pencemaran tanah	-	√	-
4	Lahan sawah	-	√	-
5	Ladang/Kebun	-	√	-
B. Kabupaten Brebes				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Pencemaran air	4 mata air	1 mata air	
2	Pencemaran udara			
3	Pencemaran tanah			
4	Lahan sawah	40 ha hutan	60 ha hutan	

		rakyat	rakyat	
			2000 ha hutan	
			negara	
5	Ladang/Kebun		605 ha	
C. Kabupaten Banyumas				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Pencemaran air	N/A	N/A	
2	Pencemaran udara	N/A	N/A	
3	Pencemaran tanah	N/A	N/A	
4	Lahan sawah	N/A	N/A	
5	Ladang/Kebun	N/A	N/A	
D. Kabupaten Tegal				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Pencemaran air	v		
2	Pencemaran udara	v		
3	Pencemaran tanah	v		
4	Lahan sawah	v		
5	Ladang/Kebun	v		
E. Kabupaten Purbalingga				
<p>Dampak pada aspek lingkungan dapat berupa: kerusakan dan pencemaran, dan lain-lain. Letusan Gunungapi Slamet diperkirakan mengancam aspek lingkungan yang berada di desa Dawuhan, Batusari, dan IgirKlanceng di Kecamatan Sirampog serta desa Pandansari di Kec. Paguyangan.</p>				
No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Pencemaran air	-	Berat	
2	Pencemaran udara	-	Berat	
3	Pencemaran tanah	-	Berat	
4	Lahan sawah	-	Berat	
5	Ladang/Kebun	-	Berat	

1.2.4.e. Aspek Pelayanan Pemerintahan

Tabel 10. Asumsi Dampak Lingkungan Akibat Erupsi Gunung Api Slamet di Lima Kabupaten

A. Kabupaten Pemalang				
No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Kantor Gambuhan	-	1 unit	7 Hari
2	Kantor Desa Clekatakan	-	1 unit	7 Hari
3	Kantor Desa Batusari	-	1 unit	7 Hari
4	Kantor Desa Penakir	-	1 unit	7 Hari
5	Kantor Desa Gunungsari	-	1 unit	7 Hari
	Kantor Desa	-	1 unit	7 Hari
6	Jurangmangu			

B. Kabupaten Brebes				
No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Balai Desa Pandansari	V		Balai Desa Pandansari
2	BPPP	V		BPPP
3	Puskesmas Pembantu Pandansari	V		Puskesmas Pembantu Pandansari
4	Balai Desa Batusari			Balai Desa Batusari
5	Balai Desa Dawuhan	V		Balai Desa Dawuhan
6	BPPP	V		BPPP
7	Balai Desa IgirKlanceng		V	Balai Desa IgirKlanceng
8	Polindes Igirklanceng		V	Polindes Igirklanceng
C. Kabupaten Banyumas				
No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Kantor Desa Melung	-	1	Atap kantor desa roboh
2	Kantor Desa Ketenger	-	-	-
3	Kantor Desa Karangmangu	-	-	-
4	Kantor Desa Karangsalam	-	-	-
5	Kantor Desa Sikapat	-	-	-
6	Kantor Desa Kotayasa	-	-	-
7	Kantor Desa Gandatapa	-	-	-
8	Kantor Desa Limpakuwus	-	1	Atap kantor desa roboh
D. Kabupaten Tegal				
No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Kantor Dasa Batumirah	v	-	
2	Kantor Desa Sigedong	-	v	
3	Kantor Desa Guci	-	v	
E. Kabupaten Purbalingga				
No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1	Kantor Desa Serang	-	1	7 hari
2	Kantor Desa Kutabawa	1	-	7 hari
3	Poliklinik Desa Cendana	1	-	7 hari
4	Poliklinik desa Kutabawa	1	-	7 hari

1.2.4. Rencana Jalur Evakuasi

1.2.5.a. Kabupaten Pemalang

Tabel 11. Rencana Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Api Slamet

No. Kabupaten	Lokasi Terdampak		Lokasi Aman Bencana	
	Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1 Pemalang	Clekatakan	Pulosari	Gombong Beluk	Belik

2	Batursari	Pulosari	Clekatakan, Pangenteran	Pulosari
3	Penakir	Pulosari	Nyalembeng	Pulosari
4	Gunungsari	Pulosari	Sima	Moga
5	Jurangmangu	Pulosari	Walangsanga	Moga
6	Gambuhan	Pulosari	Moga	Moga
7	Karangsari	Pulosari	Sima	Moga
8	Siremeng	Pulosari	Gambuhan, Pulosari, Cikendung	Pulosari

1.2.5.b. Kabupaten Brebes

Tabel 12. Rencana Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Api Slamet Kab. Brebes

No.	Kabupaten	Lokasi Terdampak		Lokasi Aman Bencana	
		Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1	Brebes	Pandansari	Paguyangan	Paguyangan	Paguyangan
2		Batursari	Sirampog	Buniwah	Sirampog
3		Dawuhan	Sirampog	Buniwah	Sirampog
4		Igirklanceng	Sirampog	Buniwah	Sirampog

1.2.5.c. Kabupaten Banyumas

Tabel 13. Rencana Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Api Slamet Kab. Banyumas

No.	Kabupaten	Lokasi Terdampak		Lokasi Aman Bencana	
		Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1	Banyumas	Melung	Kedungbanteng	Karangnangka	Kedungbanteng
2		Ketenger	Baturaden	Rempoah	Baturaden
3		Kemutuglor	Baturaden	Rempoah	Baturaden
4		Karangmangu	Baturaden	Rempoah	Baturaden
5		Karangsalam	Baturaden	Rempoah	Baturaden
6		Sikapat	Sumbang	Sumbang	Sumbang
7		Gandatapa	Sumbang	Sumbang	Sumbang
8		Kotayasa	Sumbang	Banteran	Sumbang
9		Limpakuwus	Sumbang	Banteran	Sumbang

1.2.5.d. Kabupaten Tegal

Tabel 14. Rencana Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Api Slamet Kab. Tegal

No.	Kabupaten	Lokasi Terdampak		Lokasi Aman Bencana	
		Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1	Tegal	Batumirah	Bumijawa	Batumirah	Bumijawa
2		Sigedong	Bumijawa	Batumirah	Bumijawa
3		Guci	Bumijawa	Tuwel	Bojong

1.2.5.e. Kabupaten Purbalingga

Tabel 15. Rencana Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Api Slamet Kab. Purbalingga

No.	Kabupaten	Lokasi Terdampak		Lokasi Aman Bencana	
		Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1	Purbalingga	Kutabawa	Karangreja	Balai Desa	Karangreja

			Karangreja	
2	Serang	Karangreja	Rest Area Serang Lapangan desa	Karangreja
3	Sangkanayu	Mrebet	Sangkanayu	Mrebet
4	Penghalusan	Mrebet	SMKN2 Mrebet	Mrebet
5	Binangun	Mrebet	SMKN2 Mrebet	Mrebet
6	Bumisari	Bojongsari	Kecamatan Bojongsari Lapangan desa	Bojongsari
7	Karang Jengkol	Kutasari	Meri Lapangan desa	Kutasari
8	Candinata	Kutasari	Meri Lapangan desa	Kutasari
9	Cendana	Kutasari	Meri Lapangan desa	Kutasari
10	Cadiwulan	Kutasari	Meri Lapangan desa	Kutasari
11	Karangcegak	Kutasari	Meri	Kutasari

2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok merupakan tugas organisasi komando penanggulangan darurat bencana Erupsi Gunung Api Slamet di dalam operasi tanggap darurat yang telah ditentukan. Tugas pokok Bencana Erupsi Gunung Api Slamet disusun sebagai narasi (satu paragraf) yang memuat doktrin (asas, prinsip); tujuan tanggap darurat (hanya penanganan darurat bencana) (pada umumnya), dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah (sesuai skenario kejadian); yang dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan (periode operasi). Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menyusun tugas pokok, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproseliti.
- 2) Penanggulangan bencana berasaskan kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan – keselarasan - keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- 4) Tujuan penanggulangan bencana yang disasar dalam tanggap darurat meliputi untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh – yang menghargai budaya lokal; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 5) Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat (yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi rencana operasi dilaksanakan setelah tanda-tanda peringatan dini terjadinya erupsi Gunung Api Slamet atas dasar rekomendasi dari Pos PGA Gambuhan, Kab. Pemalang dan PVMBG Bandung pada status “**AWAS**” (Berdasarkan arahan PVMBG). Fase tanggap darurat bencana ditetapkan berjalan **selama 14 hari** di 5 kabupaten terdampak.

Organisasi pelaksana penanganan darurat bencana terdiri dari Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat Kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga.

Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat dapat pula membentuk Pos Pendamping PDB tingkat Pusat dengan mempertimbangkan tingkat eskalasi kejadian, luasan kawasan, dan tingginya dampak yang diakibatkan.

3.1. Pelaksanaan Konsep Operasi

Konsep operasi atau rencana tindakan memuat ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan (periode operasi). Tindakan ini fokus pada tanggap darurat – dan keadaan darurat yang sesuai skenario kejadian. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai.

3.1.1. Fase Siaga Darurat

Siaga darurat dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.

3.1.2. Fase Tanggap Darurat

Tanggap darurat dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.

Tabel 16. Kedudukan dan Peran Organisasi Pos Pendamping Erupsi Gunung Api Slamet di Provinsi Jawa Tengah

No.	Instansi/ Lembaga	Kedudukan	Peran
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Kodam IV Diponegoro	Pangdam IV Diponegoro	Wakil Koordinator
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah	Kalaxhar BPBD Prov. Jawa Tengah	Sekretaris
4	Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jawa Tengah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jawa	Bidang Data, Informasi, dan Humas

No.	Instansi/ Lembaga	Kedudukan	Peran
		Tengah	
5	Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Ketua FPRB Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
6	BASARNAS	Kepala Kantor SAR Semarang Kepala Kantor SAR Cilacap	Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Bidang Operasi Sarana Prasarana Pengungsian
8	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah	Kepala Dinas Kesehatan	Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial
9	Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah	Kepala Dinas Sosial	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Pendidikan
11	Kepolisian Daerah Prov. Jawa Tengah	Kepala Kepolisian Jawa Tengah	Bidang Operasi Keamanan

3.1.3. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Transisi darurat ke pemulihan adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Tabel 17. Kegiatan Fase Penanganan Bencana

Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peringatan dini • Perencanaan keberlanjutan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Cepat (<i>Rapid Assesement</i>) • Penentuan dan pernyataan status darurat Bencana Erupsi Gunung Api 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan prasarana dan sarana penting (pintu air, rumah pompa, tanggul, listrik, air bersih, telekomunikasi dan

Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan sumberdaya (SDM, logistik dan peralatan) • Sistem peralatan komunikasi dan informasi • Penyiapan tempat evakuasi • Pelatihan dan gladi 	<p>Slamet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencarian dan penyelamatan korban Erupsi Gunung Api Slamet. • Pemberian bantuan/kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan) • Perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas) 	<p>ketersediaan BBM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, posko kesehatan dan tempat ibadah) • Pemulihan ekonomi masyarakat • Pemulihan psiko sosial • Pemulihan pendidikan • Penyelamatan dan evakuasi lanjutan • Pertolongan darurat lanjutan

Sumber: Pedoman Renkon edisi keempat, 2019 dan analisis, 2020

3.2. Fungsi

3.2.1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi bidang – bidang yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Bidang ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga sebagai pimpinan tertinggi. Komandan pengendali operasi akan dibantu oleh beberapa bidang dalam melaksanakan tugasnya, antara lain bidang perencanaan, bidang operasi, bidang logistik dan bidang administrasi dan keuangan.

3.2.2. Perencanaan

Dalam menghadapi Erupsi Gunung Api Slamet, perlu disiapkan “Rencana Operasi” dengan mengadaptasi/penyesuaian Rencana Kontingensi dengan kejadian sebenarnya setelah dilakukan kajian cepat dampak bencana. Bidang perencanaan berfungsi untuk mengkoordinir proses penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.

3.2.3. Operasi

a) SAR dan Keamanan

Bidang SAR (pencarian dan pertolongan) dan Keamanan berfungsi untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan Erupsi Gunung Api Slamet mendapatkan perlindungan baik dari ancaman Bencana Erupsi Gunung Api Slamet maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat. Pada saat terjadi Bencana Erupsi Gunung Api Slamet maka bidang ini berfungsi untuk memfasilitasi penduduk di wilayah risiko Erupsi Gunung Api Slamet untuk mengungsi ke tempat yang aman.

b) Kesehatan

Bidang kesehatan berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi Bencana erupsi Gunung Api Slamet maupun pada saat berlangsungnya situasi darurat sampai situasi darurat berakhir kepada penduduk yang terpapar dan terdampak Erupsi Gunung Api Slamet di Kabupaten Purbalingga.

c) Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana berfungsi untuk memastikan sarana dan prasarana yang vital dan penting dapat berfungsi dengan baik untuk menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat.

3.2.4. Logistik

Bidang logistik berfungsi untuk mempersiapkan dan menyediakan logistik yang memadai bagi korban Bencana erupsi Gunung Api Slamet (baik pangan maupun sandang sesuai dengan kebutuhan).

3.2.5. Administrasi dan Keuangan

Bidang administrasi dan keuangan berfungsi untuk memastikan hal – hal yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan untuk kelancaran operasi tanggap darurat termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.

3.3. Tugas-Tugas

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing – masing bidang dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bagian/unit/divisi dibawahnya. Agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Adapun tugas masing – masing bidang tersebut yaitu:

Tabel 18. Tugas-Tugas Organisasi Pos Pendamping Erupsi Gunung Api Slamet di Provinsi Jawa Tengah

No.	Peran/Bidang/Klaster	Tugas-Tugas
1	Koordinator	1. Memastikan kesiapan Posko PDB
2	Wakil Koordinator	Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes,
3	Sekretaris	Banyumas, dan Purbalingga yang
4	Bidang Data, Informasi, dan Humas	terdampak erupsi freatik dan gas beracun Gunung Api Slamet
		2. Memastikan aktivasi Posko PDB Kabupaten Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga dimulai sejak penetapan status Siaga Darurat
		3. Memastikan kesiapan potensi SAR dan Basarnas di Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga
		4. Memastikan kesiapan potensi relawan penanggulangan bencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah
		5. Memastikan kesiapan personil TNI/Polri di Kabupaten Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga
		6. Memastikan kesiapan rumah sakit dan

No.	Peran/Bidang/Klaster	Tugas-Tugas
		<p>tenaga medis di Kabupaten Pematang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mengkoordinasikan kesiapan instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan minimum 8. Memobilisasi sumberdaya instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas masing-masing 9. Menyampaikan laporan pendampingan kepada Gubernur Jawa Tengah
5	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu koordinator untuk memastikan dukungan sumberdaya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah 2. Membantu koordinator untuk memastikan memobilisasi sumberdaya instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas masing-masing
6	Bidang Operasi Pencarian Pertolongan dan Evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku pencarian, pertolongan dan evakuasi yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku pencarian, pertolongan dan evakuasi yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan

No.	Peran/Bidang/Klaster	Tugas-Tugas
		<p>peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku pencarian, pertolongan dan evakuasi yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <p>4. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi di tingkat provinsi Jawa Tengah</p>
	Bidang Operasi Sarana Prasarana Pengungsian	<p>1. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku bidang operasi sarana dan prasarana pengungsian yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <p>2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi sarana dan prasarana pengungsian yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi sarana dan prasarana pengungsian di tingkat provinsi Jawa Tengah</p>
7	Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	<p>1. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <p>2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi kesehatan dan psikososial yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi kesehatan dan psikososial di tingkat provinsi Jawa Tengah</p>
	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	<p>1. Memastikan terlaksananya pertemuan</p>

No.	Peran/Bidang/Klaster	Tugas-Tugas
		<p>koordinasi antar pelaku bidang operasi Logistik dan Dapur Umum yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi Logistik dan Dapur Umum yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 3. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi Logistik dan Dapur Umum di tingkat provinsi Jawa Tengah
8	Bidang Operasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku bidang operasi Pendidikan yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi bidang operasi Pendidikan yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 3. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi Pendidikan di tingkat provinsi Jawa Tengah
9	Bidang Operasi Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku bidang operasi Keamanan yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 2. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi bidang operasi Keamanan yang berasal dari instansi / lembaga terkait di tingkat provinsi Jawa Tengah 3. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi Keamanan di tingkat provinsi

No.	Peran/Bidang/Klaster	Tugas-Tugas
Jawa Tengah		

3.4. Intruksi Koordinasi

1. Penugasan Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah berlaku selama 14 hari operasi penanganan darurat bencana. Penugasan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
2. Bila terjadi bencana erupsi Gunung Api Slamet maka segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah.
3. Penyusunan rencana operasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah setelah memperhatikan hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga.
4. Tugas Pos Pendamping PDB provinsi memberikan pendampingan dan dukungan, **BUKAN dalam fungsi mengambil alih operasi di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga.**
5. Aktivasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah setelah Pemerintah Kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah.
6. Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau relawan yang berasal dari instansi / lembaga di tingkat provinsi Jawa Tengah.
7. Petugas dan atau relawan yang ditempatkan di Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang operasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah.

4.1. Administrasi

1. Pada awal kejadian erupsi Gunung Api Slamet atau sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka seluruh sumberdaya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari SKP D teknis dan instansi terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha.
2. Setelah ditetapkannya pernyataan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan tanggap darurat dapat **menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga.**
3. Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan pendampingan teknis, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kelima kabupaten sesuai dengan hasil kajian kebutuhan.
4. Pemerintah Pusat melalui BNPB dapat memberikan bantuan yang tidak bisa diberikan kabupaten maupun provinsi. Jenis bantuan yang diberikan mencakup **pendampingan terhadap kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), dan sistem administrasi yang akuntabel.**

4.2. Logistik

1. Pada awal kejadian erupsi freatik dan gas beracun atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan maka seluruh sumberdaya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga baik **berupa personil, logistik dan peralatan dioptimalkan.**

2. Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan personil, logistik dan peralatan ke Kabupaten/Kota terdekat dan atau provinsi Jawa Tengah dimana **biaya operasional ditanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing dan atau Provinsi Jawa Tengah.**
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan bantuan personil, logistik, dan peralatan dengan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilindungi secara
maksudnya

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

Berita Acara Peserta Penyusunan Renkon Erupsi Gunung Api Slamet
Tingkat Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Api Slamet, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Penelitian Pengembangan Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
2	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
3	Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
4	Pusdalops BPBD Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
5	BMKG Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
6	Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI)	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
7	Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI)	Bidang Data, Informasi Dan Humas	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
8	Sentra Komunikasi (SENKOM) Mitra Polri	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
10	Forum CSR	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
11	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
12	Unit Layanan Disabilitas	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
13	Organda	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
14	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
15	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU)	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
16	Kwartir Daerah Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
17	Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum Bidang Operasi Pendidikan	
18	Barisan Ansor Serbaguna (BANSER)	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
19	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
20	SARDA Jawa Tengah	Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
21	Biro Kesra Setda Jawa Tengah	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
22	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPUSDATARU) Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
24	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
26	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
27	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
29	Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Bidang Operasi Pendidikan	
30	Direktorat BINMAS POLDA Jawa Tengah	Bidang Operasi Pendidikan	
31	Direktorat LANTAS POLDA Jawa Tengah	Bidang Operasi Pendidikan	
32	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah	Bidang Operasi Pendidikan	
33	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Keamanan	
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Tengah	Bidang Operasi Keamanan	

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KONTINJENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG API MERAPI

1.1. Karakteristik Bahaya Bencana

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m dpl, per 2018) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunungapi teraktif di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah dapat diasumsikan bahwa setelah letusan besar Merapi 2010 (yang terjadi hanya 100 tahun sekali) tidak diikuti oleh letusan besar kembali tetapi akan masuk ke siklus pendek Merapi. Dari data kegempaan dan aktivitas Merapi sejak 2016 hingga saat ini tidak adanya tanda-tanda perubahan dari 2 tahun terakhir. Kuantitas kegempaan sangat rendah dibanding angka keaktifan pada tahun 2006 dan 2010. Kondisi saat ini sangat tenang. Tidak ada perubahan morfologi secara besar besaran dan tidak mencerminkan aktivitas dari dalam. Berdasarkan sejarahnya, terjadinya *swarm* (rentetan gempa dalam waktu yang singkat/sekelompok gempa yang terjadi pada satu lokasi tertentu. Sering berasosiasi dengan vulkanisme) terjadi sejak 1 tahun sebelum aktivitas hingga saat ini belum terjadi lagi. Yang dapat diamati adalah terbentuknya kawah yang membuka ke arah tenggara/selatan yang membawa implikasi pada ancaman erupsi ke depan akan lebih dominan ke arah selatan. Setelah letusan 1930 letusan setelahnya sampai dengan letusan 2006 (7 dekade) mengarah ke barat daya.

Pada tahun 2018, Gunung Merapi mulai mengalami peningkatan aktivitas. Berdasarkan data Balai Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) tercatat beberapa kali letusan yakni tanggal 11 Mei dan 1 Juni 2018 dengan ketinggian kolom asap 5500 m dan 6000 m. Letusan ini disebabkan oleh desakan magma dari kedalaman 3 km yang ditandai dengan

munculnya gempa beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya, terjadi pertumbuhan kubah lava pada periode 18 sampai 20 Agustus 2018 dengan volume 12.276 m³.

Pada tahun 2020, Gunung Merapi tercatat beberapa kali mengeluarkan letusan kecil yakni periode 4 Januari hingga 10 April 2020 dengan tinggi kolom 3.000 m di atas puncak. Melalui perekaman seismograf tanggal 27 Mei 2020 tercatat Gunung Merapi mengalami 3 kali gempa hembusan, 3 kali gempa guguran, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Berdasarkan hal tersebut BPPTKG menetapkan status “WASPADA” (Level II) Gunung Merapi.

Kubah lava muncul di pusat kawah cenderung ke barat – barat laut, sampai di bagian tengah kubah. Kubah lava dapat terbangun dengan volume maksimal 10 juta m³. Pertumbuhan kubah yang cukup besar mengakibatkan ketidakstabilan/ runtuhnya dinding kawah sektor Barat dan sektor Selatan (sekitar bukaan kawah). Ketika kubah lava tidak stabil maka sebagiannya akan runtuh ke arah bukaan kawah saat ini dan juga ke arah bukaan akibat runtuhnya dinding kawah tersebut. Skenario ini mengacu kepada kebanyakan erupsi tipe Merapi yang meruntuhkan lava lama seperti erupsi 1998 dan 2006.

Penetapan peringatan dini pra-kondisi diantaranya sebagai berikut:

- a. Status siaga Merapi : kemunculan kubah lava yang mengalami pertumbuhan yang signifikan.
- b. Status awas Merapi : Awan panas terjadi intensif dan jarak jangkau > 3 km dari puncak. Data pemantauan gempa VT 0-1 kali/hari, MP 50-150 kali/hari, RF 50-200 kali/hari, dan laju deformasi EDM 0-1 cm/hari.

Adapun potensi bahaya akibat erupsi Gunung Merapi terdiri atas :

- a. Bahaya primer

Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung, seperti :

- 1) Guguran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuhnya kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat membakar dan merusak lingkungan yang terlanda.
- 2) Awan panas (*Pyroclastic Flow*) : bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan panas adalah aliran massa panas (300 – 600 derajat celsius) berupa campuran gas dan material gunung api yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.
- 3) Surge : lebih *energetic* namun lebih *dilute* dari aliran piroklastik sehingga lebih menyebar. Konsentrasi material 0,1 – 1%.

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi berupa lontaran material vulkanik akan menjangkau radius 3 km dari kubah lava sedangkan bahaya awan panas terjadi jika kubah lava telah terisi 50% dan runtuh. Perkiraan laju awan panas mengarah ke Kali Kuning (7 km), Kali Boyong (6,5 km), Kali Krasak (7 km), Kali Putih (5 km), Kali Senowo (8 km), Kali Trising (7 km), Kali Apu (4 km).

b. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti :

1) Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produkletusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunung api. Lahar Erupsi Gunung Merapi menempati area 286 km² di sekitar Merapi dengan ketebalan endapan rata-rata 0,5-2 m, ekstrim 15 m (Desa. Sisir, Kali Senowo, 1888), 10 m (Desa. Salam, 1931), 25 m (Kali. Blongkeng, 1837). Pemicu lahar adalah hujan, intensitas 40 mm selama 2 jam dengan kecepatan lahar rata-rata 5-7 m/dt (rata-rata 20km/jam) pada

elevasi 1.000 m.

2) Lahar hujan di sekitar Erupsi Gunung Merapi

Hujan dilereng barat 2416 mm/tahun, di lereng selatan 3.253 mm/tahun, rata rata terjadi pukul 12.00 Wib – 19.00 Wib, sehingga 80% lahar hujan terjadi sore hari. Hujan lokal/*stationary/orographic* 66% memicu lahar hujan, hujan *regional/migratory* 33 % menyebabkan lahar hujan dalam skala relatif besar. Lahar hujan terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

c. Bahaya tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan).

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut menimpa beberapa kawasan dalam kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terdiri atas :

a. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran /lontaran material pijar), gas beracun. Berdasarkan pertimbangan posisi kubah lava dan titik kegiatan saat ini di lereng barat-daya terlanda letusan akan datang terutama awan panas. KRB III menurut Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Jawa Tengah meliputi :

Tabel 1 Jumlah Penduduk terdampak Erupsi Merapi

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	2625	2669
			Ngargosoko	2380	1381
			Ngablak	2461	2101
			Kemiren	1243	1251

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		Jumlah		8709	7402		
		Dukun	Ngargomulyo	2464	1061		
			Keningar	617	634		
			Sengi	4397	2953		
			Krinjing	2191	2238		
			Paten	3145	3257		
			Mangunsoko	1680	418		
		Jumlah		14494	10561		
		Total penduduk terdampak Kabupaten Magelang		23203	17963		
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	2595	2601		
			Klakah	2882	2816		
			Lencoh	3247	3156		
			Jrakah	4280	4159		
			Samiran	3923	3893		
			Suroteleng	1836	1826		
				Jumlah		18763	18451
				Tamansari	Mriyan	2197	2163
					Sangup	2574	2546
				Jumlah		4771	4709
				Musuk	Cluntang	2551	2532
				Jumlah		2551	2532
				Cepogo	Wonodoyo	2569	2542
					Jombang	2304	2276
				Jumlah		4873	4818
		Total penduduk terdampak Kabupaten Boyolali		30958	30510		
3	Klaten	Kemalang	13 desa	36997	36997		
			16 desa	40612	40612		
		Karangnongko	14 desa	32714	32714		
		Jatinom	18 desa	55363	55363		
		Total penduduk terdampak Kabupaten Klaten		165686	165686		
Total Keseluruhan Penduduk Terdampak Bencana				219847	214159		

Sumber : Renkon Erupsi Gunung Merapi dan Data BPS Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, 2020

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II

Kawasan Rawan Bencana II terdiri atas 2 bagian yaitu kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran

lava dan lahar dan kawasan yang berpotensi terlanda lontaran berupa jatuhan piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar). Di KRB II ini masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sampai daerah ini dinyatakan aman kembali.

c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar hujan Merapi dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas. Banjir lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi.

1.2. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) Mengacu pada rencana penanggulangan bencana provinsi Jawa Tengah tahun 2014 bahwa Gunung Merapi dikategorikan sebagai gunung api aktif; 2) Mengacu pada buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masuk dalam risiko sedang hingga tinggi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi; 3) Mengacu pada dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten termasuk kawasan rawan terhadap bahaya primer erupsi Gunung Merapi. Mengacu pada dokumen tersebut, maka disusunlah rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah ini.

Selain itu, mengacu pada aktivitas Gunung Merapi sejak 2016, maka penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi dapat ditentukan dengan memperhatikan tipe letusan dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) *Ekplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu dan kerikil perkiraan luasan ancaman hujan abu mencapai puluhan kilometer dan lontaran batu dan kerikil sejauh < 3 kilometer;
- 2) *Efusif* : pembentukan kubah lava, jenis ancaman yang ditimbulkan hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan surge.

Awan panas akan meluncur sampai jarak 6 – 12 kilometer dari puncak;

- 3) *Efusif/eksplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan awan panas letusan. Ancaman yang ditimbulkan adalah luncuran awan panas hingga mencapai 17 kilometer dari puncak.

1.3. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

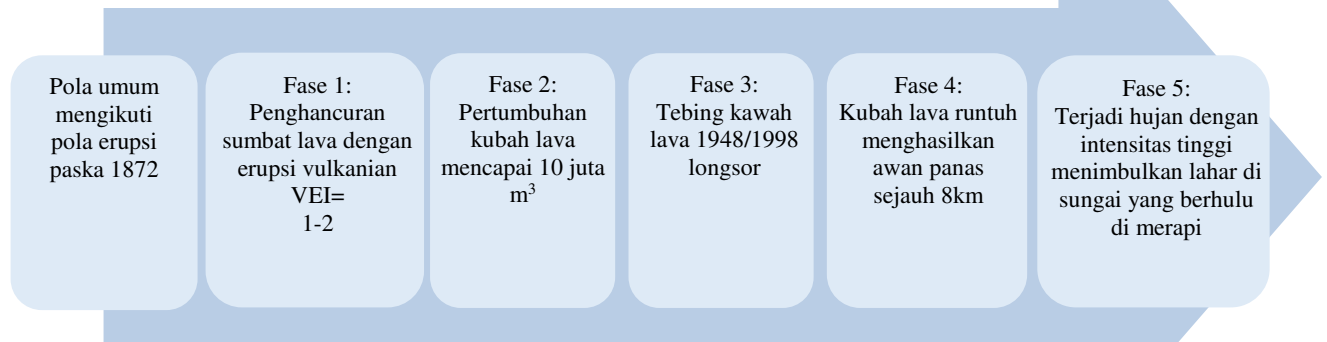
1.3.1. Penentuan kejadian

Penentuan kejadian ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari kantor BPPTKG di Yogyakarta. Menurut perhitungan dan analisa para ahli dapat dijelaskan bahwa dengan mengacu pada erupsi Merapi 2010 dapat digambarkan fase-fase yang dialami Merapi sebagai berikut :

- 1) Pola umum mengikuti pola erupsi pasca letusan 1872 dengan tipe “Merapi”;
- 2) Fase 1: Penghancuran sumbat lava dengan erupsi vulkanian VEI= 1-2 yang diawali dengan letusan cenderung eksplosif dengan ketinggian kurang lebih 1,5 km dan jatuhnya material di seputar area puncak Merapi hingga radius 3 km ke segala arah. Sementara abu vulkanik diperkirakan mengarah ke barat dan ke timur sesuai dengan pola hembusan angin;
- 3) Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m³ yang merupakan pertanda letusan tipe “Merapi”;
- 4) Fase 3: Tebing kawah lava 1948/1998 longsor sebagai akibat pembentukan kubah lava yang terus meningkat;
- 5) Fase 4: Kubah lava runtuh menghasilkan awanpanas sejauh 8 km diperkirakan meluncur ke beberapa arah yaitu tenggara selatan (sedikit) barat hingga barat laut dengan konsentrasi di aliran sungai Gendol dan sungai Lamat, sungai Senowo, Trising dan sungai Apu;

6) Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar di sungai yang berhulu di Merapi sehingga perlu diwaspadai semua aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi.

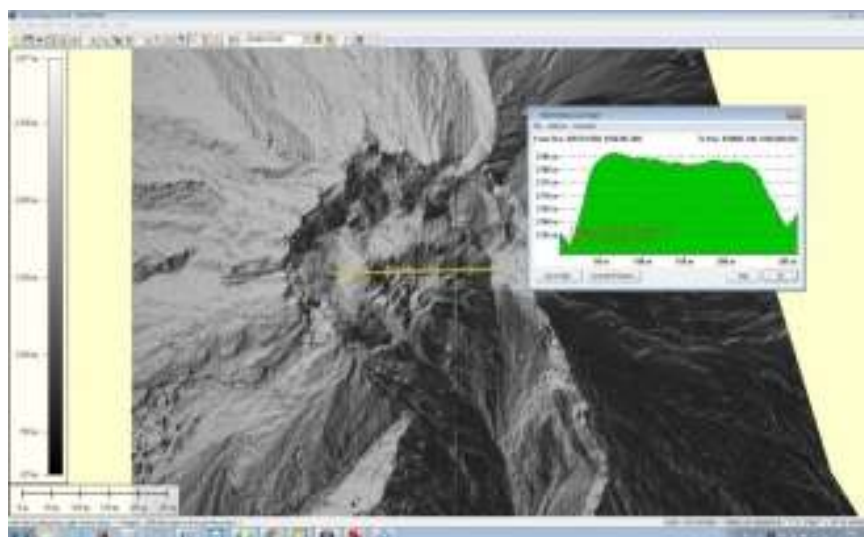
SKENARIO BAHAYA MERAPI PASKA 2010



Mendasarkan pada informasi aktivitas Gunung Merapi sejak tahun 2016 dan fase fase tersebut, maka didalam rencana kontingensi ini ditetapkan kejadian erupsi Gunung Merapi diskenariokan bulan Oktober 2017.

1.3.2. Pengembangan skenario kejadian

- 1) Pada tanggal 1 Februari 2021, BPPTKG meningkatkan status Merapi menjadi “Siaga” (Level III) untuk Daerah KRB III. Merapi menunjukkan peningkatan aktifitas seismik, yaitu gempa fase banyak dengan 38 kejadian/hari, gempa vulkanik 11 kejadian/hari terjadi adanya penghancuran sumbatan lava dengan erupsi vulkanian VEI=1-2.



- 2) Pada 10 Februari 2021 status Merapi ditetapkan 'Awat' (Level IV), dengan kondisi akan segera meletus, ataupun keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu, adanya longsoran tebing pertumbuhan kubah lava mencapai 10.000.000 m³, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran-guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian/hari Gempa Fase Banyak, 80 kejadian/hari Gempa Vulkanik, 194 kejadian/hari Gempa Guguran, dengan laju deformasi 42 cm/hari. Radius aman ditetapkan di luar 10 km dari puncak Merapi.
- 3) Pada 20 Februari 2021 pukul 00:30 WIB terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Pada tanggal 21 Februari 2021 terjadi rentetan runtuhnya kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 10 km. Melalui pengukuran dengan mini DOAS (*Deferensial Optical Absorption Spectroscopy*/Alat Ukur Emisi Sulfur Dioksida SO₂) diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO₂ yang mencapai 500 ton/hari. Pada pukul 16:05 ditetapkan radius aman di luar 10 km dari puncak Merapi.

1.3.3. Pengembangan skenario dampak

Pengembangan skenario dampak bencana erupsi Gunung Merapi meliputi beberapa aspek yaitu :

Tabel 2. Dampak Erupsi Gunung Merapi pada Daerah Terdampak

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aspek kependudukan	Penduduk	17963	30510	165686	lama pengungsian 1- 2 bulan

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Aspek sarana dan prasarana	Jalan	79,7	15	73	km
		Jembatan	33	-	-	unit
		Cek DAM	5	-	-	buah
		Sabo DAM	-	-	3	buah
		Embung	-	-	1	buah
		Jaringan listrik	19	15 (terganggu selama 30 hari)	13 (terganggu selama 30 hari)	desa
		Jaringan air bersih	10 (desa)	7 (terganggu selama 30 hari)	61 (terganggu selama 30 hari)	unit
		Sekolah :				
		- SD	18	17	67	SD
		- SMP/Mts	4	16	(Terganggu selama 30 hari)	SMP dan Mts
		- SMA/MA/SMK	-	7		SMA, MA, dan SMK
		Sarana kesehatan :				
		- Puskesmas	10	4 (terganggu selama 30 hari)	7 Terganggu selama 30 hari	Tempat
		- Rumah sakit	Terganggu selama 30 hari	Terganggu selama 30 hari	1 (terganggu selama 30 hari)	unit
3	Aspek sosial ekonomi	Pasar	10	7 (terganggu selama 30 hari)	4 (terganggu selama 30 hari)	tempat
		Tempat usaha/pertokoan	-	7 (terganggu selama 30 hari)	712 (terganggu selama 30 hari)	unit
		UMKM	-	70	-	unit
		Tempat pariwisata	-	-	4	destinasi
		Hotel	-	3	-	tempat
		Homestay	-	100	-	tempat
		Losmen	-	3	-	tempat
		Sawah	-	9977 (terganggu selama 60 hari)	15 % (terganggu selama 30 hari)	ha
		Tegalan/Kebun	-	9887	-	ha

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perikanan	-		-	
		Peternakan	7570 (Kambing dan sapi)	15048 (terganggu selama 60 hari)	43844	Sapi potong, sapi perah, kuda, domba, babi, dan kelinci
4	Aspek pemerintahan	Kantor desa/kantor pemerintahan	10 (terganggu selama 30 hari)	11 (terganggu selama 30 hari)	65 (terganggu selama 30 hari)	unit
5	Aspek lingkungan	Kehutanan	-	5126,01	Kawasan hutan terbakar akibat awan panas	ha
		Perkebunan	-	10490	Perkebunan terancam terbakar	ha
		Cagar budaya	-	4	Seluruh populasi dalam kawasan lindung terancam awan panas	buah
		Mata air	-	1735,5	Pencemaran air oleh abu vulkanik	ha
		Suaka alam	-	2546,2	-	ha

2.1. Aktivasi Rencana Kontingensi

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilaksanakan setelah terjadi tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana Erupsi Gunung Merapi dari hasil kajian lembaga teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada saat status **"Awas Merapi"**.

2.2. Tujuan dan Strategi

2.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/sarana vital guna berfungsinya kembali pelayanan publik secepatnya. Tujuan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi penanganan darurat, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, sosial, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan penanganan darurat. Pentingnya melaksanakan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus mendasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

2.2.2. Strategi

Rencana Operasi sebagai rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*). Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat juga harus ditetapkan termasuk tata cara pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk manajemen logistik dan peralatan;

2. Penetapan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana;
3. Terpenuhinya prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab di dalam keadaan darurat

Aspek penting dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait dengan penentuan masa penanganan darurat dan mekanisme operasi kedaruratan yang meliputi:

1. Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status peringatan dini, siaga darurat, dan tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan beserta kegiatannya;
2. Dasar penentuan status di dalam keadaan darurat;
3. Pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat untuk setiap skenario dan jenis bencana;
4. Mekanisme aktivasi rencana operasi penanganan darurat bencana.

Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam situasi darurat bencana antara lain :

1. Kesiapan kurang sempurna/tidak ada;
2. Peringatan dini tidak ada atau kurang efektif;
3. Informasi tidak lengkap/tidak tepat, membingungkan;
4. Komunikasi/ transportasi terputus;
5. Kebingungan, *chaos*, krisis, gagal kordinasi;
6. Kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi;
7. Lingkup terlalu besar/meluas;
8. Sasaran yang tidak jelas;
9. Masalah keamanan dan jaminan perlindungan;
10. Terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit;
11. Banyak yang terlibat, koordinasi sangat kompleks;
12. Hambatan politis, administratif dan birokratis.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu

menetapkan kebijakan yang mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik sekaligus dapat mengurangi risiko bencana. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi tindakan yang tepat dan segera sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (diluar prosedur rutin/standar). Seluruh tindakan tersebut harus bertujuan untuk :

1. Mengurangi jumlah korban;
2. Meringankan penderitaan;
3. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi;
4. Mengamankan aset;
5. Memulihkan fasilitas kunci atau vital;
6. Mencegah kerusakan lebih jauh;
7. Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat.

Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos Lapangan penanganan darurat bencana juga dibentuk di tingkat yang lebih kecil yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat bencana. Peran dari Pos Lapangan tersebut adalah :

1. Meminimalkan risiko kerusakan dan kerugian;
2. Memberikan perlindungan, perhatian khusus pada kelompok rentan (Perka BNPB Nomor 14 tahun 2014);
3. Memberikan perlindungan dan penyelamatan kepada masyarakat sesuai skala prioritas dan non diskriminatif;
4. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
5. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya egosektoral;
6. Menjamin pelayanan publik untuk tetap berfungsi.

Arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung hal-hal diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan

No	Kebijakan	Strategi
1	Meminimalkan kerusakan dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Pos Komando sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana (BPBD), dan juga sebagai pengendali operasi - Mengidentifikasi dampak dan potensi kerusakan yang ditimbulkan - Menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar 3 kabupaten terdampak langsung, - Menjamin pelayanan publik tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan.
2	Penanganan bencana alam berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan mengelola jenis-jenis potensi yang berbasis komunitas, - Mengoperasionalkan desa paseduluran (<i>sister village</i>) dan paseduluran disabilitas - Memberdayakan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi
3	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara realistis dan bermartabat serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan (Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, pasal 8)	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebijakan dalam penanganan bencana termasuk etika berinteraksi - Memastikan kebutuhan dasar pengungsi (pasokan air bersih dan sanitasi, makanan, bantuan non pangan, kesehatan, hunian sementara, sarana dan prasarana lainnya) terpenuhi secara inklusibekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait - Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan antar wilayah
4	Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas secara non diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan pos pengaduan layanan - Memastikan keamanan dan keselamatan selama tanggap darurat baik pada manusia, asset dan aksesnya

Berdasarkan pada hal-hal tersebut dan memperhatikan kapasitas 3 kabupaten terdampak, maka penetapan kebijakan dan strategi Penanganan Darurat Bencana disepakati membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berada ditingkat Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Gunung Merapi.

3.1. Konsep Operasi

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 4 klaster dalam melaksanakan penanganan penanggulangan kedaruratan bencana. Perencanaan Klaster (Bidang) disusun agar tujuan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi dapat melindungi segenap masyarakat termasuk dari ancaman wabah pandemi Covid-19. Pengembangan Struktur dan Klaster dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan darurat bencana Pos Pendamping, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman dan kerentanan, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana.

Perencanaan klaster di tingkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kedudukannya sebagai Pos Pendamping dengan struktur sebagaimana terlampir. Adapun klaster Pos Pendamping sebagai berikut:

- 1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi;
- 2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian;
- 3) Klaster Kesehatan;
- 4) Klaster Logistik dan Dapur Umum.

3.1.1. Mekanisme pelaksanaan

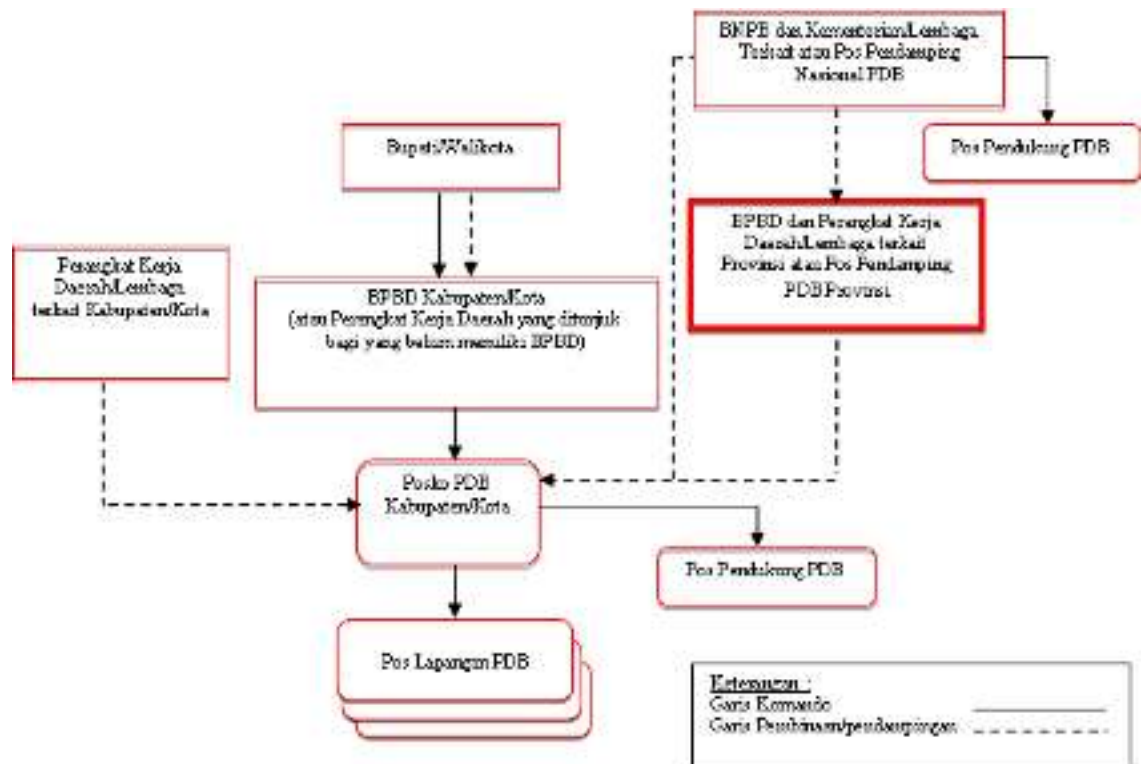
- 1) BPBD Kabupaten terdampak sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Kabupaten yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Posko PDB yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah lain dalam kabupaten terdampak

dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.

- 3) Posko PDB Kabupaten terdampak berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pos Lapangan PDB dapat didirikan di lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 4) BPBD Kabupaten secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- 5) Perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Posko PDB Kabupaten termasuk logistik kesehatan untuk penanganan Covid-19.
- 6) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD Kabupaten terkait upaya penanganan darurat bencana.
- 7) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan bencana dan Covid-19 kepada Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 8) Pemerintah Provinsi jika diperlukan terkait pelaksanaan pendampingan penanganan darurat bencana dapat membentuk Pos Pendamping PDB Provinsi.
- 9) Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain dalam provinsi dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 10) Pemerintah melalui koordinasi BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan

pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.

11) Jika Pos Pendamping PDB provinsi memerlukan Pos Pendukung PDB nasional yang dapat membantu akses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB atau memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak. Jika memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak maka pengendalian pengelolaan akses bantuan yang bersumber dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional tetap menjadi tanggungjawab Pos Pendukung PDB nasional.

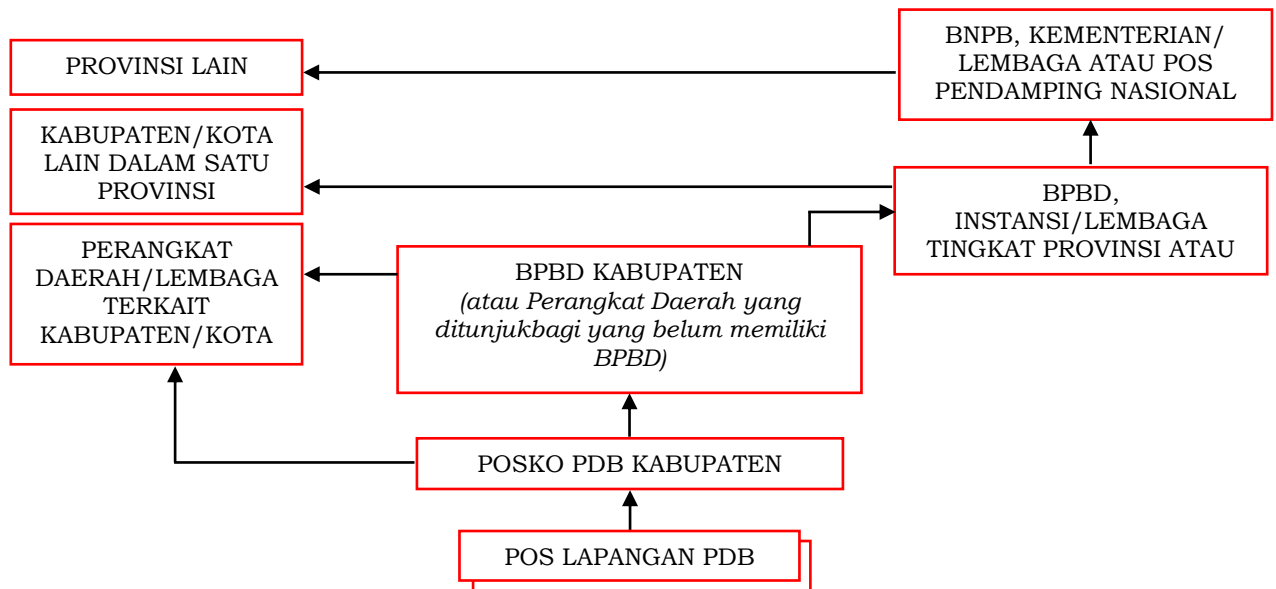


Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan pos pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah

3.1.2. Mekanisme permintaan bantuan

- 1) Permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan seperti formulir di bawah.
- 2) Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Komandan Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun satuan kerja perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan dengan mengoordinasikan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko PDB Kabupaten.
- 4) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten, maka Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi melalui BPBD Kabupaten.
- 5) BPBD Provinsi berkewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dimaksud dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan mobilisasi bantuan sumber daya ke Kabupaten/Kota lain yang tidak terdampak yang masih dalam satu wilayah kerja provinsi dan memiliki kemampuan untuk membantu.
- 6) Bila permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber daya provinsi dan kabupaten/kota lain yang tidak terdampak, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB.
- 7) BNPB berkewajiban untuk memenuhi permintaan sumber daya bantuan dan logistik kesehatan yang diperlukan dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan bantuan dimaksud ke provinsi lain yang memiliki kemampuan untuk membantu.

- 8) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka BPBD Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping PDB Provinsi dan logistik kesehatan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- 9) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi tidak dapat memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan, maka Pos Pendamping PDB Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
- 10) Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan kepada Pos Pendukung Nasional PDB dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Nasional.



Gambar 2. Mekanisme permintaan bantuan

3.1.3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya

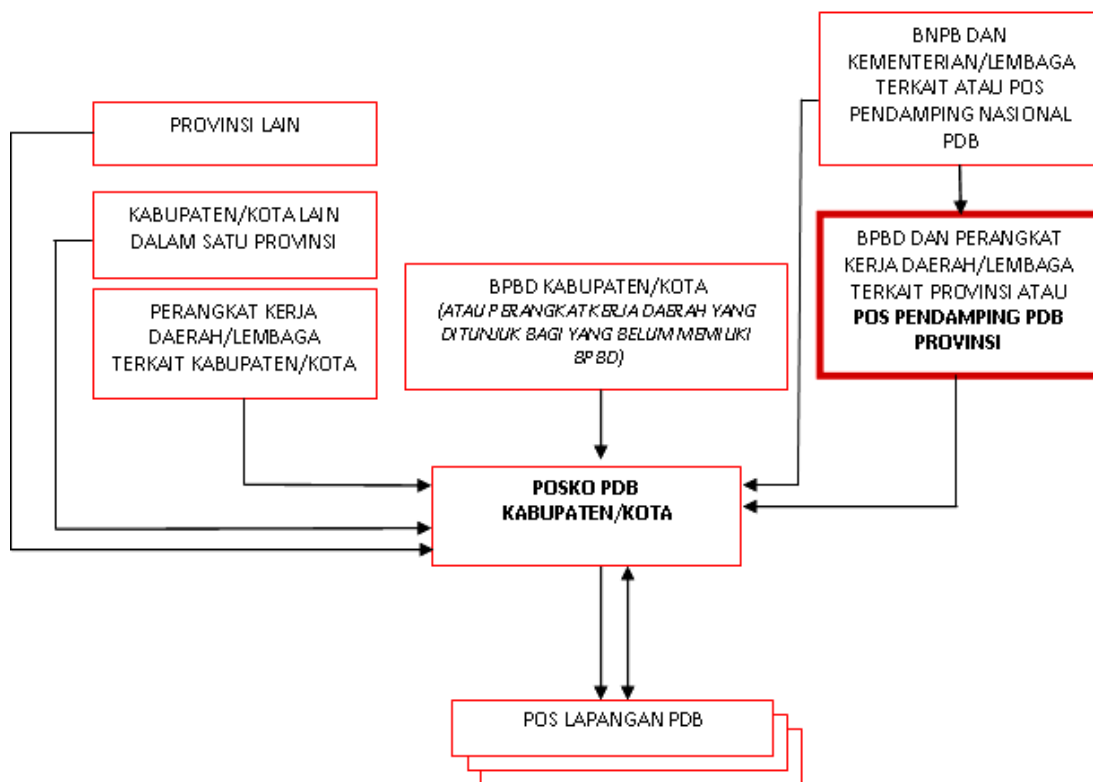
- 1) Posko PDB Kabupaten memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB.
- 2) BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan memobilisasi bantuan sumber daya

dan logistik kesehatan yang diminta oleh Posko PDB Kabupaten.

- 3) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat terpenuhi pada tingkat Kabupaten terdampak, maka BPBD Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah provinsi dapat memobilisasi bantuan langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BPBD Provinsi bersangkutan.
- 4) Bila jarak Pos Lapangan PDB berlokasi lebih dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang akan memberikan bantuan dibanding jarak dari Posko PDB, maka BPBD Kabupaten/kota lain tersebut dapat langsung menyerahkan bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB dimaksud atas petunjuk dari Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 5) Bila ada kebutuhan penanganan darurat bencana yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersangkutan, maka BNPB dapat memobilisasi bantuan di tingkat nasional untuk mendukung penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten terdampak, dengan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat terpenuhi dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah, maka BPBD Provinsi lainnya (termasuk BPBD Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya) dapat pula memobilisasi bantuan kepada Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BNPB.
- 7) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendamping PDB Provinsi ke Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 8) Bila Pos Pendukung Nasional PDB dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendukung Nasional melalui Pos Pendamping Provinsi PDB atau langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak

dengan pertimbangan efektifitas dan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB yang bersangkutan.

- 9) Pos Pendukung PDB yang di bentuk oleh BNPB dapat memobilisasi bantuan darurat bencana yang diterimanya ke Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

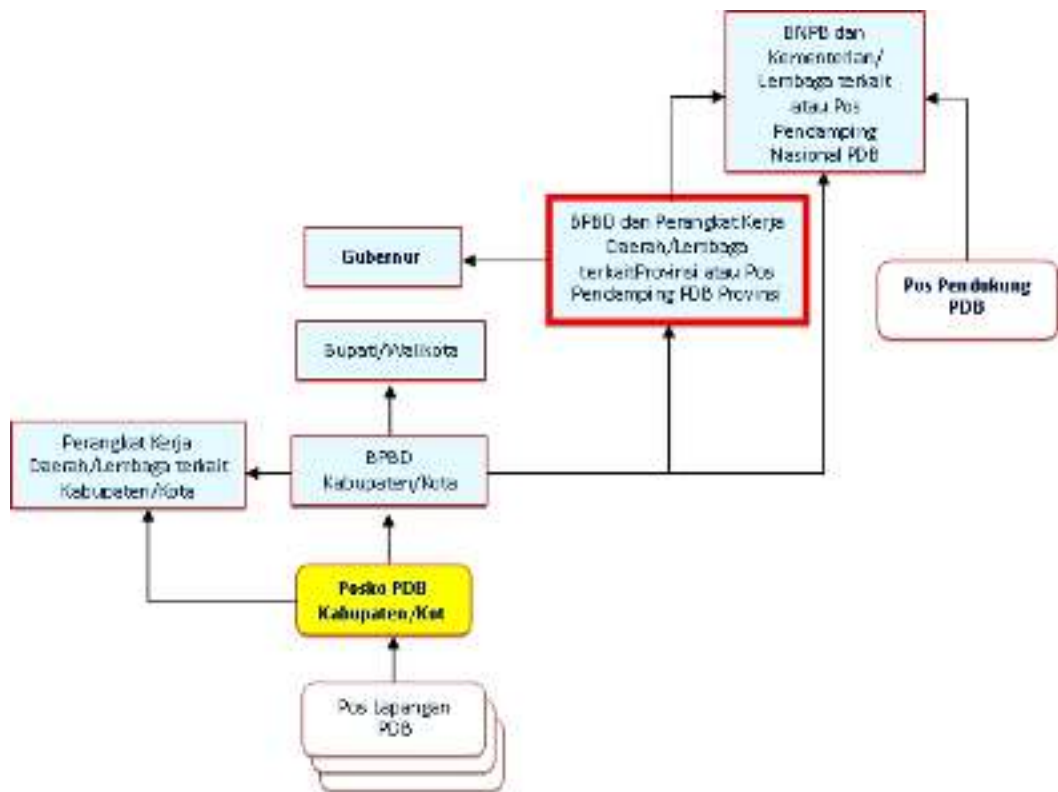


Gambar 3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya

3.1.4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

- 1) Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
- 2) Pos Lapangan PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB Kabupaten.

- 3) Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB Kabupaten berkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB.
- 4) Komandan Posko PDB Kabupaten berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media masa.
- 5) Posko PDB Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Kabupaten dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten.
- 6) BPBD Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten, BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB, dan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.
- 7) Pos Pendamping PDB Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait Provinsi dan BNPB.
- 8) BPBD Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana serta pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB



Gambar 4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

3.2. Fungsi

3.2.1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya kesatuan Pos Komando PDB di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten yang terarah, terpadu, terukur, dan berstandar protokol kesehatan Covid-19 antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;
- 2) Memastikan adanya pola koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;
- 3) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi terpadu.

3.2.2. Perencanaan

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan pelaksanaan operasi penanganan darurat terukur, terpadu, dan terarah dan berstandar protokol kesehatan berdasarkan tujuan dan strategi dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan adanya pelaksanaan operasi penanganan darurat dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan;
- 3) Memastikan adanya penetapan rencana operasi dan perintah operasi harian oleh komandan penanganan darurat bencana bersama pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi dengan protokol kesehatan.

3.2.3. Operasi

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan tercapainya tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam operasi penanganan darurat bencana secara terpadu;
- 2) Memastikan semua tindakan operasi berjalan secara secara efektif dan efisien.

3.2.4. Logistik

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya dukungan logistik pangan yang dikelola pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 2) Memastikan adanya dukungan logistik peralatan komunikasi dan transportasi dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 3) Memastikan adanya dukungan logistik sarana pergudangan dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.
- 4) Memastikan adanya dukungan logistik kesehatan dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.

3.2.5. Administrasi dan keuangan

- 1) Memastikan adanya sumber pembiayaan operasi penanganan darurat;
- 2) Memastikan adanya mekanisme penerimaan dan penggunaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Masyarakat, maupun sumbangan dari pihak lainnya;
- 3) Memastikan adanya mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.

3.3. Tugas-Tugas

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas-tugas yang mencakup :

1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

Kegiatan klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Mengkoordinasikan kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi.
- c. Mengkoordinasikan dan memobilisasi kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi dengan protokol kesehatan Covid-19.
- d. Melakukan mobilisasi potensi sumberdaya dan logistik kesehatan (APD, masker, penyekat ruangan, hand sanitizer, sabun, tempat cuci tangan) yang dibutuhkan.
- e. Melakukan persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak dengan protokol Covid-19.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Sasaran klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai

berikut :

- a. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi di 3 Kabupaten.
- c. Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi di 3 kabupaten.
- d. Terlaksananya mobilisasi potensi sumberdaya dan logistik kesehatan yang dibutuhkan.
- e. Terlaksananya persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Terlaksananya operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak dengan protokol Covid-19.
- g. Tersusunnya laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Dalam proses penyelamatan dan evakuasi, keberadaan desa-desa paseduluran ikut berperan penting. Untuk mendukung penanganan bencana di masa pandemik, maka TEA harus dilengkapi dengan pengaturan jarak menggunakan sekat dengan kapasitas 50% dari jumlah normal. Adapun desa-desa paseduluran per kabupaten yang terdampak sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sister Village dan Kapasitas TEA nya

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa) NORMAL	Kapasitas TEA masa pandemi
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	Ngluwar	Jamus kauman	4300	2150
					Pekunden		
					Bligo		
			Nglumut	Salam	Sucen	525	263
			Ngargosoko	Salam	Gulon	2600	1300
					Seloboro		
Ngablak	Srumbung	Kradenan	2320	1160			

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa) NORMAL	Kapasitas TEA masa pandemi
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ngluwar	Somokerto	1750	875
				Mungkid	Tirto		
			Srumbung	Ngluwar	Baturono	1750	875
					Tersangede		
			Mranggen	Muntilan	Gunungpring	3090	1545
			Tegalrandu	Srumbung	Bringin	3500	1750
					Pabelan		
			Kemiren	Salam	Wanurejo	1500	750
		Dukun	Ngargomulyo	Muntilan	Taman agung	2670	1335
			Kalibening	Muntilan	Adikarto	1700	850
			Keningar		-	-	-
			Sengi	Sawangan	Jati	5500	2750
				Sawangan	Butuh	5500	2750
			Mungkid	Mungkid	Treko	5500	2750
			Sumber	Muntilan	Pucungrejo	2000	1000
			Krinjing		-	-	-
			Paten	Mungkid	Gondang	5086	2543
				Mungkid	Bumirejo	5086	2543
			Mertoyudan	Mertoyudan	Mertoyudan	5086	2543
			Mangunsoko		-	-	-
			Dukun		-	-	-
			Sewukan	Mungkid	Ambartawang	4000	2000
				Mungkid	Mungkid	4000	2000
		Sawangan	Wonolele	Sawangan	Banyuroto	2500	1250
			Ketep	Sawangan	Wulunggunung	2550	1275
				Sawangan	Ketundan	2550	1275
			Kapuhan	Sawangan	Mangunsari	3000	1500
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	Mungkid	Bumirejo	-	-
			Klakah	Sawangan	Gantang	-	-
			Lencoh	Ampel	Kembang	-	-

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa) NORMAL	Kapasitas TEA masa pandemi
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jrakah	Boyolali Kota	Karanggeneng	-	-
			Samiran	Boyolali Kota	Mudal	-	-
		Musuk	Mriyan	Boyolali Kota	Kiringan	-	-
			Cluntang	Boyolali Kota	Siswodipuran	-	-
			Sumur	Mojosongo	Kemiri	-	-
		Cepogo	Gedangan	Boyolali Kota	Pulisen	-	-
			Genting	Mojosongo	Kemiri	-	-
3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante	Prambanan	Kebondalem lor	1000	500
			Sidorejo	Kebonarum	Menden	1000	500
			Tegal mulyo	Karangnongko	Demak Ijo	1000	500
				Delanggu	Gatak	1000	500
				Karangnongko	Kanoman	1000	500
			Bawukan	Prambanan	Brajan	2000	1000
				Kebonarum	Menden	1000	500
				Karangnongko	Somokaton	2000	1000
				Kebonarum	Karangduren	2000	1000
			Ngawen	Manjung	2000	1000	
			Kebonarum	Basin	2000	1000	
			Kebonarum	Pluneng	2000	1000	
			Karangnongko	Banyuaneng	2000	1000	
		Prambanan	Joho	2000	1000		
		Prambanan	Randusari	2000	1000		
		Panggung	Prambanan	Bugisan	2000	1000	
		Manisrenggo	16 desa				
Karangnongko	14 desa						
Jatinom	18 desa						
Total Keseluruhan						74.591	37.296

2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian

Kegiatan klaster sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.
- b. Memobilisasi kebutuhan sarana dan Prasarana Pengungsian dari lembaga/ instansi tingkat Provinsi.

- c. Mengkoordinasikan tempat pengungsian sesuai standar protokol kesehatan Covid-19, termasuk sarana penerangan.
- d. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Sasaran klaster sarana dan prasarana pengungsian diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.
- b. Tersedianya tempat pengungsian.

Adapun lokasi-lokasi tempat pengungsian dan kapasitasnya di setiap kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5. Lokasi Pengungsian Warga dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa) NORMAL	Kapasitas (jiwa) PANDEMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	-	-	-
			Nglumut	-	-	-
			Ngargosoko	-	-	-
			Ngablak	-	-	-
			Srumbung	-	-	-
			Mranggen	-	-	-
			Tegalrandu	-	-	-
			Kemiren	-	-	-
		Dukun	Ngargomulyo	-	-	-
			Kalibening	-	-	-
			Keningar	-	-	-
			Sengi	-	-	-
			Sumber	-	-	-
			Krinjing	-	-	-
			Paten	-	-	-
			Mangunsoko	-	-	-
			Dukun	-	-	-
			Sewukan	-	-	-
		Sawangan	Wonolele	-	-	-
			Ketep	-	-	-
Kapuan	-		-	-		
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	-	-	-

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa) NORMAL	Kapasitas (jiwa) PANDEMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Klakah	Sirkuit Gokart	-	-
			Lencoh	Eks gedung IPHI	-	-
			Jrakah	Halaman BPDB Boyolali	-	-
			Samiran	Halaman Rumah Dinas Bupati Boyolali	-	-
		Musuk	Mriyan	Gelanggang Anuraga	-	-
			Cluntang	Gedung Mahesa	-	-
			Sumur	Alun-alun lor boyolali	-	-
		Cepogo	Gedangan	GOR Ponco Budoyo	-	-
			Genting	Alun-alun selatan boyolali	-	-
		3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante	Shelter Kebondalem Lor
			Sidorejo	Shelter Menden	1000	500
			Tegal mulyo	Shelter Demak Ijo	1000	500
			Kendalsari	GOR Gelar Sena	2000	1000
			Bawukan	Komplek TNI Depowedi	2000	1000
			Panggung	Pendopo Kabupaten Klaten	2000	1000
			Manisrenggo	16 desa		
			Karangnongko	14 desa		
Jatinom	18 desa					
Total Keseluruhan					9000	4500

Catatan: Posisi lokasi dengan desa terdampak belum disesuaikan perlu konfirmasi ulang

Tabel 6. Jumlah Lokasi Pengungsian Hewan Ternak dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Ternak	Tempat Pengungsian		Kapasitas
			Kecamatan	Lokasi Pengungsian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	7570	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2	Boyolali	15048	Boyolali kota	Pasar Sapi Singkil	-

No.	Kabupaten	Jumlah Ternak	Tempat Pengungsian		Kapasitas
			Kecamatan	Lokasi Pengungsian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Cepogo	Pasar Sapi Jelok	-
			Boyolali kota	Pasar Sapi Ampel	-
3	Klaten	43844	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Total Keseluruhan		66462			

- c. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Tersedianya tempat cuci tangan dengan sabun.
- e. Tersedianya sarana penerangan.
- f. Tersedianya tempat pembuangan sampah.
- g. Tersedianya sarana khusus bagi penyandang disabilitas.
- h. Tersedianya sarana untuk pelayanan publik.
- i. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan multimedia.
- j. Tersedianya sarana sosial dan psikososial.
- k. Tersedianya sarana belajar mengajar sementara.

3) Klaster Kesehatan

Kegiatan klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.
- b. Memobilisasi bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota.
- c. Mengkoordinasikan bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan baik dari RS swasta, klinik maupun lembaga kesehatan lainnya.
- d. Mengkoordinasikan RS Lapangan dan penanganan *trauma healing* oleh Persada Profesi Psikologi, Biro Psikologi Universitas dan profesi Psikolog lainnya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.

- f. Menyusun laporan kegiatan layanan kesehatan.
- g. Membentuk Sub Klaster Penanganan Covid-19

Adapun kegiatan dari sub klaster penanganan Covid-19 sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan klaster kesehatan dan satuan tugas penanganan Covid-19 masing-masing daerah;
- Memobilisasi bantuan tenaga medis dan logistik kesehatan berstandar protokol Covid-19;
- Melaksanakan pelaporan rutin kondisi Covid-19 di lokasi pengungsian dan situasi kebencanaan di lapangan;
- Berkoordinasi dengan rumah sakit masing-masing daerah;
- Berkoordinasi dengan laboratorium khusus penyakit paru di daerah masing-masing;
- Melakukan monitoring dan evaluasi layanan kesehatan per kurun waktu tertentu.

Sasaran klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.
- b. Terdistribusinya bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, baik kelompok rentan maupun penyandang disabilitas.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan layanan kesehatan.

4) Klaster Logistik dan Dapur Umum

Kegiatan klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Memobilisasi kebutuhan logistik dan dapur umum di kabupaten kab/kota.

- c. Mengkoordinasikan bantuan kebutuhan dasar logistik dan dapur umum.
- d. Memberikan bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.
- f. Menyusun laporan kegiatan klaster logistik dan dapur umum.

Sasaran klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar.
- c. Terpenuhinya bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan Klaster Logistik dan Dapur Umum.

3.4. Instruksi Koordinasi

- 1) Penugasan Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah berlaku selama 1 bulan (tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021) sejak operasi penanganan darurat bencana. Penugasan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Jika terjadi peningkatan aktivitas dan atau berpotensi terjadi erupsi Gunung Merapi maka penetapan status tanggap darurat segera ditetapkan dan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah segera diaktivasi. Gubernur Jawa Tengah menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Koordinator sesuai struktur organisasi;

- 3) Penyusunan Rencana Operasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dengan menyesuaikan perkembangan lapangan sesuai hasil kaji cepat dan data dari Pos Komando PDB Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada ketiga kabupaten yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten tanpa mengambil alih operasi komando penanganan darurat bencana;
- 5) Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau relawan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah di lokasi yang telah ditentukan sebagai Pos Pendamping di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten selama 24 jam dan 14 hari;
- 6) Petugas dan atau relawan yang ditempatkan di Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang operasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah;

4.1. Administrasi

- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi atau sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka seluruh sumberdaya lokal Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana, lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 2) Setelah ditetapkan pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan BANSOS/Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 3) Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan pendampingan teknis, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh ketiga kabupaten sesuai dengan hasil kajian kebutuhan;
- 4) Pemerintah pusat merapat dan memberikan pendampingan dan bantuan yang sifatnya ekstrim berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Jenis pendampingan yang diberikan mencakup kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), pendampingan akses Belanja Tak Terduga (BTT), pendampingan administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel, dan pendampingan mobilisasi logistik, peralatan, serta dukungan komunikasi yang dibutuhkan daerah terdampak.

4.2. Logistik

- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan

Kabupaten Klaten dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat berupa personil, logistik dan peralatan;

- 2) Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi;
- 3) Pemerintah Provinsi dapat menginformasikan pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk dapat membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dapat membantu penanganan darurat bencana dengan bantuan terkait: fasilitas personil, dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

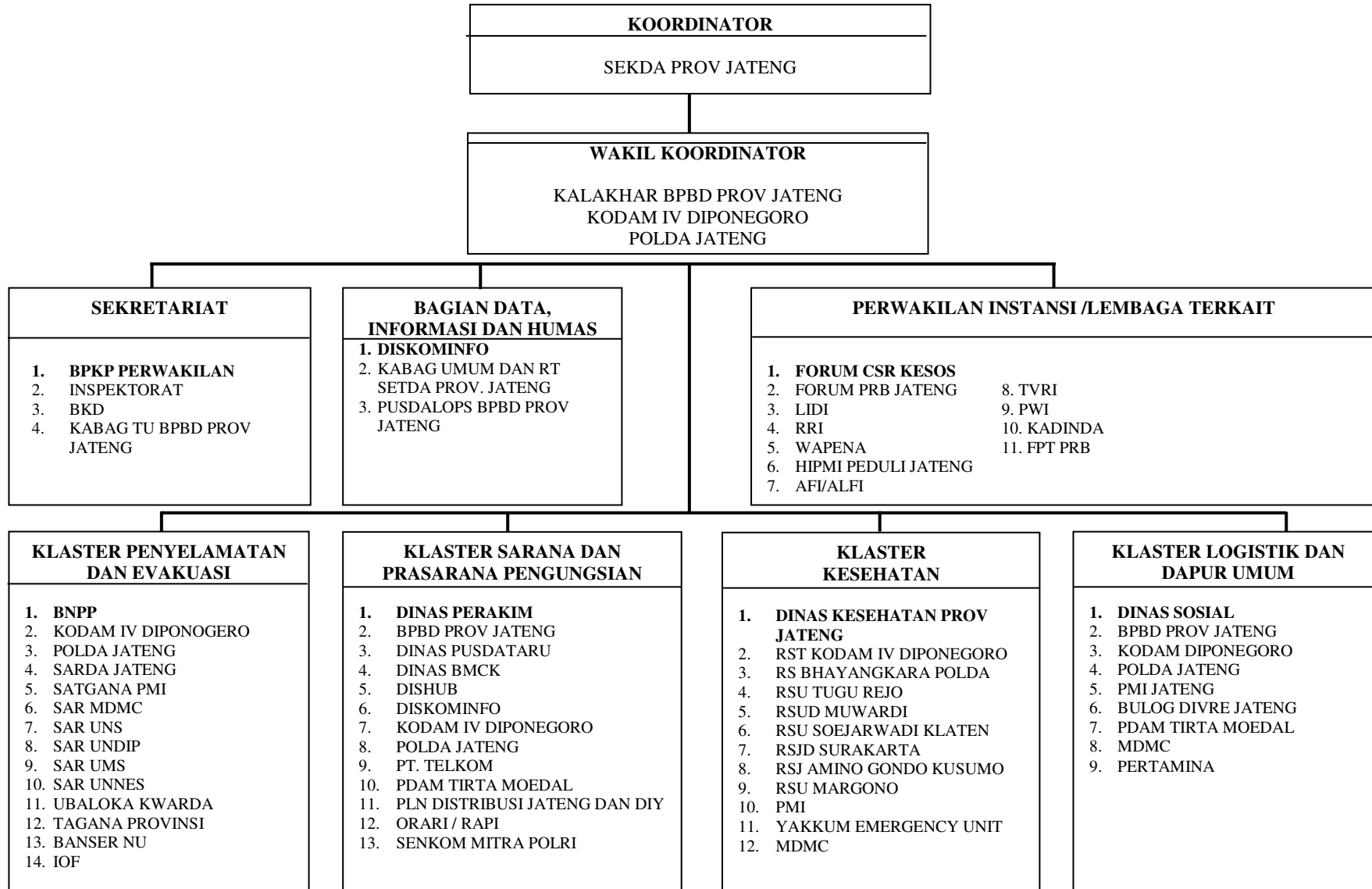
GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

LAMPIRAN-A: Struktur Koordinasi dengan Pos Pendamping PDB Bencana Erupsi Merapi Prov. Jawa Tengah



LAMPIRAN-B: **Susunan Tugas**

Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
Setda Prov. Jateng	Ex-Officio Kepala BPBD Prov Jateng	Koordinator
BPBD Prov. Jateng Kodam IV Diponegoro Polda Jateng	1. Kalakhar BPBD Prov. Jateng 2. Pangdam IV Diponegoro 3. Kapolda Prov. Jateng	Wakil Koordinator Wakil Koordinator Wakil Koordinator
BPKP Perwakilan Inspektorat Prov. Jateng BKD Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	Ka. BPKP Perwakilan Ka. Inspektorat Prov. Jateng Ka. BKD Prov. Jateng Kabag TU BPBD Prov. Jateng	Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat
Diskominfo Prov. Jateng Setda Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	Ka Diskominfo Kepala Bagian Humas Setda Prov. Jateng Ka Pusdalops BPBD Prov Jateng	Koordinator Bidang Data, Informasi dan Humas Anggota Anggota
Forum CSR Kesos Forum PRB Jateng LIDI Jateng RRI Wapena Hipmi Peduli Jateng Afi/Alfi TVRI PWI Kadin FPT PRB	1. Ketua Forum CSR Kesos 2. Ketua Forum PRB Jateng 3. Ketua LIDI 4. Ka.RRI 5. Ketua Wapena 6. Ketua Hipmi Peduli Jateng 7. Ketua Afi/Alfi 8. Ka.TVRI 9. Ketua PWI 10. Ketua Kadin 11. Ketua FPT PRB	Koordinator Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
BNPP Prov. Jateng Kodam IV Diponegoro	Ka. Kantor SAR Semarang Kodam IV Diponegoro <u>Anggota :</u> 1. Polda Jateng 2. SARDA Jateng 3. Satgana PMI 4. SAR MDMC 5. SAR UNS 6. SAR Undip 7. SAR UMS 8. SAR UNNES 9. Ubaloka Kwarda 10. Tagana Provinsi	Koordinator Klaster Penyelamatan dan Evakuasi Wakil Koordinator

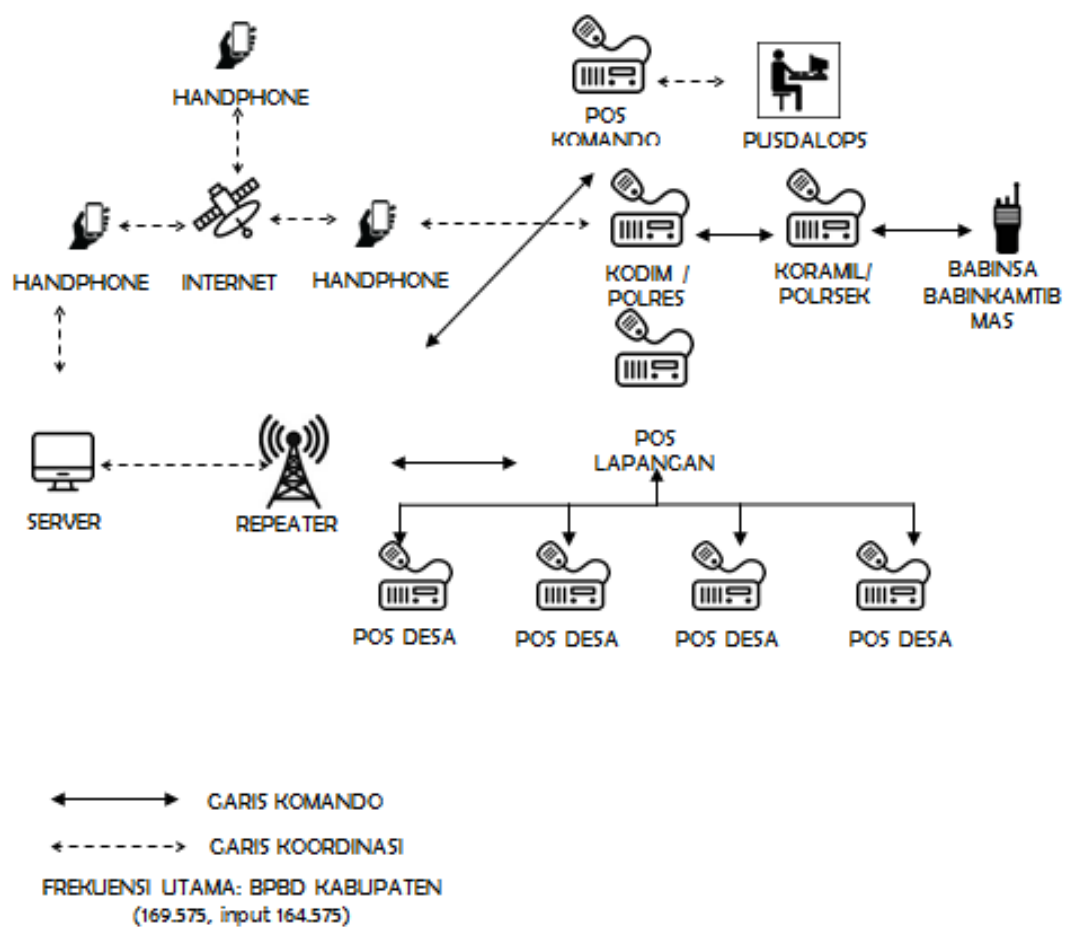
Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
	11. Banser NU 12. Indonesian Off Road Federation (IOF)	
Dinas Perakim Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	Ka. Dinas Perakim Prov. Jateng Kabid Penanganan Darurat BPBD Prov. Jateng <u>Anggota:</u> 1. Dinas PUSDATARU 2. Disperakim 3. Dinas Perhubungan 4. Diskominfo 5. Kodam IV Diponegoro 6. Polda Jateng 7. PT. Telkom 8. PDAM Tirta Moedal 9. PLN Distribusi Jateng 10. ORARI 11. RAPI 12. Senkom Mitra Polri	Koordinator Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian Wakil Koordinator
Dinas Kesehatan Prov. Jateng Kodam IV Diponegoro	Ka. Dinas Kesehatan Prov. Jateng Kodam IV Diponegoro <u>Anggota:</u> 1. Polda Jateng 2. RST Kodam IV Diponegoro 3. RS Bayangkara Polda 4. RSU tugurejo 5. RSUD Muwardi 6. RSU Soejarwadi Klaten 7. RSJD Surakarta 8. RSJ Amino Gondo Kusumo 9. RSU margono 10. PMI 11. Yakkum Emergency Unit 12. MDMC	Koordinator Klaster Kesehatan Wakil Koordinator
Dinas Sosial Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	Ka. Dinas Sosial Prov. Jateng Kabid Logistik dan Peralatan BPBD Prov. Jateng <u>Anggota:</u>	Koordinator Klaster Logistik dan Dapur Umum Wakil Koordinator

Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
	1. Kodam IV Diponegoro 2. Polda Jateng 3. PMI 4. Bulog Divre Jateng 5. PDAM Tirta Moedal 6. MDMC	

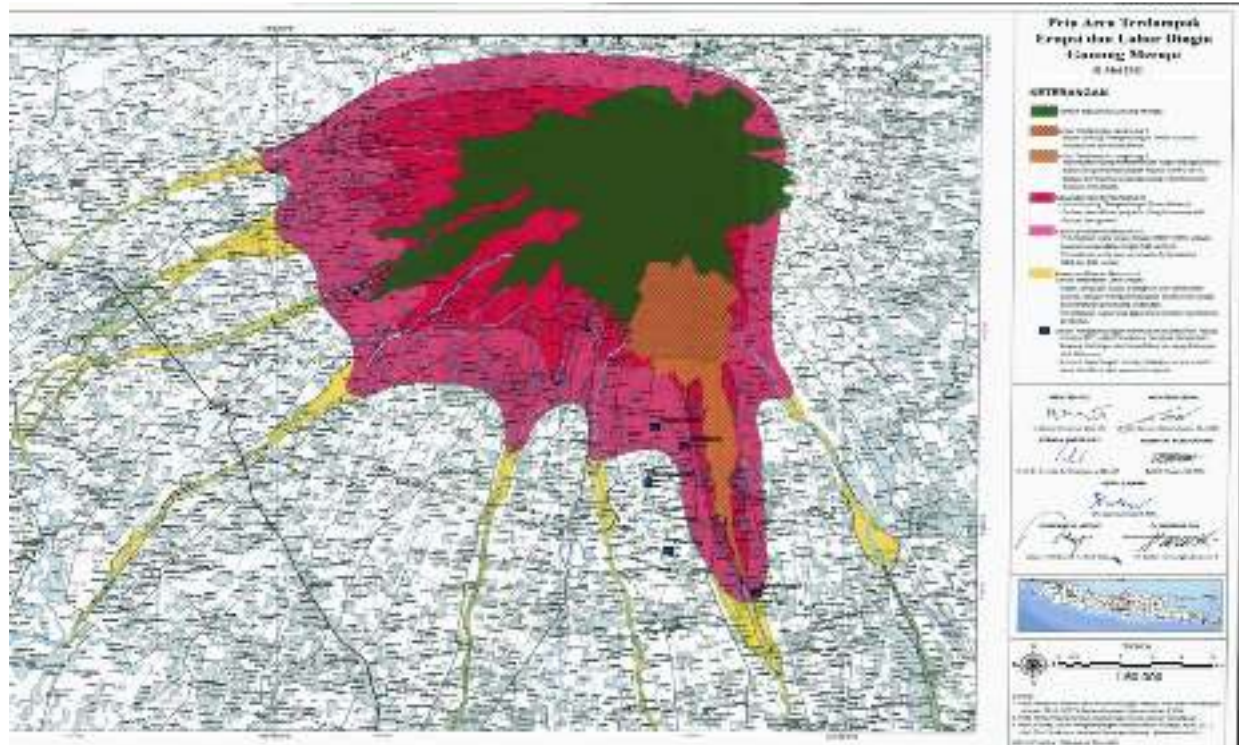
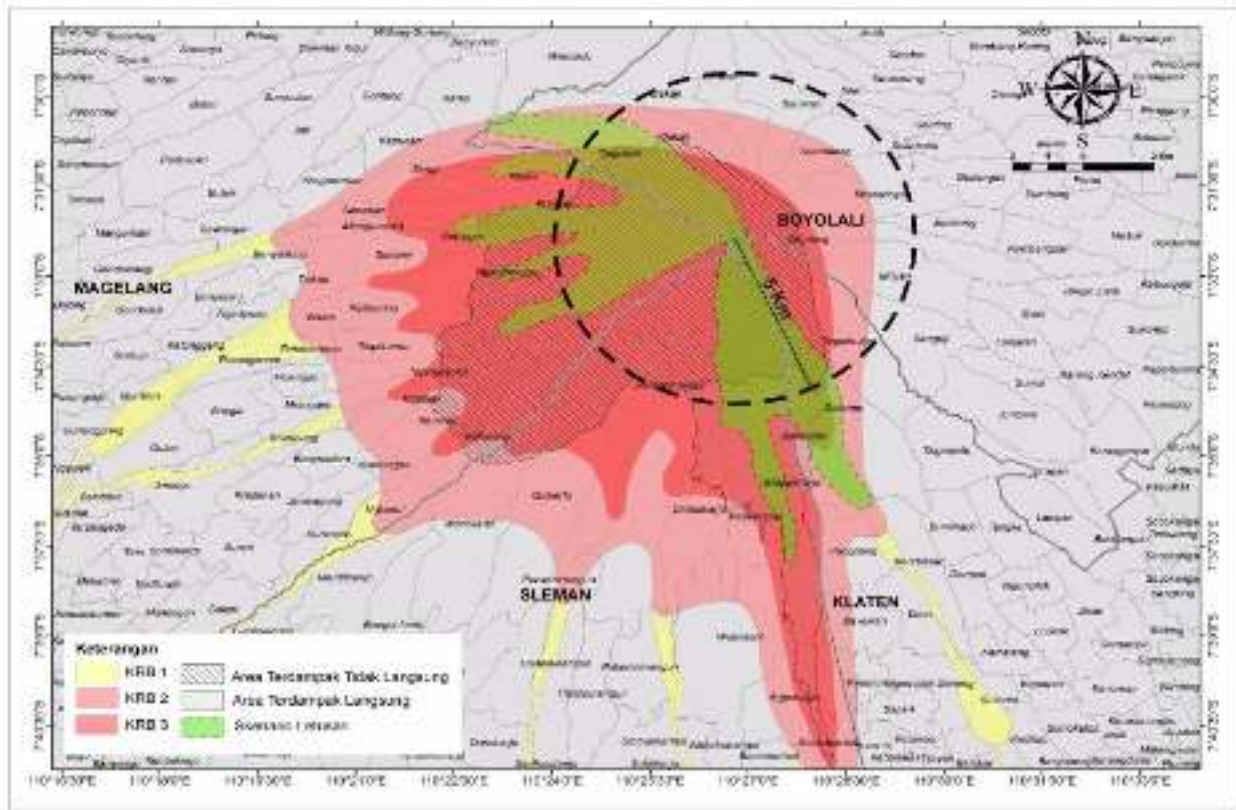
LAMPIRAN-C: Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi Komando dengan Bidang menggunakan frekuensi radio komunikasi, operasional diatur oleh Kominfo dan Balmon. Sedangkan jaring komunikasi antar Bidang Telepon/HP dan Sosial media (Whatsapp).

a. Jaringan Komunikasi di Kabupaten Magelang



LAMPIRAN-D: Peta-Peta Potensi Kejadian Bencana Erupsi Gunung Merapi



LAMPIRAN-E: Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

a. Kemampuan Sumberdaya di Provinsi Jawa Tengah

No	Lembaga / Instansi	Kemampuan Sumberdaya	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Personil 50 orang; 2. Sarana : peralatan laboratorium	
2.	Dinas Sosial	(terlampir)	
3.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	a. Personil 10 orang b. Sarana: traktor, alat pertanian	
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	1. Personil 237 orang 2. Prasarana: gedung 3unit, internet 100 Mbps 3. Sarana: Komputer 157 unit, pesawat telp. 37 unit, faximile: 8 unit, computer touch screen 2 unit, UPS/stabilizator: 26 unit, LAN internet (server/modem): 6 unit, kendaraan roda 2 : 4 unit, kendaraan roda 4: 21 unit, handycam: 6 unit, HT, 3 unit, handled VHF/UHF: 2 unit, antenna repeater 3 unit, kamera digital 3 unit, mobile VHF/UHF 2 unit, server 15 unit,	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Personil: 105 orang	a. Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) b. Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	1. Backhoe loader: 2 unit 2. Dumtruck: 2 unit 3. Operator: 4 orang	(BPTJ Magelang dan Surakarta)

b. Proyeksi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/lokasi
1	Personil	Orang	50	50	Boyolali
2	Ruang sekretariat	Unit	3	3	Pos AJU

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/lokasi
					Magelang
3	Gudang	unit	1	1	Pos AJU Magelang
4	Ruang Kendali	Unit	1	1	Pos AJU Magelang
5	Sarana dan prasarana sekretariat	Unit	5	5	Pos AJU Magelang
6	Ruang pertemuan	Unit	1	1	Pos AJU Magelang

c. Kapasitas OPD pada Pos Pendamping

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
PBD Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> Personil Komputer Printer HT Armada 	60 10 5 30	Personil Unit Buah Unit
NI	<ul style="list-style-type: none"> Personil Tenda HT Peta Armada 	100 30 30 6 20	Personil Unit Unit Buah Buah
Polri	<ul style="list-style-type: none"> Personil HT Armada 	100 30 20	Personil Unit Buah
Instansi Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Personil Komputer HT/Repeater Jaringan internet Jaringan komunikasi dengan beberapa pihak 	150 5 5	Personil Unit Buah
Instansi Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> Personil Prasarana : mobil pelayanan Kesehatan Hewan dan motor Sarana : penyediaan obat hewan, penyediaan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi pengendalian zoonosis dan penerapan kesrawan terdampak bencana 	10	personil

d. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		
			Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/ lokasi
1	Truck Evakuasi	Unit	150	140	Klaten
2	Truck evakuasi	Unit	45	30	Boyolali
3	BBM	Liter	7.510	7.510	Klaten
4	BBM	Liter	114.931	114.901	Boyolali
5	Personil Rescue	orang	Menyesuaikan	Tersedia di SARDA Jateng, Kantor SAR Semarang, Surakarta dan Karanganyar	Semarang, Boyolali, Klaten, Magelang, Surakarta dan Karanganyar
6	Relawan	Orang	Menyesuaikan	Tersedia	Semarang, Boyolali, Klaten, Kendal, Temanggung dan Magelang

e. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster sarana dan prasarana pengungsian :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
BPBD Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Armada 	100 10	Personil Unit
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Alat Berat • Armada Tangki Air • Backhoe 	12 1 2 3	Personil Unit Unit Unit
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Personil 	10	Personil
Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Radio Komunikasi • Kendaraan • Jaringan internet • Jaringan komunikasi 	20 5 5	Personil Unit Buah
Kodam IV Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Alat Berat • Jembatan 	50 10 5	Personil Unit Unit
Polda Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Kendaraan 	50 15	Personil Unit
PT. Telkom	<ul style="list-style-type: none"> • Personil • Akses Internet • Perahu karet 	11 9 9	Personil Instalasi Unit

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
PDAM	<ul style="list-style-type: none"> MCK Air bersih Bak tandon air 	- 7 30	- Instalasi Unit
PLN	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Trafo Instalasi listrik Personil Team PDKB Mobil Yantek 	6 30	Unit Personil
ORARI	<ul style="list-style-type: none"> Personil 	30	Personil
RAPI	<ul style="list-style-type: none"> Personil 	35	Personil
Senkom Polri	<ul style="list-style-type: none"> Personil 	30	Personil
Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Personil Kantor Terminal Tipe B Armada Water Barrier 	30 1 2 4 10	Personil Buah Unit Unit Unit

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Mobil tangki air	Unit	35	23	-
2	Mobil tangki air	Unit	45	45	-
3	Air bersih	m ³	7.886	7.886	-
4	Bak tandon air	Unit	850	850	-
5	Bak tandon air	Unit	45	45	-
6	MCK	Unit	3.400	3.400	-
7	Tenda peleton	Unit	350	350	-
8	Tenda peleton	Unit	45	45	-

f. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster kesehatan :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> TGC Dinkes Genset Tenda RS lapangan Feld Bed Armada Alkes Obat Disinfektan Alat penjernih air 	115 1 1 40 5 1 1 8 1	Personil Unit Unit Unit Unit Unit Paket Peal Unit
TNI	<ul style="list-style-type: none"> Dokter umum Armada RS Lapangan 	100 30 2	Personil Unit Unit
POLRI	<ul style="list-style-type: none"> Dokter umum Armada RS Lapangan 	100 30 2	Personil Unit Unit

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
RSUD Tugu	• Dokter	20	Personil
	• Perawat	35	Personil
	• Ambulance	5	Buah
	• Tenda RS lapangan	1	Unit
RSUD Moewardi	• Dokter	20	Personil
	• Perawat	35	Personil
	• Ambulance	5	Unit
PMI	• Ambulance	2	Unit
	• Relawan Kesehatan	30	Personil
	• Tenda RS Lapangan	2	Unit
MDMC	• Obat obatan	30	Personil
	• Relawan Kesehatan		
YEU	• Perawat	30	Personil

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Perawat	Orang	175	170	-
2	Dokter Umum	Orang	170	170	-
3	Dokter Spesialis	Orang	27	27	-
4	Bidan	Orang	236	236	-
5	Ambulance	Unit	170	170	-
6	Obat obatan	Paket	170	170	-

g. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Dapur Umum

Berikut adalah data ketersediaan dan kebutuhan klaster logistik dan dapur umum:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Personil	Orang	300	300	
2	Beras	Kg	1.122.864	1.022.864	Boyolali
3	Beras	Kg	217.963	117.963	Magelang
4	Beras	Kg	50.742	2.944.520	Klaten (kekurangan beras akan dipenuhi oleh Bulog Divre Jawa Tengah dan Divre di masing masing Kabupaten)
5	Hygine kit	Paket	12.516	10.516	-
6	Family kit	Paket	15.042	15.027	-

h. Estimasi Ketersediaan Sumber Daya Per Kabupaten

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
A. Kabupaten Magelang									
1	Dinas Kesehatan	Dokter Umum	60	Ambulan dan Puskesmas Keliling	58	Puskesmas	29	Jaringan Internet	32
		Dokter Gigi	36			Puskesmas Pembantu	165		
		Perawat	173						
		Bidan	436						
		Ahli Gizi	27						
2	PMI	Dokter Umum	1	Ambulan transport	1	Alat dapur umum	1	Telepon	1
		Perawat	8	Ambulan jenazah	1	Dapur umum	1		
		Analisis	2	Kendaraan bak terbuka	1				
		Bidan	2	Bis Donor Darah	1				
		PTTD	1						
		Tenaga Ahli Tanggap Darurat	1						
		Tenaga Terampil:							
		MFR	10						
		DU	10						
		Wash	5						
		Rescuer	5						
		Driver	5						

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
3	PEMDES Kalibening	Bidan/ Perawat	8	Ambulan, Komputer, dan Printer	1	Balai Desa	1	Sawah	52551
4	PEMDES Sewukan	Bidan Desa	1	Laptop	6	Balai Desa	2	HT	20
5	PEMDES Nglumut	Bidan Desa	2	Komputer Laptop	5 3	GOR Balai Desa PKD Sekolah	1 1 1 1	Tulisan Radiopancar HT Pengeras Suara Kentongan	4 1 9 6 9
6	PEMDES Sumber	Bidan Desa	1	laptop Mobil Sepeda Motor	13 15 300			HT	30
7	PEMDES Ngargomulyo	Bidan Desa	1	laptop Mobil Truck	6 44 17	Chainsaw Tandu Genset	2 1 2	RPU HT Megaphone Speaker	1 20 2 3
8	PEMDES Ngablak	Bidan Desa	1	Komputer Mobil Siaga Sinso Diesel Mibil Dinas Mobil Siaga	5 1 2 1 2 1	GOR Lapangan Sekolah Gedung	1 1 3 1	HT Papan Pengumuman	25 2
9	PEMDES Kaliurang		2	laptop	7	Balai Desa	1	HT	10

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
				Genset	4				
				Elf	1				
				Pick up	1				
10	PEMDES Tegalrandu	Bidan	10	Mobil	64	TPS	8	HT	30
				Truk	34				
11	PEMDES Mranggen	Bidan	1	Komputer	3	Balai Desa	2	Sembako	9
		Perawat	4	Peralatan	5			Papan	4
				Mobsos	1			HT	1
				Mob OPRB	1				
				Minibus	26				
12	PEMDES Ngargosoko			Mobil Siaga	1	Posyandu	7	HT	10
						OPRB	50		
13	PEMDES Keningar			Mobil Sosial	1	Posyandu	1		
				Mobil Pribadi	19	OPRB	40		
				Truk	3				
14	PEMDES Krinjing			Truck/Picup	131			HT	83
B. Kabupaten Boyolali									
1	BPBD	Personil	10	Komputer	1	Gudang Logisitik	1	Lemari	2
		Relawan	50	Mobil tangki air	1	Bantuan Peta tematik	1	Faximile	1
		Personil Logistik	15	Mobil	2	Tenda Peleton	2	GPS	1
		Personil TEA	4	Motor	4	Tenda	3	Internet	1

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
				Kendaraan roda 4	1	Pengungsian Veltbed	15	Proyektor LCD	1
				Motor Trill	4	Pompa air	1	Papan Data	1
				Mobil rescue	2	Handycam dan Kamera video	2	Printer	1
				Mobil Rescue (RTU)	2	Radio	7	Sepatu boot	4
				Genset	1	Pesawat RIG	1	Pemancar canon	3
						Pusdalops	1	Chain saw	5
								Alat pemotong baja dan beton	1
								Topi proyek	4
								Tenda Gulung	127
								Kunci Hidran	2
								Bak Tandon	2
								Sarangan selang hisap	1
								Selang buang tiga	1
								Selang hisap spiral	1
								Tandon air 100 l	1
								Wireless	1
								Megaphone	2
								Jerigen	5
2	Disnakertrans	Personil	2	Genset	1	Tenda	3	Printer	1
		Personil TEA	1			Pengungsian Veltbed	10		
						Radio	2		
3	DPU ESDM	Personil	4	Truk	2			Cangkul	30

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
		Personil TEA	5	Pick up Mobil tangki air Excavator Truk tinja	3 1 1 1			Chain saw Helm Penyelamat	5 8
4	Dinkes	Personil Perawat Bidan Tenaga Laboratorium Psikolog	2 29 19 5 1	Ambulan Genset	6 1	Posyandu Masker Sarung tangan Gudang Farmasi Pesawat RIG	29 11 20 1 1	Faximile Printer	1 1
5	POLRES	Personil	102	Truk Motor	1 10				
6	KODIM	Personil Personil TEA	102 100	Truk Teropong	1 1	Gudang Logistik Bantuan Tenda Peleton Tenda Pengungsian Peralatan dapur umum Radio Pesawat RIG	1 2 2 2 10 1	Lemari GPS Papan Data	2 1 1
7	Humas PemKab	Personil	2					Faximile	1
8	Diskominfo	Personil Personil Logistik	2 15	Mobil Mobil Rescue (RTU)	1 1	Gardu Pemantau Handycam dan Kamera video	2 2	Faximile Internet	1 1

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
						Radio	1	Printer	1
						Bandara	1		
						Pesawat RIG	1		
9	Disdikbud	Personil	2						
10	Disdukcapil	Personil	2						
11	FPRB	Personil	2					Jerigen	2
		Personil Logistik	50						
12	Dinas Perikanan dan Peternakan	Personil	2	Truk	3				
13	Balai desa TES							Lemari	45
14	Pem kecamatan	Personil Logistik	6			Komputer	3	Lemari	3
15	RSUD	Dokter umum	5	Mobile jenazah	4	Lab. Kesehatan	1	Faximile	1
		Perawat	5	Genset	1	Masker	10		
		Apoteker	1			Sarung tangan	50		
		Tenaga Laboratorium	5						
		Personil evakuasi	4						
16	Telkom							Internet	1
17	PDAM			Mobil tangki air	1				
18	Pandanarang	Dokter umum	1	Ambulan	4			Tandu	8
		Perawat	1	Mobile jenazah	4				
		Tenaga Laboratorium	1						
		Psikolog	2						
19	RS PKU Aisyiah	Dokter umum	1	Ambulan	1	RS Rujukan	1		
		Perawat	1	Mobile jenazah	4				

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
		Apoteker	1						
		Bidan	2						
		Tenaga Laboratorium	1						
20	RS Umi Barokah	Dokter umum	1	Mobile jenazah	4			Tandu	4
		Perawat	1						
21	RS Sisma Medika	Dokter umum	1	Mobile jenazah	4				
22	RS Banyudono	Dokter umum	1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
		Perawat	1						
23	RSUD Simo	Dokter umum	1			RS Rujukan	1	Tandu	8
24	RSU Asy- Syifa Sambi Dinkes	Dokter umum	29	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
		Apoteker	1						
25	RSUD Boyolali	Dokter Spesialis	10	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
		Bidan	10						
26	RS Karanggede	Perawat	1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
27	PMI	Personil	10	Ambulan	1	Masker	10	Cangkul	20
				Mobil Rescue (RTU)	2	Tenda Peleton	2	Chain saw	2
				Mobile jenazah	1	Veltbed	10	Bak Tandon	10
				Genset	1	Pompa air	1		
						Radio	10		
						Pesawat RIG	1		
28	RSI Hidayah					RS Rujukan	1	Tandu	4
29	PKU Banyu Bening							Tandu	5

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
30	BASARNAS	Personil	66			Radio Pesawat RIG	5 1		
31	Dishub	Personil	10						
32	Dinsos	Personil Personil Logistik	10 15	Kendaraan roda 4 Mobil Rescue (RTU)	1 1	Tenda Dapur Umum Alat Dapur Umum Peralatan dapur umum	9 1 4		
33	Dinas Pertamanan							Sekop	8
34	SATPOLL PP/Damkar			Kendaraan roda 4 Mobil Damkar	1 5			Helm Penyelamat	10
35	Dinas Koperasi			Kendaraan roda 4	1				
36	PEMDES	Personil Logistik	90			Pesawat RIG	14		
37	Disperinda	Personil TEA	15						
38	PDAM							Bak Tandon	10
39	MMC Merapi FM					Studio Radio Darurat Exciter 1000 watt dan antena 50 watt Komputer Perangkat Studio Radio Receiver	1 1 3 2 1000		

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
						Generator	1		
						Penyiar	7		
						Jurnalis	10		
						Admin medsos	6		
40	Disdikbud	Personil	30						
C. Kabupaten Klaten									
1	BPBD	Personil	150	Laptop	7	Pesawat RIG	7	Peralatan makan minum	7
		Personil Posko Induk	35	Kendaraan roda 2	14	HT	40	White board	7
		Personil Posko Kecamatan	10	Kendaraan roda 4	7	Repeater VHP	1	Kertas HVS	3
		Personil Shelter	30	Motor	1	Komputer dan Link ITKP	1	PC	1
		Relawan	12	Mobil Operasional	2	Tenda Posko	5	GPS	2
		Fasilitator	12	Mobil Pick up	8	Peta kerja	1	Chainsaw	1
				Mobil tangki air	4	Tali evakuasi 300 m	1	Tandu	8
				Mobil Pemadam	4	Mesin pemadam	3	Tampungan Air	4
				Mobil Ambulan	8	Tenda Serbaguna	4	Peralatan dapur	4
				Genset	2	Tenda Pleton	4	LCD Proyektor	4
						Tenda Regu	5	Soundsystem	4
						Tabung Oksigen	4		

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
2	POLRES	Personil kesehatan	6	Mobil	4				
3	KODIM	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
		Personil kesehatan	6	Kendaraan roda 4	7				
		Personil evakuasi	12						
4	POLRES	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
5	SATPOL PP			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
6	Dishub			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
7	SAR	Personil	150						
8	Damkar			Mobil Damkar	1				
9	Dinkes	Dokter	5			Tabung Oksigen	12	Tandu	8
		Paramedis	10			Kursi roda	8	Tikar	100
		Bidan	5			Obat antisesak	400		
		Guru	10			Velbed	50		
		Relawan Psikososial	5						

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI
PROVINSI JAWA TENGAH 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dengan kegiatan sebagaimana dimaksud :

No	Kegiatan
1	Diseminasi Dokumen Renkon Erupsi Gunung Merapi bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
2	Melakukan Uji Publik Dokumen Rencana Kontingensi, TTX, dan Gladi
3	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
4	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat pada saat terjadi bencana
5	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
6	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika diperlukan
7	Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

PANGDAM IV DIPONEGORO



WIDI PRASETIJONO
 Mayor Jenderal TNI

KAPOLDA JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.
 Inspektur Jenderal Polisi

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
ERUPSI GUNUNG MERAPI**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Merapi. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

<p>1. SEKRETARIS DAERAH JAWA TENGAH</p>	<p>2. PANGDAM IV DIPONEGORO</p>	<p>3. KAPOLDA JAWA TENGAH</p>
<p>4. KEPALA DAERAH PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>5. KEPALA DAERAH PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>6. KEPALA DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH</p>
<p>7. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>8. KEPALA DINAS PEKERJAAN MUDA, TENGAH MARGA DAN KEMUDA JAWA PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. JAWA TENGAH</p>
<p>10. KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>11. KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEKELING</p>	<p>12. KEPALA DINAS PERUMAHAN, NEGARA DAN KAWASAN PERMUKIMAN DISPERUMAH JAWA TENGAH</p>
<p>13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAWA TENGAH</p>	<p>14. KEPALA SATPOL PP PROV. JAWA TENGAH</p>	<p></p>

**Berita Acara Peserta Penyusunan Renkon Erupsi Gunung Api Slamet
Tingkat Provinsi**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Api Slamet, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
1	Inspektorat Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	
2	Badan Keuangan Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	
3	Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	
4	Bagian Humas Setda Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
5	Pusdalops BPBD Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
6	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
7	Unit Layanan Disabilitas	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
8	Radio Republik Indonesia (RRI) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
9	WAPENA	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
10	HIPMI Peduli Jateng	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
11	AFI/ALFI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
12	TVRI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
13	PWI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
14	KADIN	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
15	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
16	Kwartir Daerah Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
17	Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Logistik dan Dapur Umum Bidang Kesehatan	
18	SARDA Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
19	SAR UNS	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
20	SAR UNDIP	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
21	SAR UMS	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
22	SAR UNNES	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
23	MDMC Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Logistik dan Dapur Umum Bidang Kesehatan	
24	TAGANA Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
25	BANSER NU Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
26	Indonesian Off Road Federation (IOF)	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
27	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
28	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
29	PT. TELKOM	Bida Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
30	PDAM Tirta Moedal	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian Bidang Logistik dan Dapur Umum	
31	PLN Distribusi Divre Jateng DIY	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
32	ORARI Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
33	RAPI Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
34	SENKOM Mitra Polri	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
35	RST Kodam IV Diponegoro	Bidang Kesehatan	
36	RS Bayangkara Polda	Bidang Kesehatan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
37	RSU Tugurejo	Bidang Kesehatan	
38	RSUD Muwardi	Bidang Kesehatan	
39	RSU Soejarwadi Klaten	Bidang Kesehatan	
40	RSJD Surakarta	Bidang Kesehatan	
41	RSJ Amino Gondokusumo	Bidang Kesehatan	
42	RSU Margono	Bidang Kesehatan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
43	Yakkum Emmergency Unit	Bidang Kesehatan	
44	Bulog Divre Jawa Tengah	Bidang Logistik dan Dapur Umum	

LAMPIRAN 11 PROFIL ORGANISASI

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No 1F Semarang Utara TELP. 024-3519927</p>	137	Mobil Dapur Umum: 1 Pick up : 4 Motor trail : 1 Sepeda Motor : 5 Truck serbaguna : 2 Handy Talky : 50 GPS : 2 Telp/satelit: 98002 Antenna : 1 Megaphone: 13 Genset : 23 Tandu : 2 Tandon air : 6 Tenda Pleton: 27 Tenda Posko: 5	Menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah
<p>Polda Jateng Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Telp: 024 8319860 roops_poldajateng@yahoo.com 081280031999</p>	100 Dokter Umum	Truck SAR: 2 Truck Penumpang: 7 Truck Box: 3 Bus: 3 Double Cabin: 7 Motor Trail: 30 Mobil Dapur Lapangan: 3 Mobil SAR Tata: 2 Mobil Ambulance: 3	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana • Mendukung perbaikan sarana prasarana

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Motor Logistik : 1 Mengaphone: 2 Telepon Satelit : 1001 Genset : 1 RS Lapangan : 2	krusial <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial • Penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak bencana
Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Jalan Bukit Barisan A IV no 9 Permata Puri Kec. Ngaliyan Kota Semarang (024) 7629192 / fax. 7629189 Sar.semarang@basarnas.go.id 081327506300	70 rescuer 5 perawat	HT : 35 RIG : 2 Telp/Satelit : 2 Repeater/ Portable : 1 Genset: 4 Rescue Car : 5 Motor Trail: 8 Truck Angkut : 7 Velbed : 20 Tandu: 15 Teropong/Teleskop : 2 Chainsaw (gergaji mesin) : 5 Pompa air : 2 Helm SAR : 3 Vertical Rescue : 5 Matras : 35 Sleeping bag : 30 Tenda Operasional/Posko : 4 Renda Regu/Doom : 10 Lampu Senter : 4 Emergency Lamp : 2	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tindak awal dan Operasi SAR • Koordinasi, Pengerahan dan Pengendalian potensi SAR
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong diadakannya lumbung pangan

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
Ungaran 024-6921972, 6925554 / 024-6921997 08156584359 (Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan)			masyarakat sebagai bentuk cadangan pangan antisipasi rawan pangan akibat bencana • Terpenuhinya pangan bagi masyarakat di lokasi rawan bencana
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7613185		Truk Crane : 2 Mini Excavator: 10 Wheel loader : 1 Mobil Pick-up: 18 Backhoe Loader: 1 Dump Truk: 18	Perbaikan fasilitas umum, jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov. Jawa Tengah Jalan Setia Budi No.201 B, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 (024) 7478813		Gergaji mesin :2 Kampak: 3 Cangkul:4 Sekop:4 Power sprayer sedang: 3 Sepatu boot kerja:4 pasang Helm security standart : 4 Tangki air: 4 Mesin pompa: 4 Mobil 69engui Hilux: 1 Sepatu boot: 25 pasang Pakaian pelindung anti panas: 15 Sarung tangan: 25 pasang Lampu kepala: 2 Helm safety: 25	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		<p> Peples: 15 Sabuk perlengkapan: 2 Handie talkie: 4 Megaphone: 3 Baju pemadam kebakaran: 10 Garpu: 10 Gepyok: 10 Gebyokan: 20 Sekop: 18 Garuk: 15 Sabit: 15 Handsprayer: 1 Tabung pemadam kebakaran: 3 Kleper: 5 Helm: 4 Baju pemadam kebakaran: 50 Sepatu boot: 50 pasang Helm: 4 APAR: 5 Kapak dua fungsi: 3 Alat pemotong dan pengait: 3 Handy talky: 2 Gepyok: 6 Helm proyek: 3 Sepatu boot: 3 Sarung tangan: 3 Garu tajam baja: 3 Kompas tangan: 3 Cangkul baja: 3 Sekop baja: 3 Parang baja: 3 Pompa punggung: 1 Lampu kepala: 3 Megaphone: 2 Jas hujan dan Celana: 3 Ransel/water bag: 3 </p>	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		<p>GPS: 2</p> <p>Pompa pemadam: 1 Pompa air: 1 Power sprayer sanchin: 1 Tangki “71 enguin” TB 110: 1 Jet Shooter: 2 Megaphone: 2 Binocular: 1 Handy talkie: 4 Perahu LCA (Landing Craft Aluminium): 1 Perahu fiber: 1</p> <p>Handy talkie: 7 Binocular: 3 Sekop: 25 Sabit: 10 Kapak: 15 Parang: 15 Chainsaw: 3 Gergaji pangkas: 25 Mesin pemotong rumput: 2 Gepyok: 10 Headlamp: 6 Sepatu safety: 12 Parang: 13 Sekop: 34 Sabit: 38 Handy talky: 10 Repeater: 1 Kendaraan roda 4: 3 Kendaraan roda 3: 2 Kendaraan roda 2: 5 RPU Recom: 1 Radio komunikasi/RIG: 1 Gergaji mesin:1</p>	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Drone:1	
<p>Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang Barat, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7608201</p>		Excavator Standart: 11 Excavator Long-Arm: 1 Mini Excavator: 3 Vibro Roller : 5 Bulldozer : 1 Dump Truck : 1 Mobile Pump : 1 Portable Water Pump : 1	
<p>Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah Jl. Siliwangi No.357, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 (024) 7605700</p>		HT : 4 Repeater : 5 Motor Trail : 10 Mobil Pick-Up : 6 Truk Serbaguna :1 Chainsaw :2 Sepatu Booth :4	
<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 (024) 3515301</p>	105 personil		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) • Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>PMI Jl. Arum Sari Raya, RT.11/RW.02, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 59111 (024) 76746733</p>	<p>30 relawan</p>	<p>Ambulance : 2 Tenda RS Lapangan : 2</p>	<p>•</p>
<p>MDMC Jl. Wonodri Sendang Raya No.2, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242</p>	<p>30 relawan</p>		

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

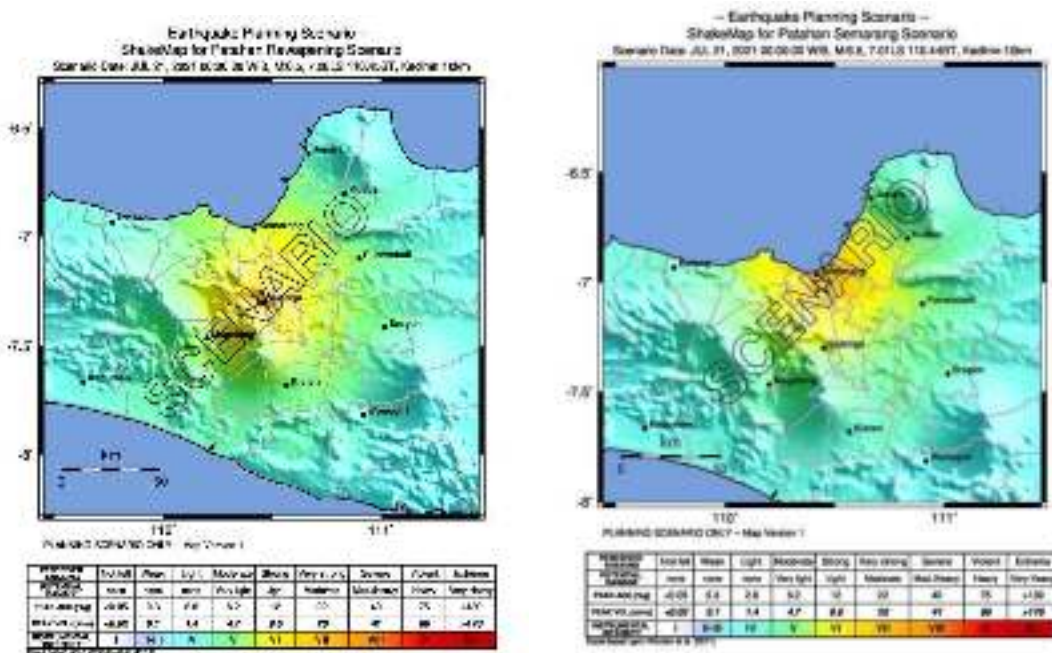
**RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI AKIBAT SESAR
KENDENG**

1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

1.1.1 Karakteristik Ancaman Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng

Sesar Kendeng yang merupakan jenis sesar naik, sesar ini merupakan satu dari ratusan sumber gempa baru yang ditambahkan dalam revisi peta gempa bumi nasional, apabila terjadi pergerakan pada sesar kendeng dapat dapat memicu gempa dengan magnitudo 6,5-7,0. Kondisi tutupan lahan di sepanjang jalur sesar dan sekitarnya mayoritas merupakan kawasan terbangun dengan guna lahan pemukiman, sehingga hal ini menimbulkan resiko yang tinggi jika terjadi gempa di sekitar jalur sesar. Sesar Kendeng yang merupakan jenis sesar naik melewati Jawa Tengah terbagi menjadi 7 segmen yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Rawapening, dan Purwodadi dengan total panjang 152 km. Lebih lanjut, rencana kontingensi ini akan terkait Sesar Kendeng Segmen Semarang yang memiliki panjang 34 km dan memberikan risiko ke 12 kabupaten/kota sebagaimana lebih detail dalam Tabel 1.

Menurut para peneliti kegempaan sesar Kendeng dapat berpotensi menimbulkan gempa dengan Magnitudo Maksimum M 6,5, skala intensitas maksimum VII di wilayah Kota/Kabupaten yang dilalui oleh sesar tersebut. Pergerakan sesar tersebut dapat memberikan dampak yang cukup parah bagi wilayah-wilayah lain yg berada di sekitar sesar, ditambah lagi dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan tentunya akan menambah dampak kerusakan bagi berbagai aspek kehidupan.



Gambar 1. Skenario gempa sesar kendeng segmen rawa pening (kiri), Skenario gempa sesar kendeng segmen semarang (Sumber:BMKG)

Kekhawatiran terpicunya gempa bumi besar karena keberadaan Sesar Kendeng sudah mulai diperhitungkan oleh para ahli. Selain sebagai media rambat gelombang gempabumi dari sesar-sesar aktif lainnya di Jawa Tengah, Sesar Kendeng dapat juga menjadi sumber gempabumi itu sendiri. Gempabumi tidak dapat ditentukan kapan terjadinya, maka usaha terbaik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri jika gempa itu benar-benar datang. Itulah usaha mitigasi bencana, yaitu usaha untuk meminimalkan risiko atau akibat dari bencana.

1.1.2. Karakteristik Ancaman COVID-19

Di Indonesia wabah COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 28 Agustus 2021 sudah menyebar ke 34 provinsi dengan total kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi sudah mencapai 4.066.404 orang, kasus kematian 131.372 orang dan 3.707.850 orang dinyatakan sembuh. Sampai dengan tanggal 7 September 2021, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 474.991 jiwa, kasus sembuh 436.754 jiwa, dan meninggal

31.326 jiwa. Di 12 kabupaten/kota yang berpotensi terdampak ancaman gempa bumi, memiliki dominasi tingkat risiko COVID-19 pada tingkat Sedang, dengan Kabupaten Kudus dan Grobogan dengan tingkat Rendah, sebagaimana dijelaskan secara detail dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Risiko 12 Kabupaten/Kota atas COVID-19 dan Gempa Sesar Kendeng-Semarang

No	Kabupaten	Tingkat Risiko	
		COVID-19 (menurut covid19.go.id)	Gempa (Skala MMI)
1	Kota Semarang	Sedang	VII
2	Kabupaten Semarang	Sedang	VI-VII



Gambar 2. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <https://corona.jatengprov.go.id/data>

1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempa bumi bersumber di darat Sesar Kendeng, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat

bencana.

Skenario kejadian yang digunakan yaitu gempa dengan magnitudo 6.5 SR. Lokasi gempa atau episentrum terletak di koordinat 7.01° LS, 110.44° BT (Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang), berada pada kedalaman 10 Kilometer dan Guncangan gempa juga terjadi koordinat 7.28° Lintang Selatan, 110.45° Bujur Timur di Daerah Rawa Pening kedalaman 10 Kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik Baik nilai magnitudo yang dipakai sebagai maksimum nilai magnitudo yang mungkin terjadi maupun lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Yang membedakan adalah dimasukkannya nilai amplifikasi (PGA) untuk memberikan pendekatan besarnya nilai intensitas getaran di permukaan serta sejauh mana dampak guncangan gempa tersebut terhadap wilayah yang berada di sekitar pusat gempa. Intensitas getaran di batuan dasar (SB) mengalami amplifikasi (penguatan) ketika melewati lapisan dangkal dengan nilai penguatan yang berbeda tergantung jenis lapisan yang dilewatinya. Dampak getaran di permukaan ketika melewati lapisan dangkal yang lunak akan lebih kuat jika dibandingkan dengan dampak bila melewati lapisan dangkal yang keras.

Skenario detail kejadian gempabumi terjadi pada hari HH siang, pukul 13.00 WIB, pusat gempa berada di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, tepatnya pada koordinat 7.01° Lintang Selatan, 110.44° Bujur Timur di kedalaman 10 Kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik. Guncangan gempa juga terjadi koordinat 7.28° Lintang Selatan, 110.45° Bujur Timur di Daerah Rawa Pening kedalaman 10 Kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik, Kabupaten Semarang Guncangan gempa terjadi di sepanjang jalur sesar arah barat-timur. Gempa susulan terjadi di sekitar episentrum gempa dan di sepanjang jalur sesar. Ancaman sekunder yang dapat terjadi sesaat setelah gempa dapat berupa longsor dan likuifaksi. Longsor dapat terjadi di Kabupaten Semarang di sekitar radius gempa yang berada di sesar kendeng yang berada di daerah rawa pening sedangkan di Kota Semarang di area

rentan longsor dan dekat/ dilalui jalur sesar (dapat dilihat wilayah rentan longsor pada peta) 15 menit - 30 menit setelah terjadinya gempa utama.

Berikut Tabel 2 yang merupakan pokok-pokok ringkasan Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi dampak dari bencana yang terjadi. Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi.

Tabel 2. Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Asumsi Waktu Kejadian	Hari/Tanggal : XXX / Waktu/Jam : 13.00 WIB
Lokasi, Durasi, Intensitas, Ancaman Lanjutan, dll	Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan daerah Rawa Pening, Kabupaten Semarang Kordinat : 7.01° LS, 110.44° BT dan 7.28° LS, 110.45° BT Kedalaman : 10 km Durasi : 60 detik. VIII Skala MMI : 6.5 SR Ancaman Lanjutan : Longsor, Luapan Rawapening, Likuifaksi
Cakupan Wilayah Terdampak	Lihat Tabel 1
Bahaya Primer	Runtuhan Bangunan
Bahaya Sekunder	Tanah Longsor, Luapan Rawapening, Likuifaksi, <i>Banjir Rob</i> dan COVID-19

Tabel 3. Asumsi Dampak Kejadian

Asumsi Dampak Kejadian	
ASPEK KEPENDUDUKAN	Total penduduk terpapar di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang berdasarkan asumsi dampak maksimum sesar Kendeng adalah ±2.734.135 (berdasarkan KRB Prov. Jawa Tengah) penduduk di 2 Kota Semarang dan Kabupaten Semarang) dengan rincian sebagai berikut:
	<p>Kota Semarang memiliki kerentanan sosial yang sangat tinggi mengingat kepadatan Kawasan terbangun yg tersebar di semua wilayah administrasi memberikan dampak signifikan pada aspek kependudukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah penduduk terpapar: 1.704.627 jiwa (jumlah penduduk di 16 Kecamatan) <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah meninggal (2%): 34.092 jiwa ○ Jumlah penduduk belum ditemukan (18%): 306.832 ○ Luka berat (10%) dari penduduk luka-luka: 170.460 ○ Luka sedang (30%) dari penduduk luka-luka: 511.388 ○ Luka ringan (40%) dari penduduk luka-luka: 1.022.776 ● Jumlah penduduk yang mengungsi (40%): 681.874 ● Terinfeksi COVID-19 (2%) : 34.092 <p>Wisatawan terdampak: 9.074 jiwa, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wisatawan asing: 18 jiwa ● Wisatawan domestik: 9.056 Jiwa
	<p>Kabupaten Semarang</p> <p>Jumlah penduduk total (delapan Kecamatan) seluruh daerah terdampak sebanyak 387.120 jiwa</p> <p>Jumlah meninggal ± 1% (dari jumlah total delapan kecamatan) dari jumlah penduduk yaitu sekitar 3.871 jiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah penduduk belum ditemukan (1%): 3.871 ● Jumlah penduduk yang mengungsi (40%): 154.848 jiwa ● Jumlah penduduk luka-luka (20%): 77.424 jiwa <ul style="list-style-type: none"> ○ Luka berat (10%) dari penduduk luka-luka:

	<p>7.742 jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Luka sedang (25%) dari penduduk luka-luka: 19.310 jiwa ○ Luka ringan (65%) dari penduduk luka-luka: 50.207 jiwa <ul style="list-style-type: none"> ● Risiko terinfeksi COVID-19 (1%):1.294 <p>Wisatawan terdampak: 1.249 jiwa, terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wisatawan asing: 1 jiwa ● Wisatawan domestik: 1.248 Jiwa
<p>ASPEK FISIK</p>	<p>Kota Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bangunan terdampak yang rusak 40% : 170.462 bangunan <ul style="list-style-type: none"> ○ Rusak berat/roboh (24%): 102.277 ○ Rusak ringan (76%): 323.879 ● Jalan terdampak <ul style="list-style-type: none"> ○ Jalan Nasional: <ul style="list-style-type: none"> ■ Jalan Walisongo, terdampak ± 4,8 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Siliwangi,terdampak ± 2,6 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Tol Jatingaleh-Gayamsari terdampak ± 3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Tol Kaligawe Gayamsari, terdampak ± 1 Km, rusak berat ± 0,3 Km ● Jalan Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jalan Majapahit, terdampak ± 3,3 Km, rusak berat ± 1 Km ● Jalan Kota: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kolektor : <ul style="list-style-type: none"> ■ Jl Gunung Kelir Raya, terdampak ± 0,5 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Kyai Gilang, terdampak ±3,7 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Rowosari Atas, terdampak ± 5,5 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Cisadane, terdampak ± 1,8 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Laut Mangunharjo, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Karanganyar, terdampak ± 1,9

	<p>Km, rusak berat ± 0,5 Km</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jl Gunungkelir Raya, terdampak ± 0,5 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Tapak Raya, terdampak ± 0,7 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Tugurejo Raya, terdampak ± 0,3 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Stasiun Jrasah, terdampak ± 1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Galungan Raya, terdampak ± 2,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Hanoman Raya, terdampak ± 0,6 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Padma Boulevard, terdampak ± 0,6 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Jembawan XI terdampak ± 3,5 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Jembawan Raya, terdampak ± 1,3 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Abdul Rahman Saleh, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Puspogiwang, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Boong Salaman, terdampak ± 1,0 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Basudewa, terdampak ± 0,7 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Sudoyono, terdampak ± 4,4 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pahlawan, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl MT Haryono, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Kyai Saleh, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Sompok, terdampak ± 1,7 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Lamper Tengah, terdampak ± 1,4 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Fatmawati Raya, terdampak ± 3,4 Km, rusak berat ± 1 Km
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jl Tentara Pelajar, terdampak ± 2,3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Kedungmundu Raya, terdampak ± 3,4 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pamularsih, terdampak ± 2,0 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl WR Supratman, terdampak ± 1,5 Km, rusak berat ± 0,5 Km ○ Arteri : <ul style="list-style-type: none"> ■ Jl Jend. Soedirman, terdampak ± 4,3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pandanaran, terdampak ± 3,9 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Urip Sumoharjo, terdampak ± 1,3 Km, rusak berat ± 0,5 Km ● Total terdampak ± 73 km, rusak berat ± 33,4km ○ Jembatan terdampak: 1 buah jembatan pada jalan nasional, 6 jembatan di jalan provinsi dan 10 jembatan di jalan kabupaten/kota. Jembatan putus: 2 buah jembatan sepanjang Jl. Siliwangi rusak berat. ○ Perkantoran Bisnis di wilayah Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah (Kawasan Simpang Lima, Kawasan Jl Pahlawan, Pandanaran, Jl A Yani, Jl MT Haryono Peterongan, Jl Siliwangi). ○ Perkantoran Pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kantor Dinas Pemkot dan Pemprov : 160 Unit di semua Kecamatan Kota Semarang ■ Kantor BUMN/BUMD 6 Unit ■ Kantor Kecamatan: 16 Unit ■ Kantor Desa/Kelurahan: 177 Unit tersebar di semua Kecamatan Kota Semarang ■ Instansi Militer, Penerbat (Penerbangan Angkatan Darat), Polrestabes Semarang, Kantor PomDam.
--	---

- Fasilitas Satuan Pendidikan
 - Perguruan Tinggi: 59 Unit
 - Sekolah Menengah Pertama :139 Unit
 - Sekolah Menengah Atas : 124 Unit
 - Sekolah Dasar/MI : 142 Unit
- Fasilitas Kesehatan
 - Rumah Sakit terdampak rusak parah 13 unit
 - Puskesmas terdampak kerusakan parah 14 Unit di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan. Puskesmas terdampak kerusakan sedang 9 Unit di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari. Puskesmas terdampak kerusakan ringan 19 Unit di Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara.
 -
- Tempat ibadah terdampak ± 980 Unit di Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Mranggen.
- Tempat Wisata terdampak :

Semarang Zoo, Taman Lele, (Kecamatan Ngaliyan), Sam Poo Kong, Pantai Marina & PRPP, Museu, Ronggowarsito (Kecamatan Semarang Barat), Lawang Sewu,(Kecamatan Semarang Tengah), Pusat Jajanan Pandanaran, Kampung Pelangi, Taman Indonesia Kaya, Simpang Lima(Kecamatan Selatan), Masjid Agung Jawa Tengah(Kecamatan

Gayamasari), Museum Mandala Bhakti, (Kecamatan Semarang Selatan), Candi Tugurejo, (Kecamatan Tugu)

Hotel terdampak :

5 Unit (Kecamatan Semarang Barat)

22 Unit (Kecamatan Semarang Tengah)

3 Unit (Semarang Selatan)

± 20 unit (Semarang Tengah)

- Fasilitas PLN/Gardu Induk yang terganggu: GI Krapyak (150 kV), GI Pandean Lamper (150 kV), GI Kalisari (150 kV), GI Randugarut (150 kV), GI Simpang Lima (150 kV).
- Gangguan distribusi PDAM, sumber air baku di permukaan, daerah 13 Kecamatan di Kota Semarang, terutama jaringan pipa PDAM yang berada di utara jalur patahan Kendeng Semarang, pakar ± 51.241.168 lt/detik dan sumber air tanah dari Kawasan Gampangan, Kali Pancur, Ngaliyan, Setum terhenti. Pasokan dari Jaringan Pipa PDAM yang sebagian besar berasal dari selatan Kota Semarang sekitar ±25.000.000 lt/detik terhenti. Instalasi Pengolahan Air Baku di Kota Semarang berfungsi hanya 50% atau hanya sebesar 12.500.000 lt/detik karena instalasi di sepanjang sesar kendeng Kota Semarang terputus dan mengganggu distribusi air ke Kota Semarang bagian utara sesar kendeng segmen Kota Semarang.
- Gangguan distribusi pipa gas di Karangayu, Kecamatan Semarang Barat.
- Gangguan distribusi pipa BBM di Kawasan Bandara A Yani, Kecamatan Semarang Barat, dan gangguan pada penampung BBM di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur.
- Industri terdampak di Kawasan :
 1. Kawasan Industri Wijayakusuma (Kecamatan tugu) (Makanan, garmen,

	<p>elektronik, dll 100 jenis izin industri)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Industri Candi (Kecamatan Ngaliyan) Banyak jenis industri 3. Sentra Industri Ikan Asap (Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasar terdampak : <p>Pasar Mangkang, Pasar Jrasah, (Kecamatan Ngaliyan). Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Mrican, (Kecamatan Semarang Selatan). Pasar Karangayu (Kecamatan Semarang Barat). Pasar Johar Lama, Sentra Perdagangan MT Haryono (Semarang Tengah). Pasar Pedurungan (Kecamatan Pedurungan). Pasar Kokroso (Kecamatan Semarang Utara). Pasar Gayamsari (Kecamatan Garamsari). Sentra Perdagangan Jurnatan (Kecamatan Semarang Tengah)</p> ● Utilitas transportasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kota Semarang <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Terminal: Terminal Bus Mangkang (Kecamatan Tugu) ■ 4 Stasiun: Stasiun Mangkang, Stasiun Jrasah (Kecamatan Tugu), Stasiun Semarang Poncol, Semarang Tawang (Semarang Utara) ■ 1 Bandara Ahmad Yani (Semarang Utara) berada di utara sesar sejauh 4 km. ■ Rel kereta api sepanjang ±16.41 km berada di atas sesar. ■ 1 Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang Utara)
	<p>Kabupaten Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bangunan terdampak yang rusak 98.000. bangunan <ul style="list-style-type: none"> ○ Rusak berat/roboh (20%): 19.600 ○ Rusak ringan (80%): 78.400 ● Jalan Nasional terdampak terdampak <ul style="list-style-type: none"> ○ Jl. Semarang-Bawen (4,2km) ○ Jl. Bawen- Surakarta (10km)

- Jl. Bawen-Jogja (10,2km)
- Jl. Tol Semarang-Surakarta (8,17km)
- Jalan provinsi:
 - Jl. Salatiga-Kedungjati (21,2km)
- Jalan kabupaten & Jalan lokal:
 - Ruas Klepu-Pringapus (2km)
 - Ruas Klepu-Kemasan (2,4km)
 - Ruas Pringapus-Kemasan (1,05km)
 - Ruas Kemas-Mandiro (6,3km)
 - Ruas Kemas-Jandirejo (6,35km)
 - Ruas Candirejo-Borangan (9,75km)
 - Ruas Candirejo- Banger (4,9km)
 - Ruas Lemahireng-Pringapus (5,65km)
 - Ruas Lemahireng-Kadangan (6,8km)
 - Ruas Pringapus-polosiri (7,52km)
 - Ruas Pringapus Ngajaran (5,85km)
 - Ruas Harjosari-Doplang (3,9km)
 - Ruas Doplang-Milir (4,8km)
 - Ruas Rengas-Bawen (2,35km)
 - Ruas Bawen-polosiri (4,1km)
 - Ruas Tuntang-Karanglo (7,55km)
 - Ruas Karanglo-Ngajaran(11,130km)
 - Ruas Jelok-polosiri (3,1km)
 - Ruas Biringin-Kalikurmo (10,4km)
 - Ruas Bringin-Banding (5,2km)
 - Ruas Gogodalem-Kalikurmo (8,15km)
 - Ruas Jambu Banyu Biru (5,1km)
 - Ruas Telomoyo-Tuntang (4,25km)
 - Ruas Candran (3,75km)
 - Ruas Delik-Pabelan (4,25km)
 - Ruas Tlogo-Karangtengah (4,75km)
 - Ruas Pake-Sendang (3,5km)
 - Ruas Gogodalem-Plumutan(8,1km)
 - Ruas Ujung-ujung - Dadapayam (12,6km)
 - Ruas Senowo-Sendang (4,7km)
 - Ruas Senowo-Dadapayam (5,2km)
 - Ruas Banyubiru-Sepakung (8km)
 - Ruas Banyubiru-Wirogomo (7,4km)
 - Ruas Kebondowo-Sepakung (6,1km)
 - Ruas Banyubiru-Candran (11,5km)
 - Ruas Tegaron-Sepakung (3,5km)
 - Ruas Kauman Lor-Semowo (4,26km)

- Ruas Kauma Kidul-Semowo (4,6km)
- Ruas Bapi-Sukharjo (6,2km)
- Ruas Sero-Tukang (5,5km)
- Ruas Banding-Boro (5,4km)
- Ruas Gamaran-Semowo (2km)
- Ruas Gedangari-Sumogawe (5,4km)
- Ruas Nogosaren-Sepakung (7,4)
- Ruas Suruh-Barukan (4km)
- Ruas Barukan-Sumberejo (3,5km)
- Ruas Suruh-Krandon Lor (4,4km)
- Ruas Suruh-Bonomerto (7,3km)
- Ruas Medayu-Kadungringin (9,2km)
- Ruas Plumbon-Kentang (7,27km)
- Ruas Suruh-Semagu (4,1km)
- Ruas Suruh-Ketanggi (3,85km)
- Ruas Mancar-Dersasari (6,3km)
- Ruas Karangduren-Keboan (4,7km)
- Jl. Lingkar P. Hewan-Ambarawa (0,5Km)
- Jl. Yos Sudarso (0,7km)
- Jl. Dopleng (0,6km)
- Jl. Dr. Sutomo (1,3km)
- Jl. Brigjend Sudiarto (0,5km)
- Jl. Sanggrahan (1,25km)
- Jl. Slamet Riyadi (0,6km)
- Jl. Pemuda (0,4km)
- Jl. Naryo Admajan (0,35km)
- Jl. Kartini (3,8km)
- Jl. Lanjang (0,8km)
- Jl. Tentara Pelajar (1,1)
- Jl. Bougenvile I (0,65km)
- Jl. Bougenvile II (0,60km)
- Jl. Bougenvile III (0,65km)
- Jl. Musium Kereta Api (0,75km)
- Jl. Anggrek (0,8km)
- Jl. Tegalrejo (0,5km)
- Jl. Kepatihan (2,7km)
- Jl. Tanjung Sari (0,2km)
- Jl. Karanganyar I, II (1,1km)
- Jl. Karanganyar-Tambakboyo (4,7km)
- Jl. RSUD-Bejaten (0,3km)
- Jl. Pasar Lanang (0,4km)
- Jl. Tambakboyo-Kupang (0,3km)

- Jl. Bawen II (0,75km)
- Jl. Bawen III (0,35)
- Jl. Bawen IV (0,9km)
- Jl. Bawen V (0,4km)
- Jl. Bawen-Doplang (1,1km)
- Jl. Doplang II (0,4km)
- Jl. Doplang I (1,05km)
- Jl. Baran III (0,8km)
- Jl. Baran IV (0,5km)
- Jl. Baran I (0,15km)
- Jl. Jetis-Kenteng (1,25km)
- Jl. Kenteng I (0,2km)
- Jl. Gondoriyo-Kebondalem (2,85km)
- Jl. Nias (0,65km)
- Jl. Lingkar Wisata Bandungan (1km)
- Jembatan terdampak: 10 buah jembatan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- Perkantoran Bisnis:± 120 unit bangunan yang terdampak di delapan kecamatan dimana perusahaan terdampak paling besar di daerah pringapus dan bawen.
- Perkantoran Pemerintahan:
 - Kecamatan: 8 Unit, di Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
 - Desa/Kelurahan:16 Unit di Kecamatan Tuntang, 10 Unit di Kecamatan Ambarawa, 8 Unit Kecamatan Bawen, 17 unit di kecamatan Pabelan, 10 unit di kecamatan Banyubiru, 18 unit di Kecamatan Suruh, 16 unit di Kecamatan Bringi, 8 unit di Kecamatan Pringapu

Fasilitas Satuan Pendidikan

- Sekolah Menengah (SMP & SMA dan setingkatnya): 5 unit di kecamatan Tuntang, 5 unit di Kecamatan Bawen,21 unit di Kecamatan Ambarawa, 7 unit di Kecamatan Pabelan, 7 Unit di Kecamatan Banyubiru,11 di Kecamatan Suruh, 7 di Kecamatan Bringin dan 5 di Kecamatan Pringapus

- Sekolah Dasar (dan setingkatnya): 27 unit di kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen terdapat 25 unit, Kecamatan Ambarawa terdapat 29 unit. 21 unit di Kecamatan Pabelan, 23 Unit di Kecamatan Banyubiru, 38 di Kecamatan Suruh, 26 di Kecamatan Bringin dan 25 di Kecamatan Pringapus

Fasilitas Kesehatan (dinkes pak wahyono)

- Rumah Sakit 2 unit, terdampak rusak parah, di Kecamatan Ambarawa
- Klinik terdampak ± 35 unit, rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Puskesmas terdampak ± 11 unit, rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Apotek terdampak ± 40 unit, rusak berat di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Posyandu terdampak ± 638 unit, rusak berat di rusak berat - rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Rumah Bersalin & Praktek Bidan terdampak ± 155 unit unit, rusak berat rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Tempat ibadah terdampak ± 1043, rusak ringan-berat di delapan, Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
- Tempat Wisata terdampak, terdiri dari Tlogo resort dan banyumili , saloka, Goa Maria Rosa Mistika di (Kecamatan Tuntang), Banaran cafe, eling bening, Dusun semilir, PT coca cola, Agro wisata

Pesanggrahan Watu di (Kecamatan Bawen), museum kereta api ambarawa melayani wisatawan Kereta Api mengingat secara fisik dua stasiun kereta di Kabupaten Semarang (Stasiun Tuntang dan Stasiun Ambarawa) memotong jalur sesar dan rel kereta api sepanjang ±.10 km berada di atas sesar, kampung rawa ambarawa, wisata alam pasekan, museum palagan ambarawa (Kecamatan Ambarawa), bukit cinta, pemandian muncul, curug kembar bolodewo, lereng kelir, taman kelinci, rekreasi langen tirto, di (Kecamatan Banyubiru),

- Fasilitas PLN/Gardu Induk yang terganggu: GI Jelok Tuntang yang berada di kecamatan Tuntang serta PLTA Jelok Tuntang
- Gangguan distribusi PDAM Sarana Tirta Ungaran di Kecamatan Tuntang, sumber air baku di permukaan yang berada di Sungai tuntang mengakibatkan gangguan distribusi di sebagian Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bergas dan Kecamatan Bawen, PDAM Cabang Ambarawa, PDAM Cabang Suruh
- Industri terdampak di delapan Kecamatan terdiri dari Industri Tekstil dan Garmen, Industri minuman (coca- cola), industri Manufaktur di Kecamatan Bawen, dan Industri Tekstil dan Garmen, Industri bahan kimia di Kecamatan Pringapus
- Pasar terdampak 15 lokasi pasar, Pasar Lopait, di Kecamatan Tuntang, Pasar Projo, Pasar Lanang, Pasar Surabaya, Pasar Gamblok di Kecamatan Ambarawa dan Pasar Hewan, Pasar Harjosari, di Kecamatan Bawen, Pasar Pebelan, Pasar Padaan di Kecamatan Pabelan, Pasar Banyu Biru, Pasar Kebondowo di Kecamatan Banyubiru, Pasar Bringin di kecamatan Bringin, Pasar Pringapus di Kecamatan Pringapus, Pasar Suruh, Pasar Plumbon di kecamatan Suruh
- Utilitas transportasi:
 - **Kabupaten Semarang**
 - 3 Terminal: Terminal Bawen dan Terminal Ambarawa, Terminal Suruh
 - 2 Stasiun: Stasiun Tuntang dan

	<p>Stasiun Ambarawa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Angkutan umum mempunyai trayek dengan tujuan 8 kecamatan terdapat 29 yang terganggu dari 45 trayek yang dilayani di Kabupaten Semarang ■ 40 pol/Garasi angkutan umum yang rusak yang berjumlah 14pol/Garasi dari 59 pol/Garasi ■ Rel kereta api sepanjang ±.10 km berada di atas sesar.
<p>ASPEK EKONOMI</p>	<p>Kegiatan Ekonomi Terganggu dan Cenderung Akan Lumpuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kota Semarang, kegiatan ekonomi akan lumpuh di Kecamatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tugu, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, Gayamsari, Tembalang, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Timur. ● Kabupaten Semarang, kegiatan ekonomi akan lumpuh di Kecamatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuntang, Bawen, Pabelan, Banyubiru, Bringin, Pringapus, Ambarawa, Suruh <p>Kehilangan dari Sektor Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kota Semarang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasar Mangkang ○ Pasar Jrasah ○ Pasar Bulu ○ Pasar Karangayu ○ Pasar Modern Mall (Matahari, Citraland, Informa) ○ Pasar Johar Lama ○ Pasar Peterongan ○ Java Mall ○ Sentra perdagangan MT Haryono ○ Pasar Mrican ○ Pasar Kapling ○ Pasar Meteseh ○ Pasar Pedurungan

- Pasar Kokroso
- Pasar Gayamsari
- Sentra perdagangan Jurnatan

- **Kabupaten Semarang:**

- Kecamatan Tuntang: 1
- Kecamatan Ambarawa: 4
- Kecamatan Bawen: 2
- Kecamatan Pabelan: 2
- Kecamatan Banyubiru: 2
- Kecamatan Bringin: 1
- Kecamatan Pringapus; 1
- Kecamatan Suruh:2
- pasar yang terhenti operasionalnya, Pasar Lopait, di Kecamatan Tuntang, Pasar Projo, Pasar Lanang, Pasar Surabaya, Pasar Gamblok di Kecamatan Ambarawa dan Pasar Hewan, Pasar Harjosari, di Kecamatan Bawen, Pasar Pebelan, Pasar Padaan di Kecamatan Pabelan, Pasar Banyubiru, Pasar Kebondowo di Kecamatan Banyubiru, Pasar Bringin di kecamatan Bringin, Pasar Pringapus di Kecamatan Pringapus, Pasar Suruh, Pasar Plumbon di kecamatan Suruh

Kehilangan dari Sektor Peternakan dan Perikanan

- **Kota Semarang**

1. Tambak (Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Genuk)
2. Peternakan Ayam Petelur (Kecamatan Semarang Utara)

- **Kabupaten Semarang**

- Karamba apung (rawa pening)
- Ternak Warga terganggu berupa (ayam, Kambing, sapi Dll)

Kehilangan dari Sektor Pertanian dan Perkebunan

- **Kota Semarang**

Tidak terdampak

- **Kabupaten Semarang**

Tidak terdampak

Kehilangan dari Sektor Perindustrian

- **Kota Semarang**

1. Kawasan Industri Wijayakusuma (Kecamatan tugu) (Makanan, garmen, elektronik, dll 100 jenis izin industri)
2. Kawasan Industri Candi (Kecamatan Ngaliyan) Banyak jenis industri
3. Sentra Industri Ikan Asap (Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara)

- **Kabupaten Semarang**

1. Industri Tekstil dan Garmen, Industri minuman (coca- cola), industri Manufaktur di Kecamatan Bawen
2. Industri Tekstil dan Garmen, Industri bahan kimia di Kecamatan Pringapus

Kehilangan dari Sektor Pariwisata

- **Kota Semarang**

Selain banyaknya bangunan hotel yang roboh, andalan pariwisata di Kota Semarang adalah wisata kuliner dan wisata belanja. Sektor-sektor tersebut pasca bencana tentu saja akan terhenti. Hampir semua bahan baku kebutuhan sektor pariwisata di suplai dari luar Kota Semarang. Terputusnya jalur transportasi akan menyulitkan suplai bahan baku. Ekonomi Kota Semarang otomatis lumpuh. Sektor pariwisata di Kota Semarang terdampak paling parah karena Kawasan pariwisata di Kota Semarang terletak 90% di sekitar wilayah sesar Kendeng.

- **Kabupaten Semarang**

Banyaknya wisata yang bertajuk alam serta beberapa bangunan, akses jalan serta penginapan yang mengalami kerusakan, sehingga otomatis sektor pariwisata terhenti untuk sementara, akses keluar masuk bahan baku kebutuhan sektor pariwisata yang disuplai dari luar kabupaten Semarang. Terputusnya jalur transportasi akan menyulitkan suplai bahan baku, sedangkan bahan baku kebutuhan sektor pariwisata yang disuplai

	<p>dari dalam Kabupaten Semarang mengalami kerusakan yang diakibatkan gempa bumi, Pariwisata Kabupaten Semarang otomatis terhenti sementara.</p> <p>Kehilangan dari Sektor Transportasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kota Semarang, kehilangan pemasukan dari sektor transportasi umum pada BRT Trans Semarang, dan Kereta Api mengingat secara fisik empat stasiun kereta di Kota Semarang (Stasiun Mangkang, Stasiun Jrahah, Stasiun Semarang Poncol, dan Semarang Tawang) berada di jalur sesar dan rel kereta api sepanjang ±.16.41 km berada di atas sesar. Bandara Ahmad Yani berada di utara sesar sejauh 4 km akan terdampak pula. ● Kabupaten Semarang, kehilangan pemasukan dari sektor transportasi umum, Kopja Trans Jawa Tengah, dikarenakan beberapa jalan dan halte BRT mengalami kerusakan yang diakibatkan gempa yang berlokasi di sekitar daerah rawa pening
<p>ASPEK LINGKUNGAN</p>	<p>Air</p> <p>Suplai air baku jauh berkurang (lihat dampak fisik terhadap suplai air baku PDAM), kondisi air bersih di Kab/Kota terdampak akan menjadi keruh. Permasalahan air bersih akan menjadi sumber permasalahan utama ketika terjadi gempa bumi.</p> <p>Tanah/Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dampak terhadap hilangnya/terganggunya lahan untuk perkebunan, pertanian, dan permukiman akan terjadi terutama di wilayah Kabupaten Semarang. Lahan perkebunan kemungkinan akan dijadikan wilayah pengungsi yang berasal baik dari Kabupaten Semarang maupun dari Kota Semarang, mengingat sulitnya mencari lahan terbuka di Kota Semarang. ● Pada wilayah permukiman, terutama permukiman padat, akan terdampak parah dengan hancurnya sarana fasos/fasum seperti rusaknya MCK, saluran drainase, septic tank komunal, TPS sampah bahkan TPA sampah. ● Munculnya berbagai macam wabah penyakit seperti Diare, DBD, Leptospirosis, Typhoid dan

	<p>wabah penyakit lainnya bila permasalahan sanitasi lingkungan tidak segera diatasi</p> <p>Udara Dampak pada kualitas udara (peningkatan debu, asap, kualitas udara menurun akibat tercemar bau dari proses pembusukan) terutama di wilayah-wilayah padat penduduk dan rentan kebakaran</p> <p>Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping luasan hutan di dua kabupaten/kota terdampak sudah sangat kecil karena alih fungsi lahan, dampak susulan gempa berupa longsor di beberapa wilayah rentan akan lebih mengurangi luasan hutan yang ada, sehingga memperparah kondisi ekosistem. Kemungkinan besar, hewan-hewan seperti monyet, babi hutan, binatang melata akan bermigrasi ke wilayah lain atau bahkan mungkin akan bermigrasi ke wilayah pengungsian.
<p>ASPEK LAYANAN PEMERINTAHAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Semarang, layanan pemerintahan mulai dari level kelurahan dan kecamatan akan terfokus pada proses penanganan bencana hingga masa transisi rehab-rekon kurang lebih sekitar 14 hari sampai dengan 1 bulan. Layanan pemerintahan di tingkat Kota akan terhambat relatif lebih lama terutama pada bangunan2 pemerintahan yang roboh dan belum menggunakan sistem digital untuk backup data arsip • Kabupaten Semarang, kurang lebih sama dengan Kota Semarang, untuk layanan tingkat Kabupaten kemungkinan terganggu karena dampak yg cukup parah terkait jarak dari pusat gempa, namun jika dilihat dari banyaknya Kawasan terbuka di sekitar lokasi pusat pemerintahan, akan memudahkan dalam pembangunan kantor-kantor pelayanan pemerintahan darurat di sekitar lokasi pemerintahan eksisting <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelayanan Kesehatan dan pendidikan terganggu diakibatkan kejadian gempa yang mengharuskan adanya kantor-kantor darurat yang dibentuk di area yang aman, sehingga pelayanan dapat b

2.1 Tugas Pokok

Organisasi (Komando) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Semarang, SKPDB Kota Semarang dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

SKPDB Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi pendukung dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat - Transisi Darurat ke pemulihan) selama 30 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana serta meminimalisir dampak dan kerugian ekonomi akibat bencana.

3.1 Konsep Operasi & Rencana Tindakan

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kota Semarang dan SKPDB Kabupaten Semarang, dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan dasar warga terdampak bencana Gempabumi Sesar Kendeng, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi COVID-19, mulai hari "H" jam "J" selama 14 hari, di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Operasi pendukung dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana

Tabel 3. Konsep Operasi Penanganan Darurat Gempa Bumi Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah

<p>Fase Tanggap Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan ● Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk pendukung ● Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi Sesar Kendeng Tingkat Provinsi ● Pembentukan Pos Lapangan ● Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ● Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ● Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda. ● Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa kebencanaan ● Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan). ● Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19). ● Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan.
<p>Transisi Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan. ● Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana - prasarana vital.

	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang. • Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat. • Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi. • Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.
--	---

3.2 Fungsi

3.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB Kota Semarang, SKPDB Kabupaten Semarang dalam penanganan darurat bencana gempabumi akibat Sesar Kendeng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem dengan bidang-bidang/fungsi-fungsi spesifik. 5 bidang fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing masing bidang operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

- a) Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.

- b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.
- c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
- d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.

2) Bidang Perencanaan

Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng secara terpadu serta memastikan komando dan komunikasi terkait operasi pelaksanaan darurat bencana.

3) Bidang Operasi

Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana yang secara terpadu secepat mungkin dan tepat.

4) Bidang Logistik

Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.

5) Bidang Administrasi dan Keuangan

- a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana dan memberikan petunjuk terkait keuangan secara keseluruhan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana.
- b) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

3.3 Tugas-Tugas

3.3.1 Provinsi Jawa Tengah

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi mendukung penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (yang) berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas dalam Satgas Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah.

1. Komandan PDB

- Mengaktifkan menjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana tingkat provinsi.
- Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- Melaksanakan pengerahan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga /organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas

penanganan tanggap darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat

2. Wakil Komandan PDB

- Membantu Komandan Tanggap Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
- Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

3. Hubungan Masyarakat

- Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- Memastikan alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.

4. Keselamatan dan Keamanan

- Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Satgas dalam menjalankan tugasnya.
- Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.

5. Perwakilan Lembaga/Instansi

- Bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

6. Sekretariat

- Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Provinsi.
- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Komando Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping.

7. Perencanaan

1) Unit Sumber Daya

- a) Menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).
- b) Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar.

2) Situasi

- a) Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi
- b) Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim, sebagai bahan pertimbangan aksi
- c) Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana gempa yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa
- d) Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak

- e) Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta- peta

8. Operasi/Pos Lapangan

Operasi penanganan kedaruratan bencana gempa bumi akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mengaktivasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB).

Pos ini berfungsi melaksanakan operasi pendukung penanganan darurat bencana. Terdapat 2 (dua) Pos Lapangan PDB Provinsi Jawa Tengah yang diaktivasi untuk mendukung, memperkuat, dan mendampingi SKPDB Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pos Lapangan Kota Semarang, (2) Pos Lapangan Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan prinsip pengutamaan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan kedaruratan bencana, tugas pokok pos lapangan adalah untuk memastikan berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpinpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai (1) tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan, (2) sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait, dan (3) sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, Pos Lapangan PDB Provinsi mengerahkan sumberdaya (deployment) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sektor penanganan sesuai dengan bidang/sektor yang dalam SKPDB Kabupaten/Kota. Bidang/Sektor tersebut adalah:

1) **SAR dan Evakuasi**

- a) Mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan)
- b) Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase)

- c) Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban)
- d) Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah)
- e) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam operasi SAR dan Evakuasi

2) **Kesehatan**

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan kesehatan klinis, serta kesehatan COVID-19), termasuk pelayanan ambulans
- b) Memastikan dan mendukung adanya pemetaan area bencana (bersama RHA/rapid health assessment)
- c) Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan
- d) Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan COVID-19
- e) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan pengobatan, termasuk COVID-19
- f) Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
- g) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.
- h) Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan kesehatan

3) **Pendidikan**

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan
- b) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan
- c) Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak
- d) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat

- e) Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
- f) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam penanganan bidang pendidikan

4) **Pengungsian**

- a) Memastikan dan mendukung *assessment* (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala
- b) Mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang
- c) Mendukung pengelolaan dapur umum
- d) Memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-titik pengungsian)
- e) Memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK
- f) Memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian
- g) Memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan COVID-19
- h) Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan COVID-19
- i) Memastikan dan mendukung fasilitasi isolasi/karantina COVID-19

5) **Air Bersih dan Sanitasi**

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.
- b) Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- c) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.

- d) Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja.

6) **Sarana Prasarana**

- a) Memastikan dan mendukung upaya perbaikan sarana dan prasarana vital di lokasi bencana
- b) Memastikan dan mendukung pengaturan akses transportasi: Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara
- c) Mendukung pembangunan jembatan sementara untuk jembatan rusak
- d) Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda
- e) Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara
- f) Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara
- g) Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara
- h) Memastikan dan mendukung penyiapan genset yang memadai untuk suplai listrik
- i) Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda
- j) Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar
- k) Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
- l) Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung

9. Logistik

1) **Unit Peralatan**

- a) Menyediakan peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase menuju pemulihan.
- b) Menyiapkan tenda posko, pos kesehatan, hunian sementara, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.
- c) Mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian

2) Unit Transportasi

- a) Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi
- b) Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat
- c) Mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi
- d) Mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana
- e) Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.

3) Unit Pergudangan

- a) Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan penyaluran makanan dll, pengendalian.
- b) Membuat tenda pergudangan, membuat suatu manajemen dokumen stok barang masuk dan barang keluar, serta membuat lampiran ketersediaan barang, melakukan koordinasi dan pengendalian.

4) Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi

- a) Merencanakan, mendata, memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi pengungsi.
- b) Memenuhi bantuan pangan dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
- c) Memenuhi bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus.
- d) Membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan.
- e) Melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian.
- f) Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.

5) Unit Kesehatan

- a) Menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.
- b) Mencari kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.
- c) Pendistribusian tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.

6) Hunian dan Bantuan Non-Pangan

- a) Menyiapkan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara.
- b) Memberikan bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas.

10. Administrasi dan Keuangan

- a) Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
- b) Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan

- c) Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
- d) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
- e) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

11. Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB) merupakan perangkat organisasi dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi akibat Sesar Kendeng. Pos Pendukung memiliki fungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tugas-tugas Pos Pendukung PDB bantuan dari dalam negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima;
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB;
- e) Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk;
- f) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

Kegiatan utama Pos Pendukung PDB bantuan dari luar negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;

- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan;
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Melakukan pengelolaan perizinan;
- f) Melakukan pengembalian bantuan;
- g) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- h) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- i) Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional; dan
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.

12. Pos Pendamping

Pos Pendamping merupakan perangkat PDB yang berfungsi memastikan dan menjamin berjalannya operasi pendukung, perkuatan, dan pendampingan strategi dan taktis agar penanganan kedaruratan bencana berjalan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektivitas terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pos Pendamping berperan untuk melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya, pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas

- a) melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota;
- b) melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana;
- c) mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan;
- d) menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
- e) melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan;
- f) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

3.4 Instruksi Koordinasi

3.4.1. Provinsi Jawa Tengah

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng

BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana gempabumi Sesar Kendeng. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa	Jenis Bencana
Bilamana	Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
Dimana	Tempat/lokasi/daerah bencana

Berapa	Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
Penyebab	Penyebab terjadinya bencana
Bagaimana	Upaya yang telah dilakukan

Analisa akibat langsung dari kejadian gempa bumi Sesar Kendeng dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Jawa Tengah menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Provinsi Jawa Tengah atas hasil pengkajian cepat akibat gempabumi Sesar Kendeng.
- b. Pertimbangan dan masukan dari Walikota Semarang dan Bupati Semarang, serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah.
 - i. Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - ii. Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus keputusan mengaktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana gempabumi akibat Sesar Kendeng.
 - iii. Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota merupakan

pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh masing-masing Bupati/Walikota.

3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng.

4.1 Administrasi

4.1.1. Provinsi Jawa Tengah

Pengeralahan/mobilisasi sumberdaya untuk pendudukan penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD Jawa Tengah sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengeralahan sumberdaya Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat provinsi dilihat Lampiran.

Biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah bersumber dari:

1. APBD Provinsi
2. APBN
3. Bantuan lain yang tidak mengikat.

4.2 Logistik

4.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Pengeralahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
3. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
4. Biaya yang timbul akibat pengeralahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pengeralahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana

5.1. Komando

5.1.2. Provinsi Jawa tengah

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah dipimpin Gubernur¹, Wakil Gubernur, dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

¹ *) *Instruksi Presiden Jokowi dalam Rakornas PB 2019 (<https://bnpb.go.id/berita/6-enam-arahan-presiden-joko-widodo-saat-rakornas-pb-2019-di-surabaya-2-febuari-2019>)*

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten/Kota, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota	Lokasi	Koordinat
Kabupaten Semarang	Kantor Bupati Kabupaten Semarang	-7.129224, 110.403900
Kota Semarang	Kantor BPBD Prov Jawa Tengah	-6.969617, 110.422561

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara A.Yani/Pangkalan TNI AD	-6.965887, 110.375869
Pos Pendukung 2	Pelabuhan Tanjung Emas	-6.946997, 110.424246

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 4	Pintu Tol Kalikangkung	-6.987790, 110.316862
Pos Pendukung 5	Pintu Tol Ungaran	-7.138242, 110.419834
Pos Pendukung 6	Pintu Tol Jatingaleh	-7.031308, 110.421172
Pos Pendukung 7	Pintu Tol Gayamsari	-6.999076, 110.451149
Pos Pendukung 8	Stasiun Tawang	-6.964507, 110.427779
Pos Pendukung 9	Stasiun Poncol	-6.973116, 110.414945
Pos Pendukung 10	Terminal Penggaron	-7.017570, 110.493348
Pos Pendukung 11	Pintu Keluar Tol Ungaran	-7.138242, 110.419834
Pos Pendukung 12	Pintu Keluar Tol Bawen	-7.245952, 110.446906
Pos Pendukung 13	Pintu Keluar Tol Tingkir	-7.362319, 110.532681

d. Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional (Pospenas atau Pos BNPB) berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.

5.2. Kendali

1. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

5.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

5.4. *Komunikasi*

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi

- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 024-3519904

c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id

d. Faksimile : 024-3519186

5.5 *Existing Renkon Jawa Tengah*

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando

Tanggap Darurat Bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rencana Operasi

Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.

b. Permintaan Sumberdaya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi.
2. Kepala BPBD Provinsi sesuai dengan lokasi, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.
3. Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana. 5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud

dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD dan atau Departemen Keuangan.

c. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

d. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

1. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
2. Personil Komando, semua sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan PDB.
3. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
4. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
5. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
6. Alat komunikasi dan peralatan komputer.

7. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

e. Pengakhiran

1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Provinsi membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.
 - Pos Komando SKPD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
 - Pos Pendamping berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
 - Pos Pendukung berkedudukan di Posko SKPDB Kabupaten/Kota.
 - Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berkedudukan di tiap Kabupaten/Kota.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

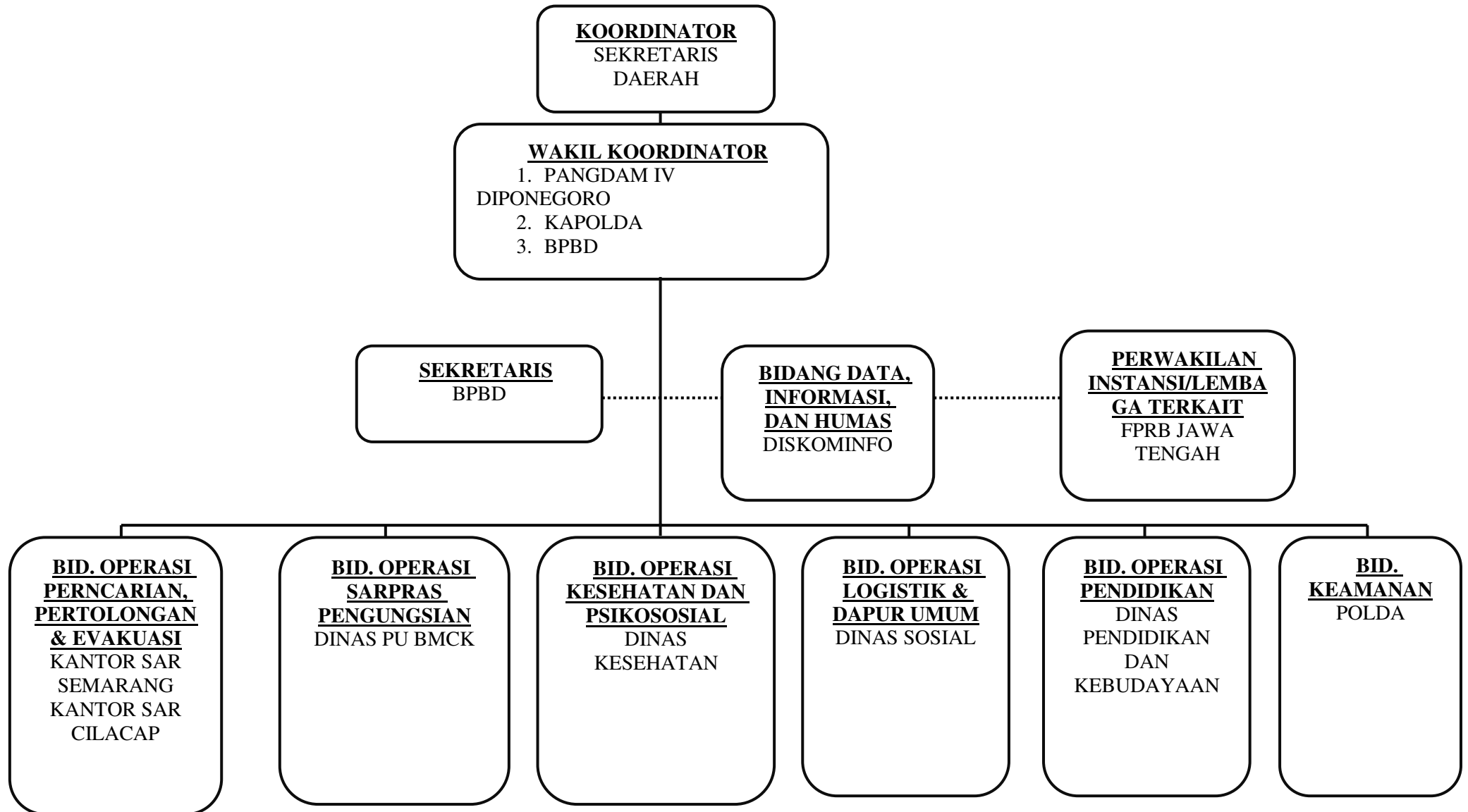


Di Indonesia secara
sukSES dan adil

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

Struktur Organisasi Pos Pendamping

Struktur Organisasi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng di Prov. Jawa Tengah



Susunan Fungsi

SUSUNAN TUGAS - FUNGSI

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan Pos Pendamping dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

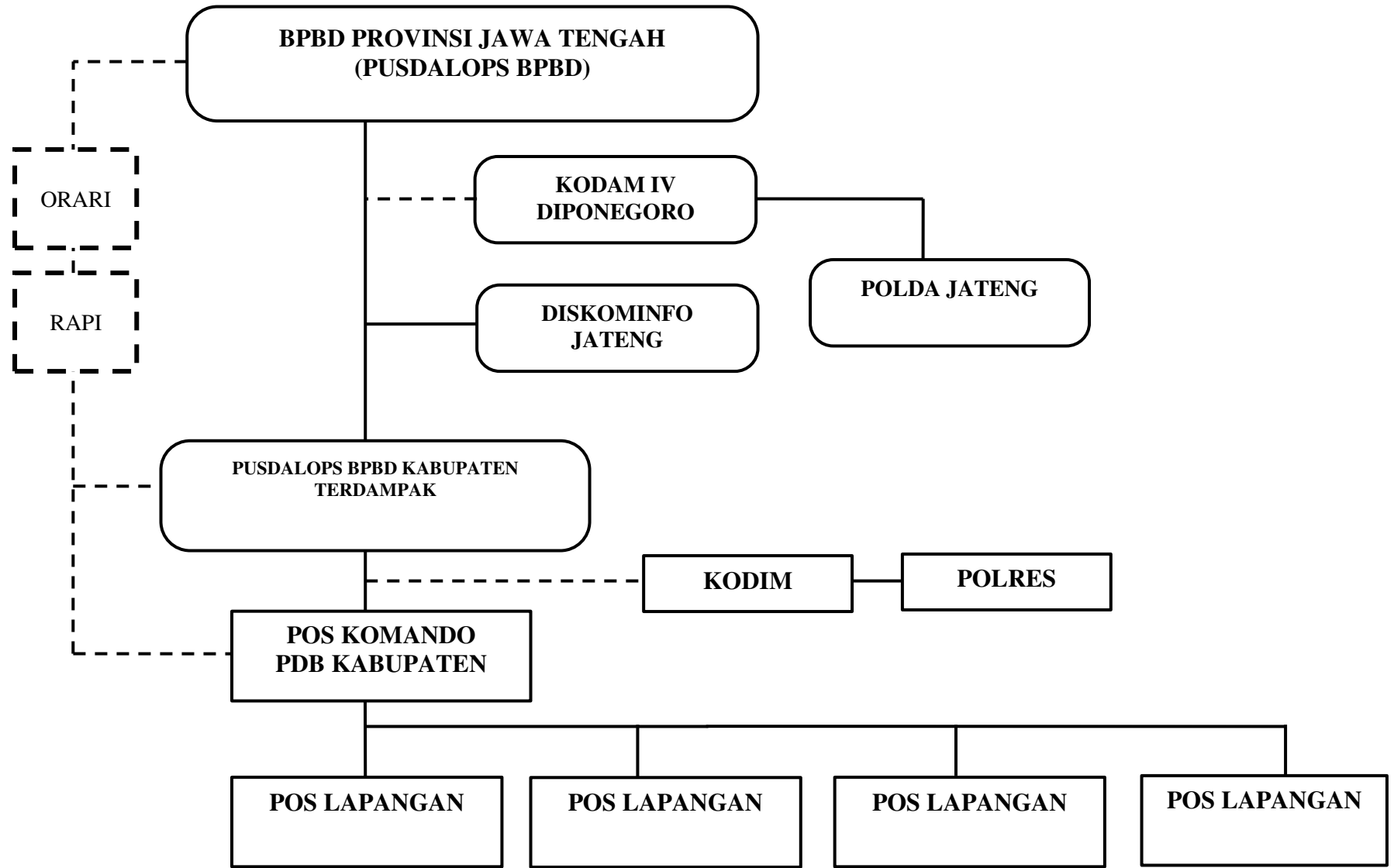
No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
1	Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2.	Wakil Koordinator :	
	a. Pangdam IV Diponegoro b. Kapolda Jawa Tengah c. BPBD Prov. Jawa Tengah	
3	Sekretaris	
	Pemimpin (lead) :	Kabag TU BPBD Prov. Jateng
	Pendukung :	BPBD Prov. Jateng
4.	Bidang Data, Informasi dan Humas	
	Pemimpin (lead) :	Diskominfo Prov. Jateng
	Pendukung :	Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Pusdalops BPBD Prov Jateng, BMKG Jawa Tengah, ORARI, RAPI, Senkom, Dinas ESDM Jawa Tengah
5	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
	Pemimpin (lead) :	Ketua FPRB Jawa Tengah
	Pendukung :	Ketua Forum CSR Ketua FPT PRB Jawa Tengah Ketua LIDI Ketua Organda Ketua MDMC Jawa Tengah Ketua LPBI NU Jawa Tengah Ketua KWARDA Jawa Tengah Ketua PMI Jawa Tengah Ketua BANSER Jawa Tengah Ketua BAZNAS Jawa Tengah

No.	<u>Tugas/ Posisi*</u>	<u>Institusi (Lembaga)</u>
6	Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
	Pemimpin (lead)	Kepala Kantor SAR Semarang
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah PMI Jawa Tengah BPBD Jawa Tengah SARDA Jawa Tengah MDMC Jawa Tengah KWARDA Jawa Tengah Human Initiative
7	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
	Pemimpin (lead)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Biro Kesra Setda Jawa Tengah Dinas Sosial Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah PMI Jawa Tengah
8	Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
	Pemimpin (lead)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Dinas Sosial Jawa Tengah PMI Jawa Tengah

No.	<u>Tugas/ Posisi*</u>	<u>Institusi (Lembaga)</u>
		MDMC Jawa Tengah KWARDA Jawa Tengah Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) Jawa Tengah RSUD milik Provinsi Jawa Tengah RSU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
9	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
	Pemimpin (lead)	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tagana BPBD Jawa Tengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah SARDA Jawa Tengah Forum CSR PMI Jawa Tengah BAZNAS Jawa Tengah Forum Zakat Human Initiative
10	Bidang Operasi Pendidikan	
	Pemimpin (lead)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
	Pendukung	Kanwil Kemenag Jawa Tengah

No.	<u>Tugas/ Posisi*</u>	<u>Institusi (Lembaga)</u>
		Direktorat BINMAS POLDA Jawa Tengah Direktorat LANTAS POLDA Jawa Tengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Disporapar Jawa Tengah PMI Jawa Tengah
11	Bidang Operasi Keamanan	
	Pemimpin (lead)	POLDA Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro SATPOL PP Jawa Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**JARING KOMUNIKASI POS PENDAMPING RENKON
GEMPA BUMI AKIBAT SESAR KENDENG
PROVINSI JAWA TENGAH**



Lampiran-D: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
1	Perencanaan	1. Ahli Manajemen Bencana 2. Ahli Geologi kegempaan 3. Ahli trauma healing dan mental healthy 4. Ahli epidemi 5. Ahli kesehatan 6. Keuangan	1. BPBD Prov Jateng 2. BMKG 3. Satgas Covid Prov Jateng 4. IDI Prov Jateng 5. Bappeda	2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang		
2	Personil	Tim Evakuasi untuk menolong korban terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Personil TRC Prov Jateng 2. Personil TNI 0714 3. Perosnil Polisi 4. Personil SAR Prov Jateng	50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 oarang (pershift)		

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
			5. Personil Basarnas 6. POL PP 7. TAGANA			
		Tim kesehatan dan epidemolgi untuk mengecek kesehatan warga terdampak dan memastikan warga memetahui protokol kesehatan COVID, 19 di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Dokter Anak 2. Dokter Orthopedi 3. Dokter Radiologi 4. Dokter Kejiwaan 5. Dokter kandungan 6. Dokter umum 7. Perawat 8. Bidan 9. Kesehatan Masyarakat 10. Tenaga Laboratoium 11. Tim pendukung lainnya	8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 16 orang (pershift) 8 orang (pershift) 16 orang (pershift) 8 orang (pershift) (silahkan diisi)		

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
		Tim pangan dan logistik untuk memastikan ketersediaan makanan dan air bersih untuk keperluan sanitasi di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Dinas sosial (dapur umum) (untuk 2. Personil PDAM 3. Perosnil DLH 4. Personil 	<p>24 orang (pershift)</p> <p>8 orang</p> <p>10 orang</p>		
		Tim informasi dan komunikasi untuk mengetahui kondisi terkini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil dinas kominfo 2. Personil Rapi 3. Personil Orari 	<p>5 orang</p> <p>10 orang</p> <p>10 orang</p>		
		Tim poskomando penanganan darurat bencana memonitoring serta merencanakan kegiatan tanggap darurat dan transisi darurat	Gabungan BPBDProv Jateng, Polisi, Pol PP	2 orang setiap opd		

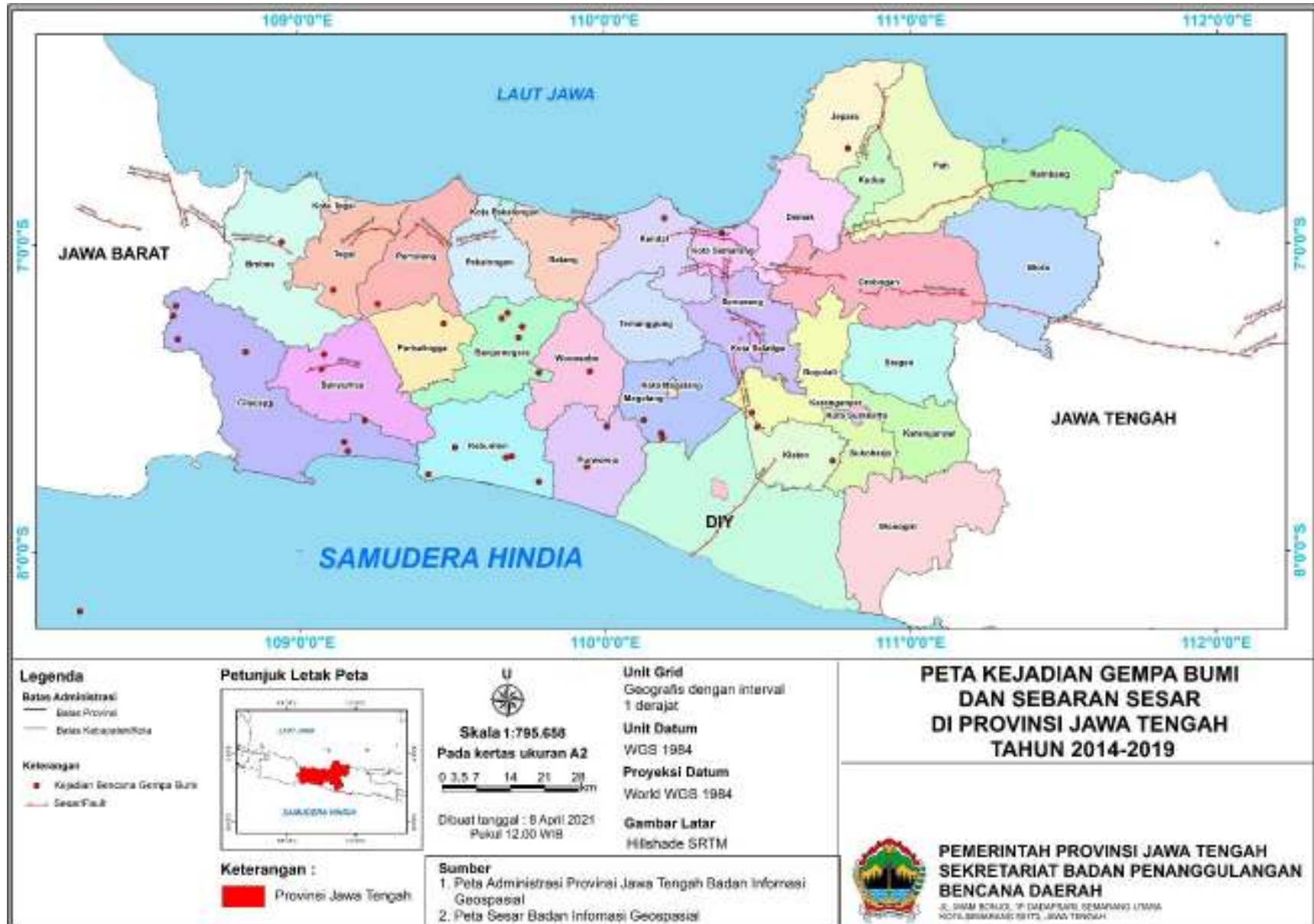
No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
3	Peralatan dan Oprasi	Unit kendaraan dan peralatan untuk evakuasi di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eskavator Dari Dinas PU dan dinas 2. Pickup dari BPBD, Dinas PU 3. Bego dari dinas PU, BPBD dan dinas 4. Truk dari (TNI, Plisi, Pol PP, BPBD, Dinas PU 5. Mobile Rescue dinas 	<p>16 unit</p> <p>10 unit</p> <p>8 unit</p> <p>30 unit</p> <p>8 unit</p>		
		Unit kendaran dan perlengkapan kesehatan dan medis untuk penanganan dan tindakan medis di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulan dari PMI, Rumah sakit 2. Mobil jenazah dari PMI, Rumah sakit 	<p>16 unit</p> <p>16 unit</p>		

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
		Unit kendaraan sampah	1. Truk sampah dari DLH	8 unit		
		Unit angkut sampah Tempat sampahinfeksius dan domestik		
		Dapur umum untuk setiap kecamatan	1. Mobil dapur umum	16 unit		
		Mobil air bersih setiap kecamatan	1. Truk suplay air bersih	16 unit		
		Handy Talky 10 HT per kecamatan	1. HT Masing masing petugas di kecamatan	80 unit		
		Tenda pendukung	1. Tenda dapur umum (Dinsos dan BPBD) 2. Tenda Kesahtan (Dinkes dan	10 unit 16 unit 16 unit		

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
			PMI) 3. Tenda isolasi (Dinkes, BPBD dan PMI) 4. Tenda Komando (TNI POLISI)	10 unit		
		Kantong jenazah untuk masyarakat yang meninggal akibat gempa	1. Kantong jenazah	4000 kantong		
4	Logistik	Kebutuhan beras untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Beras : 0,4 kg per hari x 387.120 jiwa terdampak x 14 hari = 2.167.888 kg	2.167.888 kg		
		Kebutuhan air bersih untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Air bersih : 2 liter x 387.120 jiwa x 14 hari = 10.839.360 liter	10.839.360 liter		

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
		Lauk Pauk untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Lauk pauk @6000 x 3 x 14hari x 387.120 jiwa	Rp 975.492.000.000		
		Multivitamin untuk dayatahan tubuh warga terdampak	Multifitamin 387.120 x 1 botol	387.120 botol		
5	Administrasi dan sekretaria tan	Admin Keuangan Database Staf umum	Bappeda dan BPBD Database Pusdalops BPBD Satf umum BPBD	2 orang 2 orang 2 orang		

Lampiran-E : Peta-Peta

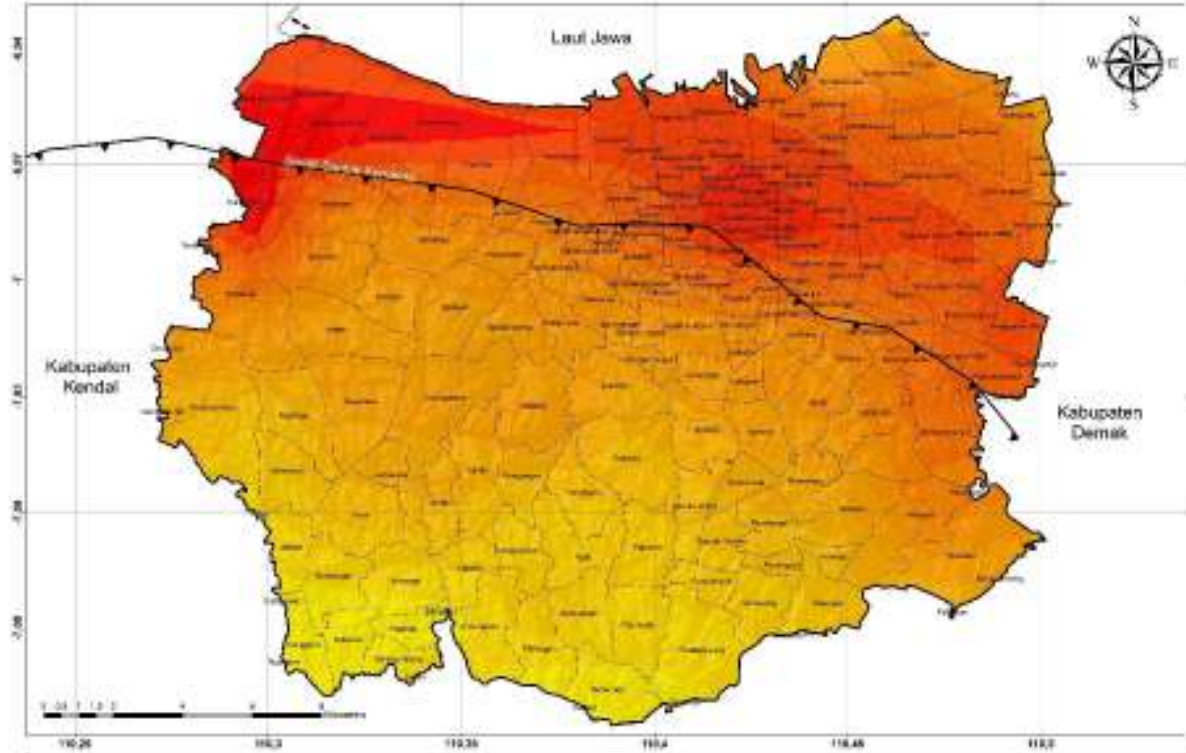




SKENARIO PETA GUNCANGAN TANAH (SHAKEMAP SCENARIO) KOTA SEMARANG

SUMBER GEMPA : SESAR BARIBIS KENDENG

Skala : 1:30.000



KECERDASAN GEMPA	Very felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
PERINGKAT GEMPA	1000	10000	100000	1000000	10000000	100000000	1000000000	10000000000	100000000000
Waktu dari pag.	<0.05	0.3	3.8	6.2	12	22	45	75	>120
RIKAT ML (cm)	<0.02	0.1	1.4	4.7	8.8	28	47	85	>170
INTEGRASI SEISMISITAS	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Sumber: Kurniawan (2010)

Legenda

- Area Kecamatan
- Area Alasul Kota Semarang
- Sempit jalan (Thin Road)

Sumber Data

- Survey Mikroseismis (VSS) BMKG di Kota Semarang Tahun 2010
- Sumber dasar PUSGEM 2017, Bariba Kendeng, M-Fiss 8.5
- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial (BIG) Kota Semarang

Keterangan

Peta ini merupakan skenario seismik tingkat perancangan untuk bebatuan sumber dasar Bariba Kendeng dengan menggunakan parameter M=8. Perhitungan tingkat guncaman menggunakan (SMPD 2016, 2018) dan (MCC 2016) dengan asumsi parameter seismis (ShakMap).

MMI (Modified Mercalli Intensity)

MMI (Modified Mercalli Intensity) adalah skala untuk mengukur tingkat kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi. Skala ini didasarkan pada laporan saksi mata dan kerusakan yang teramati. Skala ini memiliki 12 tingkat, dari I (sangat ringan) hingga X (sangat parah).

- I: Gempa tidak dirasakan kecuali dalam ruangan dan hanya dirasakan oleh orang-orang yang sedang tidur.
- II: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang tidur.
- III: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang tidur dan beberapa orang yang sedang bekerja.
- IV: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur.
- V: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser.
- VI: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser dan beberapa benda berat akan bergeser.
- VII: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser dan beberapa benda berat akan bergeser. Beberapa benda akan rusak.
- VIII: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser dan beberapa benda berat akan bergeser. Beberapa benda akan rusak dan beberapa benda akan rusak parah.
- IX: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser dan beberapa benda berat akan bergeser. Beberapa benda akan rusak dan beberapa benda akan rusak parah. Beberapa benda akan rusak parah dan beberapa benda akan rusak parah parah.
- X: Gempa dirasakan oleh beberapa orang yang sedang bekerja dan beberapa orang yang sedang tidur. Beberapa benda ringan akan bergeser dan beberapa benda berat akan bergeser. Beberapa benda akan rusak dan beberapa benda akan rusak parah. Beberapa benda akan rusak parah dan beberapa benda akan rusak parah parah. Beberapa benda akan rusak parah parah dan beberapa benda akan rusak parah parah parah.

Lampiran-F : SOP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA KESIAPSIAGAAN POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI JAWA
TENGAH**

NO.	KEGIATAN	BMKG BANJARNEGARA	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Kejadian Tektonik Gempa Sesar									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Gempa Sesar dan Susulan jika ada	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama BMKG Banjarnegara untuk mengkaji dan menganalisis skenario gempa melihat dari aktivitas susulan									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario erupsi yang akan terjadi	
3	Menyiagakan personil yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 5 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personel TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personel	
5	Menyiagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di PUSDalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personel	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TANGGAP DARURAT POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI
JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA SLAMET	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Aktivitas Gempa di Lokasi Episentrum setelah gempa utama									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan aktivitas kegempaan	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pengungsi	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA SLAMET	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	Menerima Informasi Perkembangan Penurunan aktivitas gempa di lokasi episentrum									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan status kegempaan		
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah										Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer.	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana		

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI SESAR KENDENG
PROVINSI JAWA TENGAH 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi Sesar Kendeng di Jawa Tengah dengan kegiatan sebagaimana dimaksud :

No	Kegiatan
1	Diseminasi Dokumen Renkon Gempa Bumi Sesar Kendeng bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
2	Melakukan Uji Publik Dokumen Rencana Kontingensi, TTX, dan Gladi
3	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
4	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat pada saat terjadi bencana
5	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
6	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika diperlukan
7	Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

PANGDAM IV. DIPONEGORO

WIDI PRASETIJONO
 Mayor Jenderal TNI

KAPOLDA JAWA TENGAH

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.
 Inspektur Jenderal Polisi

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
GEMPA BUMI SESAR KENDENG**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi Sesar Kendeng. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

<p>1 KETUA SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>2 PANGDAM IV DIPONEGORO</p> 	<p>3 KAPOLDA JAWA TENGAH</p> 
<p>4 KEPALA BPPD PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>5 KEPALA BPKAD PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>6 KEPALA DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>7 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>8 KEPALA DINAS PEKERJAAN MARGA DAN CILIKAPURA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>9 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>10 KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>11 KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEKELANGKAP SEKELANGKAP</p> 	<p>12 KEPALA DINAS PERENCANAAN RUMAH DAN KAWASAN PERMUKIMAN DISPERUMAH KABUPATEN KENDENG</p> 
<p>13 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>14 KEPALA SATPOL PP PROV. JAWA TENGAH</p> 	

Berita Acara Peserta Penyusunan Renkon Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng Tingkat Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris Bid. Data, Informasi dan Humas Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Penelitian Pengembangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPUSDATARU) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
4	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum	
6	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
9	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
10	Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Pendidikan Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
11	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
12	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Keamanan	
13	Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
14	Panglima Kodam IV Diponegoro	Wakil Koordinator Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Keamanan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
15	POLDA Jawa Tengah	Wakil Koordinator Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Keamanan	
16	SAR Semarang	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
17	Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Pendidikan	
18	Sentra Komunikasi (SENKOM) Mitra Polri	Bid. Data, Informasi dan Humas	
19	Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI)	Bid. Data, Informasi dan Humas	
20	ORARI Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
21	SARDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	
22	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
23	Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
24	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
25	Forum Zakat Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
26	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Logistik dan Dapur Umum	
27	Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
30	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
31	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Keamanan	
33	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
34	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
35	Pusdalops BPBD Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
36	BMKG Jawa Tengah Stasiun Banjarnegara	Bid. Data, Informasi dan Humas	
37	Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
38	Direktorat BINMAS POLDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
39	Direktorat LANTAS POLDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
40	Forum CSR Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Logistik dan Dapur Umum	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
41	Unit Layanan Disabilitas	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
42	MDMC Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
43	LPBI NU Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
44	Human Initiative	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO

1.1. Latar Belakang Ancaman Bencana

Sungai merupakan awal membangun sebuah peradaban bagi masyarakat terdahulu. Sungai memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik dari segi lahan maupun dari segi sumberdaya air tidak terkecuali Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa yang melewati 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo memiliki luasan $\pm 20.125 \text{ km}^2 \pm 12\%$ dari seluruh Pulau Jawa atau mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, ke Laut Jawa di utara Surabaya melalui alur sepanjang $\pm 600 \text{ km}$. WS Bengawan Solo terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorong, DAS Pantura Gelaang (Gresik-Lamongan-Tuban) dan DAS Kali Lamong (**Gambar 1.1**). DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di WS Bengawan Solo dengan luas $\pm 16.000 \text{ km}^2$ terbagi menjadi sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Sub-DAS Kali Madiun dan Sub-DAS Bengawan Solo Hilir. Sungai Bengawan Solo melalui 17 kabupaten dan 3 kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo sudah menjadi perhatian utama baik dalam pengelolaan sumber daya airnya maupun manajemen bencana sejak zaman kolonial (sda.pu.go.id, 2022).

Tahun 1880 muara Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Madura ke Ujung Pangkah guna menghindari sedimentasi di Tanjung Perak. Pasca bencana banjir yang menenggelamkan hampir sebagian besar Kota Solo tahun 1966, Pemerintah mulai membangun infrastruktur pengendali banjir. Dengan bantuan teknis Pemerintah Jepang (OTCA) tahun 1974 dirumuskan Master Plan Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pada Tahun 1974 diusulkan rumusan

pembangunan infrastruktur pengendali banjir diantaranya yaitu: a) Waduk Wonogiri, b) Waduk Jipang; c) Waduk Bendo; d) Waduk Badegan, serta 25 lokasi waduk lainnya yang direkomendasikan. Tahun 1978-1981 Waduk Serbaguna Wonogiri dibangun yang difungsikan untuk pengendali banjir di wilayah Sungai Bengawan Solo hulu serta penyedia air irigasi seluas \pm 30.000 Ha di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen, PLTA (12,4 MW) serta digunakan untuk perikanan dan pariwisata. Meskipun demikian ancaman banjir terus mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bengawan Solo hingga saat ini.

Ancaman bencana banjir pasca pembangunan waduk di beberapa titik masih seringkali terjadi di permukiman sekitar Sungai Bengawan Solo dengan jenis banjir banjir luapan (*river floods*). Bencana ini mengakibatkan kerugian baik dari segi material maupun korban jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut pengurangan risiko bencana perlu dilakukan salah satunya dengan penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir Sungai Bengawan Solo. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun pemerintah setempat dalam menghadapi bencana banjir. Mengingat urgensi dari kegiatan tersebut perlu adanya kerja sama antar *stakeholder* pentahelix.



Gambar 1.1 Wilayah Sungai Bengawan Solo

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
- g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat
- j. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran Lembaga Asing non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir Bengawan Solo yaitu menyiapkan landasan operasional, strategi, dan pedoman dalam penanganan kondisi darurat banjir yang melibatkan pemanagku kebijakan sehingga pelaksanaan lebih terkoordinasi dan terpadu.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen rencana kontingensi ini diantaranya yaitu:

- a. Tersusunnya skenario, kebijakan dan tindakan teknis serta manjerial yang disepakati semua pihak terlibat dan stakeholder di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk menanggulangi bencana banjir secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
- b. Membuat pedoman untuk guna mengkoordinir sumberdaya manusia serta sarana prasarana ketika terjadi tanggap darurat banjir yang disebabkan luapan Sungai Bengawan Solo sehingga penanganan darurat banjir baik dalam proses penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan, hingga tahap pasca bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir Sungai Bengawan Solo merupakan

dokumen tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kabupaten/kota yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo dan terdampak banjir di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas kajian rencana kontingensi yang diskenariokan meliputi 9 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Blora, Rembang, dan Kota Surakarta. Pendetailan dokumen dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen renkon tingkat kabupaten.

1.5. Kebijakan dan Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan dan strategi dalam penanganan darurat merupakan arahan dan /atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan Darurat dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Pemerintah kabupaten terdampak di Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten;
2. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;
3. Pemerintah kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati menyatakan kabupaten dalam status keadaan darurat bencana dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan melalui pendirian Pos Pendukung;
4. Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum;
5. Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
6. Pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan

kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan;

7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat
8. Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam penanggulangan kedaruratan;
9. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
10. Biaya pelayanan kesehatan terdampak bencana di bebaskan;
11. Mengevaluasi penanggulangan bencana.

b. Strategi

Strategi penanggulangan bencana merupakan upaya guna mencapai kebijakan yang telah ditentukan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan tersebut yaitu:

1. Pengerahan sarana angkutan udara yang tersedia untuk operasi Penyelamatan di daerah terpencil dan terisolasi;
2. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
3. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan;
4. Pengerahan cadangan logistik provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung;
5. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender;

6. Perbaiki sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan;
7. Mendirikan pos bantuan;
8. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana;
9. Pelayanan *Psychological First Aid*.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana Banjir Bengawan Solo dilakukan secara partisipatif. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir bengawan Solo. Adapun tahapan proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyamaan persepsi** terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi banjir Sungai bengawan Solo.
- b. Pengumpulan data** : Pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana
- c. Verifikasi data** : Analisa data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat
- d. Penyusunan dokumen rencana kontingensi**, pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bahaya banjir; periode, frekuensi dan luasan terdampak banjir; pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.
- e. Penandatanganan komitmen, konsultasi publik** hasil rumusan rencana kontingensi : Diseminasi dokumen rencana kontingensi

kepada semua pelaku (OPD dan Instansi serta badan usaha) yang terlibat dalam penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7. Umpan Balik

Memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi banjir Sungai Bengawan Solo berlaku selama 2 tahun. Pemutakhiran dokumen renkon dilakukan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti halnya perubahan luasan terdampak banjir, perubahan besaran dan bentuk jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka diperlukan kaji ulang atau review guna mengupdate isi dokumen sesuai dengan kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi banjir Bengawan Solo menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) penanganan kedaruratan bencana banjir. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah dilakukan analisis dan mendapat data hasil kaji cepat bencana di lapangan.

2.1. Karakteristik Bahaya

Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara astronomis terletak di 6°49 LS – 8°08 LS dan 110°18 E – 112°45 E. secara administratif DAS Bengawan Solo di wilayah Jawa Tengah meliputi 9 kabupaten/kota yaitu:

1. Kabupaten Boyolali;
2. Kabupaten Klaten;
3. Kabupaten Sukoharjo;
4. Kabupaten Wonogiri;
5. Kabupaten Karanganyar;
6. Kabupaten Sragen;
7. Kabupaten Blora;
8. Kabupaten Rembang;
9. Kota Surakarta.

Keberadaan sungai tidak terlepas dari bencana banjir, tidak terkecuali Sungai Bengawan Solo. Wilayah Sungai Bengawan Solo hulu memperoleh input air dari Gunungapi Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Banjir merupakan salah satu bentuk daya rusak air yang merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor alam dan non alam. Faktor alam yang mempengaruhi berupa curah hujan, kondisi fisografi, erosi, sedimentasi, dan ketidakmampuan badan sungai untuk menampung air dan mengalirkan air. Sedangkan faktor non-alam yaitu pengaruh dari aktivitas manusia.

Bencana banjir di DAS Bengawan Solo sering terjadi di sub-DAS Bengawan Solo bagian hilir. Penyebabnya disebabkan oleh kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air terutama saat musim penghujan. Perubahan penggunaan lahan permukiman di daerah sempadan sungai dan penebangan di daerah hulu sungai juga menjadi pemicu lainnya bencana banjir di daerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Banjir besar akibat luapan Sungai Bengawan Solo tercatat terjadi pada tahun 1918, 1966, 2007 dan tahun 2009. Banjir tahun 1918 di sebabkan jebolnya beberapa tanggul di Kota Surakarta sehingga mengakibatkan Kota Surakarta tergenang air setinggi 2 meter, dan di beberapa wilayah mencapai 4 meter (BPBD Kota Surakarta, 2020). Banjir tahun 2007 disebabkan oleh curah hujan yang cukup ekstrem (>100 mm per hari) yang terjadi di daerah pegunungan selatan Wonogiri dan Karanganyar yang kemudian dialirkan melalui

Sungai Bengawan Solo sehingga banjir terkonsentrasi di kota sebelah timur. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo juga terjadi pada tahun 2009 yang terjadi di Boyolali, Karanganyar, Kota Surakarta, Sragen, dan Sukoharjo yang juga dipengaruhi oleh hujan lebat dalam durasi waktu yang cukup lama. Pola banjir pada tahun 2009 pernah juga terjadi pada tahun 1993 dan 1982. Banjir tersebut disebabkan luapan Sungai bengawan Solo dan juga *back water* sungai lain yang masuk ke Sungai Bengawan Solo. Banjir pada tahun 1982 merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi setelah pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri dengan perkiraan debit banjir 1.100 m³/detik. Banjir yang terjadi pada tahun 2009, 1993 dan 1982 setara dengan periode ulang 30 tahun.

2.2.Skenario Kejadian

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana banjir, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana. Kejadian banjir ini terjadi di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat penyintas menjadi rentan terpapar bahaya Covid-19. Skenario kejadian dan asumsi dampak diuraikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1 Skenario dan Asumsi Dampak Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo

Waktu Kejadian	Pertengahan Februari terjadi hujan lebat pukul 02.00 WIB. BBWS Bengawan Solo memberikan peringatan dini kepada Posko Banjir BBWS, Dinas PU dan BPBD
-----------------------	---

Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Boyolali; 2. Kabupaten Klaten; 3. Kabupaten Sukoharjo; 4. Kabupaten Wonogiri; 5. Kabupaten Karanganyar; 6. Kabupaten Sragen; 7. Kabupaten Blora; 8. Kabupaten Rembang; 9. Kota Surakarta.
Pemicu	<p>Meluapnya sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya dikarenakan curah hujan yang tinggi dengan ketinggian air genangan antara 50-300 cm.</p>
Bahaya Primer	<p>Air yang menggenang menyebabkan gangguan atas fasilitas umum, lumpuhnya pelayanan umum, perkantoran dan industri, kegiatan ekonomi, melumpuhkan transportasi dan dampak psikologis, Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah terganggu, kekurangan sarana air bersih, munculnya masalah kesehatan masyarakat, dan pelayanan puskesmas tidak berjalan dengan baik.</p>
Peringatan Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Hijau : BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap 2 jam dan pelaporan setiap 6 jam. Petugas melaporkan ke Posko Banjir BBWS (Perlu ditambahkan ancaman sistem hulu hilir) 2. Status Siaga Kuning: BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap 1 jam dan pelaporan setiap 3 jam , BBWS melaporkan pada Posko Banjir BBWS dan menginformasikan ke BPBD Kabupaten/Kota wilayah Sungai Bengawan Solo 3. Status Siaga Merah

	BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap saat dan melakukan pelaporan setiap 15 menit. Satgas BBWS wilayah melakukan peninjauan dan berkoordinasi dengan BPBD setempat
Cakupan Wilayah Terdampak	9 Kabupaten
Bahaya Sekunder	Wabah atau sumber penyakit dari genangan dan pembusukan bahan organik.
Bahaya Pendamping	COVID-19

2.3. Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak banjir Sungai bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah meliputi Sembilan kabupaten/kota dengan asumsi penduduk terdampak sebanyak

1. Kabupaten Blora

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Blora meliputi 21 desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan, dan Kecamatan Cepu. Adapun perkiraan jiwa terdampak sebanyak 5053 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 538 Jiwa
Luka Berat : 385 Jiwa
Mengungsi : 4130 Jiwa

2. Kabupaten Karanganyar

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Karanganyar meliputi 6 desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Jaten, Gondangrejo, dan Kebakkramat. Adapun perkiraan jiwa terdampak sebanyak 1.493 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 74 Jiwa

Luka Berat : 81 Jiwa
Meninggal : 18 Jiwa
Hilang : 26 Jiwa
Mengungsi : 1294 Jiwa

3. Kabupaten Klaten

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Klaten meliputi 5 Desa dari 3 Kecamatan Bayat, Wedi, dan Trucuk. Adapun perkiraan jiwa terdampak 202 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Mengungsi : 202 Jiwa

4. Kabupaten Wonogiri

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Wonogiri meliputi 33 desa dari 16 Kecamatan. Adapun perkiraan jiwa terdampak 580 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 15 Jiwa
Luka Berat : 20 Jiwa
Meninggal : 5 Jiwa
Hilang : 1 Jiwa
Mengungsi : 598 Jiwa

5. Kabupaten Sragen : 2501 Jiwa

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sragen meliputi 32 Desa dari 9 Kecamatan Masaran, Plupuh, Sidoharjo, Tanon, Sragen, Sukodono, Sambungmacan, Jenar, Ngampal. Adapun perkiraan jiwa terdampak 2501 dengan rincian sebagai berikut:

Mengungsi : 2500 Jiwa
Meninggal : 1 Jiwa

6. Kabupaten Sukoharjo

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sukoharjo meliputi 4 Desa dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban. Adapun perkiraan jiwa terdampak yaitu 1241 jiwa mengungsi.

7. Kota Surakarta

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sukoharjo meliputi 10

Desa meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Adapun perkiraan jiwa terdampak yaitu 4942 jiwa mengungsi.

8. Kabupaten Boyolali

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Boyolali meliputi 22 Desa dari 6 kecamatan yaitu, Kecamatan Ngemplak, Sawit, Banyudono, Sambu, Nogosari, Teras. Adapun perkiraan jiwa terdampak terdampak 3662 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 1269 Jiwa

Luka Berat : 480 Jiwa

Meninggal : 54 Jiwa

Hilang : 54 Jiwa

Mengungsi : 1805 Jiwa

9. Kabupaten Rembang : 112 Jiwa

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Rembang 6 Desa dari 1 kecamatan yaitu Kecamatan Sale. Adapun perkiraan jiwa terdampak 112 jiwa mengungsi.

B. Aspek Fisik/Infrastruktur

Berdasarkan skenario banjir Sungai Bengawan Solo dengan bahaya primer berupa genangan air memberikan dampak pada sarpras listrik, air, sarpras transportasi, sarpras komunikasi, sarpras kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.2 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Blora

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	2	2	
	- Jembatan	2	2	
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
4	Sarana komunikasi - BTS - Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit	1	1	
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3	3	
8	Kantor pemerintahan	1		1
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	1	1	
12	Rumah	5	5	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.3 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	4	4	
	- Jembatan	4	4	
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi - BTS - Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3		3
8	Kantor pemerintahan	2		2
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	6		6

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.4 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan	10	6	4
	- Parapet	1		1
	- Talud			3
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.5 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	6	4	2
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	9		
	- Jembatan	8		
	- Pelabuhan			
	- Terminal	2		
4	Sarana komunikasi	14	10	4
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	16	9	6
8	Kantor pemerintahan	5	3	2
9	Pasar	2	2	
10	SPBU	2	1	1
11	Tempat Ibadah	6	4	2

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.6 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	-	-	-
2	Air (sumur, sumber air lain)	-	-	-
3	Prasarana transportasi	-	-	-
	- Jalan	-	-	-
	- Jembatan	-	-	-
	- Pelabuhan	-	-	-
	- Terminal	-	-	-
4	Sarana komunikasi	-	-	-
	- BTS	-	-	-
	- Jaringan telepon, dll	-	-	-
5	Rumah sakit	-	-	-
6	Puskesmas	-	-	-
7	Sekolah	-	-	-
8	Kantor pemerintahan	-	-	-
9	Pasar	-	-	-
10	SPBU	-	-	-
11	Tempat Ibadah	-	-	-

6. Kabupaten Sukoharjo**Tabel 2.7 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sukoharjo**

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	8	8	
	- Jembatan	2	2	
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25	25	
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3		3
8	Kantor pemerintahan	1		1
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah			

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.8 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	25	20	5
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	15	15	
	- Jembatan	15	15	
	- Bandara	15	15	
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25	25	
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	5	5	
8	Kantor pemerintahan	10	10	
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	10	10	

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.9 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik		10	
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan	10	10	
4	Sarana komunikasi	10		
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah			
8	Kantor pemerintahan			
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	1		

9. Kota Surakarta

Tabel 2.10 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kota Surakarta

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Berat (%)
		Ringan (%)	Terancam (%)	
1	Jaringan listrik	25	25	
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi	15		
	- Jalan	15		
	- Jembatan			
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25		
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	5		
8	Kantor pemerintahan	5		
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	5		

C. Aspek Ekonomi

Akibat kejadian bencana banjir Bengawan Solo berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.11 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Blora

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		3
2	Warung		
3	Lahan sawah		1
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.12 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		1
2	Warung		
3	Lahan sawah		10
4	Tegalan/Kebun		3
5	Ternak		25
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		12
9	Tempat wisata		3

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.13 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah		10
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.14 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	1	2
2	Warung	4	20
3	Lahan sawah	8	25
4	Tegalan/Kebun	3	1
5	Ternak	8	1
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri	2	20
9	Tempat wisata	6	25

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.15 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah	2	1
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.16 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	1	
2	Warung	1	
3	Lahan sawah	5	5
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak	5	5
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri	5	5
9	Tempat wisata		

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.17 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	2	1
2	Warung	20	5
3	Lahan sawah	25	5
4	Tegalan/Kebun		2
5	Ternak	3	
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri	20	
9	Tempat wisata	25	

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.18 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah	5	
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

9. Kota Surakarta

Tabel 2.19 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kota Surakarta

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah		
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak	3	3
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

D.Aspek Lingkungan

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.20 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Blora

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air		50
2	Pencemaran udara		
3	Pencemaran tanah		
4	Lahan sawah		30
5	Ladang/Kebun	25	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.21 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air		
2	Pencemaran udara		
3	Pencemaran tanah		
4	Lahan sawah		5
5	Ladang/Kebun		10

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.22 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	5	-
2	Pencemaran udara		-
3	Pencemaran tanah	5	-
4	Lahan sawah	10	-
5	Ladang/Kebun	5	-

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.23 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	10	2
2	Pencemaran udara	1	0
3	Pencemaran tanah	2	8
4	Lahan sawah	8	4
5	Ladang/Kebun	1	1

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.24 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.25 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.26 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	40	10
2	Pencemaran udara	5	2
3	Pencemaran tanah	40	10
4	Lahan sawah	40	10
5	Ladang/Kebun	10	2

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.27 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	20	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	10	-
5	Ladang/Kebun	-	-

9. Kota Surakarta

Tabel 2.28 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kota Surakarta

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.29 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Blora

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa Ngelo	25	
	Kantor Desa		
2	Nglanjuk		20
3	Kantor Desa Gadon	30	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.30 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	2	
2			

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.31 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Klaten

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor desa	5	
2			

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.32 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	1	
2			

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.33 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sragen

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor desa	1	
2			

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.34 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	1	
2			

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.35 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Boyolali

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	10	
2			

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.36 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Rembang

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	2	
2			

9. Kota Surakarta

Tabel 2.37 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kota Surakarta

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Kelurahan	10	
2	Kantor Kecamatan	3	

3.1. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke Sembilan kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana banjir dan tugas kemanusiaan dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 9 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana.

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana banjir dalam waktu +/- 72 jam;
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 unsur pentahelix dan 9 kabupaten/kota terdampak;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan menjalankan fungsi SKPDB;
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Jawa Tengah

yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;

5. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Jawa tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
6. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak atau korban sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19;
7. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
8. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Oganisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, Provinsi Jawa Tengah melaksanakan operasi pendudukan, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kabupaten/Kota di DAS Bengawan Solo dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Operasi penanganan darurat bencana dibagi menjadi dua fase yaitu fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah

Fase	Sasaran Tindakan
Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan2. Mendukung pelaksanaan rapat penyusunan rencana operasi3. Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk pendudukan4. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Tingkat Provinsi5. Pembentukan Pos Lapangan6. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo 9 Kabupaten terdampak7. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo di Lokasi terdampak8. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda9. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa kebencanaan10. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan).11. Memastikan pelayanan kesehatan bagi

pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19).

12. Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan.

1. Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan

2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan.

3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.

6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.

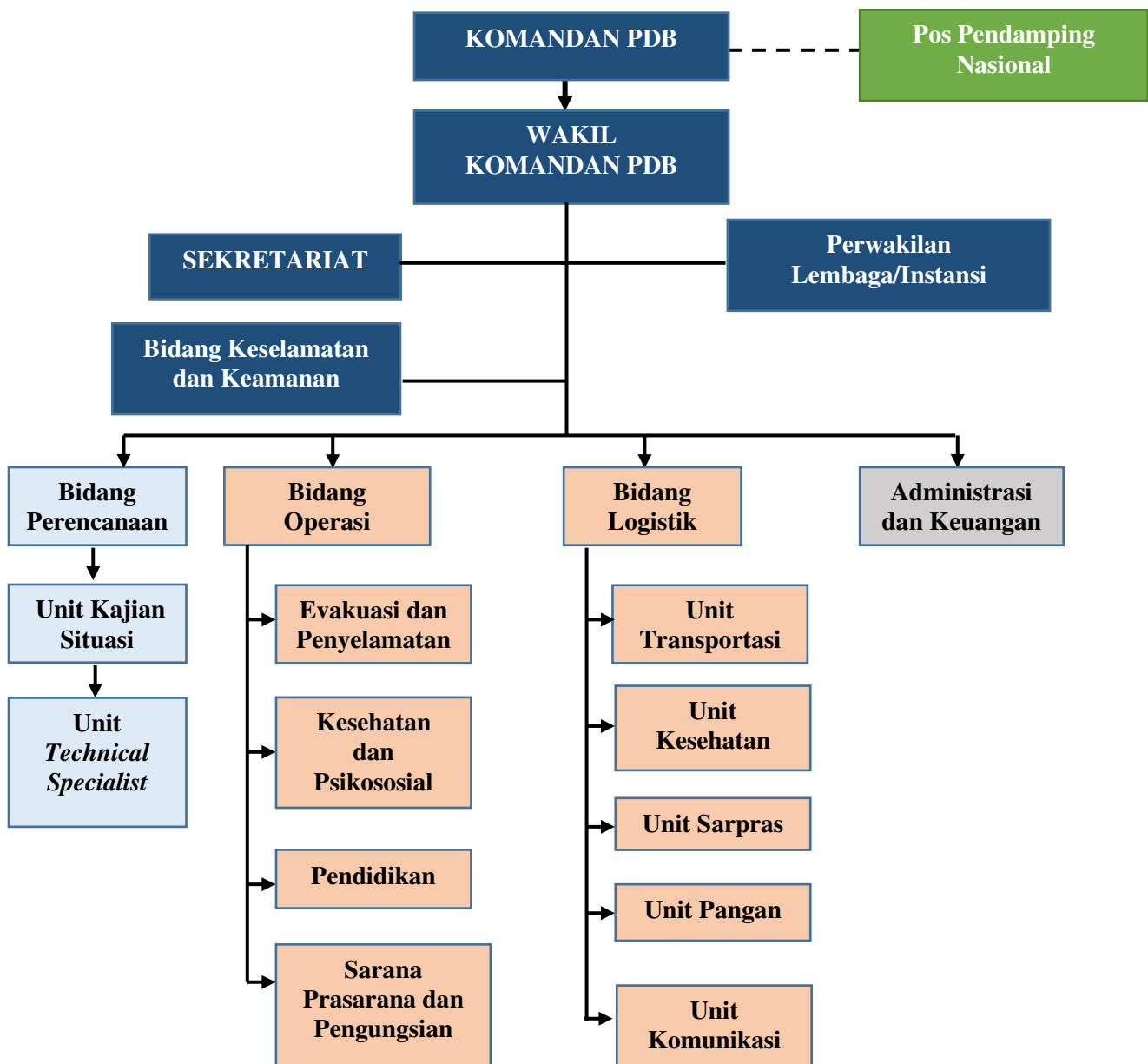
7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.

8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.

9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rejabilitasi dan rekonstruksi.

Transisi Darurat ke Pemulihan

4.2. Struktur Organisasi Komando



Gambar 4.1 Struktur Komando Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Provinsi dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB 9 Kabupaten terdampak bencana Banjir Sungai Bengawan Solo (Kabupaten Klaten, Rembang, Karanganyar, Blora, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, dan Kota Surakarta), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan. Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana

Tindakan	Kegiatan Pokok
<p>indakan 1 : melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,</p>	<p>a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak. d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo.</p>
<p>indakan 2 : melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana</p>	<p>a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo secara terpadu. b) Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat Banjir Bengawan Solo, berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan. c) Mendukung dan memantau penyusunan</p>

Tindakan	Kegiatan Pokok
	<p>strategi pemulihan pasca darurat bencana banjir.</p> <p>a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana.</p>
<p>indakan 3 : operasi Penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo</p>	<p>b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat.</p> <p>c) Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan</p> <p>d) Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana</p>
<p>indakan 4: memenuhi Logistik untuk penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo</p>	<p>a) Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.</p> <p>b) Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat</p>
<p>indakan 5: kelengkapan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo</p>	<p>a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana</p> <p>b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana.</p> <p>c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.</p>

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo,

Tabel 4.3 Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jawa Tengah dalam Renkon Banjir Sungai Bengawan Solo

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak. d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo.
Perencanaan	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo secara terpadu. b) Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana.
Operasi	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat
Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Administrasi dan Keuangan	a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
---------------	--------------

bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.5. Instruksi Koordinasi

Memuat arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana Banjir

BPBD Provinsi Jawa Tengah menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten/Kota terdampak banjir yang telah melakukan pengkajian langsung di lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

- Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat bencana banjir. Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.

3. Apabila terjadi bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo yang melanda Kabupaten/Kota segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Rembang.

5. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada kesembilan kabupaten terdampak tanpa mengambil alih komando penanganan darurat bencana.

6. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.
7. Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau/ relawan yang berasal dari instansi / lembaga dari tingkat Provinsi Jawa Tengah.
8. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos PDB Provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang Pos Pendamping PDB Jawa Tengah

5.1.Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukung penangan darurat bencana Banjir di Bengawan Solo pada situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumberdaya Kabupaten terdampak banjir bengawan solo mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPD teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten Terdampak Banjir bengawan Solo;
3. Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil assessment di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta system administrasi;

5.2.Logistik

Pengerahan sumberdaya tingkat provinsi dalam menghadapi bencana Banjir Bengawan Solo sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana banjir system komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya kabupaten terdampak baik berupa personil, logistic dan peralatan dioptimalkan;
2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personil, logistik, dan peralatan ke Provinsi Jawa Tengah dan atau/

Kabupaten/Kota terdekat dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi masing-masing;

3. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi bersangkutan;
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan;
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

6.1. Komando

Komando operasi penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo di Jawa Tengah dipimpin oleh Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

a. Pos Komando

Pos Komando tanggap darurat bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana berkedudukan **di Eks Bakorwil II Kota Surakarta**

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten

Tabel 5.1 Lokasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo

Kabupaten/ Kota	Pos Lapangan	Koordinat
Kab. Blora	BPBD Kab. Blora	-6.9725449,111.4563036
Kab. Karanganyar	BPBD Kab. Karanganyar	-7.6050694,110.9464917
Kab. Klaten	BPBD Kab. Klaten	-7.7013666,110.5960514
Kab. Wonogiri	BPBD Kab. Wonogiri	-7.831226,110.9186953
Kab. Sragen	BPBD Kab. Sragen	-7.4311635,111.0220414
Kab. Sukoharjo	BPBD Kab. Sukoharjo	-7.6873598,110.8428811
Kab. Boyolali	BPBD Kab. Boyolali	-7.5395536,110.6143314,17
Kab. Rembang	BPBD Kab. Rembang	-6.7299969,111.3496282

Kabupaten/ Kota	Pos Lapangan	Koordinat
Kota Surakarta	BPBD Kota Surakarta	-7.560344,110.8038965

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 5.2 Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara Adi Sumarmo	-7.5155113,110.753953
Pos Pendukung 2	Exit Tol Pungkruk (Sragen)	-7.4331393,110.9821828
Pos Pendukung 3	Exit Tol Ngemplak (Surakarta)	-7.5287803,110.777128
Pos Pendukung 4	Exit Tol Colomadu (Klaten)	
Pos Pendukung 5	Exit Tol Kebakkramat (Karanganyar)	-7.5214187,110.8824792
Pos Pendukung 6	Lapangan Sukorejo Kec. Wonogiri (Wonogiri)	-7.8244076,110.918472
Pos Pendukung 7	Alun-alun Sukoharjo	-7.6830777,110.840514
Pos Pendukung 8	Exit Tol Mojosongo (Boyolali)	-7.530342,110.6274273
Pos Pendukung 9	Bandara Ahmad Yani	-6.9663454,110.3749891

6.2. Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan operasi penangaann darurat bencana.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

6.4. Komunikasi

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi

- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX san 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 024-3519904

c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id

d. Fax : 024-3519186

6.5. Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

1. Diseminasi Dokumen Renkon Bengawan Solo bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
2. Penandatanganan kesepakatan oleh setiap pimpinan instansi selaku koordinator bidang-bidang dalam penyusunan Renkon Bengawan Solo;
3. Melalui pemantauan secara periodik terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Tengah;
4. Melakukan koordinasi secara berkala bersama instansi terkait untuk memperbaharui dokumen Rencana Kontingensi Bengawan Solo dan disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan terkini oleh semua pihak terkait;
5. Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim;
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah;
7. Dilakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota yang masuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo;
8. Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo akan diajukan dan di legalisasi dalam bentuk Pergub;
9. Melakukan gladi lapang dan gladi posko untuk mengetahui fungsi koordinasi yang sudah dibentuk berjalan sesuai dengan alur komando yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Di Indonesiaan secara
sukSES dan niala

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PROV. JAWA TENGAH

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Banjir Sungai Bengawan Solo**

DAERAH WAKTU : WIB

SANDI OPERASI : BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PROV. JAWA TENGAH

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- b. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke Sembilan kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana banjir dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 9 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana. Konsep operasi dalam dua fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Aspek Kependudukan	<p>Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak banjir Sungai bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah meliputi Sembilan kabupaten/kota dengan asumsi penduduk terdampak sebanyak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Blora : 5053 Jiwa <ul style="list-style-type: none"> Luka Ringan : 538 Jiwa Luka Berat : 385 Jiwa Mengungsi : 4130 Jiwa 2. Kabupaten Karanganyar : 1493 Jiwa <ul style="list-style-type: none"> Luka Ringan : 74 Jiwa Luka Berat : 81 Jiwa Meninggal : 18 Jiwa Hilang : 26 Jiwa
--------------------	---

	<p>Mengungsi : 1294 Jiwa</p> <p>3. Kabupaten Klaten : 202 Jiwa</p> <p>Mengungsi : 202 Jiwa</p> <p>4. Kabupaten Wonogiri: 17.254 Jiwa</p> <p>Luka Ringan : 6215 Jiwa Luka Berat : 2394 Jiwa Meninggal : 965 Jiwa Hilang : 1282 Jiwa Mengungsi : 6398 Jiwa</p> <p>5. Kabupaten Sragen : 2501 Jiwa</p> <p>Mengungsi : 2500 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa</p> <p>6. Kabupaten Sukoharjo : 1241 Jiwa</p> <p>Mengungsi : 1241 Jiwa</p> <p>7. Kota Surakarta : 4942 Jiwa</p> <p>Mengungsi : 4942 Jiwa</p> <p>8. Kabupaten Boyolali: 3.662 Jiwa</p> <p>Luka Ringan : 1269 Jiwa Luka Berat : 480 Jiwa Meninggal : 54 Jiwa Hilang : 54 Jiwa Mengungsi : 1805 Jiwa</p> <p>9. Kabupaten Rembang : 112 Jiwa</p> <p>Mengungsi : 112 Jiwa</p>																								
Aspek Fisik	<p>Berdasarkan skenario banjir Sungai Bengawan Solo dengan ketinggian genangan 50-300 cm di Sembilan kabupaten/kota mengakibatkan beberapa kerusakan diantaranya</p> <table border="1" data-bbox="592 1391 1270 1733"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kerusakan</th> <th>Presentasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jaringan Listrik</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sarana Prasarana/Fasilitas umum</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sarana Komunikasi</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sarana Kesehatan</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sekolah</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kantor Pemerintah</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tempat Ibadah</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kerusakan	Presentasi	1	Jaringan Listrik	12%	2	Sarana Prasarana/Fasilitas umum	30%	3	Sarana Komunikasi	20%	4	Sarana Kesehatan	5%	5	Sekolah	10%	6	Kantor Pemerintah	10%	7	Tempat Ibadah	15%
No	Jenis Kerusakan	Presentasi																							
1	Jaringan Listrik	12%																							
2	Sarana Prasarana/Fasilitas umum	30%																							
3	Sarana Komunikasi	20%																							
4	Sarana Kesehatan	5%																							
5	Sekolah	10%																							
6	Kantor Pemerintah	10%																							
7	Tempat Ibadah	15%																							
Aspek Ekonomi	<p>Dampak genangan banjir yang mengakibatkan beberapa pelayanan jasa maupun kerusakan infrastruktur mengakibatkan kerugian pada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya beberapa fasilitas umum • Lumpuhnya beberapa pasar tradisional • Beberapa tempat wisata dan industri tidak dapat 																								

	<p>beroperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian akibat biaya perbaikan konstruksi bangunan yang tergenang banjir maupun kerusakan beberapa jalan pasca banjir • Kerugian akibat terhambatnya pengiriman logistik karena jalan tergenang banjir
Aspek Lingkungan	<p>Dampak banjir pada aspek lingkungan berpengaruh terhadap pencemaran air, tanah, dan kerusakan terhadap lahan sawah serta kebun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran Air Genangan air yang melanda mengakibatkan beberapa sumber mata air dan sumur warga tergenang, sehingga harus dilakukan pembersihan atau menguras sumur • Pencemaran Tanah/lahan Kejadian bencana banjir menimbulkan genangan pada lahan kebun dan sawah warga sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan beberapa lahan mengalami gagal panen. • Kerusakan dan Lingkungan Menjadi Kumuh Beberapa talud dan tanggul sungai mengakibatkan material lumpur terbawa dan menggenangi permukiman, fasilitas umum, dan jalan. Saat surut tentunya akan meninggalkan material dan mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh dan perlu adanya upaya pembersihan.
Aspek layanan Publik/Pemerintah	<p>Terhambatnya pelayanan jasa maupun pemerintah desa hingga kabupaten karena bangunan terendam banjir sehingga pelayanan tidak berjalan.</p>

A. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Blora

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Balun	Cepu	0	0	0	0	500
	Cepu	Cepu	20	5	0	0	125

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
2	Gadon	Cepu	36	80	0	0	255
3	Getas	Cepu	0	20	0	0	70
4	Gondel	Kedungtuban	0	0	0	0	0
5	Jimbung	Kedungtuban	20	35	0	0	128
6	Jipang	Cepu	10	0	0	0	90
7	Klagen	Kedungtuban	102	10	0	0	125
8	Ketuwan	Kedungtuban	90	5	0	0	200
9	Medalem	Kradenan	150	0	0	0	250
10	Megeri	Kradenan	5	10	0	0	25
11	Mendenrejo	Kradenan	5	90	0	0	125
12	Ngelo	Cepu	90	5	0	0	125
13	Nginggil	Kradenan	0	10	0	0	105
14	Nglanjuk	Cepu	0	0	0	0	300
15	Nglebak	Kradenan	0	12	0	0	78
16	Ngloram	Cepu	0	9	0	0	808
17	Nglungger	Kradenan	0	37	0	0	500
18	Ngrawoh	Kradenan	5	20	0	0	65
19	Panolan	Kedungtuban	0	37	0	0	128
20	Sumberpitu	Cepu	5	0	0	0	128

B. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Karanganyar

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Sroyo	Jaten	2	3	2	2	6
2	Ngringo	Jaten	4	8	3	2	162
3	Waru	Kebakkramat	18	35	3	8	486
4	Kragan	Gondangrejo	21	15	8	6	405
5	Plesungan	Gondangrejo	22	9	0	3	113
6	Karangturi	Gondangrejo	7	11	2	5	122

C. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Klaten

No.	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Beluk	Bayat	-	-	-	-	40
2	Trucuk	Trucuk	-	-	-	-	30
3	Melikan	Wedi	-	-	-	-	60
4	Jiwo Wetan	Wedi	-	-	-	-	36
5	Pacing	Wedi	-	-	-	-	36

D. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Wonogiri

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Tanjungsari	Tirtomoyo	1	-	1	-	32
2	Tirtomoyo	Tirtomoyo	-	1	-	-	21
3	Banyakprodo	Tirtomoyo	1	1	-	-	5
4	Sidorejo	Tirtomoyo	-	1	-	1	-
5	Bulurejo	Nguntoronadi	1	-	1	-	12
6	Kulurejo	Nguntoronadi	-	-	1	-	8
7	Gemantar	Selogiri	-	1	-	-	21
8	Jaten	Selogiri	1	-	-	-	9
9	Kepatihan	Selogiri	-	-	1	-	12
10	Singodutan	Selogiri	-	2	-	-	5
11	Kaliancar	Selogiri	-	1	-	-	51
12	Jendi	Selogiri	-	1	-	-	9
13	Giritirto	Wonogiri	1				60
14	Gedong	Giriwoyo	-	3	1		28
15	Gumiwang Lor	Wuryantoro	1	2	-	-	19
16	Pulitan kulon	Wuryantoro	1	-	-	-	19
17	Baleharjo	Eromoko	1	-			27
18	Eromoko	Eromoko	-	-	-	-	8
19	Mingarharjo	Eromoko	2	1	-	-	38
21	Tubokarto	Pracimantoro	1	-	-	-	52
21	Banaran	Pracimantoro	-	1	-	-	14
22	Sedayu	Pracimantoro	1	-	-	-	10
23	Trukan	Pracimantoro	-	-	-	-	13
24	Pucanganom	Giritontro	2	2	1	-	19
25	Ngargoharjo	Giritontro	-	-	-	-	11
26	Kebonagung	Sidoharjo	-	-	-	-	16
27	Sempukerep	Sidoharjo	1	2	-	-	1

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
28	Tempursari	Sidoharjo	-	-	-	-	2
29	Kayuloko	Sidoharjo	-	-	-	-	2
30	Mojoreno	Sidoharjo	-	-	-	-	3
31	Gunungsari	Jatisrono	1	-	-	-	7
32	Karanglor	Manyaran	-	1	-	-	2
33	Gunungan	Manyaran	-	-	-	-	3

E. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Sragen

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Pringanom	Masaran	0	0	1	0	0
2	Pilang	Masaran	0	0	0	0	0
3	Sidodadi	Masaran	0	0	0	0	0
4	Jati	Masaran	0	0	0	0	0
5	Kliwonan	Masaran	0	0	0	0	0
6	Gentan Banaran	Plupuh	0	0	0	0	0
7	Gedongan	Plupuh	0	0	0	0	0
8	Karanganyar	Plupuh	0	0	0	0	0
9	Pandak	Sidoharjo	0	0	0	0	2.500
10	Sribit	Sidoharjo	0	0	0	0	
11	Bentak	Sidoharjo	0	0	0	0	0
12	Patihan	Sidoharjo	0	0	0	0	0
13	Tenggak	Sidoharjo	0	0	0	0	0
14	Jono	Tanon	0	0	0	0	0
15	Gawan	Tanon	0	0	0	0	0
16	Kecik	Tanon	0	0	0	0	0
17	Pengkol	Tanon	0	0	0	0	0
18	Padas	Gemolong	0	0	0	0	0
19	Suwatu	Tanon	0	0	0	0	0
21	Tangkil	Sragen	0	0	0	0	0
21	Kedungupit	Sragen	0	0	0	0	0
22	Bendo	Sukodono	0	0	0	0	0
23	Newung	Sukodono	0	0	0	0	0
24	Banaran	Kalijambe	0	0	0	0	0
25	Bedoro	ambungmacan	0	0	0	0	0
26	Cemeng	ambungmacan	0	0	0	0	0
27	Sambungmacan	ambungmacan	0	0	0	0	0

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
28	Plumbon	ambungmacan	0	0	0	0	0
29	Karanganyar	ambungmacan	0	0	0	0	0
30	Plale	Jenar	0	0	0	0	0
31	Karangudi	Ngrampal	0	0	0	0	0
32	Klandungan	Ngrampal	0	0	0	0	0

F. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Sukoharjo

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Kadokan	Grogol	0	0	0	0	75
2	Tegalmade	Mojolaban	0	0	0	0	280
3	Laban	Mojolaban	0	0	0	0	188
4	Gadingan	Mojolaban	0	0	0	0	698

G. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kota Surakarta

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Sewu	Jebres	0	0	0	0	481
2	Gandekan	Jebres	0	0	0	0	0
3	Jebres	Jebres	0	0	0	0	453
4	Pucang Sawit	Jebres	0	0	0	0	283
5	Mojo	Pasar Kliwon	0	0	0	0	481
6	Sangkrah	Pasar Kliwon	0	0	0	0	0
7	Semanggi	Pasar Kliwon	0	0	0	0	1796
8	Kedunglumbu	Jajar	0	0	0	0	897
9	Joyosuran	Pasar Kliwon	0	0	0	0	341
10	Joyotakan	Serengan	0	0	0	0	210

H. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Boyolali

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Dibal	Ngemplak	63	24	3	3	90
2	Donohudan	Ngemplak	77	28	3	3	105
3	Gagaksipat	Ngemplak	98	36	4	4	125
4	Giriroto	Ngemplak	64	24	3	3	90

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
5	Kismoyoso	Ngemplak	92	36	4	4	125
6	Manggung	Ngemplak	72	28	3	3	105
7	Ngargorejo	Ngemplak	34	12	1	1	60
8	Ngesrep	Ngemplak	69	24	3	3	90
9	Pandeyan	Ngemplak	85	32	4	4	120
10	Sawahan	Ngemplak	114	44	5	5	165
11	Sindon	Ngemplak	54	20	2	2	75
12	sobokerto	Ngemplak	72	28	3	3	105
13	Canden	Sambi	50	20	2	2	75
14	Potronayan	Nogosari	66	24	3	3	90
15	Karangduren	Sawit	28	12	1	1	40
16	Tawangasri	Teras	33	12	1	1	60
17	Tanjungsari	Banyudono	22	8	1	1	30
18	Denggungan	Banyudono	40	16	2	2	60
19	Trayu	Banyudono	26	8	1	1	30
20	Sambon	Banyudono	40	16	2	2	60
21	Bangak	Banyudono	30	12	1	1	45
22	Banyudono	Banyudono	40	16	2	2	60

I. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Rembang

No.	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Gading	Sale	-	-	-	-	-
2	Jinanten	Sale	-	-	-	-	-
3	Mrayun	Sale	-	-	-	-	-
4	Sale	Sale	-	-	-	-	112
5	Wonokerto	Sale	-	-	-	-	-
6	Joho	Sale	-	-	-	-	-

Susunan Pelaksana Tugas

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
1. Kepala Daerah	Gubernur Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2. Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis serta pendelegasian kewenangan kepada komandan tanggap darurat 3. Melakukan koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda
2. Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo 2. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupaten terdampak banjir Bengawan Solo 4. Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, pelayanan kesehatan dan penyelamatan 5. Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
3. Wakil Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasdam Kodam IV Diponegoro 2. Wakapolda Kapolda Jawa Tengah 3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana 2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
4. Sekretaris		

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin (Lead)	Kabag TU BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan agenda Komandan PDB
Pendukung	Unsur BPBD Provinsi Jawa Tengah	
5. Perwakilan Institusi/Lembaga		
Pemimpin	Ketua FPRB Jawa Tengah	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumberdaya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum CSR 2. Ketua FPT PRB Jawa tengah 3. Ketua Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Jawa Tengah 4. Ketua Organda 5. Ketua MDMC Jawa Tengah 6. Ketua LPBI NU Jawa Tengah 7. Ketua Kwarda Jawa Tengah 8. Ketua PMI Jawa Tengah 9. Ketua BAZNAS Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat banjir bengawan solo dan dampaknya berdasarkan hasil kajian di lapangan dan instrumen yang dimiliki 2. Membantu komandan untuk memastikan mobilisasi sumberdaya instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Keselamatan dan Keamanan		
Pemimpin	Satpol PP Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan Posko kepada Komandan tanggap darurat
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajaran Kodam IV Diponegoro 2. Jajaran Satpol PP Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi, mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan 2. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antara pelaku bidang Keamanan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah 3. Memastikan kebutuhan dan memobilisasi bidang Keselamatan dan Keamanan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
6. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan Posko Provinsi terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Bidang Perencanaan		
1. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pengkajian situasi penanganan darurat dari masing-masing kabupaten terdampak banjir Bengawan Solo
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (Asintel) 2. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 3. Dinas LHK Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. BPBD (Satgas Kedaruratan) 6. PMI Kabupaten Terdampak 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap status bahaya banjir yang dikeluarkan BBWS Bengawan Solo 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat banjir 3. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana banjir 4. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing kabupaten/kota terdampak
2. Unit <i>Technical Spesialis</i>		
Pemimpin	BBWS Bengawan Solo	Mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana banjir yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPDAS-HL Solo 2. KODAM IV Diponegoro (Pamenahli) 3. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 4. FPTPRB 5. Akademisi 	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana banjir yang membutuhkan keahlian khusus

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Bidang Operasi		
1. Evakuasi dan Penyelamatan		
Pemimpin	Kepala Kantor SAR Semarang	Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan evakuasi dan pertolongan korban bencana banjir
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (AsOp) 2. POLDA Jawa Tengah (DitSamapta) 3. PMI Jawa Tengah 4. BPBD Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan 2. Mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban banjir 3. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan 4. Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan 5. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan
2. Kesehatan dan Psikososial		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi dan memastikan terlaksannya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial 2. Mengkoordinasi dan memastikan RSUD dan layanan kesehatan milik Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi guna mendukung layanan kesehatan korban banjir
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes) 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. PMI Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah (Saka Bhakti Husada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah 2. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi masyarakat terdampak banjir

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	7. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) Jawa Tengah 8. RSUD Provinsi Jawa Tengah 9. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	
3. Pendidikan		
Pemimpin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Memastikan dan mengkoordinasikan antar pelaku bidang operasi pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	1. POLDA Jawa Tengah 2. Direktorat BINMAS MDMC 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. Disporapar Jawa Tengah 5. Kemenag Kanwil Jawa Tengah 6. PMI Jawa Tengah 7. KWARDA Jawa Tengah 8. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Mendukung kabupaten/kota terdampak agar pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian 2. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang pendidikan bagi masyarakat terdampak banjir
4. Sarana, Prasarana, dan Pengungsian		
Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Mendampingi Kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan sarana prasarana selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro(Kazidam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biro Logistik) 3. Biro Kesra Setda Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya	1. Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dalam penyiapan akses ke daerah terdampak 2. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial yang terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	air dan Penataan Ruang 6. Unit LIDi (Layanan Inklusi Disabilitas) Jawa Tengah 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 8. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 9. PMI Jawa Tengah	3. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak banjir
Bidang Logistik		
1. Unit Transportasi		
Pemimpin	Dinas Perhubungan Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting sarana transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	1. BPBD 2. KODAM IV Diponegoro (Kabekangdam) 3. Satpol PP Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. POLDA Jawa Tengah 6. Dinas LHK Jawa Tengah 7. DPUPR Jawa Tengah 8. BASARNAS 9. Dinas ESDM	1. Mendata kekurangan kebutuhan armada transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana 2. Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten/kota terdampak banjir 3. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 4. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)
2. Unit Kesehatan		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting logistik obat-obatan dan peralatan medis lainnya
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes) 3. PMI Jawa Tengah	1. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan masker kabupaten/kota terdampak 2. Mengkoordinasikan pembagian logistic dengan Dinas

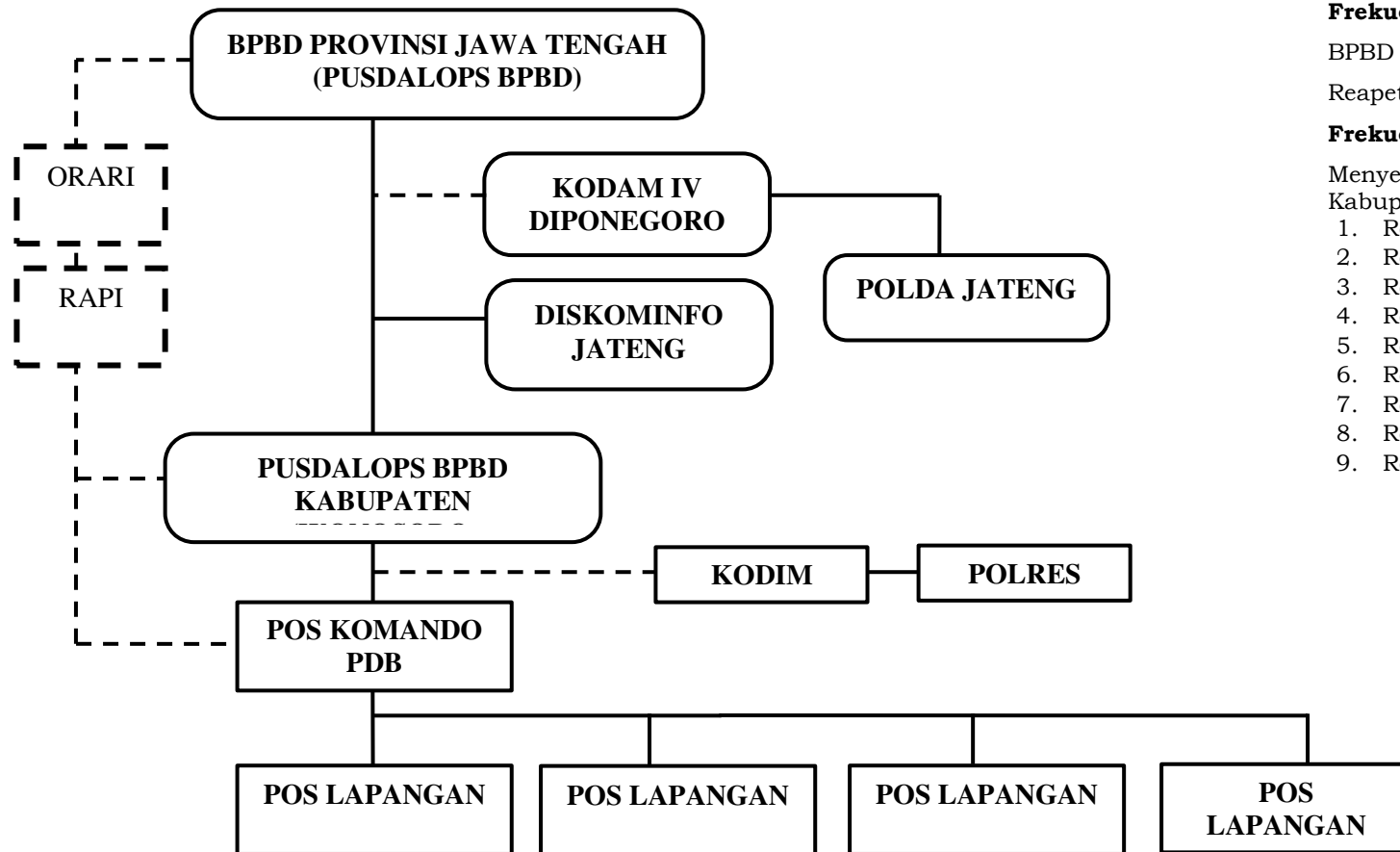
Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	4. Lembaga Usaha 5. RSUD Jawa Tengah 6. MDMC	terkait di Kabupaten/Kota
3. Unit Sarana dan Prasarana		
Pemimpin	BBWS Bengawan Solo	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung penanganan tanggap darurat
Pendukung	1. BPBD 2. KODAM IV Diponegoro (Kazidam) 3. POLDA Jawa Tengah 4. PMI Jawa Tengah 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 6. FPRB Jawa Tengah 7. Lembaga Usaha	1. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana banjir 2. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/kota terkait penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi
4. Unit Pangan		
Pemimpin	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	1. BPBD 2. Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah 3. Baznas 4. MDMC 5. PMI Jawa Tengah	1. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi bencana banjir 2. Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota terdampak terkait penyaluran pangan tim tanggap darurat
5. Komunikasi		
Pemimpin	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro(Kahudam) 2. POLDA Jawa Tengah (Bidang TIK) 3. BPBD Provinsi Jawa Tengah 4. ORARI 5. RAPI 6. SENKOM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat 2. Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Administrasi		
Pemimpin	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	BPBD Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat 3. Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ● Catatan penerimaan; ● Catatan pengeluaran; ● Laporan pertanggungjawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Inspektorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. Bappeda Provinsi Jawa Tengah 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat 4. Menyusun laporan keuangan

: Jaring Komunikasi

**JARING KOMUNIKASI POS PENDAMPING RENKON
BANJIR BENGAWAN SOLO
PROVINSI JAWA TENGAH**



Frekuensi Utama

BPBD Prov. Jateng

Repeater BPBD Prov. Jateng

Frekuensi lokal

Menyesuaikan dari masing-masing Kabupaten :

1. Repeater BPBD Kab. Boyolali
2. Repeater BPBD Kab. Klaten
3. Repeater BPBD Kab. Sukoharjo
4. Repeater BPBD Kab. Sragen
5. Repeater BPBD Kab. Wonogiri
6. Repeater BPBD Kab. Karanganyar
7. Repeater BPBD Kab. Blora
8. Repeater BPBD Kab. Rembang
9. Repeater BPBD Kota Surakarta

LAMPIRAN 6 Mata Rantai Peringatan Dini

Tingkat Siaga	Tinggi Jagaan (m)	Pengamatan TMA	Periode Laporan
Siaga Hijau	1,25-1,50	Setiap 2 Jam	6 Jam
Siaga Kuning	0,75-1,25	Setiap 1 jam	3 Jam
Siaga Merah	0,50-0,75	Terus menerus	Setiap 15 menit s/d 1 jam

Tingkat Siaga	Tindakan
Siaga Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan setiap 2 jam dan pelaporan setiap 6 jam 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Persiapanbahan banjara dan alat berat 4. Koordinasi dengan BBWS
Siaga Kuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan setiap 1 jam dan pelaporan setiap 3 jam 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Posko banjir BBWS Bengawan Solo menginformasikan ke Pokmas dan BPBD 4. Persiapan bahan banjara dan alat berat 5. Satgas wilayah meninjau lokasi 6. BBWS berkoordinasi dengan BPBD 7. BPBD menginformasikan ke masyarakat sekitar
Siaga Merah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan setiap saat dan pelaporan setiap 15 menit 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Posko banjir BBWS Bengawan Solo menginformasikan ke Pokmas dan BPBD dan Dinas PU 4. Persiapan bahan banjara dan alat berat 5. Satgas wilayah meninjau lokasi 6. BBWS berkoordinasi dengan BPBD 7. BPBD menginformasikan ke masyarakat sekitar

Keterangan:



Wewenang BBWS



Wewenang BBWS

LAMPIRAN 7 Rencana Evakuasi Posko Pengungsian Banjir

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLORA	KETUWAN	KEDUNGTUBAN	Kantor Desa	PERMANEN	500	2010
2	BLORA	JIMBUNG	KEDUNGTUBAN	Kantor Desa	PERMANEN	1500	1995
3	BLORA	PANOLAN	KEDUNGTUBAN	Rumah Evakuasi Banjir		1000	2010
4	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	BALAI DESA	PERMANEN	200	2000
5	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	SD KLAGEN	PERMANEN	300	1990
6	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	MASJID	PERMANEN	300	2005
7	BLORA	NGLUNGER	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	500	1990
9	BLORA	MEDALEM	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	5000	2010
10	BLORA	MENDENREJO	KRADENAN	Gd. Serbaguna	PERMANEN	250	2010
11	BLORA	NGRAWOH	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	150	2010
12	BLORA	MEGERI	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	200	2010
13	BLORA	NGINGGIL	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	200	2000
14	BLORA	JIPANG	CEPU	Kantor Desa	PERMANEN	1500	2020
15	BLORA	NGLORAM	CEPU	Kantor Desa	PERMANEN	300	2000
16	BLORA	GADON	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		250	2010
17	BLORA	GADON	CEPU	MASJID NURUL HUDA	PERMANEN	250	2000
18	BLORA	GADON	CEPU	SD GADON	PERMANEN	200	2000
19	BLORA	GADON	CEPU	LAP. FUTSAL		100	2005
20	BLORA	GETAS	CEPU	KANTOR DESA	PERMANEN	160	2000
21	BLORA	GETAS	CEPU	RUMAH EVAKUASI		100	2010

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
22	BLORA	SUMBERPITU	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		200	2010
23	BLORA	NGLANJUK	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		300	2010
24	BLORA	NGLANJUK	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	2010
25	BLORA	NGLANJUK	CEPU	LAPANGAN		500	1990
26	BLORA	BALUN	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	1990
27	BLORA	CEPU	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	1990
28	BLORA	NGELO	CEPU	Gedung PPSDM Migas	PERMANEN	2000	1990
1	KLATEN			Kantor Desa	PERMANEN	Situasional	-
2	KLATEN			Balai desa/Aula	PERMANEN		-
3	KLATEN			Desa/kampung setempat		Situasional	-
4	KLATEN			Rumah warga/Balai RT/RW	PERMANEN		-
5	KLATEN			Kantor kecamatan	PERMANEN	Situasional	-
6	KLATEN			Aula	PERMANEN		-
1	SRAGEN	PRINGANOM	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
2	SRAGEN	PILANG	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
3	SRAGEN	SIDODADI	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	SRAGEN	JATI	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
5	SRAGEN	KLIWONAN	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
6	SRAGEN	GENTAN BANARAN	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
7	SRAGEN	GEDONGAN	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
8	SRAGEN	KARANGANYAR	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
9	SRAGEN	PANDAK	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
10	SRAGEN	SRIBIT	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
11	SRAGEN	BENTAK	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
12	SRAGEN	PATIHAN	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
13	SRAGEN	TENGGAK	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
14	SRAGEN	JONO	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
15	SRAGEN	GAWAN	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
16	SRAGEN	KECIK	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
17	SRAGEN	PENGGOL	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
18	SRAGEN	PADAS	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
19	SRAGEN	SUWATU	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
20	SRAGEN	TANGKIL	SRAGEN	Balai Desa	PERMANEN		-
21	SRAGEN	KEDUNGUPIT	SRAGEN	Balai Desa	PERMANEN		-
22	SRAGEN	BENDO	SUKODONO	Balai Desa	PERMANEN		-
23	SRAGEN	NEWUNG	SUKODONO	Balai Desa	PERMANEN		-
24	SRAGEN	BANARAN	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
25	SRAGEN	BEDORO	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
26	SRAGEN	CEMENG	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
27	SRAGEN	SAMBUNG MACAN	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
28	SRAGEN	PLUMBON	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
29	SRAGEN	KARANGANYAR	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
30	SRAGEN	MLALE	JENAR	Balai Desa	PERMANEN		-
31	SRAGEN	KARANGUDI	NGRAMPAL	Balai Desa	PERMANEN		-
32	SRAGEN	KLANDUNGAN	NGRAMPAL	Balai Desa	PERMANEN		-
1	WONOGIRI	SEMBALUN	TIRTOMOYO	MASJID BAITURAHMAN	PERMANEN	100 orang	-
2	WONOGIRI	BULUREJO	NGUNTORONADI	RUMAH KADUS	PERMANEN	50 orang	-
3	WONOGIRI	BULUREJO	NGUNTORONADI	SD KRAPYAK	PERMANEN	200 orang	-
1	SUKOHARJO	LAWU	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
2	SUKOHARJO	BARAN	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
3	SUKOHARJO	NGUTER	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
4	SUKOHARJO	TANJUNG	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
5	SUKOHARJO	POJOK	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
6	SUKOHARJO	DALANGAN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
7	SUKOHARJO	MAJASTO	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
8	SUKOHARJO	TANGKISAN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
9	SUKOHARJO	TAMBAKBOYO	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
10	SUKOHARJO	PONOWAREN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
11	SUKOHARJO	NGASINAN	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
12	SUKOHARJO	LENGKING	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
13	SUKOHARJO	KARANGASEM	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
14	SUKOHARJO	KENEP	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
15	SUKOHARJO	BANMATI	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
16	SUKOHARJO	KRIWEN	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
17	SUKOHARJO	BULAKAN	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
18	SUKOHARJO	DUKUH	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
19	SUKOHARJO	SONOREJO	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
20	SUKOHARJO	PONDOK	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
21	SUKOHARJO	PARANGJORO	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
22	SUKOHARJO	TELUKAN	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
23	SUKOHARJO	KADOKAN	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
24	SUKOHARJO	GROGOL	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
25	SUKOHARJO	LANGENHARJO	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
26	SUKOHARJO	TEGALMADE	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
27	SUKOHARJO	LABAN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
28	SUKOHARJO	WIRUN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
29	SUKOHARJO	PLUMBON	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
30	SUKOHARJO	GADINGAN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
31	SUKOHARJO	PALUR	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
32	SUKOHARJO	NGROMBO	BAKI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
33	SUKOHARJO	MANCASAN	BAKI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	

LAMPIRAN 8 :SOP/Protap

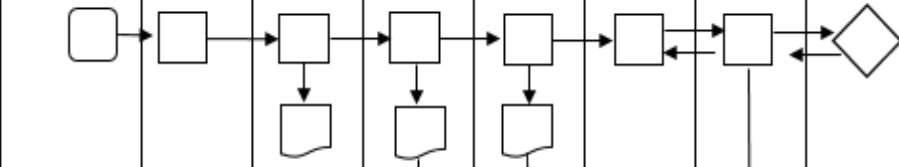
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH
MASA SIAGA DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Banjir Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Banjir Bengawan Solo	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama BBWS dan Pos Pantau BBWS untuk mengkaji dan menganalisis besaran debit banjir dan skenario limpasan banjir mendekati level waspada									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario banjir yang akan terjadi	
3	Menyiagakan personel yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 9 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personel TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personel	
5	Menyiagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di Pusdalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personel	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH
MASA TANGGAP DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan status debit air Sungai Bengawan Solo	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH
MASA TRANSISI DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo	
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer. Armada PB	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana	

LEMBAR KOMITMEN**RENCANA KONTINGENSI BANJIR BENGAWAN SOLO
PROVINSI JAWA TENGAH 2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada 4 April, 21-22 Juni, 25 Juli, 22 September, dan 9 November 2022, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud :

No	Kegiatan
1	Diseminasi Dokumen Renkon Bengawan Solo bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
2	Melakukan Uji Publik Dokumen Rencana Kontingensi, TTX, dan Gladi
3	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
4	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat pada saat terjadi bencana
5	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
6	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika diperlukan
7	Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

PANGDAM IV-DIPONEGORO**WIDI PRASETIJONO**
Mayor Jenderal TNI**KAPOLDA JAWA TENGAH****Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.**
Inspektur Jenderal Polisi

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
BANJIR BENGAWAN SOLO**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bengawan Solo pada tanggal pada 4 April, 21-22 Juni, 25 Juli, 22 September, dan 9 November 2022 di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

<p>1 SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>2 PANGDAM IV DIPONEGORO</p> 	<p>KAPOLDA JAWA TENGAH</p> 
<p>KALAKOR BPRD PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>5 KEPALA BKKAD PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>KEPALA DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>7 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>8 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, MARGA DAN CIPTAKARYA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>9 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KERUDAJAAN PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>10 KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>11 KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEKUTUP</p> 	<p>12 KEPALA DINAS PERUMAHAN, RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>13 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>KEPALA SATPOL PP PROV. JAWA TENGAH</p> 	

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

1.1 Latar Belakang Ancaman Bencana

Penanggulangan bencana menghendaki keterlibatan aktif dari berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Untuk daerah-daerah rawan bencana terutama dengan dampak bencana yang luas diperlukan keterpaduan dan kerjasama solid dari segenap pemangku kepentingan.

Ancaman bencana di sepanjang pesisir selatan Jawa dipengaruhi oleh panjangnya bentangan garis pantai sepanjang 150-200 km dari titik pertemuan lempeng Australia dan lempeng Eurasia, dimana lempeng tersebut berpotensi menjadi episentrum gempa bumi dan memicu terjadinya tsunami. Panjang garis pantai di Jawa Tengah mencapai 289,07 km, kondisi ini menunjukkan warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang pesisir selatan Jawa rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Setidaknya warga yang tinggal di pesisir selatan yang akan terkena dampak langsung yakni warga di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. Kondisi tersebut tentunya menjadi dasar awal pemerintah kabupaten hingga pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pengurangan risiko bencana.

Upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami menjadi prioritas Pemerintah. Utamanya empat kabupaten yang memiliki risiko tinggi untuk menyusun dokumen rencana kontingensi dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten masing-masing bersama pemangku kepentingan yang lain untuk menyelenggarakan kegiatan saat pra bencana maupun penanganan darurat bencana.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran Lembaga Asing non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancamana yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dokumen acuan yang disusun dan disepakati oleh seluruh stakeholders guna mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi kritis atau darurat, dalam hal ini adalah terjadinya bencana tsunami di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Tsunami sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam Menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah secara lebih terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.
2. Sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama sebagai dasar mobilisasi sumber daya pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.

3. Sebagai rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan.

Cakupan luasan ancaman bencana gempa bumi dan tsunami dalam rencana kontingensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 4 (empat) kabupaten (Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri). Sebagian wilayah terdampak gempa bumi dan tsunami, sementara sebagian lainnya hanya terdampak gempa bumi saja.

1.5 Kebijakan dan Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan dan strategi dalam penanganan darurat merupakan arahan dan /atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan Darurat dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan cakupan layanan meliputi pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana serta pemulihan sarana prasarana penting dengan memprioritaskan kelompok rentan dan memperhatikan aspek aksesibilitasnya. Rincian kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Pemerintah kabupaten terdampak di Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten;
2. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;

3. Pemerintah kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati menyatakan kabupaten dalam status keadaan darurat bencana dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan melalui pendirian Pos Pendukung;
4. Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum;
5. Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
6. Pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan;
7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat
8. Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam penanggulangan kedaruratan;
9. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
10. Biaya pelayanan kesehatan terdampak bencana di bebaskan;
11. Mengevaluasi penanggulangan bencana.

b. Strategi

Strategi penanggulangan bencana merupakan upaya guna mencapai kebijakan yang telah ditentukan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan tersebut yaitu:

1. Penetapan masa tanggap darurat selama 30 hari dengan keputusan Gubernur;

2. Pengerahan sarana angkutan udara yang tersedia untuk operasi Penyelamatan di daerah terpencil dan terisolasi;
3. Pengerahan personel pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
4. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan;
5. Pengerahan cadangan logistik provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung;
6. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender;
7. Perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan;
8. Mendirikan Pos Pendamping atau Pos Bantuan;
9. Menyediakan akses informasi masyarakat dan media;
10. Memberikan laporan perkembangan secara periodik;
11. Mengkoordinir penanganan korban terluka, meninggal dunia, dan hilang dengan melakukan pelayanan pencarian dan penyelamatan dengan aktivitas;
12. Mengkoordinir penanganan korban selamat (Pengungsi) dengan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), termasuk kesehatan, psikososial dan Pendidikan dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pendirian/penentuan shelter/penampungan darurat;

- b. Pendirian Dapur Umum ;
 - c. Pengelolaan logistik;
 - d. Pelayanan kesehatan dan psikososial;
 - e. Pendidikan darurat (sekolah darurat);
 - f. Mendirikan tempat peribadatan darurat;
13. Mengkoordinir pemulihan fungsi sarana dan prasarana umum yang vital (pasar, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum);
 14. Memastikan kemanana masyarakat dan aset dengan melakukan patroli kemanan yang melibatkan seluruh potensi yang ada antara lain pihak kepolisian;
 15. Memobilisasi seluruh OPD, institusi pemerintahan dan swasta, tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sesuai komitmen yang telah disepakati;
 16. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.

1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara partisipatif. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Tsunami. Adapun tahapan proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyamaan persepsi** terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi Tsunami.
- b. Pengumpulan data**, Pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
- c. Verifikasi data**, Analisa data sumber daya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.

d. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bahaya tsunami; periode, frekuensi dan luasan terdampak tsunami; pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sectoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

e. Penandatanganan komitmen, konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua pelaku (OPD dan Instansi serta badan usaha) yang terlibat dalam penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7 Umpan Balik

Memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah

1.8 Masa Berlaku

Dokumen rencana kontingensi Tsunami Jawa Tengah berlaku selama 2 tahun. Pemutakhiran dokumen renkon dilakukan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti halnya perubahan luasan terdampak landaan tsunami, perubahan besaran dan bentuk jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya maka diperlukan kaji ulang atau review guna mengupdate isi dokumen sesuai dengan kebutuhan

1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi tsunami menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) penanganan kedaruratan bencana tsunami di Jawa Tengah. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah dilakukan analisis dan mendapat data hasil kaji cepat bencana di lapangan

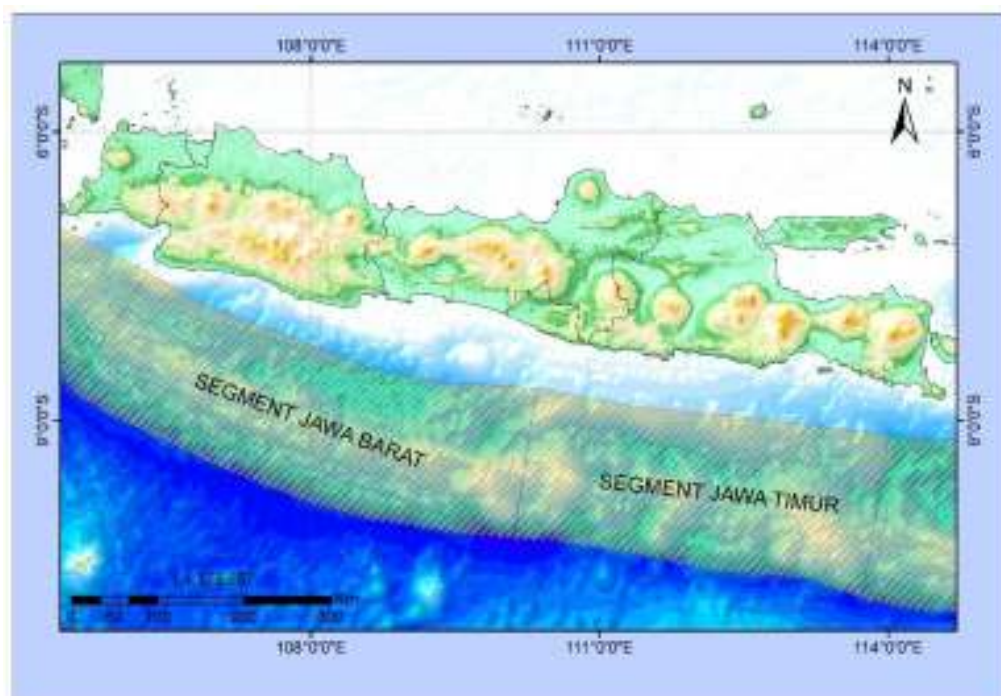
2.1 Karakteristik Bahaya

Identifikasi bahaya atau ancaman diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana, data sejarah kejadian bencana, atau hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah. Analisa bahaya/ancaman dilakukan untuk menentukan ideks bahaya/ancamana dari masing-masing wilayah, dari hasil Analisa tersebut dapat diperkirakan seberapa besaran luas bahaya yang akan terjadi di suatu daerah.

Pada Rencana Kontingensi tsunami hasil kajian para pakar lebih menjadi rujukan utama dalam penilaian bahaya yang akan dikembangkan menjadi skenario. Rujukan merupakan hasil penelitian dari BMKG tahun 2021 serta rujukan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia. Zona subduksi Jawa dengan banyak segmen (Tabel 2.1), memiliki frekuensi dan magnitudo kegempaan yang secara signifikan lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera. Meskipun demikian, terdapat beberapa gempa besar yang pernah terjadi di lepas pantai Selatan Jawa, utamanya sepanjang megathrust (Newcomb and McCann, 1987).

Berdasarkan historis kejadian subduksi gempa di Jawa, tidak ada yang mencapai 8M. Selain tsunami kecil yang terjadi pada tahun 1994 (Abercrombie, et.al., 2001) dan tahun 2006 (Ammon et.al., 2006; Fujii and Satake, 2006). Diperkirakan pergerakan relatif lempeng di zona subduksi Jawa diakomodasi terutama oleh pergerakan aseismic tanpa adanya penumpukan energi. Hipotesis ini didukung oleh fakta bahwa umur lempeng yang menunjam di bawah Jawa relative lebih tua (120-130.Ma) sehingga menjadi lebih dingin dan berat. Sebagai akibatnya, sudut penunjaman menjadi lebih besar sehingga lempeng samudera yang menunjam tidak bersinggungan kuat dengan lempeng Eurasia di atasnya. Hal ini juga didukung oleh banyaknya sesar normal di daerah fore-arc yang mengindikasikan dominasi *slab-pull force* dibandingkan dengan *slab-push force* di daerah ini (Abercrombie et.al., 2001).

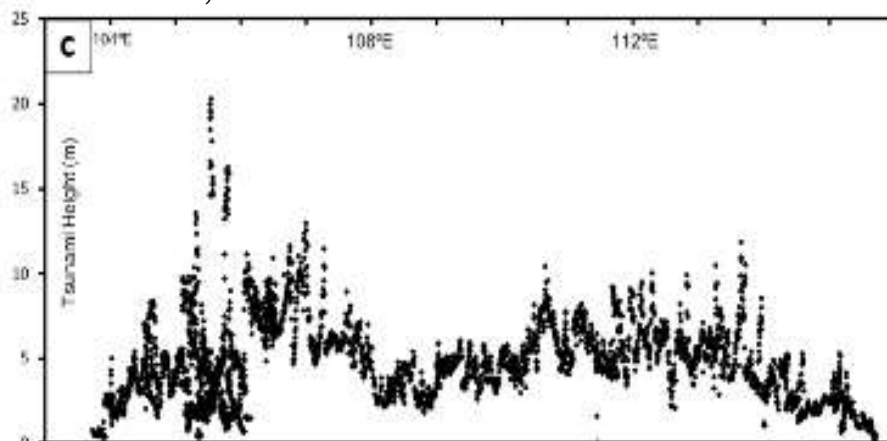
Berdasarkan kondisi gempa besar pada tahun 1994 dan 2006 menunjukkan bahwa zona subduksi Jawa tidak sepenuhnya aseismic dan masih menyimpan potensi kegempaan. Adanya periode seismitas yang lama bisa jadi mengindikasikan adanya *locked patches* yang terisolasi di perbatasan lempeng. *Locked patches* yang terisolasi ini apabila melepaskan energi akan menimbulkan gempa dengan magnitude besar. Keberadaan *locked patches* ini disebabkan karena adanya subduksi *seamount* (Abercrombie et al., 2001). Gempa subduksi yang terjadi pada 1994 dan 2006 terjadi di daerah palung sehingga kemungkinan besar gempa terjadi karena adanya *isolated locked-zone* di perbatasan subduksi Jawa. Berdasarkan hasil penelitian potensi kegempaan di zona subduksi Jawa berpotensi terjadi di daerah *seismic gap* (wilayah sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun), (McCann et al., 1979). *Seismic gap* perlu diwaspadai karena memiliki potensi menimbulkan gempa besar dan biasanya terjadi dengan periode ulang 400 tahun.



Sumber: BMKG, 2022

Gambar 2.1 Sumber Gempabumi Megathrust Jawa

Berdasarkan hasil penelitian terbaru oleh tim peneliti ITB, potensi terjadinya tsunami yang terjadi di selatan Jawa bisa mencapai ketinggian maksimal 20-12 m dengan rata-rata ketinggian 4,5m di sepanjang selatan Jawa menggunakan pemodelan skenario terburuk. Hasil pemodelan menunjukkan ketinggian tsunami yang dihasilkan di sepanjang pantai selatan Jawa kemungkinan besar terjadi di wilayah antara 105° dan 106° BT yaitu pulau-pulau kecil yang terletak ~11 hingga 15 km dari garis pantai terdekat dengan ketinggian 20,2 m. Skenario tersebut menghasilkan ketinggian rata-rata 3,23 m di sepanjang pantai selatan Jawa dengan ketinggian maksimum 11,7 m terjadi pada 113,65° BT di sepanjang pantai selatan Jawa Timur. Keterdapatannya zona retakan yang luas di wilayah ini telah menghasilkan ketinggian puncak tsunami yang hampir sama di sepanjang pantai antara 110° BT dan 114° BT dengan ketinggian tsunami rata-rata yang lebih rendah dari 2,43 m.



Sumber: Widiyantoro. Et.all, 2020

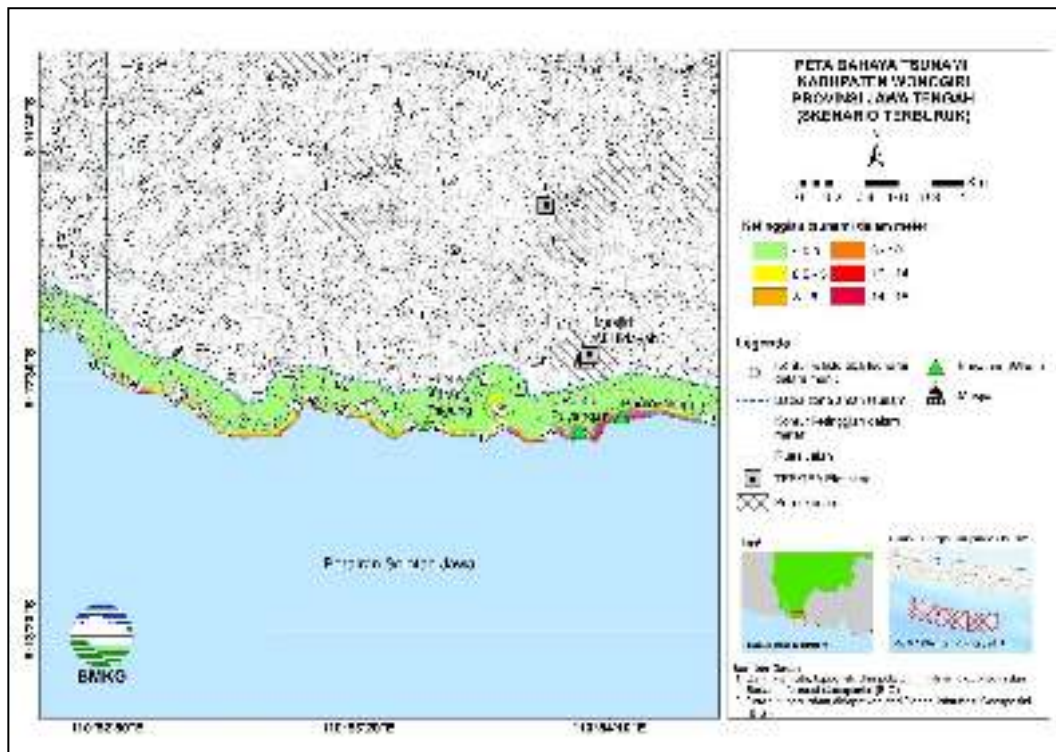
Gambar 2.2 Pemodelan Ketinggian Tsunami di Pesisir Selatan Jawa

Ancaman bencana gempa bumi dan tsunami masuk ke dalam skala probabilitas dan dampak yang tinggi. Sebagai upaya pengurangan risiko bencana BMKG telah Menyusun peta ancaman skenario terburuk masing-masing kabupaten sebagai berikut:

Wonogiri :

Peta bahaya tsunami Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa

terdapat 3 desa (Gunturharjo, Gudangharjo dan Paranggupito) dari satu kecamatan yang terancam tsunami yaitu Kecamatan Paranggupito.

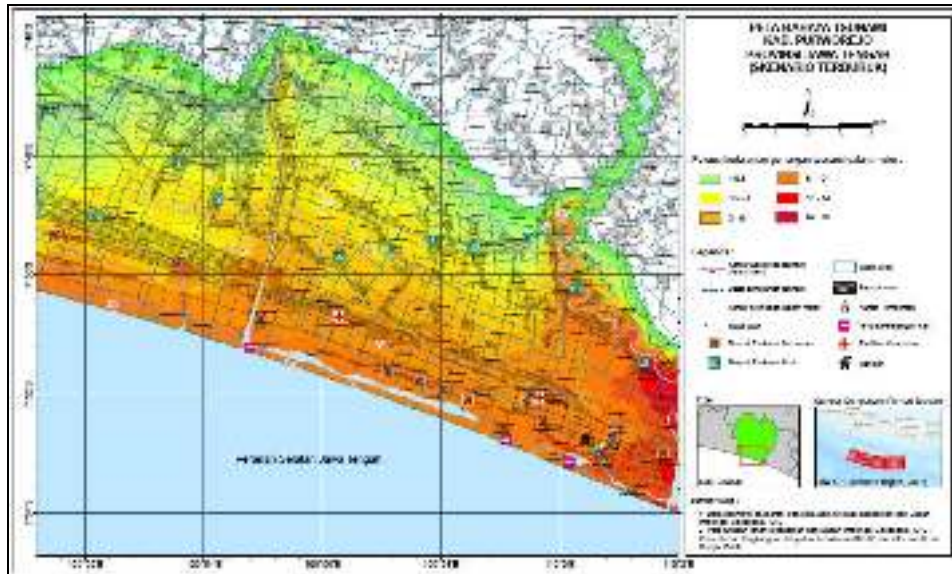


Sumber: BMKG, 2022

Gambar 2.3 Peta Bahaya Tsunami Kab. Wonogiri

Purworejo:

Peta bahaya tsunami Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa terdapat 48 desa dari 3 kecamatan yang terancam tsunami yaitu Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Ngombol.

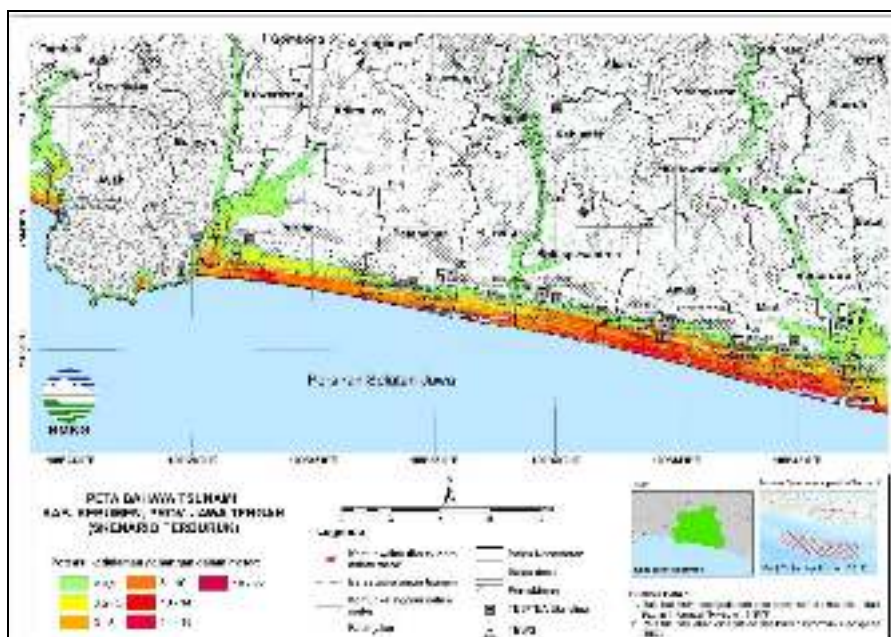


Sumber: BMKG, 2022

Gambar 2.4 Peta Bahaya Tsunami Kab. Purworejo

Kebumen:

Peta bahaya tsunami Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa terdapat 33 desa dari 8 kecamatan yang terancam tsunami yaitu Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Puring, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Mirit, dan Kecamatan Ambal.

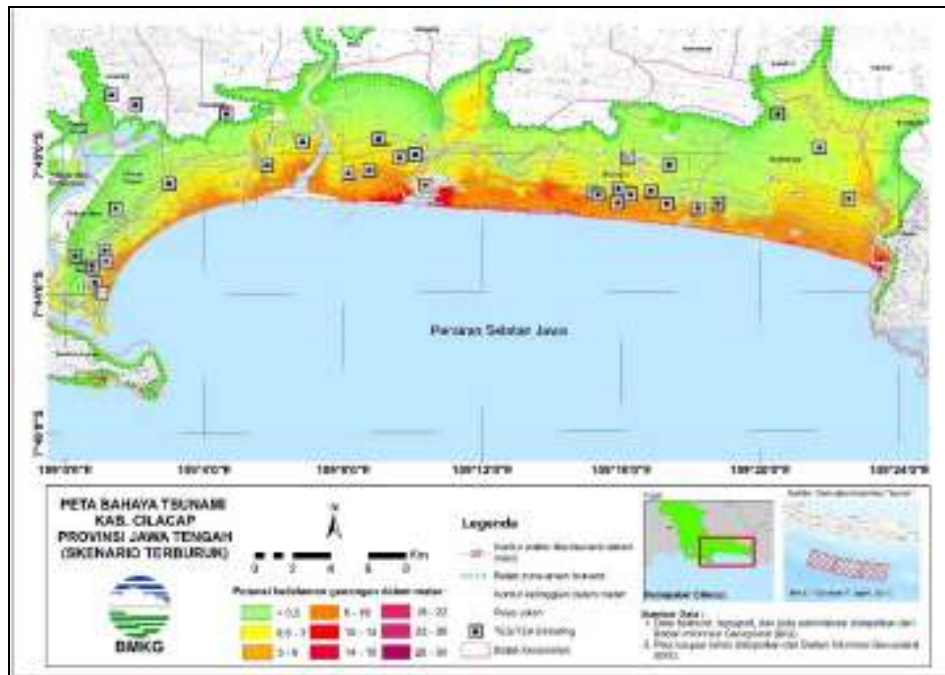


Sumber: BMKG, 2022

Gambar 2.5 Peta Bahaya Tsunami Kab. Kebumen

Cilacap:

Peta bahaya tsunami Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa terdapat 55 desa dari 10 kecamatan yang terancam tsunami yaitu Kecamatan Patimuan, Kecamatan Kampunglaut, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Utara.



2.2 Skenario Kejadian

Tabel 2.1 Skenario Bencana Tsunami

Waktu kejadian	Terjadi Tsunami Pada hari libur di siang hari
Lokasi	Sepanjang Pantai Cilacap sampai Wonogiri
Pemicu	Gempa Megathrust West-Central Java, dengan Magnitude: 8.7 SR Durasi: 60 detik; kedalaman: 18 Km,
Bahaya primer	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Rusak • Bangunan Runtuh • Tsunami (tinggi gelombang 10-19 m)

	<ul style="list-style-type: none"> • Landaan gelombang : 150 m – 5Km
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini dari BMKG memberikan info peringatan dini tsunami setelah 5 menit pasca gempabumi
Cakupan wilayah terdampak	<p>1. Kabupaten Cilacap Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Cilacap dalam 36 menit dengan ketinggian 16-18 meter</p> <p>2. Kabupaten Kebumen Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Kebumen dalam +/- 30 menit dengan ketinggian 16-18 meter</p> <p>3. Kabupaten Purworejo Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Purworejo dalam 32 menit dengan ketinggian 16-18 meter</p> <p>4. Kabupaten Wonogiri Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Wonogiri dalam 24 menit dengan ketinggian 16-19 meter</p>
Bahaya sekunder	<p>1. Kabupaten Cilacap</p> <ul style="list-style-type: none"> → Tumpahan minyak ke permukaan air laut → Kebakaran karena konsleting arus listrik → Terputusnya jaringan komunikasi → Listrik mati se-Jawa Bali karena PLTU terdampak gempabumi dan tsunami → Kegagalan Teknologi di UP4 <p>2. Kabupaten Purworejo</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kerusakan pada waduk → Kebakaran karena konsleting arus listrik → Terputusnya jaringan komunikasi <p>3. Kabupaten Kebumen</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kerusakan pada Waduk Sempor dan Wadaslintang

	<ul style="list-style-type: none"> → Kerusakan pada PLTA Wadaslintang → Kerusakan pada beberapa Embung <p>4. Kabupaten Wonogiri</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kerusakan pada Waduk Gajahmungkur → Kerusakan pada beberapa Embung → Kerusakan pada PLTA Gajahmungkur → Longsor sungai bawah tanah
Bahaya pendamping	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi Covid-19 • Wabah Muntaber • Diare • Malaria • DBD • Tyroid • Kekurangan Gizi

2.3 Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah kependudukan yang terdampak langsung di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 870.983 jiwa. Jumlah penduduk terluka sekitar 292.547 jiwa, terdiri dari luka ringan 129.295 jiwa, luka berat 163.442 jiwa, mengungsi 458.330 jiwa, hilang 40.814 jiwa dan meninggal dunia 79.292 Jiwa. Sedangkan jumlah wisatawan domestik terdampak diperkirakan 3000 Orang dan wisatawan.

1. Kabupaten Cilacap

Asumsi lokasi terdampak di Kab.Cilacap meliputi 55 desa di 10 kecamatan yaitu Kec. Patimuan, Kawunganten, Kampunglaut, Kesugihan, Adipala, Binangun, Nusawungu, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Meninggal	: 76.763 jiwa
Hilang	: 38.382 jiwa
Mengungsi	: 383.817 jiwa
Luka berat	: 161.526 jiwa
Luka ringan	: 123.144 jiwa

2. Kabupaten Kebumen

Asumsi lokasi terdampak di Kab. Kebumen meliputi 33 Desa di 8 Kecamatan yaitu Kec. Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa terancam	: 53.817 Jiwa
Meninggal	: 640 Jiwa
Mengungsi	: 32.847 Jiwa
Luka berat	: 650 Jiwa
Luka ringan	: 2603 Jiwa

3. Kabupaten Purworejo

Asumsi lokasi terdampak di Kab. Purworejo meliputi 48 desa dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Ngombol. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Meninggal	: 1.604 Jiwa
Hilang	: 914 Jiwa
Mengungsi	: 27.575 Jiwa
Luka berat	: 551 Jiwa
Luka ringan	: 1.604 Jiwa

4. Kabupaten Wonogiri

Asumsi lokasi terdampak di Kab. Wonogiri meliputi 3 desa di 1 kecamatan yaitu Kecamatan Paranggupito. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Meninggal	: 285 Jiwa
Hilang	: 1.518 Jiwa
Mengungsi	: 14.091 Jiwa
Luka berat	: 715 Jiwa
Luka ringan	: 1754 Jiwa

B. Aspek Fisik

Berdasarkan scenario gempa bumi dan tsunami pesisir selatan

Jawa Tengah bahay primer berupa kerusakan bangunan sedang hingga tinggi, serta gelombang tsunami setinggi 10 – 30 meter dengan landaan gelombang sejauh 150 m – 5 km dari lepas pantai. Diperkirakan fasilitas dan sarana prasarana yang terkena adalah fasilitas umum jalan lingkar selatan,

Tabel 2.2 Asumsi Dampak Aspek Fisik

No	Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan
1	Jaringan Listrik	Kab.Cilacap: 40%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 20%	
		Kab. Purworejo: 15%	
		Kab. Wonogiri: 30%	
2	Sumber Air	Kab.Cilacap: 43%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 30%	
		Kab. Purworejo 35%	
		Kab. Wonogiri: 20%	
3	Jalan	Kab.Cilacap: 40%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 27%	
		Kab. Purworejo: 25%	
		Kab. Wonogiri: 38%	
4	Jembatan	Kab.Cilacap: 30%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 25%	
		Kab. Purworejo: 10%	
		Kab. Wonogiri: 15%	
5	Prasarana Transportasi Darat	Kab.Cilacap: 40%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen:15%	
		Kab. Purworejo: 10%	
		Kab. Wonogiri: 2%	
6	Prasarana Transportasi Laut	Kab.Cilacap: 70%	Rusak Berat
		Kab. Kebumen: -	
		Kab. Purworejo: -	
		Kab. Wonogiri: 2%	
7	Sarana Komunikasi dan	Kab.Cilacap: 25%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 15%	Rusak Ringan-Berat

No	Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan
	Jaringan Telepon	Kab. Purworejo: 21%	Rusak Berat
		Kab. Wonogiri: 45%	Rusak Ringan-Berat
		Kab.Cilacap: 20%	
8	Fasilitas Kesehatan	Kab. Kebumen: 10%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Purworejo: 10%	
		Kab. Wonogiri:15%	
9	Sekolah	Kab.Cilacap: 46%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Kebumen: 35%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Purworejo: 13%	Rusak Berat
10	Tempat Ibadah	Kab. Wonogiri:44%	Rusak Ringan-Berat
		Kab.Cilacap: 15%	
		Kab. Kebumen: 10%	Rusak Ringan-Berat
11	PLTU/Pertamina	Kab. Purworejo: 17%	Rusak Ringan-Berat
		Kab. Wonogiri: 5%	
		Kab.Cilacap: 60%	Rusak Berat
12	Pabrik Semen	Kab. Wonogiri: 45%	Rusak Berat
		Kab.Cilacap: 60%	
		Kab.Cilacap: 55%	Rusak Berat
13	Prasarana Ekonomi (Pasar, RM, Warung, dll)	Kab. Kebumen: 10%	Rusak Berat
		Kab. Purworejo: 5%	Rusak Berat
		Kab. Wonogiri: 5%	Rusak Berat
14	Rumah Penduduk	Kab.Cilacap: 40%	Rusak Berat
		Kab. Kebumen: 20%	Rusak Berat
		Kab. Purworejo: 25%	Rusak Berat
		Kab. Wonogiri: 35%	Rusak Ringan-Berat

C. Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industry, perkebunan, perikanan hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Kerugian diperkirakan mencapai Rp.18.045.000.000

Tabel 2.3 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi

No	Jenis Kerusakan	Nominal Kerugian (Rp)
1	Pasar tradisional	Kab.Cilacap: 120.000.000
		Kab. Kebumen: 175.000.000
		Kab. Purworejo: 60.0000.000
		Kab. Wonogiri: 50.000.000
2	Warung	Kab.Cilacap: 780.000.000
		Kab. Kebumen: 300.000.000
		Kab. Purworejo: 320.000.000
		Kab. Wonogiri: 300.000.000
3	Lahan sawah	Kab.Cilacap: 43.000.000
		Kab. Kebumen: 350.000.000
		Kab. Purworejo: 38.000.000
		Kab. Wonogiri: 25.000.000
4	Tegalan/Kebun	Kab.Cilacap: 67.000.000
		Kab. Kebumen: 155.000.000
		Kab. Purworejo: 59.000.000
		Kab. Wonogiri: 35.000.000
5	Ternak	Kab.Cilacap: 231.000.000
		Kab. Kebumen: 6.200.000.000
		Kab. Purworejo: 210.000.000
		Kab. Wonogiri: 145.000.000
6	Industri	Kab.Cilacap: 1.000.000.000
		Kab. Kebumen: 450.000.000
		Kab. Purworejo: -
		Kab. Wonogiri: 80.000.000
7	Tempat Wisata	Kab.Cilacap: 957.000.000
		Kab. Kebumen: 3.750.000.000

No	Jenis Kerusakan	Nominal Kerugian (Rp)
		Kab. Purworejo: 750.000.000
		Kab. Wonogiri: 855.000.000

D. Aspek Lingkungan

Dampak gempa bumi dan tsunami juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan sedang-berat pada kondisi air, tanah/lahan dan hutan.

1) Kab. Wonogiri

Tabel 2.4

Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Wonogiri

No	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan	
		Ringan	Berat
1	Pencemaran air	11%	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	7%	-
4	Lahan Hutan/cagar alam	7%	-
5	Ladang/Kebun	4%	-

2) Kab. Purworejo

Tabel 2.5 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan	
		Ringan	Berat
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan Hutan/cagar alam	-	15%
5	Ladang/Kebun	-	15%

3) Kab. Kebumen

Tabel 2.6 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Kebumen

No	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan	
		Sedang	Berat
1	Hutan Mangrove	-	40 Ha
2	Hutan Alam	-	290 Ha
3	Sumber Air	4 Sungai	-

4) Kab. Cilacap

Tabel 2.7 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Cilacap

No	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan	
		Presentase	Satuan
1	Pencemaran		
	- Tumpahan Minyak	15	Hektar
	- Tumpahan Batu Bara	15	Hektar
	- Kebocoran Gas	5	Unit
2	Kerusakan Hutan Payau	30	Km
3	Habitat Bibit Udang	21	Hektar
4	Cagar Alam Nusakambangan Sisi Barat	30	Hektar

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Dampak gempa bumi dan tsunami di 4 Kabupaten di pesisir selatan Jawa mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi layanan publik vital diantaranya:

1) Kab. Cilacap

Mengakibatkan kerusakan kantor pemerintahan meliputi

Kantor Kabupaten

Kantor Dinas : 30 Unit

Kantor Kecamatan : 11 unit

Kantor Kelurahan/Desa : 54 unit

2) Kab. Kebumen

Mengakibatkan kerusakan kantor pemerintahan meliputi

Kantor Desa : 26

Kantor Kec: 8

3) Kab. Purworejo

Mengakibatkan kerusakan kantor pemerintahan meliputi:

Kantor Desa : 24 Unit

Puskesmas : 4 Unit

4) Kab. Wonogiri

Mengakibatkan kerusakan 88 kantor pemerintahan

3.1 Tugas Pokok

Komando penanganan darurat Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke empat kabupaten.

Operasi penanganan darurat bencana gempa dan tsunami dan tugas kemanusiaan dilakukan selama 14 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 4 Kabupaten (Wonogiri, Purworejo, Kebumen, Cilacap). Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 dengan optimalisasi Satgas COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana.

3.2 Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana tsunami dalam waktu 72 jam;
2. Terselenggaranya rapat koordinasi yang melibatkan 5 unsur pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media Massa) dan 4 kabupaten terdampak;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan menjalankan fungsi SKPDB;
4. Terlaksananya pengerahan sumber daya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Jawa tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
5. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak atau korban tsunami sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19;
6. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
7. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kabupaten terdampak tsunami dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Operasi penanganan darurat bencana dibagi menjadi dua fase yaitu fase tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 4.1 Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana Tsunami

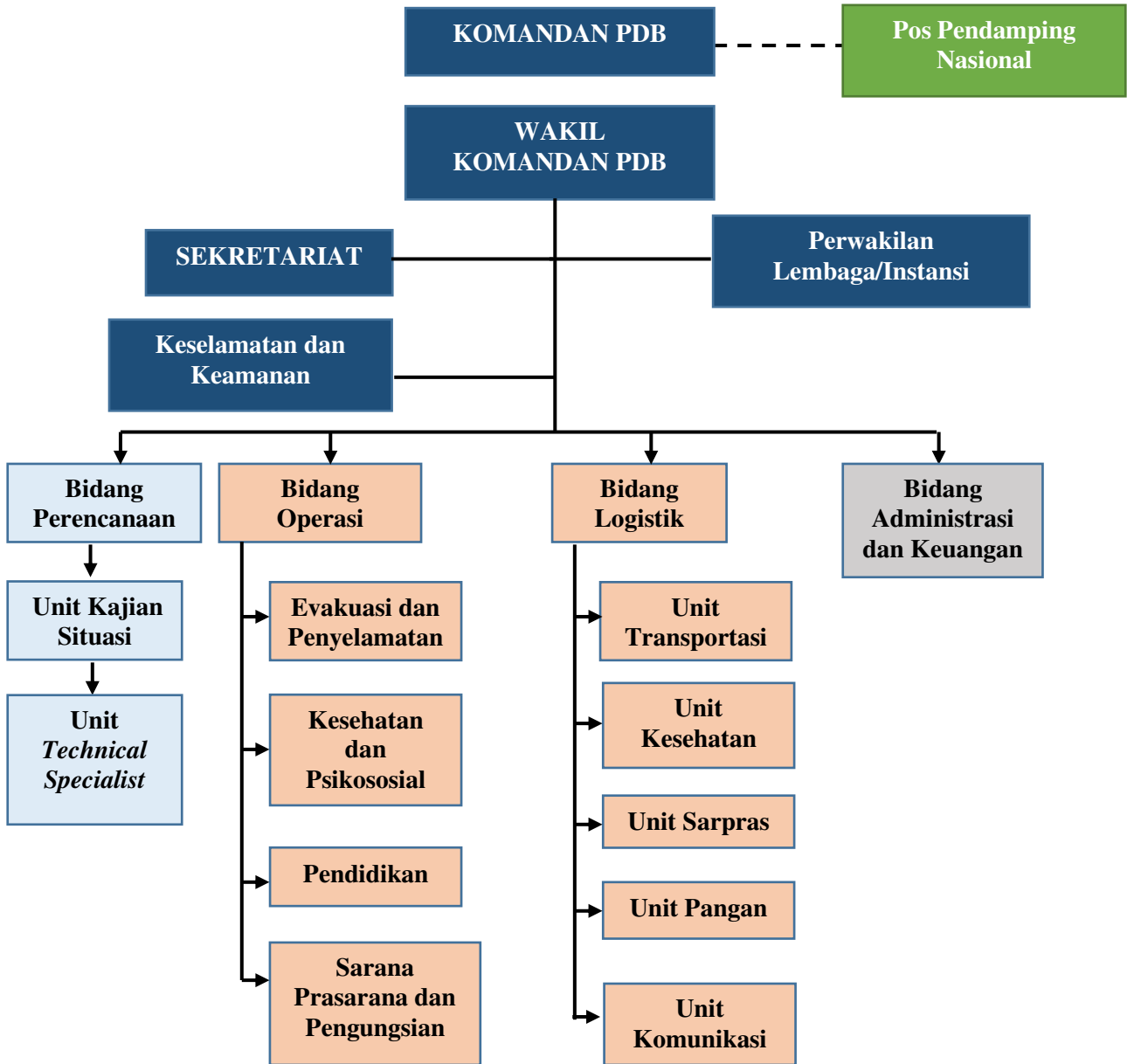
Fase	Sasaran Tindakan
Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Terbitnya Keputusan Gubernur tentang status tanggap darurat bencana tsunami;2. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan;3. Mendukung dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana operasi;4. Mobilisasi sumber daya: personel, peralatan, logistik, untuk pendukung;5. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana tsunami tingkat provinsi;6. Pembentukan Pos Lapangan ;7. Mendorong aktivasi satuan komando penanganan darurat bencana tsunami 4 kabupaten terdampak;8. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan darurat bencana tsunami di lokasi terdampak;9. Membuka wilayah yang terisolasi guna memperlancar kegiatan <i>rescue</i> dan distribusi bantuan;10. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda;11. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM (Standar Pelayanan

Fase	Sasaran Tindakan
	<p>Minimal) pada masa kebencanaan;</p> <p>12. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia serta penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan);</p> <p>13. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19);</p> <p>14. Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>15. Melakukan update informasi terkait dampak dan penanganan bencana;</p>
<p>Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan</p>	<p>1. Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan;</p> <p>2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan;</p> <p>3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik;</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang;</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang;</p> <p>6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat;</p> <p>7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi;</p> <p>8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personel jika operasi diperpanjang;</p> <p>9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;</p>

4.2 Struktur Organisasi Komando

Berikut ini struktur Pos Komando penanganan darurat

bencana dan Pos Pendamping penanganan darurat sebagaimana berikut



Gambar 4.1 Struktur Komando Pos Pendamping Jawa Tengah

4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Provinsi dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB 4 Kabupaten terdampak bencana Tsunami (Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen, Cilacap), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya

- (a) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi Dan Informasi;
- (b) Perencanaan;
- (c) Operasi;
- (d) Logistik;
- (e) Administrasi dan Keuangan.

Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana Tsunami

Tindakan	Kegiatan Pokok
Tindakan 1: Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,	<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana tsunami;b. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana tsunami;c. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak;d. Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana tsunami.
Tindakan 2: Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none">a. Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana tsunami secara terpadu;b. Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat tsunami, berdasarkan prioritas dan

Tindakan	Kegiatan Pokok
	tujuan yang ditentukan; c. Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana tsunami.
Tindakan 3 : Operasi Penanganan Darurat Tsunami	a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat; c. Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan; d. Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap daurat bencana.
Tindakan 4: Pemenuhan Logistik untuk penanganan Darurat Tsunami	a. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, fasilitas akses kemudahan kelompok rentan, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan; b. Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat.
Tindakan 5: Pelayanan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Tsunami	a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana; c. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri, swasta dan masyarakat sesuai peraturan yang ada.

4.4 Tugas-Tugas

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya.

Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan bencana tsunami.

Tabel 4.3 Tugas SKPDB Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana Tsunami

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komandan PDB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana tsunami b. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana c. Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupaten terdampak tsunami d. Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, 39ecretar, pelayanan kesehatan dan penyelamatan e. Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
Wakil Komandan PDB	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana b. Mengkoordinir tugas-tugas 39ecretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga c. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
Pos Pendamping Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan POSKO PDB tsunami terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB
Perwakilan Institusi/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumber daya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah

Keselamatan dan keamanan	a. Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan posko PDB dan Pengungsian
Bidang Perencanaan	a. Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana tsunami secara terpadu; b. Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana.
Bidang Operasi	a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat.
Bidang Logistik	a. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Bidang Administrasi dan Keuangan	a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana; c. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.5 Instruksi Koordinasi

Memuat arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana Tsunami BPBD Provinsi Jawa Tengah menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten/Kota terdampak Tsunami yang telah melakukan pengkajian langsung di lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

- Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal

- Penyebab : Gempabumi yang memicu Tsunami
 - Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
 - Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan
2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat bencana tsunami penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.
 3. Apabila terjadi bencana tsunami yang melanda kabupaten segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.
 4. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap.
 5. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada keempat kabupaten terdampak tanpa mengambil alih komando penanganan darurat bencana.
 6. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.
 7. Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau/ relawan yang berasal dari instansi / lembaga dari tingkat Provinsi Jawa Tengah.
 8. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos PDB Provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang Pos Pendamping PDB Jawa Tengah

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana Tsunami pada situasi pandemic Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumber daya Kabupaten terdampak tsunami mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPD teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah masing-masing kabupaten terdampak tsunami;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil *assessment* di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personel, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta system administrasi;

5.2 Logistik

Pengeralahan sumber daya tingkat provinsi dalam menghadapi bencana Tsunami sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana tsunami sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumber daya kabupaten terdampak baik berupa personel, logistik dan peralatan dioptimalkan;

2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personel, logistik, dan peralatan ke Provinsi Jawa Tengah dan atau/Kabupaten terdekat dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi masing-masing;
3. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengerahkan sumber daya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi bersangkutan;
6. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan;
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah. Ketika terjadi status penanganan darurat bencana diikuti dengan pendirian Posko Komando Kabupaten, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan Pos Pendamping Provinsi. Apabila pemerintah kabupaten tidak mampu menangani keadaan darurat bencana, maka kepala daerah akan mengajukan peningkatan status bencana menjadi darurat provinsi. Dalam hal ini Pos Komando Kabupaten akan menjalankan fungsi sebagai Pos Lapangan, sementara Pos Pendamping Provinsi akan beralih menjadi Pos Komando. Dalam dokumen ini Pos Komando telah beralih ke tingkat provinsi.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Kabupaten Banyumas atau Kabupaten Purbalingga.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten.

Tabel 6.1 Pos Lapangan Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten	Pos Lapangan	Koordinat
Wonogiri	Balai Dusun Dringo	S8° 12.422' E110° 54.090'
Wonogiri	Lapangan Paranggupito	S8° 10.627' E110° 50.989'
Kebumen	Kantor Camat Ayah	S7°41'32,7516"E109°23'59,1216"
Kebumen	Kantor Camat Buayan	S7°41'00,6936"E109°29'23,3952"
Kebumen	Kantor Camat Puring	S7°44'09,906"E109°31'22,5084"
Kebumen	Kantor Camat Petanahan	S7°44'43,566"E109°35'19,4208"
Kebumen	Kantor Camat Klirong	S7°44'27,348"E109°37'41,556"
Kebumen	Kantor Camat Buluspesantren	S7°46'20,4636"E109°40'04,2456"
Kebumen	Kantor Camat Ambal	S7°47'08,7288"E109°43'09,7176"
Kebumen	Kantor Camat Mirit	S7°48'09,3132"E109°47'13,2396"
Purworejo	Kantor Kecamatan Grabag	-7.829672, 109.896552
Purworejo	Kantor Kecamatan Ngombol	-7.825091, 109.966033
Purworejo	Kantor Kecamatan Purwodadi	-7.083358, 110.918809
Cilacap	Kantor Kecamatan Nusawungu	-7.6484222,109.3406744
Cilacap	Kantor Kecamatan	-7.6680343,109.2646306

Kabupaten	Pos Lapangan	Koordinat
	Binangun	
Cilacap	Kantor Kecamatan Kroya	-7.6325361,109.2425427
Cilacap	Kantor Kecamatan Adipala	-7.659376,109.1498499
Cilacap	Kantor Kecamatan Cilacap Utara	-7.6845796,109.0367644
Cilacap	Kantor Kecamatan Cilacap Selatan	-7.7209708,109.0141716
Cilacap	Kantor Kecamatan Cilacap Tengah	-7.7053887,109.0284993
Cilacap	Kantor Kecamatan Jeruklegi	-7.6245575,109.0174748

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB, berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar, serta mobilisasi atau distribusi bantuan penanganana darurat bencana baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 6.2 Pos Pendukung Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Lapangan Sukorejo Kec. Wonogiri	-7.8244076,110.918472
Pos Pendukung 2	Bandara Ahmad Yani	-6.9663454,110.3749891
Pos Pendukung 3	Bandara Jendral Besar Soedirman	-7.4598512,109.4120505
Pos Pendukung 4	Bandara Adi	-7.5155113,110.753953

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
	Soemarmo	
Pos Pendukung 5	Bandara Tunggul Wulung	-7.6518153,109.0373299

6.1. **Kendali**

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana tsunami di Provinsi Jawa Tengah berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganann darurat bencana.

6.2. **Koordinasi**

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

6.3. **Komunikasi**

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi

- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX san 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 024-3519904

c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id

d. Fax : 024-3519186

6.4. **Informasi**

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi yang terlibat dalam struktur komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Rencana kontingensi ini disusun bersama oleh berbagai instansi/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka penanganan bencana Gempabumi dan tsunami Provinsi Jawa Tengah, beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Setelah selesai penyusunan rencana kontingensi, dokumen akan ditandatangani oleh setiap pimpinan instansi/organisasi yang terlibat dan akan dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur.
2. Menindaklanjuti rencana kontingensi tsunami perlu dilakukan pertemuan/koordinasi secara berkala maupun sesuai dengan kebutuhan untuk pemutakhiran data dan validasi data lainnya.
3. Untuk menguji ketepatan Rencana Kontingensi Tsunami yang dibuat, amaka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk *Table Top Exercise* (TTX), simulasi atau gladi dengan menggunakan skenario kejadian yang termuat dalam dokumen rencana kontingensi.
4. Apabila terjadi bencana Gempabumi dan Tsunami di Provinsi Jawa Tengah, rencana kontingensi ditransformasi menjadi rencana operasi tanggap darurat yang disesuaikan dengan kejadian sebenarnya.
5. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontingensi ini dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.
6. Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim.
7. Dilakukan diseminasi hasil dokumen renkon tsunami bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

8. Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Titik Evakuasi Akhir (TEA) perlu dilakukan peninjauan ulang oleh BPBD Kabupaten terdampak dengan memilih lokasi di tempat terbuka atau lapangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dibawah bendera hukum
sukSES dan nilai

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

7.2.

LAMPIRAN A Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN TSUNAMI PROV. JAWA TENGAH

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum: _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah**

DAERAH WAKTU : WIB

SANDI OPERASI : TSUNAMI PROV. JAWA TENGAH

SUSUNAN TUGAS:

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke Empat kabupaten.

Operasi penanganan darurat bencana tsunami dilakukan selama 14 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan

situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 4 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana. Konsep operasi dalam dua fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN B Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak Tsunami di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah meliputi empat kabupaten dengan asumsi penduduk terdampak langsung sebanyak 870.983 jiwa

1. Kabupaten Cilacap

Meninggal : 76.763 jiwa
Hilang : 38.382 jiwa
Mengungsi : 383.817 jiwa
Luka berat : 161.526 jiwa
Luka ringan : 123.144 jiwa

2. Kabupaten Kebumen

Meninggal : 640 jiwa
Mengungsi : 32.847 jiwa
Luka berat : 650 jiwa
Luka ringan : 2603 jiwa

3. Kabupaten Purworejo

Meninggal : 1.604 jiwa
Hilang : 914 jiwa
Mengungsi : 27.575 jiwa
Luka berat : 551 jiwa
Luka ringan : 1.604 jiwa

4. Kabupaten Wonogiri

Meninggal : 285 Jiwa
Hilang : 1518 Jiwa
Mengungsi : 14.091 Jiwa
Luka berat : 715 Jiwa
Luka ringan : 1754 Jiwa

Berdasarkan skenario gempa 8.7 SR dan skenario tsunami dengan ketinggian gelombang 10-19 m dengan landaan gelombang 150m – 5 km mengakibatkan beberapa kerusakan diantaranya

No	Jenis Kerusakan	Presentasi
1	Jaringan Listrik	26.25%
2	Sumber Air	32%
3	Jalan	32.5%
4	Jembatan	20%
5	Prasarana Transportasi Darat	16,75%
6	Prasarana Transportasi Laut	18%

Aspek Kependudukan

Aspek Fisik

7	Sarana komunikasi dan jaringan telepon	26,25%
8	Fasilitas Kesehatan	14%
9	Sekolah	35%
10	Tempat Ibadah	12%
11	PLTU/Pertamina	26,25%
12	Pabrik Semen	60%
13	Prasarana Ekonomi (Pasar, RM, Warung, dll)	18,75%
14	Rumah Penduduk	30%

Dampak bencana gempa dan tsunami mengakibatkan kerugian sebesar Rp.18.045.000.000 baik di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industry, perkebunan, perikanan hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Bencana Tsunami mengakibatkan kerusakan diantaranya:

Aspek Ekonomi

- Pasar Tradisional : Rp. 945.000.000
- Warung : Rp. 1.700.000.000
- Lahan Sawah : Rp. 456.000.000
- Tegalan/Kebun : Rp. 316.000.000
- Ternak : Rp. 6.786.000.000
- Industri : Rp. 1.530.000.000
- Tempat wisata : Rp. 6.312.000.000

Dampak tsunami pada aspek lingkungan berpengaruh terhadap pencemaran air, tanah, dan kerusakan terhadap lahan sawah serta kebun.

Aspek Lingkungan

- Pencemaran Air

Tsunami yang melanda mengakibatkan beberapa sumber mata air dan sumur warga tergenang, sehingga harus dilakukan pembersihan atau

menguras sumur. Dampak lainnya yaitu pencemaran sungai akibat tumpahan minyak dari kilang Pertamina

- Pencemaran Tanah/lahan

Pasca tsunami mengakibatkan sisa lumpur, tumpahan minyak, dan puing bangunan yang hancur. Akibatnya banyak lahan pertanian yang mengalami kerusakan utamanya lahan kebun dan sawah sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan beberapa lahan mengalami gagal panen.

- Kerusakan Lingkungan

Di pesisir selatan terdapat banyak industri yang berbatasan dengan laut. Ketika terjadi tsunami dampak yang dapat diakibatkan yaitu tumpahan minyak, kebocoran gas, hingga tumpahan batubara. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti cagar alam, dan hutan payau.

Aspek layanan
Publik/Pemerintah

Terhambatnya pelayanan jasa maupun pemerintah desa hingga kabupaten karena bangunan hancur akibat gempa bumi dan terdampak tsunami

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
1. Kepala Daerah	Gubernur Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2. Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis serta pendelegasian kewenangan kepada komandan tanggap darurat 3. Melakukan koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda
2. Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana tsunami 2. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupaten terdampak tsunami 4. Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, pelayanan kesehatan dan penyelamatan 5. Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
3. Wakil Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasdam Kodam IV Diponegoro 2. Wakapolda Kapolda Jawa Tengah 3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana 2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
4. Sekretaris		

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin (Lead)	Kabag TU BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan agenda Komandan PDB
Pendukung	Unsur BPBD Provinsi Jawa Tengah	
5. Perwakilan Institusi/Lembaga		
Pemimpin	Ketua FPRB Jawa Tengah	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumber daya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum CSR 2. Ketua FPT PRB Jawa tengah 3. Ketua Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Jawa Tengah 4. Ketua Organda 5. Ketua MDMC Jawa Tengah 6. Ketua LPBI NU Jawa Tengah 7. Ketua Kwarda Jawa Tengah 8. Ketua PMI Jawa Tengah 9. Ketua BAZNAS Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat tsunami dan dampaknya berdasarkan hasil kajian di lapangan dan instrumen yang dimiliki 2. Membantu komandan untuk memastikan mobilisasi sumber daya instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Keselamatan dan Keamanan		
Pemimpin	Satpol PP Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan Posko kepada Komandan tanggap darurat
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajaran Kodam IV Diponegoro 2. Jajaran Satpol PP Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi, mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan 2. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antara pelaku bidang Keamanan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah 3. Memastikan kebutuhan dan memobilisasi bidang Keselamatan dan Keamanan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
6. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan Posko Provinsi terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Bidang Perencanaan		
1. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pengkajian situasi penanganan darurat dari masing-masing kabupaten terdampak tsunami
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (Asintel) 2. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 3. Dinas LHK Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. BPBD (Satgas Kedaruratan) 6. PMI Kabupaten Terdampak 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap status bahaya tsunami yang dikeluarkan BMKG 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat tsunami 3. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana tsunami 4. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing kabupaten/kota terdampak
2. Unit <i>Technical Spesialis</i>		
Pemimpin	BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara	Mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana tsunami yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (Pamenahli) 	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana tsunami yang membutuhkan keahlian khusus

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	2. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 3. FPTPRB 4. Akademisi	
Bidang Operasi		
1. Evakuasi dan Penyelamatan		
Pemimpin	Kepala Kantor SAR Semarang	Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan evakuasi dan pertolongan korban bencana tsunami
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (Kasdam) 2. POLDA Jawa Tengah (DitSamapta) 3. PMI Jawa Tengah 4. BPBD Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah BAGANA Jawa Tengah	1. Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan 2. Mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban tsunami 3. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personel pelaku evakuasi dan penyelamatan 4. Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan 5. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan
2. Kesehatan dan Psikososial		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1. Mengkoordinasi dan memastikan terlaksannya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial 2. Mengkoordinasi dan memastikan RSUD dan layanan kesehatan milik Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi guna mendukung layanan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro(KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes) 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. PMI Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah (Saka Bhakti Husada) 7. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) Jawa Tengah 8. RSUD Provinsi Jawa Tengah 9. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak 	<p>kesehatan korban tsunami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah 2. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi masyarakat terdampak tsunami
3. Pendidikan		
Pemimpin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Memastikan dan mengkoordinasikan antar pelaku bidang operasi pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLDA Jawa Tengah (Ditbinmashal) 2. Direktorat BINMAS MDMC 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. Disporapar Jawa Tengah 5. Kemenag Kanwil Jawa Tengah 6. PMI Jawa Tengah 7. KWARDA Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kabupaten/kota terdampak agar pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian 2. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang pendidikan bagi masyarakat terdampak tsunami 3. Menyusun rencana respon Pendidikan dalam situasi darurat; 4. Memfasilitasi penyelenggaraan sekolah darurat;

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	8. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Memberikan layanan dukungan psikososial; 6. Memastikan tingkat keamanan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Peningkatan partisipasi multi pihak
4. Sarana, Prasarana, dan Pengungsian		
Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Mendampingi Kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan sarana prasarana selama operasi penanganan darurat bencana tsunami
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro(Kazidam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biro Logistik) 3. Biro Kesra Setda Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya air dan Penataan Ruang 6. Unit Layanan Inklusi Disabilitas 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 8. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 9. PMI Jawa Tengah	1. Mendukung dalam bentuk sumber daya manusia dalam penyiapan akses ke daerah terdampak 2. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial yang terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan 3. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak tsunami
Bidang Logistik		
1. Unit Transportasi		
Pemimpin	Dinas Perhubungan Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting sarana transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	1. BPBD	1. Mendata kekurangan kebutuhan armada

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	2. KODAM IV Diponegoro (Kabekangdam) 3. Satpol PP Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. POLDA Jawa Tengah (Ditlantas) 6. Dinas LHK Jawa Tengah 7. Dinas PU BMCK Jawa Tengah 8. BASARNAS 9. Dinas ESDM	transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana 2. Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten/kota terdampak tsunami 3. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 4. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)
2. Unit Kesehatan		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting logistik obat-obatan dan peralatan medis lainnya
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes) 3. PMI Jawa Tengah 4. Lembaga Usaha 5. RSUD Jawa Tengah 6. MDMC 7. BASADA BANSER Jawa Tengah	1. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan masker kabupaten/kota terdampak 2. Mengkoordinasikan pembagian logistic dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota
3. Unit Sarana dan Prasarana		
Pemimpin	BPBD Prov. Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung penanganan tanggap darurat

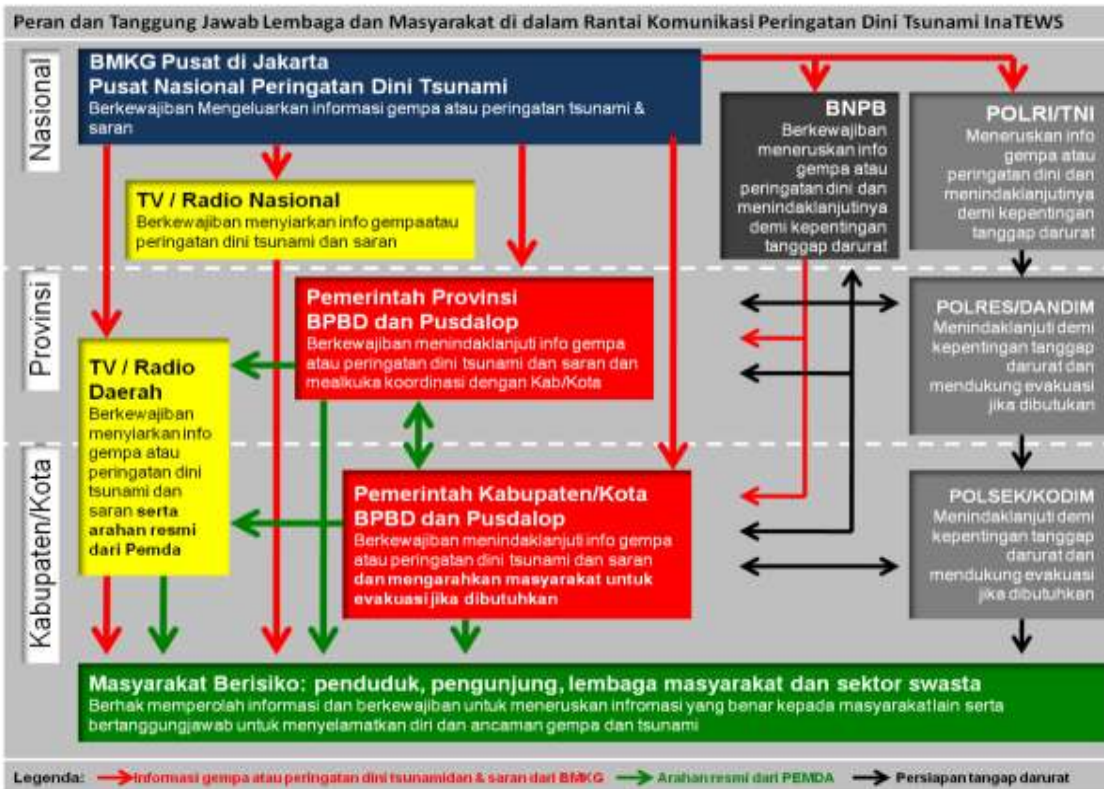
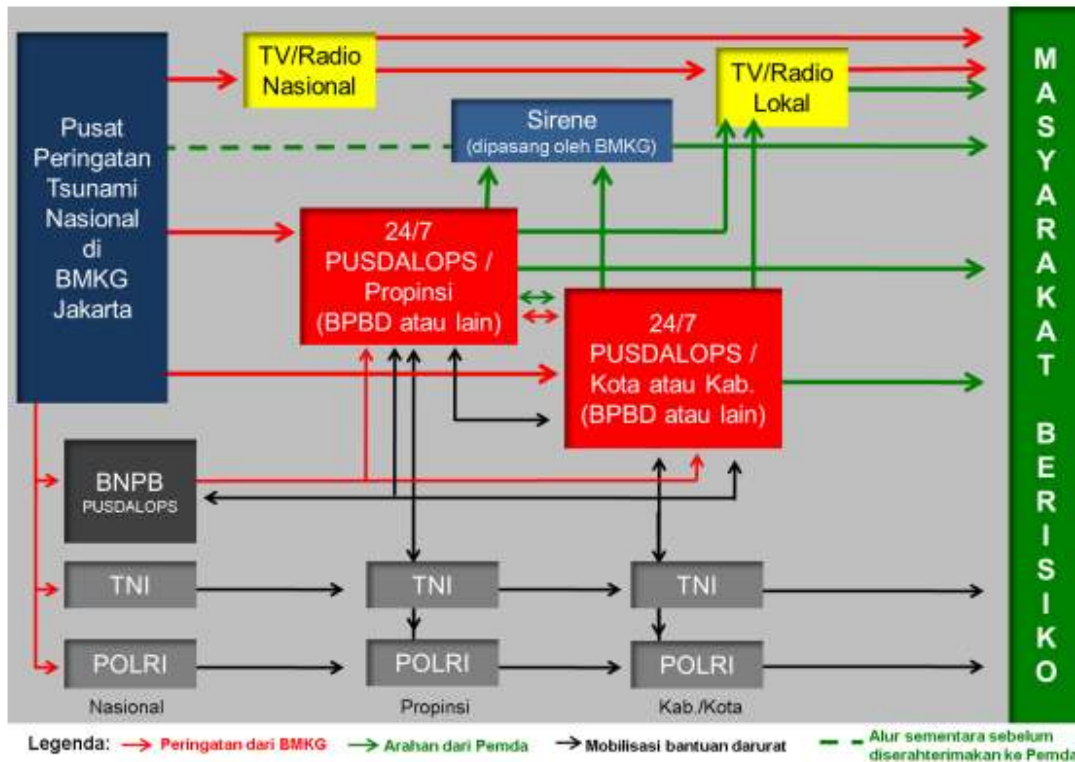
Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro (Kazidam) 2. POLDA Jawa Tengah 3. PMI Jawa Tengah 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 5. FPRB Jawa Tengah 6. Lembaga Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana tsunami 2. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/kota terkait penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi
4. Unit Pangan		
Pemimpin	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat bencana tsunami
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah 3. Baznas 4. MDMC 5. PMI Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan posko bencana tsunami 2. Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota terdampak terkait penyaluran pangan tim tanggap darurat
5. Komunikasi		
Pemimpin	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana tsunami
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KODAM IV Diponegoro(Kahudam) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	2. POLDA Jawa Tengah (Bidang TIK) 3. BPBD Provinsi Jawa Tengah 4. ORARI 5. RAPI 6. SENKOM	darurat 1. Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Administrasi		
Pemimpin	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana tsunami
Pendukung	BPBD Provinsi Jawa Tengah	1. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat 3. Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Catatan penerimaan; • Catatan pengeluaran; • Laporan pertanggungjawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengkoordinasikan dan melaporkan terkait alokasi dan realisasi anggaran penanganan darurat bencana tsunami

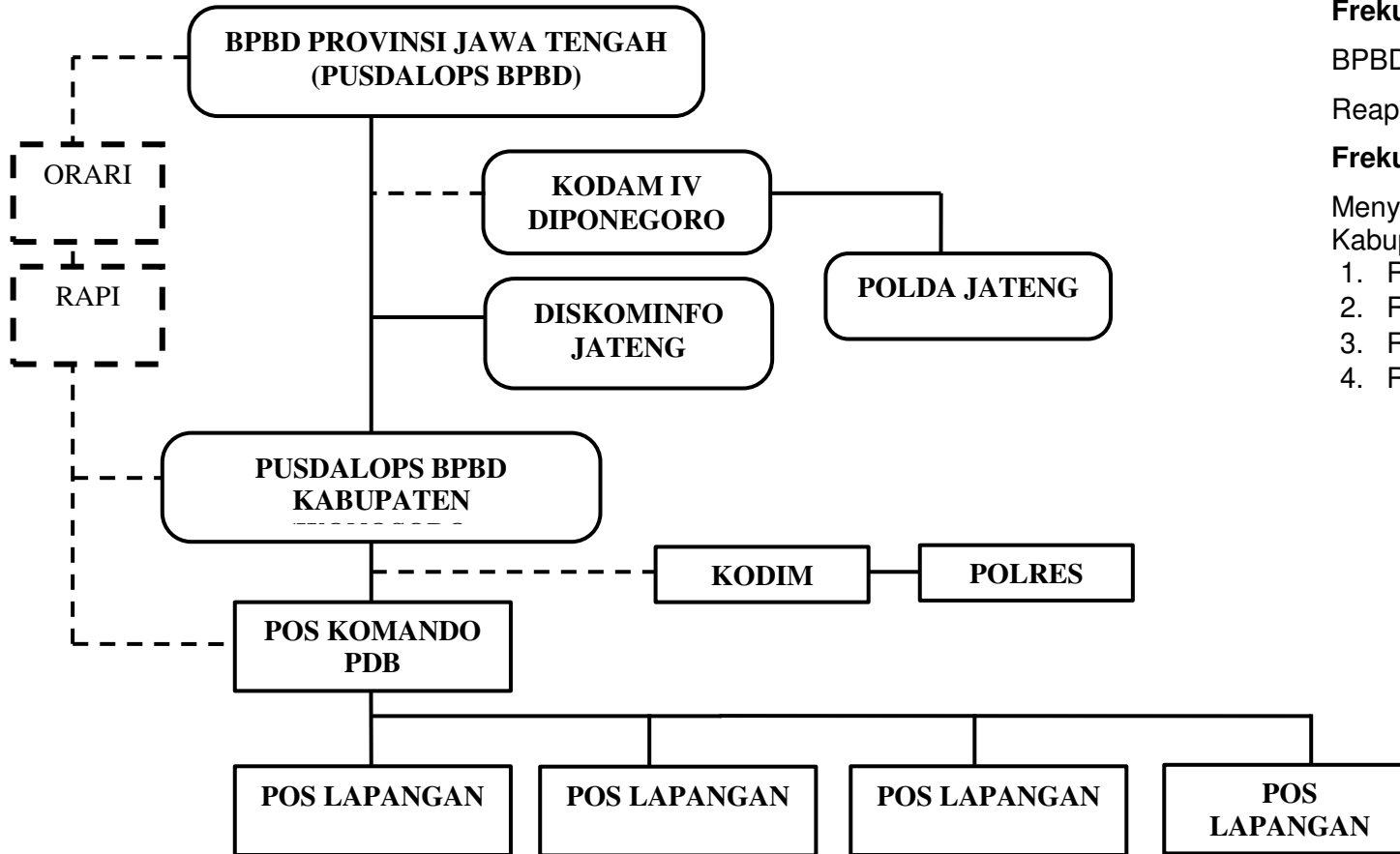
Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Inspektorat 3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. Bappeda Provinsi Jawa Tengah 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat 4. Menyusun laporan keuangan

LAMPIRAN D: Jaring Komunikasi

Rantai Komunikasi Peringatan Dini Tsunami



**JARING KOMUNIKASI POS PENDAMPING RENKON
TSUNAMI PROVINSI JAWA TENGAH**



Frekuensi Utama

BPBD Prov. Jateng

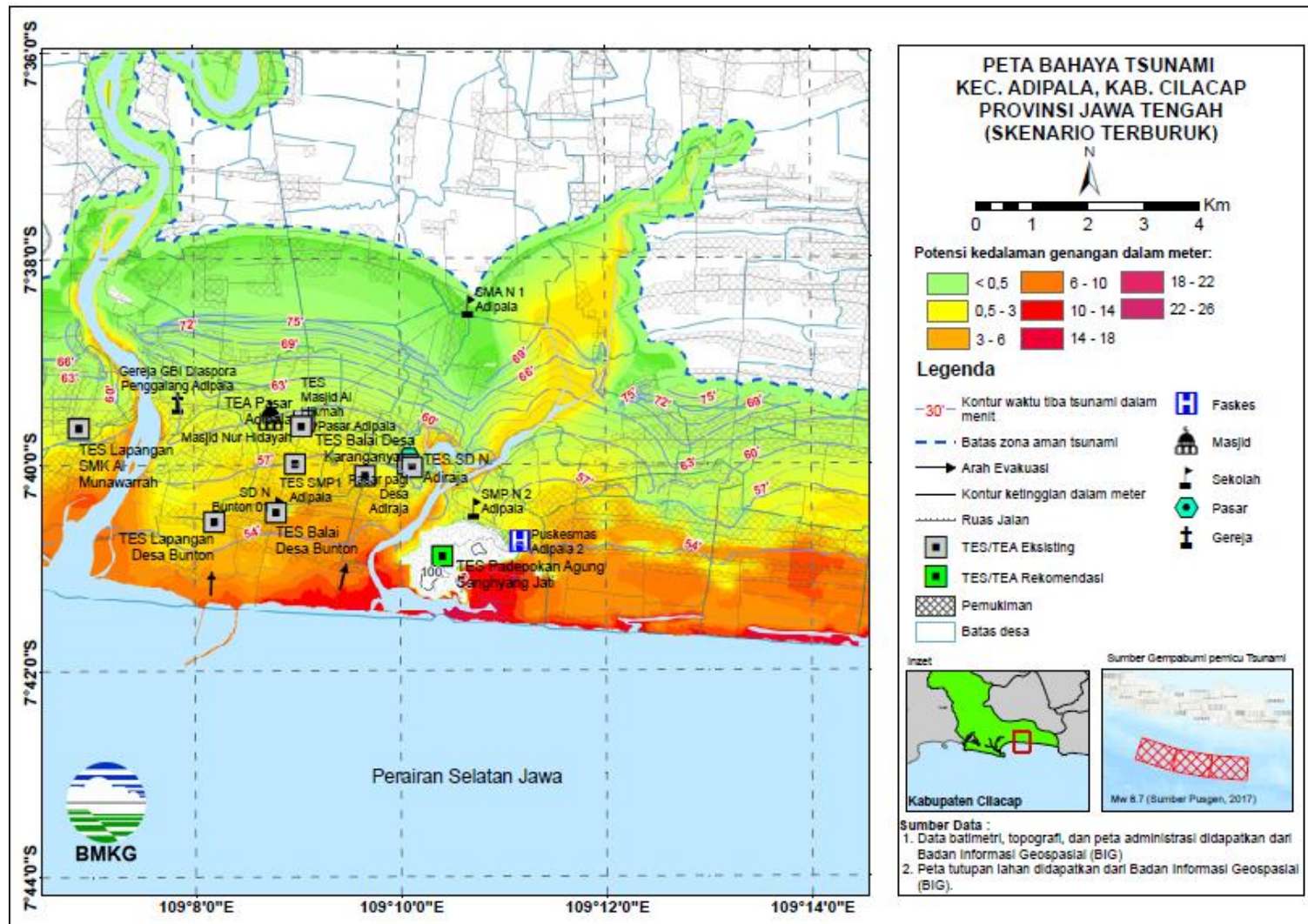
Reapeter BPBD Prov. Jateng

Frekuensi lokal

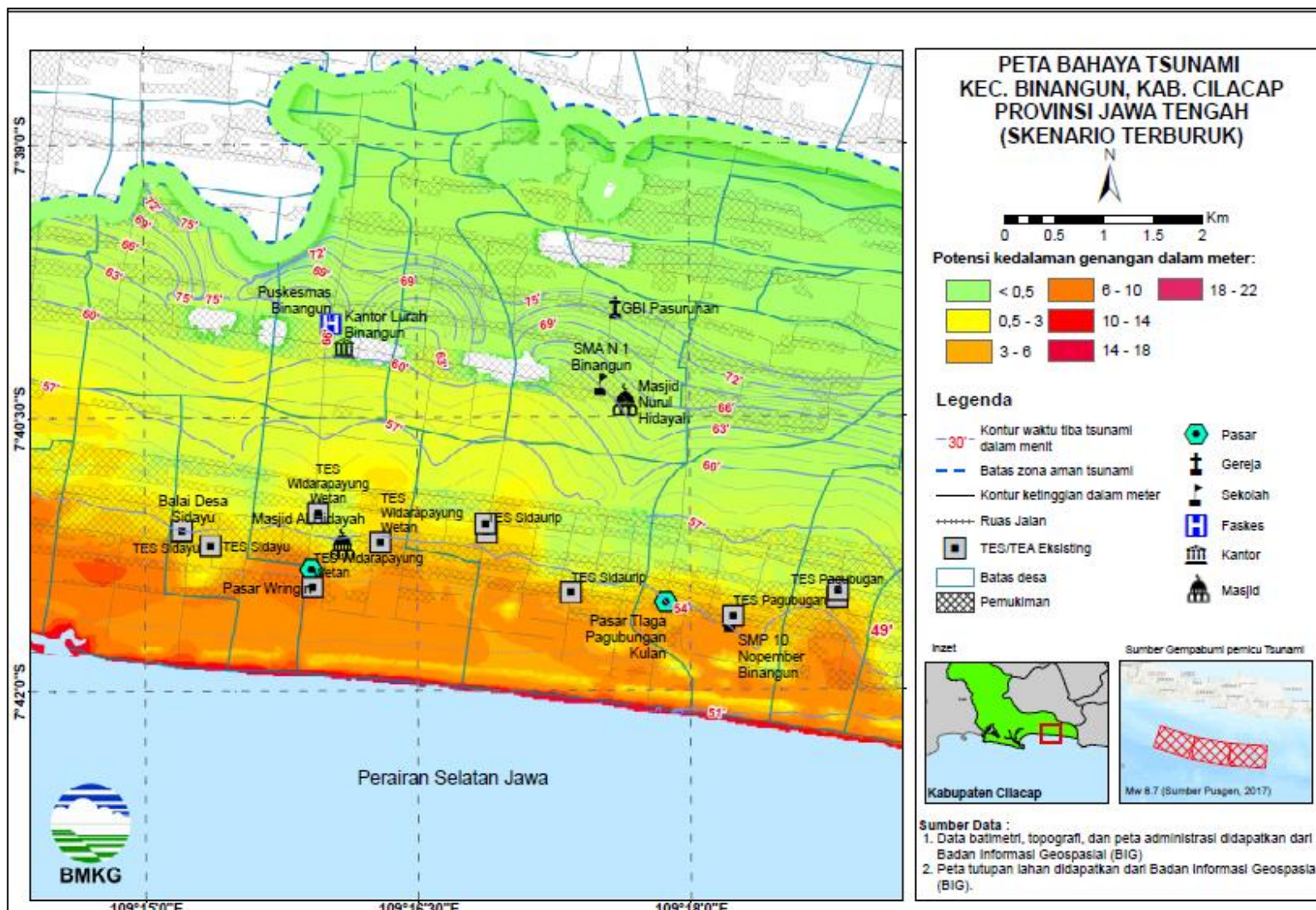
Menyesuaikan dari masing-masing Kabupaten :

1. Repeater BPBD Kab. Cilacap
2. Repeater BPBD Kab. Kebumen
3. Repeater BPBD Kab. Purworejo
4. Repeater BPBD Kab. Wonogiri

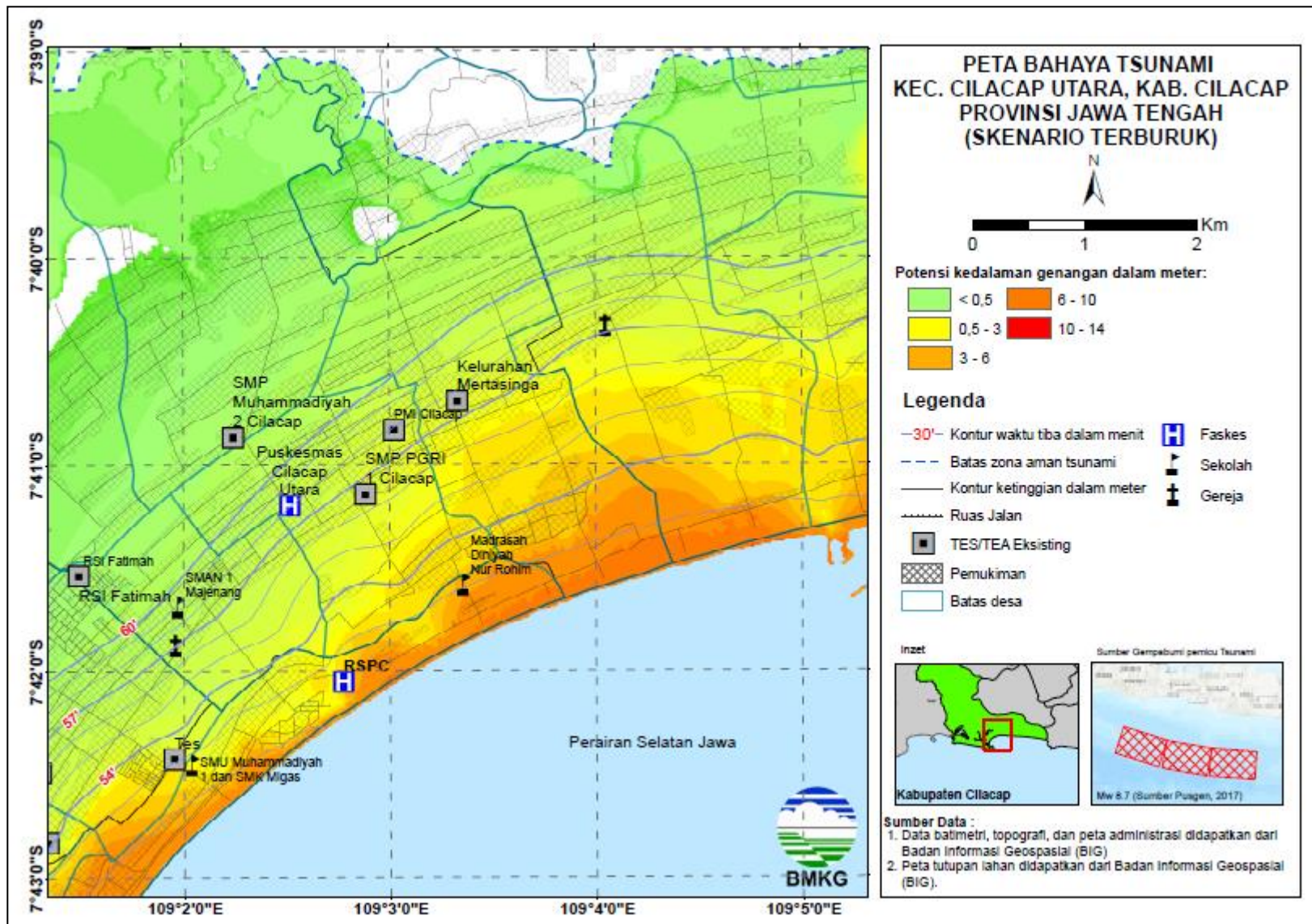
LAMPIRAN F : PETA-PETA



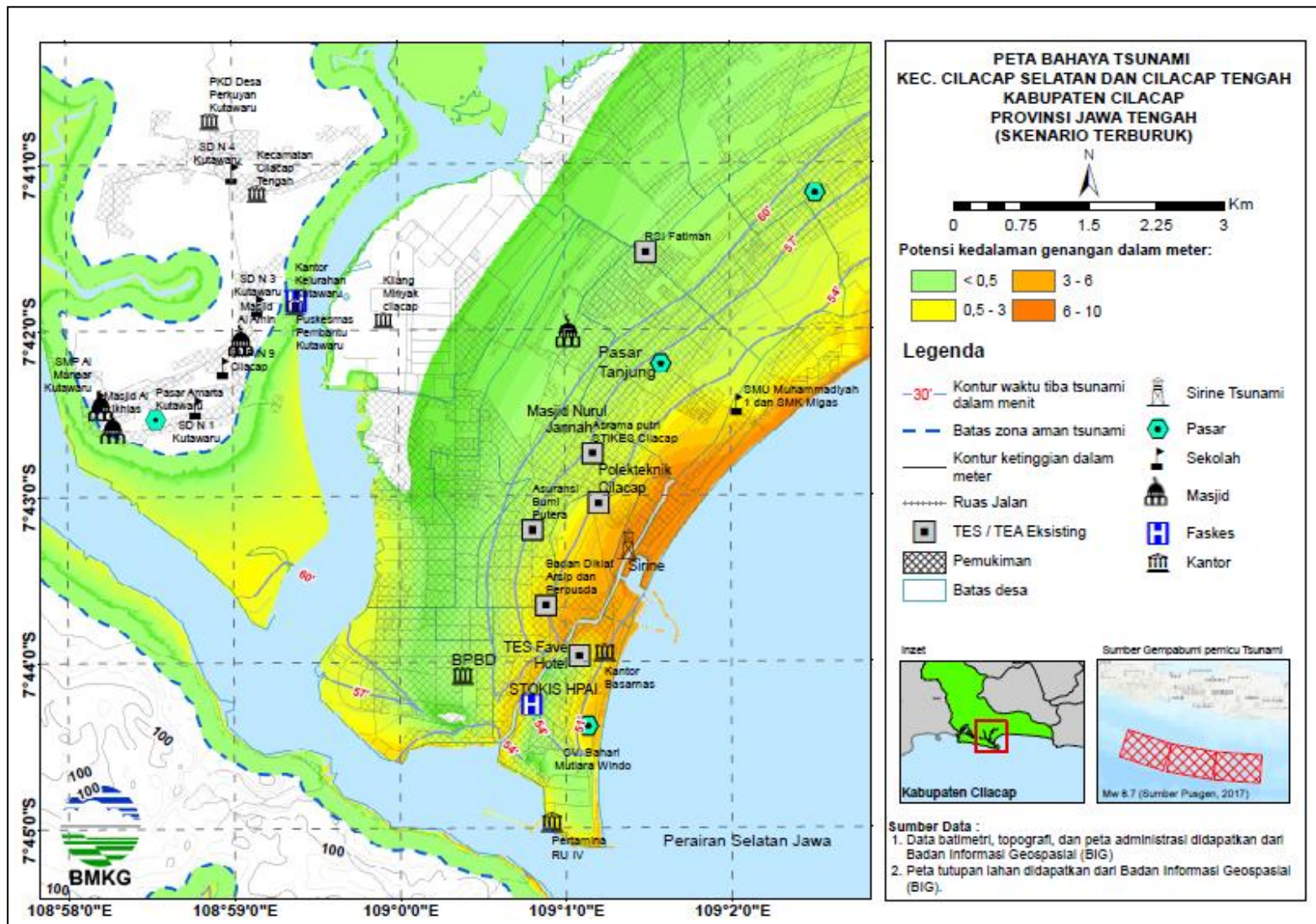
Gambar 1 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Adipala Kab.Cilacap



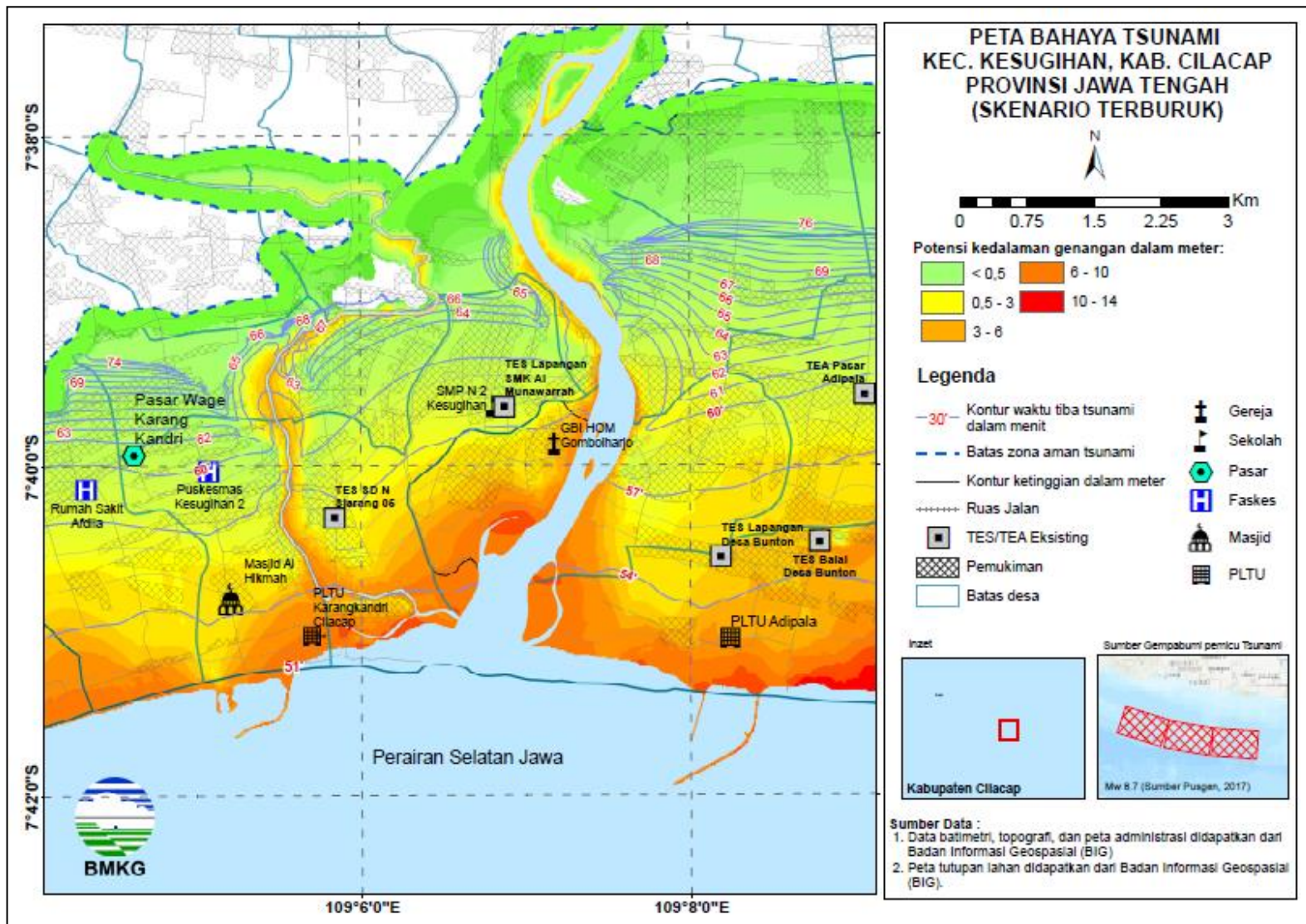
Gambar 2 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Binangun Kab.Cilacap



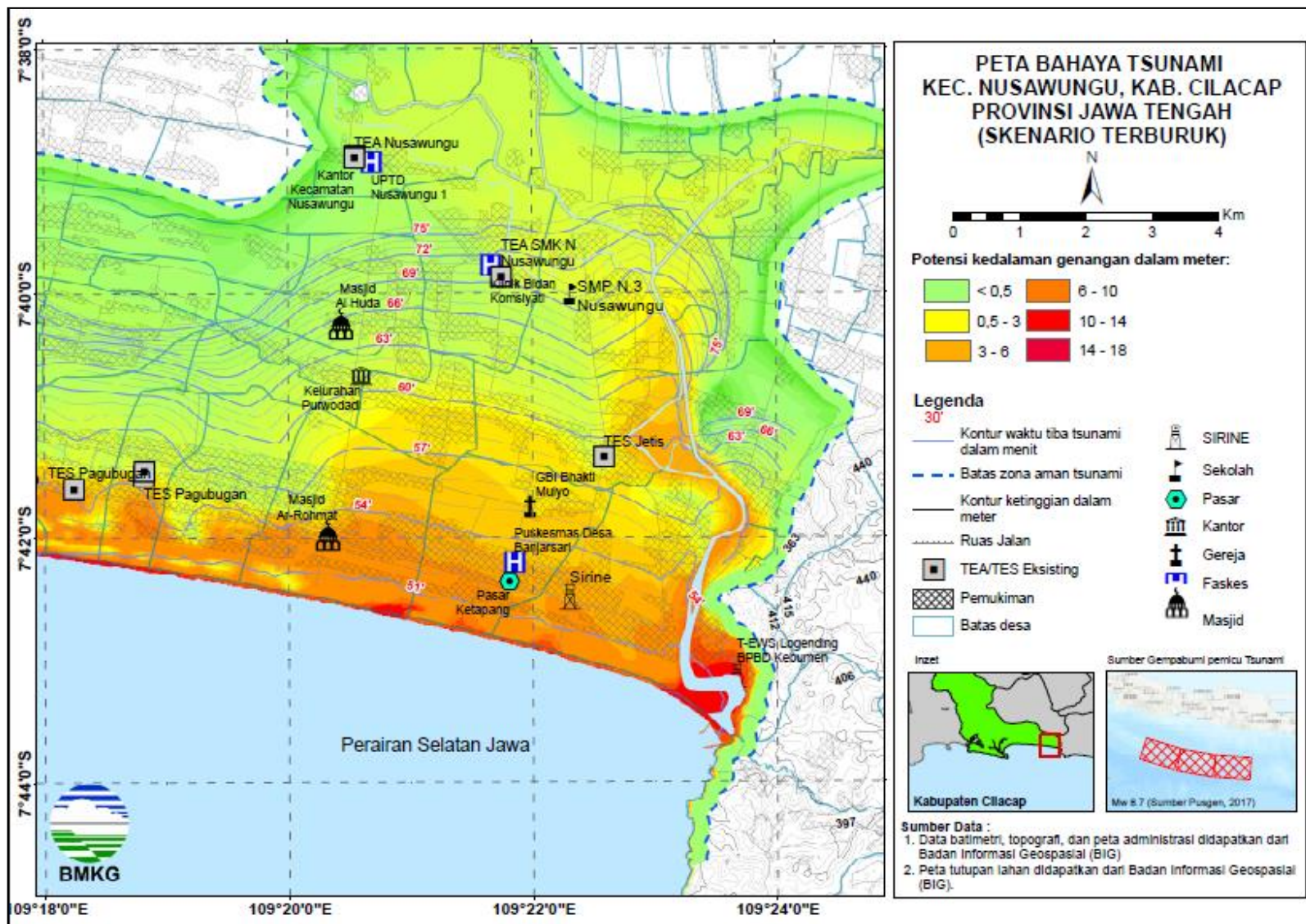
Gambar 3 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Cilacap Utara Kab.Cilacap



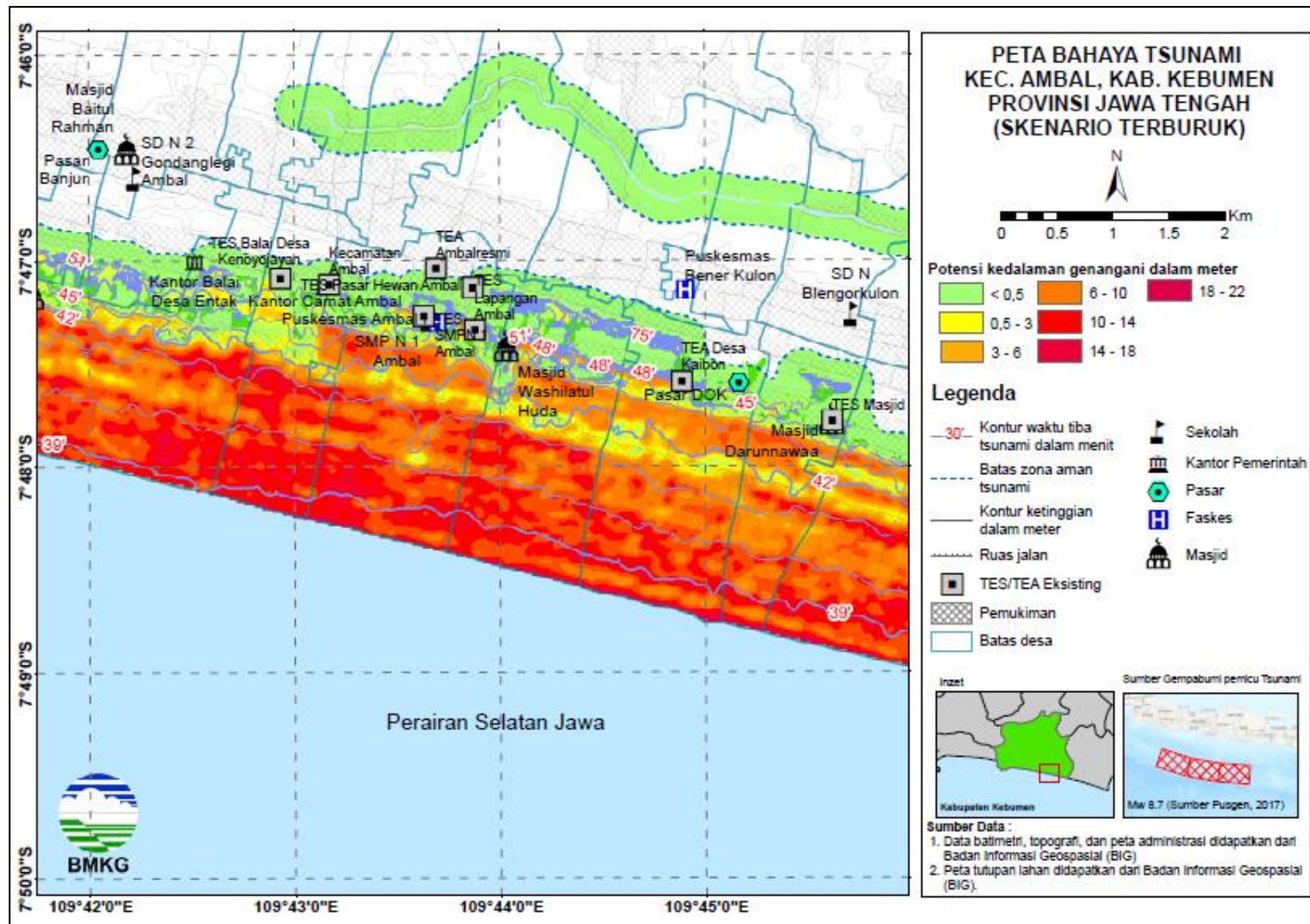
Gambar 4 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Cilacap Selatan dan Tengah Kab.Cilacap



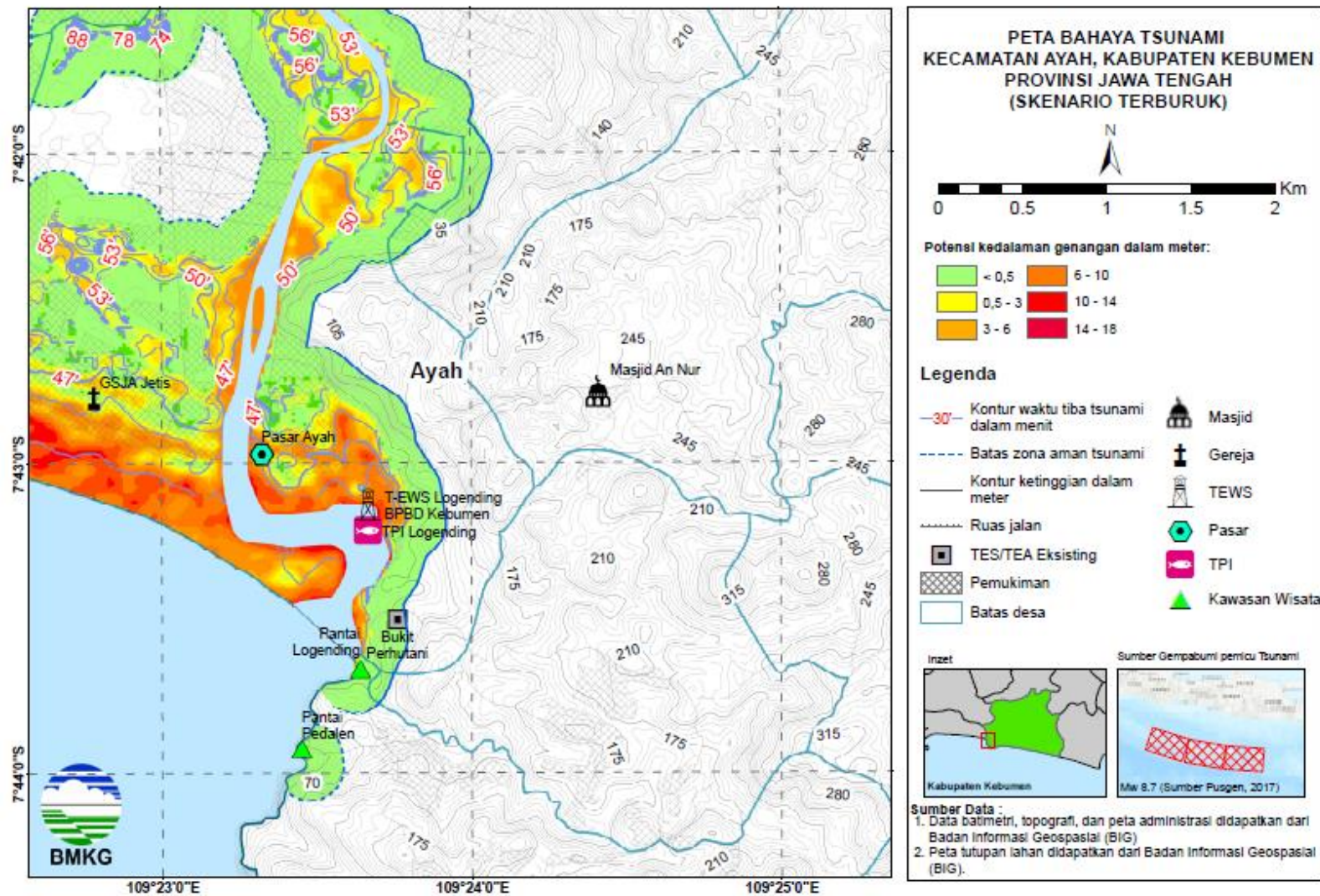
Gambar 5 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Kesugihan Kab.Cilacap



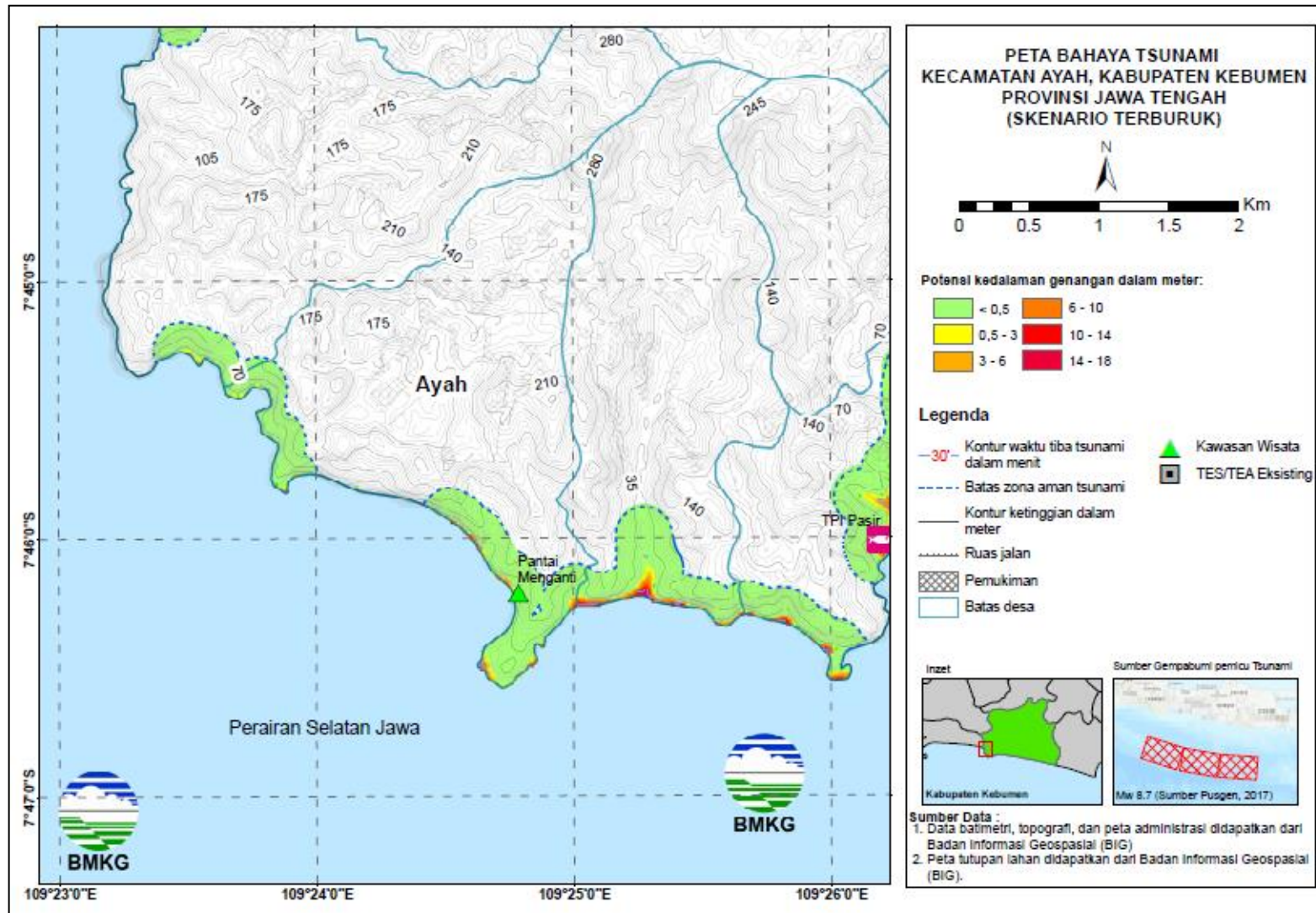
Gambar 6 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Nusawungu Kab.Cilacap

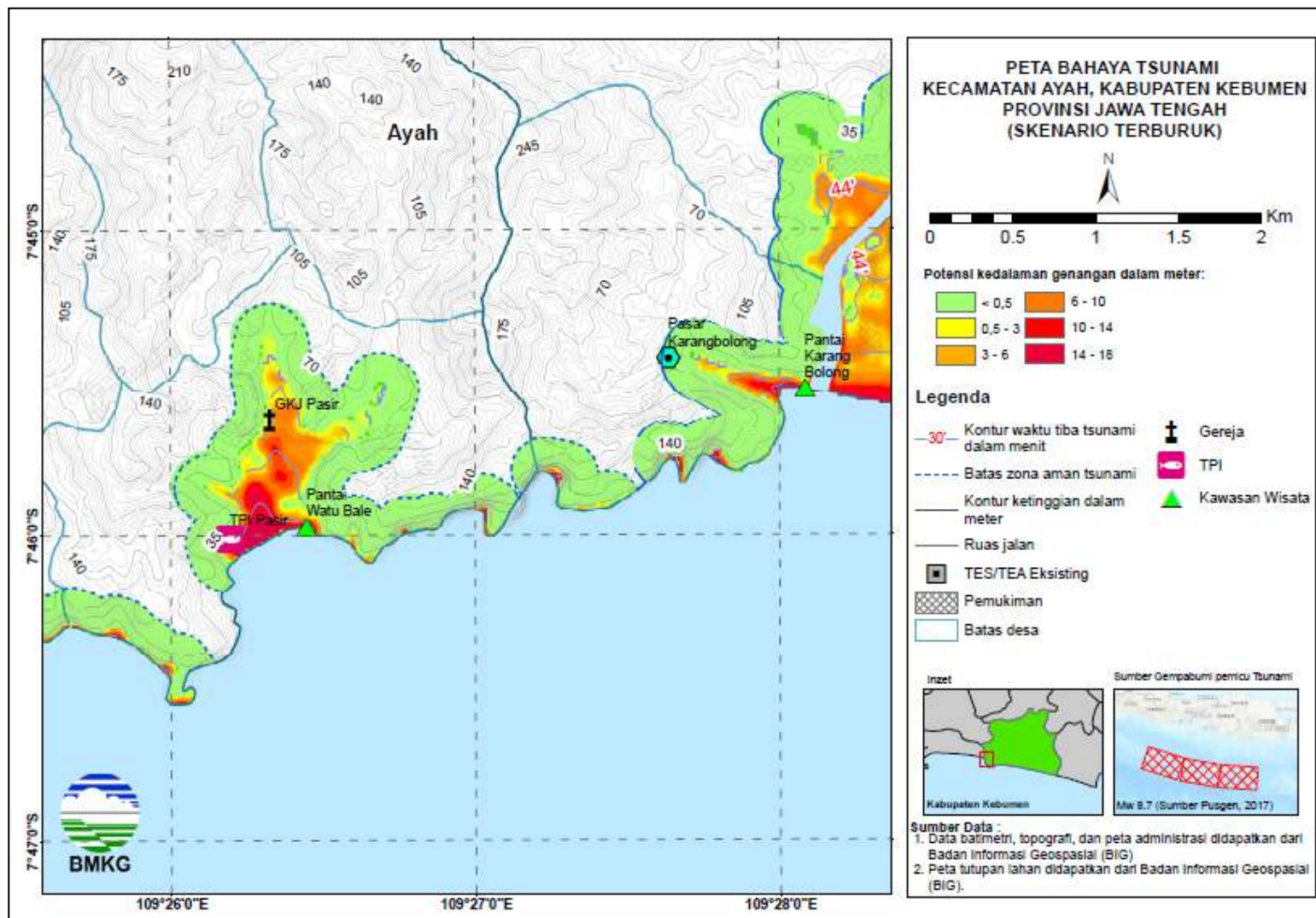


Gambar 7 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Ambal Kab.Kebumen

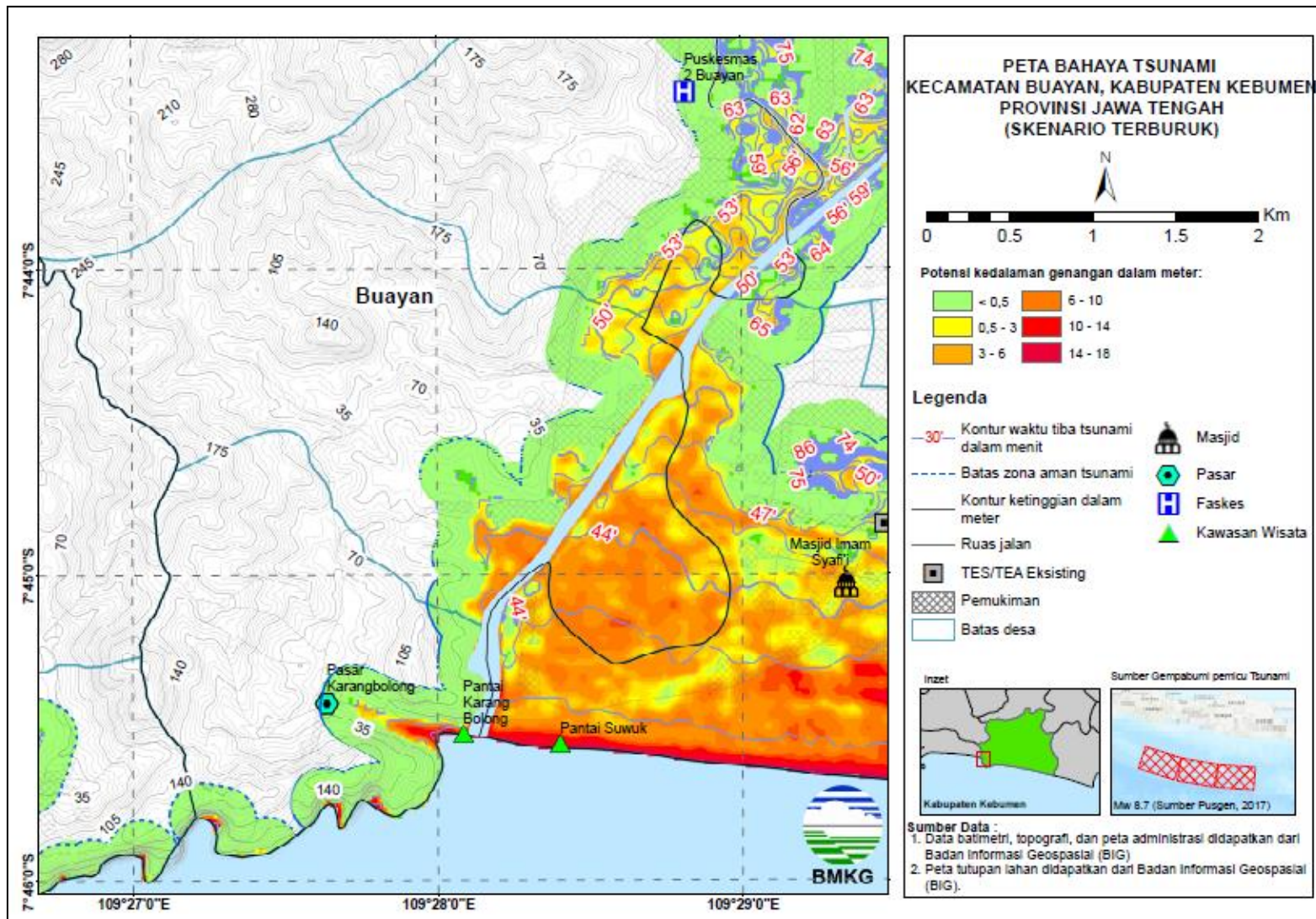


Gambar 8 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Ayah Kab.Kebumen

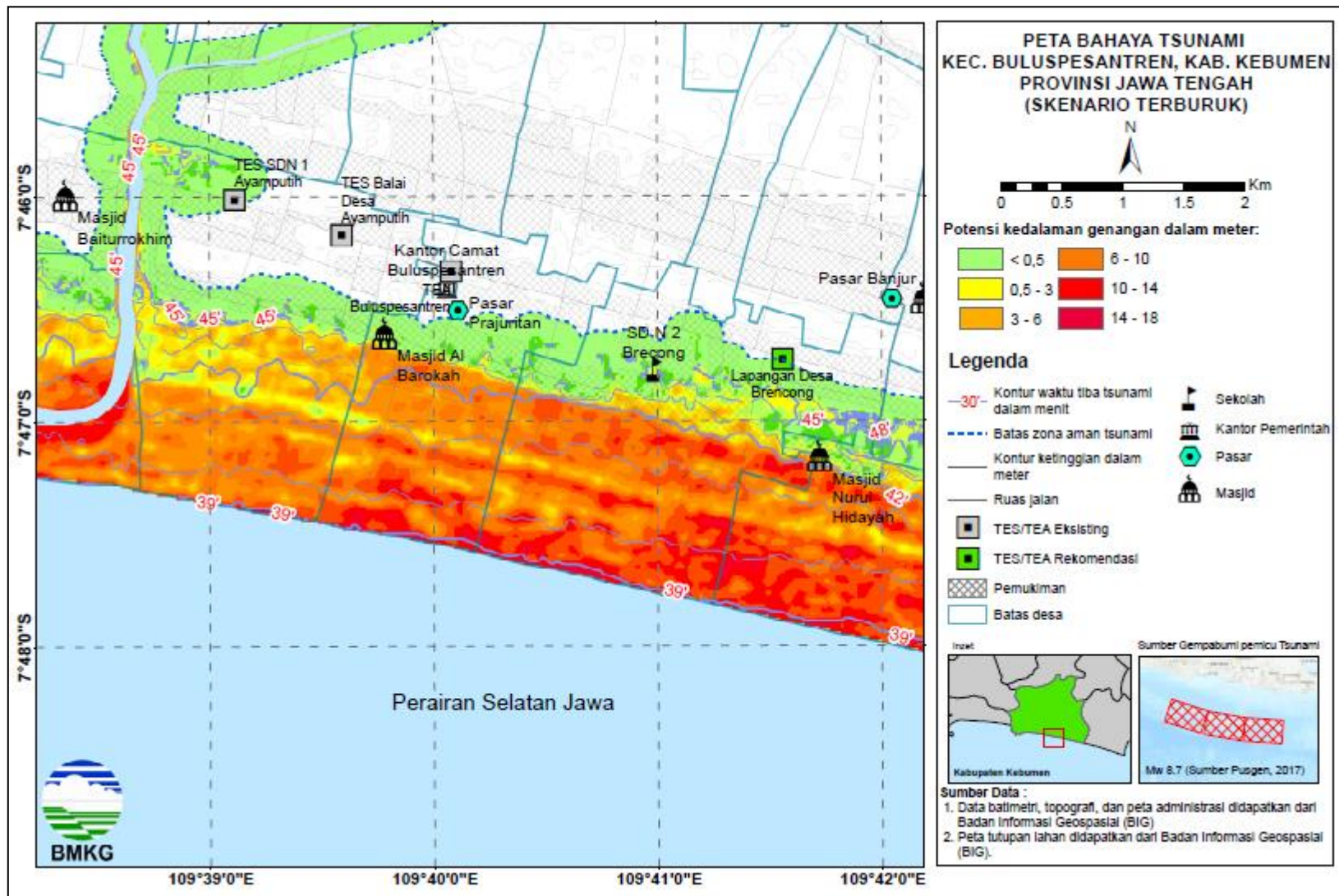




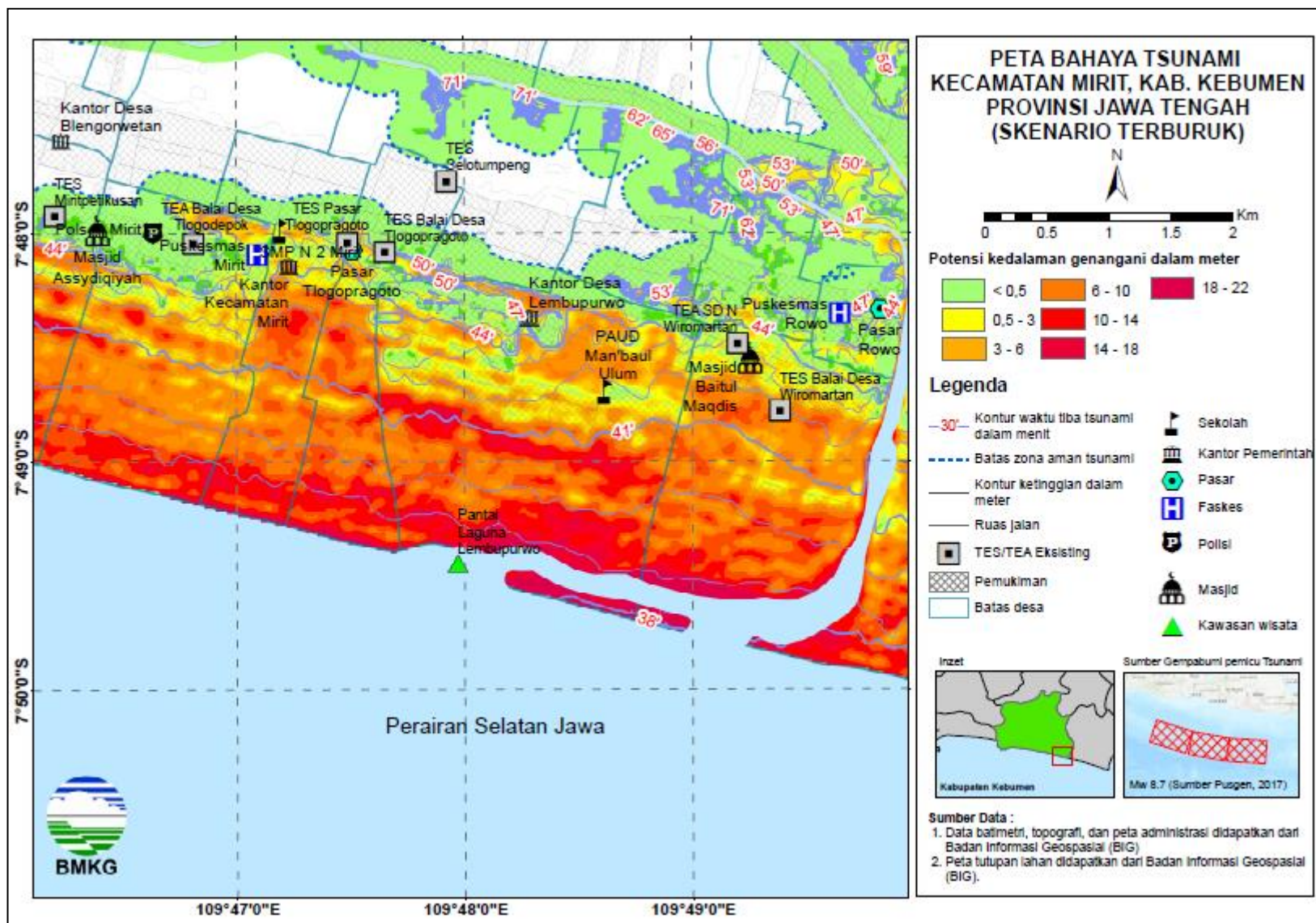
Gambar 10 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Ayah Kab.Kebumen



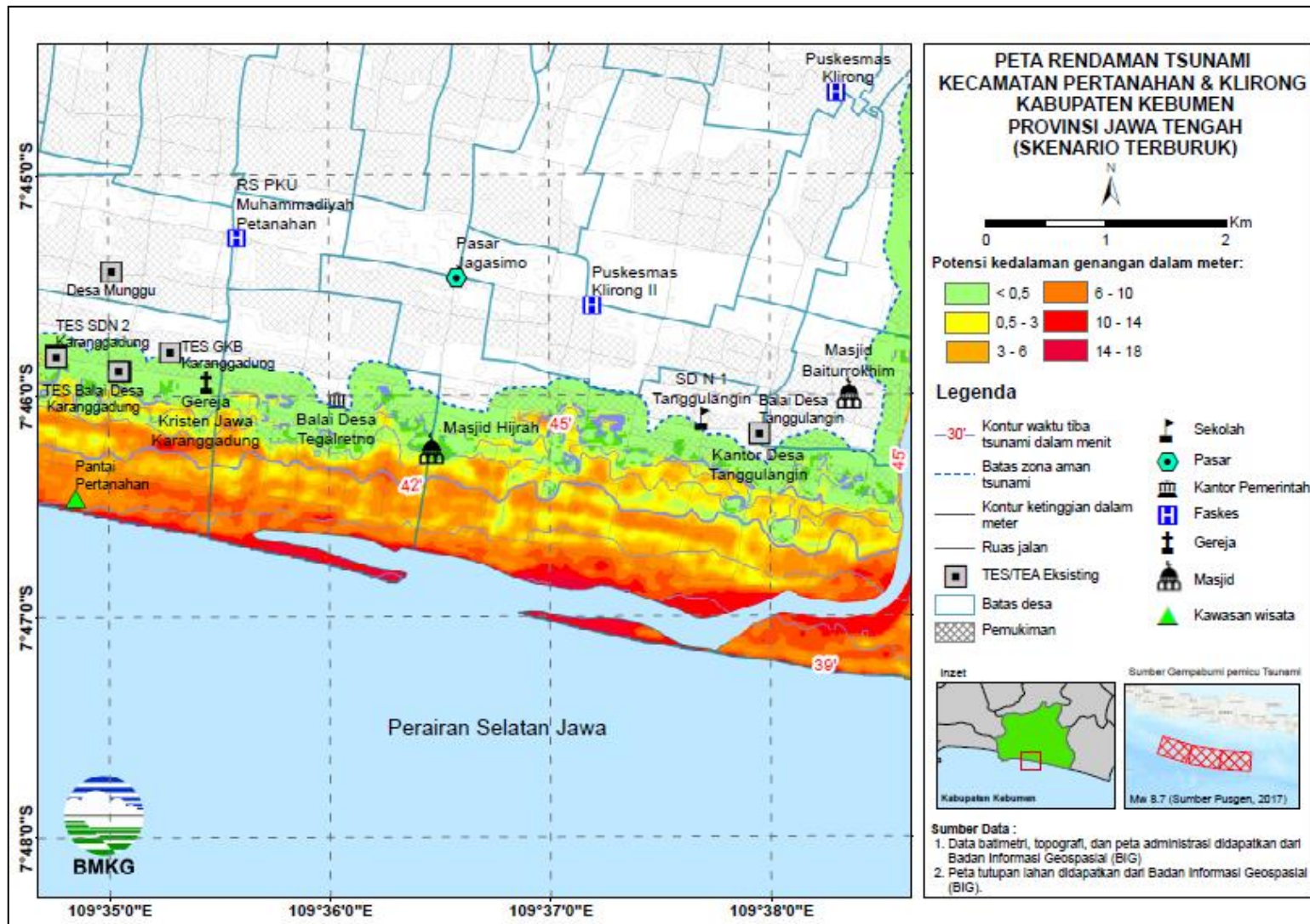
Gambar 11 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Buayan Kab.Kebumen



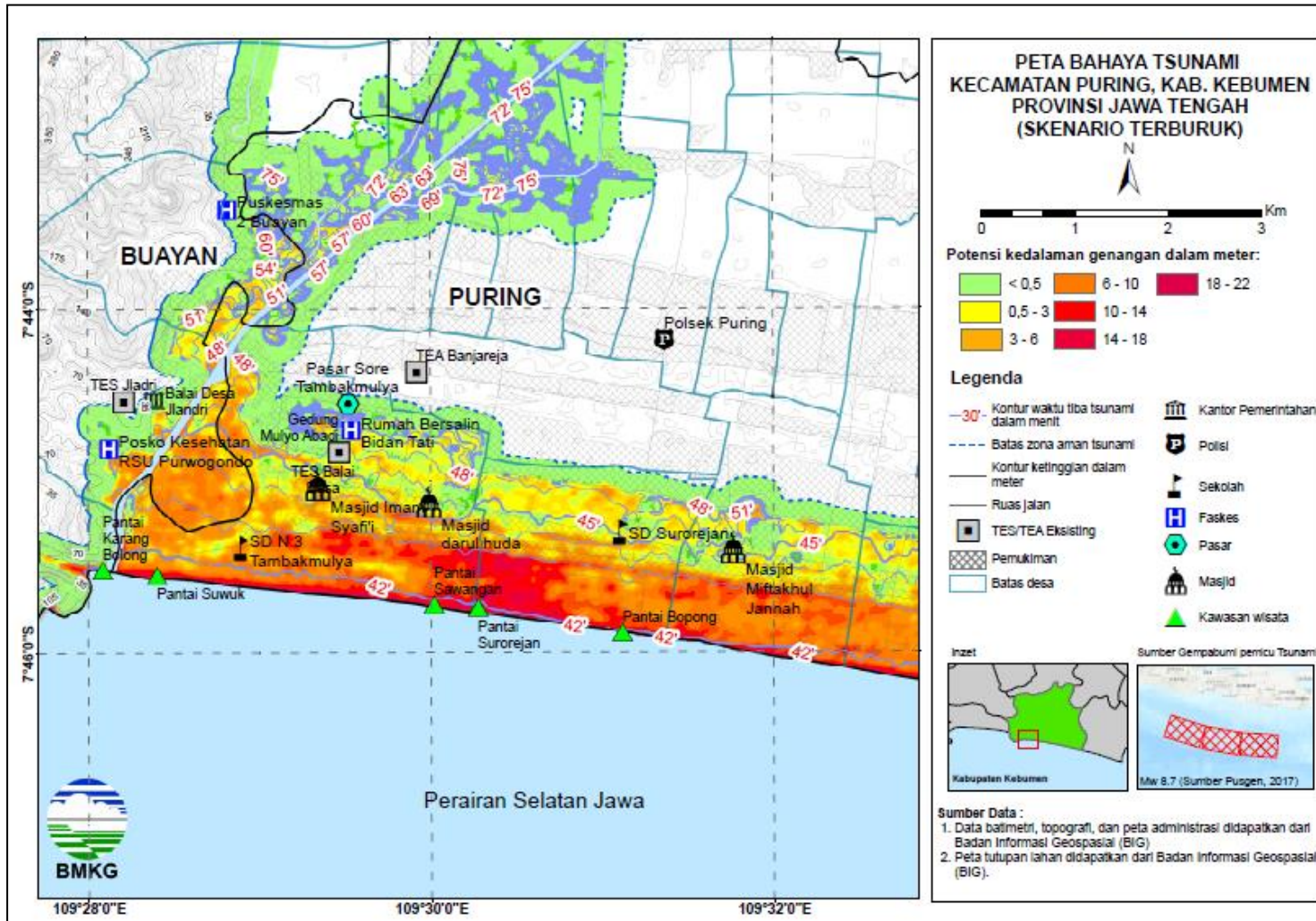
Gambar 12 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Buluspesantren Kab.Kebumen



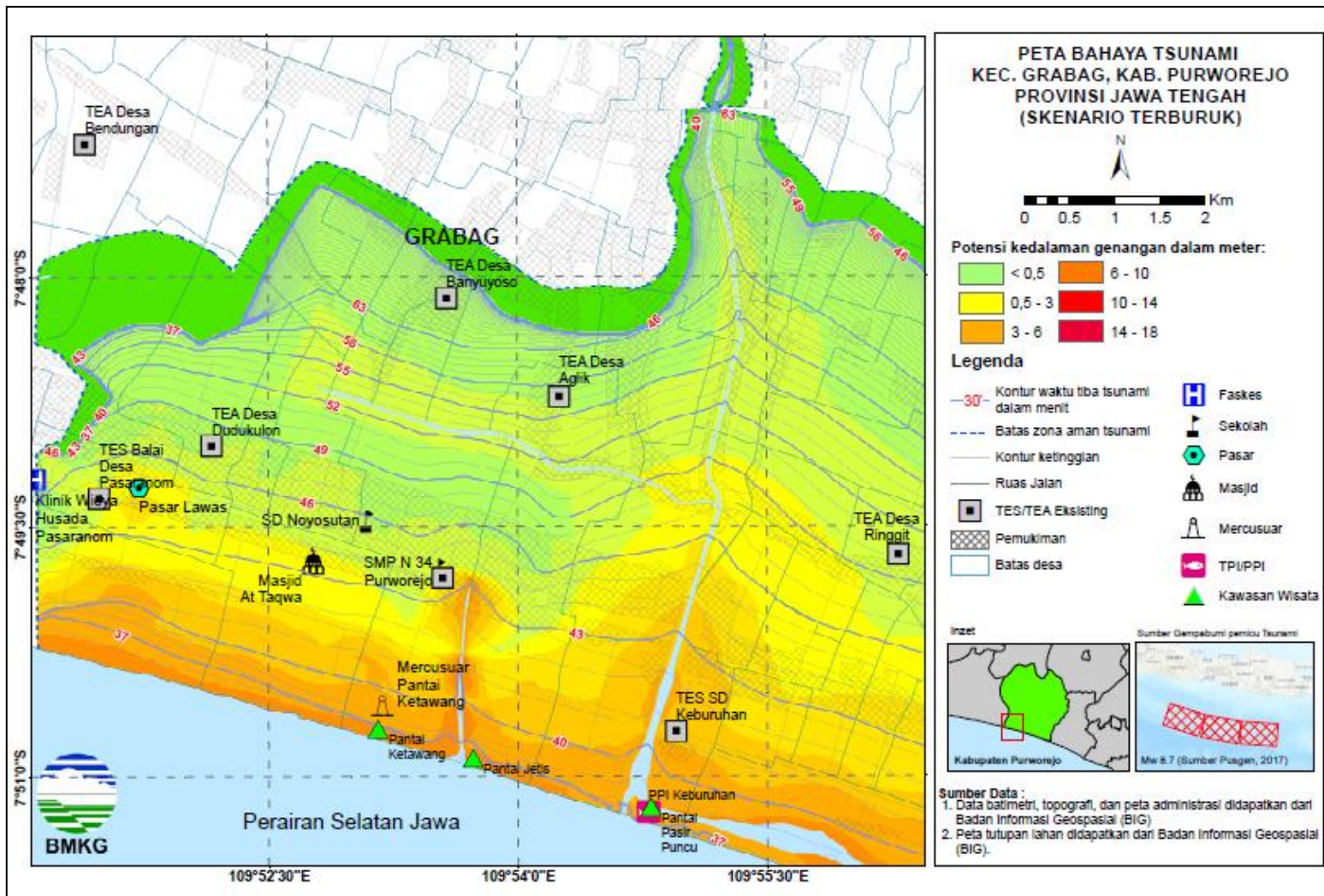
Gambar 13 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Mirit Kab.Kebumen



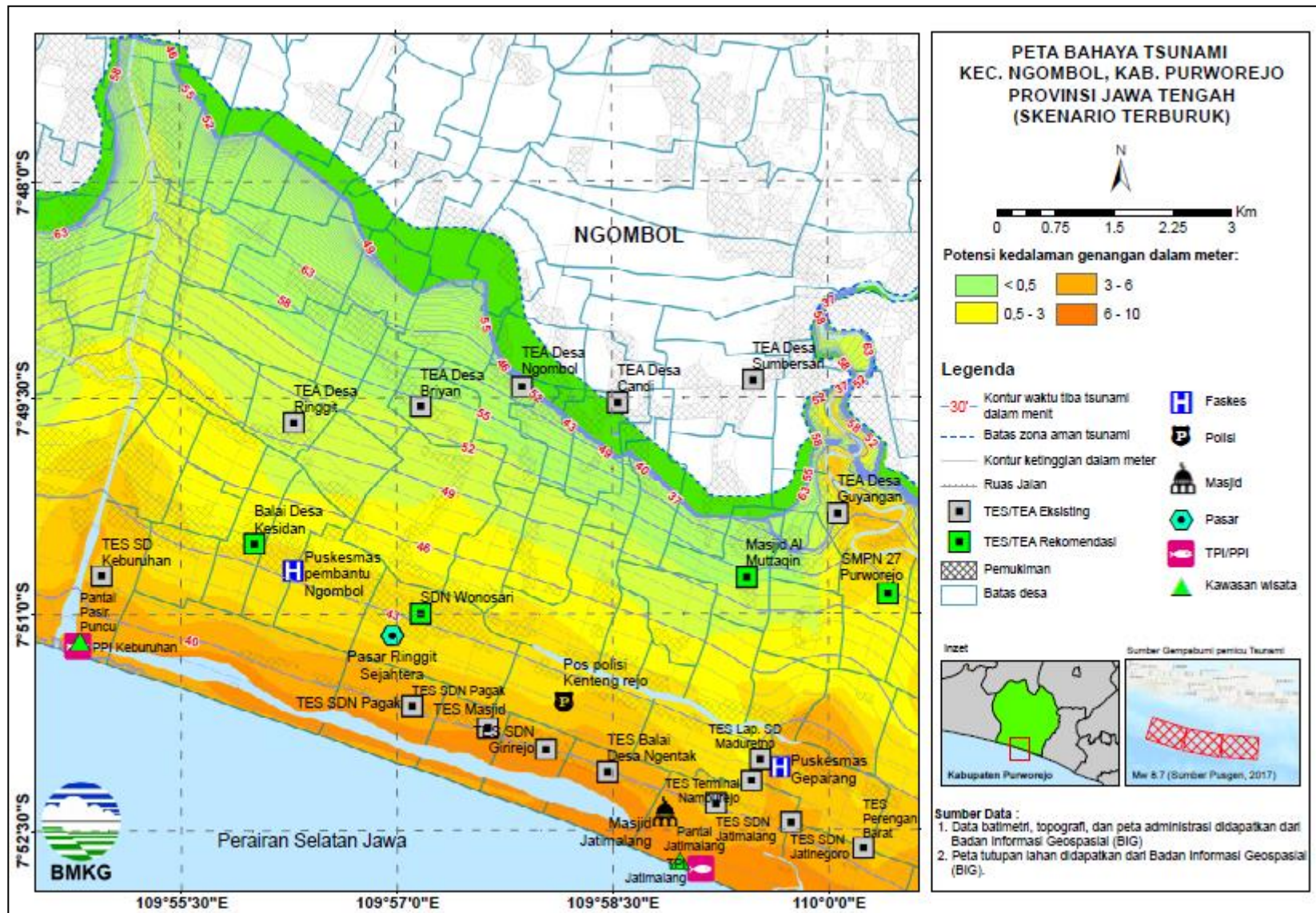
Gambar 14 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Petanahan dan Klirong Kab.Kebumen



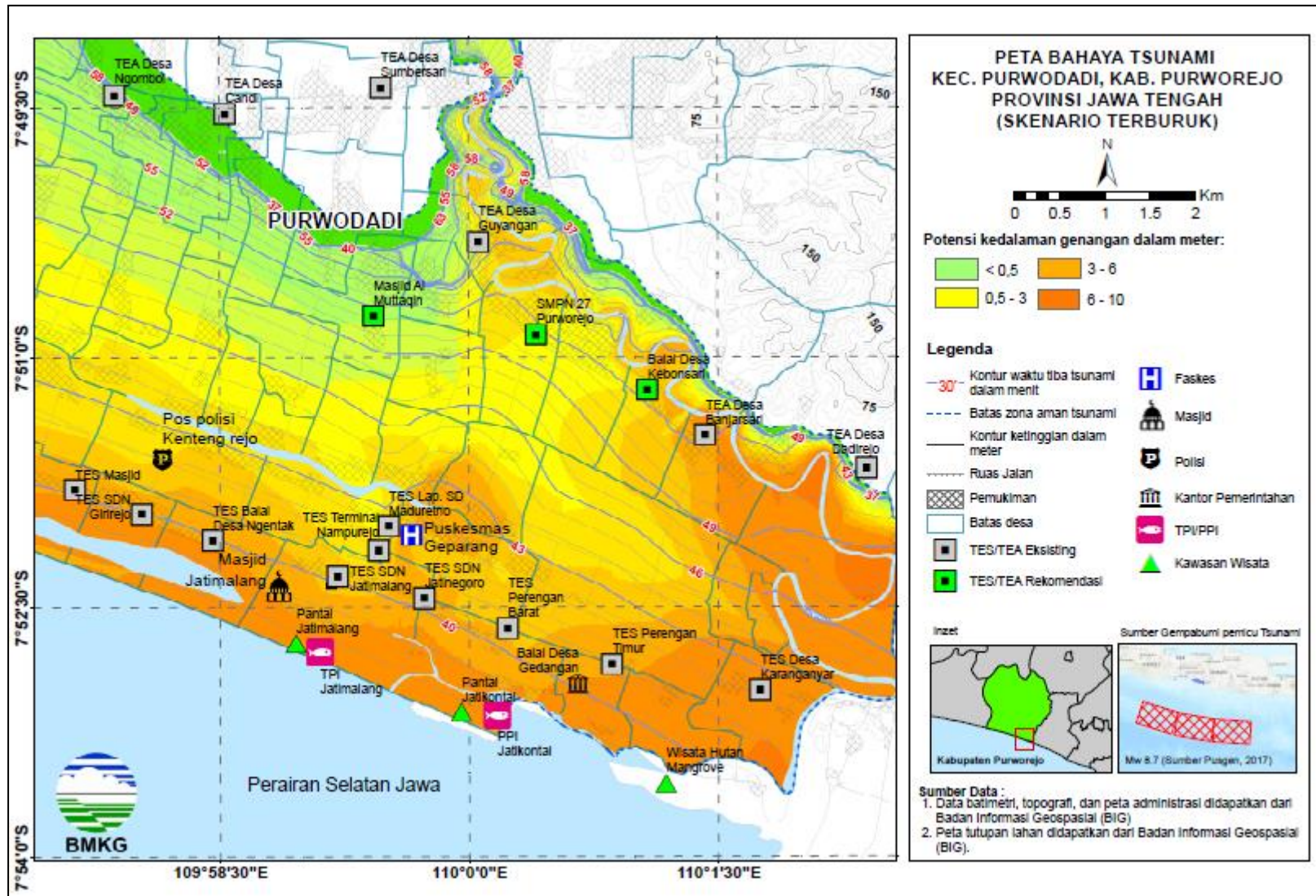
Gambar 15 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Puring Kab.Kebumen



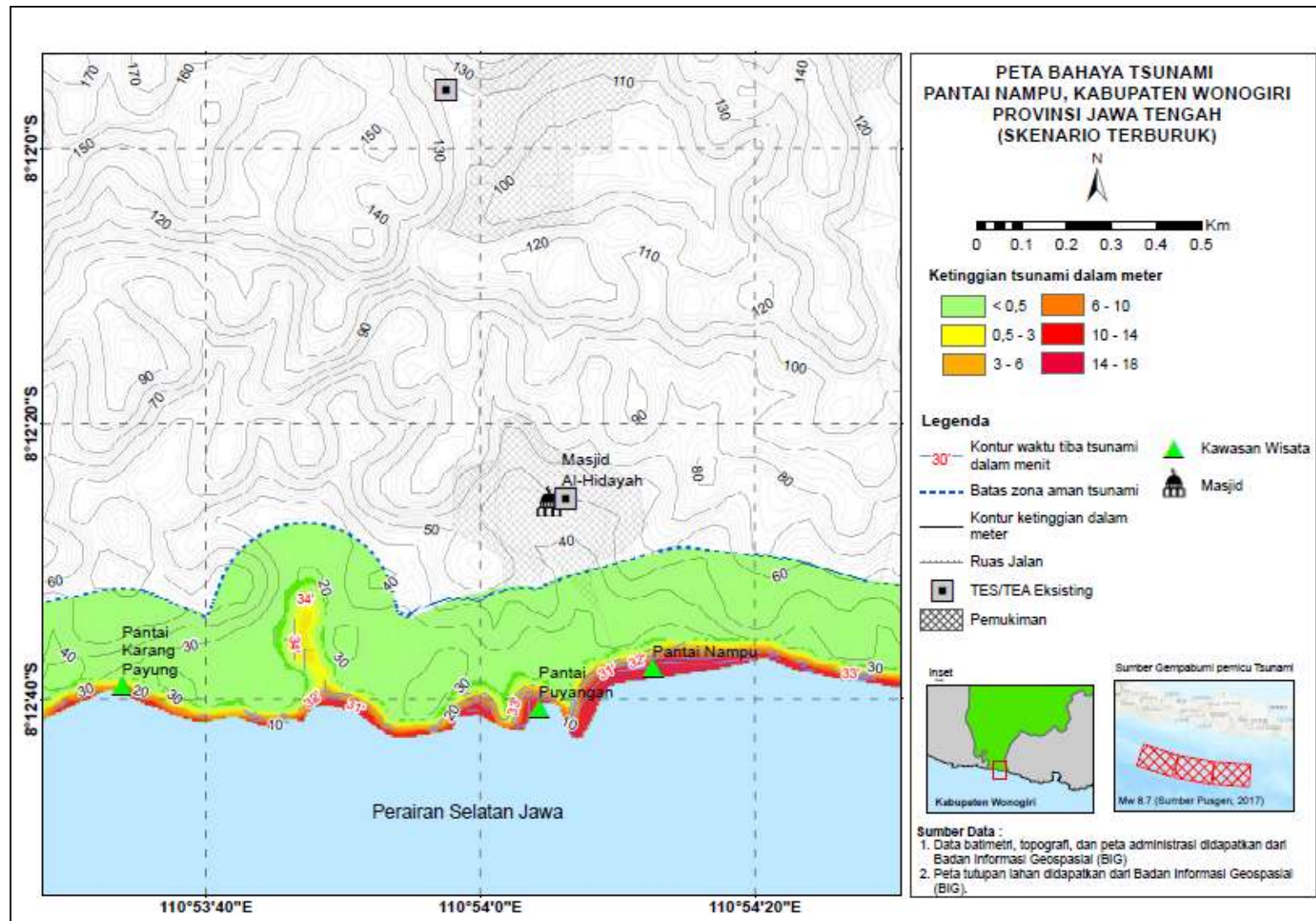
Gambar 16 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Grabag Kab.Purworejo



Gambar 17 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Ngombol Kab.Purworejo



Gambar 18 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Kec. Purwodadi Kab.Purworejo



Gambar 19 Peta Ancaman Bahaya Tsunami Pantai Nampu Kab.Wonogiri

LAMPIRAN G :JALUR EVAKUASI DAN TITIK EVAKUASI**1. KABUPATEN KEBUMEN**

No	KECAMATAN	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Ketetapan
1	Kec. Ayah Ds. Candirenggo	Semua jalan	Teba Panjatan Karang Gondang Desa Candirenggo	Lapangan parkir Obyek Wisata Goa Petruk	Fasilitas MCK 1000 jiwa
	Ds. Ayah	Semua jalan	Bukit Panjer Bukit Kali Sat Desa Ayah	Lapangan parkir Obyek Wisata Goa Petruk	sda
	Ds. Argopeni	Semua jalan	-	KUD Mino Desa Argopeni	Fasilitas MCK 200 jiwa
	Ds. Kr. Duwur	Semua jalan Jalan Evakuasi Jambon	-	Lapangan Pakir Obyek Wisata Menganti	1000 jiwa
	Ds. Sрати	Semua jalan	-	-	-
	Ds. Pasir	Semua jalan	TPI Lama Jalur TPI	- Balai Desa Pasir (Dukuh Ndilem)	Fas. MCK 250 jiwa
2	Kec. Buayan Ds. Karangbolong	Semua jalan	-	- Balai desa Karangbolong - Rumah Bapak RT 04 RW 02 (Pak Sarimin) - Pasar Desa Karangbolong	Fasilitas MCK 1000 jiwa
	Ds. Jladri	Semua jalan	Jalur Pertigaan Desa Jladri Jalur JL. Karangbolong	- Balai desa Jladri - Gor Cipta Mulya - SD N 1 Jladri	Fasilitas MCK GOR = 3000 Jiwa Balai Desa =

No	KECAMATAN	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
					500 Jiwa SD N 1 Jladri = 2000 Jiwa
3	Kec. Puring Ds. Tambakmulyo	Semua jalan	<ul style="list-style-type: none"> - SMK Kelautan - Balai Desa Tambakmulyo - SDN Banjarejo 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Weton Wetan - Pasar Weton Wetan - Balai Desa Weton Wetan 	Fasum MCK 1500 jiwa
	DS,Banjarejo	Semua jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Banjarejo - Masjid Banjarejo 	Fasum MCK 950 jiwa
	Ds.Waluyorejo	Semua jalan	<ul style="list-style-type: none"> - RT03 RW 01 Desa Waluyorejo 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur Deandels RT 03/RW01 - Masjid Ds.Puliharjo 	Fasum MCK 1200 jiwa
	Ds.Sidoharjo	Semua jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ds. Sidoharjo - SDN 1 & 2 Sidoharjo - Masjid Samsul Huda Sidoharjo - Lapangan Desa Sidoharjo 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur Dandeules - Masjid Puliharjo Dk. Balong - SDN 1 & 2 Puliharjo 	Fasum MCK 1000 jiwa
4	Kec. Petanahan Ds. Karangreja	Semua jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al Islah - Masjid al Hasim 	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Baiturohman Desa Karangreja - Gunung Madi 	Fasum MCK 2000. jiwa
	Ds. Karanggadung	Smua jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan desa Karanggadung 	<ul style="list-style-type: none"> - SDN 2 Karanggadung - Balai Desa Karanggadung - Gereja Kerosulan Baru 	Fasum MCK 1200 jiwa

No	KECAMATAN	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
				RT03 RW 03 Desa Karanggadung	
	Ds.Tegalretno	Semua jalur	-	- lapangan Desa Ampelsari Desa Tegalretno	Fasum MCK 1500 jiwa
5	Kec. Klirong Ds. Jogosimo	Semua jalur	-	- Balai desa Jogosimo - Lapangan desa Jogosimo - Pasar desa Jogosimo	Fasum MCK 2500 jiwa
	Ds.Tanggulangin	Semua jalur	-	- Jalur Deandles - SDN 2 Tanggulangin - SDN 1 Tanggulangin - Balai Desa Tanggulangin	Fasum MCK 1500 jiwa
6	Kec. Buluspesantren Ds.Ayamputih	Semua jalur	-	- Balai Desa Ayam Putih - Lapangan desa Ayam Putih - Jalur Deandles	Fasum MCK 1600 jiwa
	Ds.Setrojenar	Semua jalur	-	- Pasar desa Setrojenar - Lapangan OR desa - Balai desa Setrojenar	Fasum MCK 2000 jiwa
	Ds.AmbBrecong	Semua jalur	-	- Lapangan OR desa Brecong - SDN1 Brecong - Balai desa Bercong	Fasum MCK 2100 jiwa
7	Kec. Ambal Ds. Entak	Semua jalur	-	- Balai desa dan SDN 1 Entak Kec. Ambal - Masjid Al-Falah	Fasum MCK 1500 jiwa

No	KECAMATAN	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
	Ds. Kenoyojayan	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Balai desa & SDN 1 Kenoyojayan - Masjid Darul Shuhada - Tanah lapang/Lapangan. 	Fasum MCK 1000 jiwa
	Ds. Ambalresmi	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al-Mustofa - Balai desa Ambalresmi - Lapangan siwaru Ambalresmi - SDN 3 Ambalresmi - Kampung jawa Ambalresmi - Pasar hewan Ambalresmi 	Fasum MCK 7000 jiwa
	Ds. Kaibon Petangkuran	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Musholah Al-Bisri - Musholah Darul Mutaqin - Masjid al Wasilatul Huda - Balai Desa Kaibon Petangkuran - SD N 1 Kaibon Petangkuran 	Fasum MCK 3000 jiwa
	Ds. Kaibon	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - SDN 1 Kaibon - PAUD KBM Lintang selatan - Komplek Balai desa 	Fasum MCK 1000 jiwa
	Ds. Sumberjati	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Darunnawa - Mushola At-Taqwa - SD N 1 Sumberjati 	Fasum MCK 1000 jiwa
8	Kec. Mirit Ds. Mirit Petikusan	Semua jalur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Balai desa Mirit - SD N Mirit Petikusan 	Fasum MCK 1000 jiwa

No	KECAMATAN	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
	Ds. Tlogodepok	Semua jalur	-	- Balai desa Tlogodepok - SDN 2 Tlogodepok - Masjid Dukuh Tlogo	Fasum MCK 3000 orang untuk 3 tempat
	Ds. Mirit	Semua jalur	-	- Balai desa Mirit - SDN Mirit - Masjid	Fasum MCK 750 jiwa
	Ds.Tlogopragoto	Semua jalur	-	- Balai desa Tlogopragoto - Masjid Al Iman - SDN 1 Tlogopragoto - Pasar Desa Tlogopragoto	Fasum MCK 800 jiwa
.	Ds. Lembupurwo	Semua jalur	-	- Balai desa Lembupurwo - Masjid Al Mansyur (Dk Lengkong Satu) - Masjid Al Idris - SDN 1 Lembupurwo - Kantor Desa	Fasum MCK 900 jiwa
	Ds. Wiromartan	Semua jalur	Masjid Baitul Maqdis Desa Wiromartan	- Balai Desa Wiromartan - SDN 1 Wiromartan	Fasum MCK 500 Jiwa
	Ds. Rowo	Semua jalur	-	- Gedung Pertemuan Nelayan (TPI Atas)	Fasum MCK 600 jiwa

2. KABUPATEN WONOGIRI

NO	Kecamatan	Lokasi Titik kumpul Sementara	Lokasi Titik Kumpul Akhir
1.	Paranggupito (pantai nampu)	Balai Dusun Dringo, Desa Gunturharjo	SD Negeri 3 Gunturharjo

2.	Paranggupito (pantai sembukan)	Lapangan Desa Sembukan	Pendopo Kantor Kecamatan Paranggupito
3.	Paranggupito (Pantai kali merah)	Dusun Dawung, Desa gudangharjo	Balai Desa Gudangharjo

3. KABUPATEN PURWOREJO

No	Kecamatan	Lokasi Titik Kumpul Sementara	Lokasi Titik Kumpul Akhir
1	Kecamatan Grabag	Lokasi Balai Desa Kedungmulyo	Kantor Kecamatan Grabag
		Lokasi Balai Desa Bendungan	Kantor Kecamatan Grabag
		Lokasi Balai Desa Dudukulon	Kantor Kecamatan Grabag
		Lokasi Balai Desa Banyuyoso	Kantor Kecamatan Grabag
		Lokasi Balai Desa Aglik	Kantor Kecamatan Grabag
2	Kecamatan Ngombol	Lokasi Balai Desa Susuk	Kantor Kecamatan Ngombol
		Lokasi Balai Desa Briyan	Kantor Kecamatan Ngombol
		Lokasi Balai Desa Ngombol	Kantor Kecamatan Ngombol
		Lokasi Balai Desa Candi	Kantor Kecamatan Ngombol
3	Kecamatan Purwodadi	Lokasi Balai Desa Bongkot	Kantor Kecamatan Purwodadi
		Lokasi Balai Desa Guyangan	Kantor Kecamatan Purwodadi
		Lokasi Balai Desa Sidoharjo	Kantor Kecamatan Purwodadi
		Lokasi Balai Desa Banjarsari	Kantor Kecamatan Purwodadi
		Lokasi Balai Desa Dadirejo	Kantor Kecamatan Purwodadi

4. KABUPATEN CILACAP

NO	TEMPAT	LOKASI		KETERANGAN
		DESA/KEL	KECAMATAN	
1	Mushola Jami' Salam	Jetis	Nusawungu	TES
2	Balai Desa Banjareja	Banjareja	Nusawungu	TEA
3	SD Sidaurip 03	Sidaurip	Binangun	TES
4	SMA Negeri 1 Binangun	Binangun	Binangun	TEA
5	Balai Desa Pasuruan	Pasuruan	Binangun	TEA
6	SD Negeri Pasuruan 01	Pasuruan	Binangun	TEA
7	SD Negeri Alangamba 01	Alangamba	Binangun	TEA
8	Balai Desa Kepudang	Pudang	Binangun	TES
9	Balai Desa Jepara Kulon	Jepara	Binangun	TES
10	Balai Desa Jepara Wetan	Jepara	Binangun	TES
11	Balai Desa Ayam Alas	Ayamalas	Kroya	TEA
12	Balai Desa Karangturi	Karangturi	Kroya	TEA
13	SD IT AN Nahl Genting	Adipala	Adipala	TES
14	SMPLB Negeri Cilacap	Gumilir	Cilacap Utara	TES
15	SMP Pius Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
16	SMP Negeri 1 Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
17	PT.Cilacap Indah	Lomanis	Cilacap Tengah	TES
18	Hotel Tiga Intan	Tambakreja	Cilacap Selatan	TES
19	Hotel Mutiara	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
20	Gedung Muhammdiyah Cilacap	Tegalreja	Cilacap Selatan	TES
21	Yayasan AL-AQOBAH	Gunungsimping	Cilacap Tengah	TES
22	Yayasan Khidmatas Sunah	Mergawati	Kroya	TES
23	BPC. Gapensi	Tritih Kulon	Cilacap Utara	TES
24	Gedung Partai Golkar	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
25	Masjid Agung Darussalam Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
26	SMP Negeri 2 Cilacap	Donan	Cilacap Tengah	TES
27	SMP Negeri 3 Cilacap	Tambakreja	Cilacap Selatan	TES
28	SMP Negeri 4 Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
29	SMP Negeri 6 Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
30	SMP Negeri 8 Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
31	SMP Purnama 1 Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
32	SMP Purnama 2 Cilacap	Donan	Cilacap Tengah	TES
33	SMP PGRI 1 Cilacap	Gumilir	Cilacap Utara	TES
34	SMP Muhammadiyah 1 Cilacap	Tegalreja	Cilacap Selatan	TES

NO	TEMPAT	LOKASI		KETERANGAN
		DESA/KEL	KECAMATAN	
35	SMP Muhammadiyah 2 Cilacap	Tritih Kulon	Cilacap Utara	TES
36	SMK YPE Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
37	Yayasan SRI MUKTI Cilacap	Gunungsimping	Cilacap Tengah	TES
38	SMA Negeri 1 Cilacap	Donan	Cilacap Tengah	TES
39	Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
40	Akademi Maritim,Nusantara Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
41	Palang Merah (PMI) Cilacap	Gumilir	Cilacap Utara	TES
42	SD Negeri Tegalreja 01 Cilacap	Tegalreja	Cilacap Selatan	TES
43	SD Negeri Tegalreja 02 Cilacap	Lomanis	Cilacap Tengah	TES
44	SD Negeri 05 Gumilir Cilacap	Gumilir	Cilacap Utara	TES
45	SD Negeri Sidanegara 08 Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
46	Kelurahan Mertasinga	Mertasinga	Cilacap Utara	TES
47	UPTD Rusunawa.Kabupaten Cilacap	Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	TES
48	Badan Diklat, Arsip Dan Perpusda Kabupaten Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
49	Kantor Asuransi Bumi Putera Kabupaten Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
50	RSUD Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
51	RSU Santa Maria	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
52	RSI Fatimah Cilacap	Kebonmanis	Cilacap Utara	TES
53	RS Aprillia Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
54	SMA YOS SUDARSO Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
55	Gedung Politeknik Cilacap	Sidakaya	Cilacap Selatan	TES
56	Pendopo Kab. Cilacap	Sidanegara	Cilacap Tengah	TES
57	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Karangtalun	Cilacap Utara	TES
58	Bandara Tunggul Wulung Cilacap	Tritih Lor	Jeruklegi	TEA

LAMPIRAN H :SOP/Protap Peringatan Dini

PDT-1	Informasi Gempa Bumi dengan informasi potensi tsunami
PDT-2	Pemutakhiran informasi dengan parameter gempa bumi, informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami
PDT-3.1-n	Pemutakhiran informasi dengan informasi daerah yang telah terdampak. Jumlah PDT-3 akan dikeluarkan sesuai dengan hasil pengamatan muka air laut
PDT-4	Informasi bahwa bahaya tsunami akibat gempa yang terjadi sudah berakhir

AWAS	Diperkirakan tinggi tsunami yang akan tiba melebihi 3m	Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota untuk segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi secara menyeluruh
SIAGA	Diperkirakan tinggi tsunami yang akan tiba antara 0,5-3m	Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota untuk segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi
WASPADA	Diperkirakan tinggi tsunami yang akan tiba kurang dari 0,5 m	Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota untuk segera mengarahkan masyarakat untuk menjauh pantai dan tepian sungai

LAMPIRAN 8 :SOP/Protap

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA TSUNAMI PROV.JAWA TENGAH
MASA SIAGA DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BMKG	PUSDALOPS	KADIDI	KADIDI II	KADIDI III	KALAKHAH	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gempa dan Potensi Tsunami									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Gempa dan Potensi Tsunami	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama BMKG untuk mengkaji dan menganalisis ancaman tsunami									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario Tsunami yang akan terjadi	
3	Menylagakan personel yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 5 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personel TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personel	
5	Menylagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen Informasi yang terpadu di PUSDalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personel	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA TSUNAMI PROV.JAWA TENGAH
MASA TANGGAP DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BMKG	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gempa dan Potensi Tsunami									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan status Gempa dan Potensi Tsunami	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pengungsi	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA TSUNAMI PROV.JAWA TENGAH
MASA TRANSISI DARURAT**

NO.	KEGIATAN	BMKG	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gempa dan Potensi Tsunami									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan status Gempa dan Potensi Tsunami	
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer. Armada PB	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana	

**LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH 2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada 15 September, 26 September, 21 Oktober, 24 November 2022, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud :

No	Kegiatan
1	Diseminasi Dokumen Renkon Tsunami bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
2	Melakukan Uji Publik Dokumen Rencana Kontingensi, TTX, dan Gladi
3	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
4	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat pada saat terjadi bencana
5	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
6	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika diperlukan
7	Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

PANGDAM IV-DIPONEGORO



WIDI PRASETIJONO
Mayor Jenderal TNI

KAPOLDA JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.
Inspektur Jenderal Polisi

**BERITA ACARA PENYUSUNAN
RENCANA KONTINGENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH 2022**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tsunami pada tanggal pada 15 September, 26 September, 21 Oktober, 24 November 2022, di Provinsi Jawa Tngah. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

<p>1 SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>2 PANGDAM IV DIPONEGORO</p> 	<p>3 KAPOLDA JAWA TENGAH</p> 
<p>KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> 	<p>5 KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH</p> 	<p>6 KEPALA BBWS BENGAWAN SOLO</p> 
<p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>8 KEPALA DINAS KERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIRTA KARYA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>9 KEPALA DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH</p>  <p>HARLA SUSILO, ST.MM</p>
<p>10 KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG</p>  <p>HERU.S</p>	<p>12 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. JAWA TENGAH</p> 
<p>13 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>14 KEPALA SATPOL PP PROV. JAWA TENGAH</p> 	<p>15 KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. JAWA TENGAH</p>  <p>106</p>

LAMPIRAN 11 PROFIL ORGANISASI

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No 1F Semarang Utara TELP. 024-3519927</p>	137	Mobil Dapur Umum: 1 Pick up : 4 Motor trail : 1 Sepeda Motor : 5 Truck serbaguna : 2 Handy Talky : 50 GPS : 2 Telp/satelit: 98002 Antenna : 1 Megaphone: 13 Genset : 23 Tandu : 2 Tandon air : 6 Tenda Pleton: 27 Tenda Posko: 5	Menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah
<p>Polda Jateng Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Telp: 024 8319860 roops_poldajateng@yahoo.com 081280031999</p>	100 Dokter Umum	Truck SAR: 2 Truck Penumpang: 7 Truck Box: 3 Bus: 3 Double Cabin: 7 Motor Trail: 30 Mobil Dapur Lapangan: 3 Mobil SAR Tata: 2 Mobil Ambulance: 3 Motor Logistik : 1 Mengaphone: 2 Telepon Satelit : 1001 Genset : 1 RS Lapangan : 2	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana • Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial • Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial • Penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak bencana
<p>Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Jalan Bukit Barisan A IV no 9 Permata Puri Kec. Ngaliyan Kota Semarang</p>	70 rescuer 5 perawat	HT : 35 RIG : 2 Telp/Satelit : 2 Repeater/ Portable : 1 Genset: 4 Rescue Car : 5	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tindak awal dan Operasi SAR • Koordinasi, Pengerahan dan Pengendalian potensi SAR

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
(024) 7629192 / fax. 7629189 Sar.semarang@basarnas.go.id 081327506300		Motor Trail: 8 Truck Angkut : 7 Velbed : 20 Tandu: 15 Teropong/Teleskop : 2 Chainsaw (gergaji mesin) : 5 Pompa air : 2 Helm SAR : 3 Vertical Rescue : 5 Matras : 35 Sleeping bag : 30 Tenda Operasional/Posko : 4 Renda Regu/Doom : 10 Lampu Senter : 4 Emergency Lamp : 2	
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran 024-6921972, 6925554 / 024-6921997 08156584359 (Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan)			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong diadakannya lumbung pangan masyarakat sebagai bentuk cadangan pangan antisipasi rawan pangan akibat bencana • Terpenuhiya pangan bagi masyarakat di lokasi rawan bencana
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7613185		Truk Crane : 2 Mini Excavator: 10 Wheel loader : 1 Mobil Pick-up: 18 Backhoe Loader: 1 Dump Truk: 18	Perbaikan fasilitas umum, jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov. Jawa Tengah Jalan Setia Budi No.201 B, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 (024) 7478813</p>		<p>Gergaji mesin :2 Kampak: 3 Cangkul:4 Sekop:4 Power sprayer sedang: 3 Sepatu boot kerja:4 pasang Helm security standart : 4 Tangki air: 4 Mesin pompa: 4 Mobil 112engui Hilux: 1 Sepatu boot: 25 pasang Pakaian pelindung anti panas: 15 Sarung tangan: 25 pasang Lampu kepala: 2 Helm safety: 25 Peples: 15 Sabuk perlengkapan: 2 Handie talkie: 4 Megaphone: 3 Baju pemadam kebakaran: 10 Garpu: 10 Gepyok: 10 Gebyokan: 20 Sekop: 18 Garuk: 15 Sabit: 15 Handsprayer: 1 Tabung pemadam kebakaran: 3 Kleper: 5 Helm: 4 Baju pemadam kebakaran: 50 Sepatu boot: 50 pasang</p>	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Helm: 4 APAR: 5 Kapak dua fungsi: 3 Alat pemotong dan pengait: 3 Handy talky: 2 Gepyok: 6 Helm proyek: 3 Sepatu boot: 3 Sarung tangan: 3 Garu tajam baja: 3 Kompas tangan: 3 Cangkul baja: 3 Sekop baja: 3 Parang baja: 3 Pompa punggung: 1 Lampu kepala: 3 Megaphone: 2 Jas hujan dan Celana: 3 Ransel/water bag: 3 GPS: 2 Pompa pemadam: 1 Pompa air: 1 Power sprayer sanchin: 1 Tangki "113enguin" TB 110: 1 Jet Shooter: 2 Megaphone: 2 Binocular: 1 Handy talkie: 4 Perahu LCA (Landing Craft Aluminium): 1 Perahu fiber: 1 Handy talkie: 7 Binocular: 3 Sekop: 25	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Sabit: 10 Kapak: 15 Parang: 15 Chainsaw: 3 Gergaji pangkas: 25 Mesin pemotong rumput: 2 Gepyok: 10 Headlamp: 6 Sepatu safety: 12 Parang: 13 Sekop: 34 Sabit: 38 Handy talky: 10 Repeater: 1 Kendaraan roda 4: 3 Kendaraan roda 3: 2 Kendaraan roda 2: 5 RPU Recom: 1 Radio komunikasi/RIG: 1 Gergaji mesin: 1 Drone: 1	
Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang Barat, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7608201		Excavator Standart: 11 Excavator Long-Arm: 1 Mini Excavator: 3 Vibro Roller : 5 Bulldozer : 1 Dump Truck : 1 Mobile Pump : 1 Portable Water Pump : 1	
Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah Jl. Siliwangi No.357, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 (024) 7605700		HT : 4 Repeater : 5 Motor Trail : 10 Mobil Pick-Up : 6 Truk Serbaguna : 1 Chainsaw : 2 Sepatu Booth : 4	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 (024) 3515301</p>	<p>105 personil</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) • Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
<p>PMI Jl. Arum Sari Raya, RT.11/RW.02, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 59111 (024) 76746733</p>	<p>30 relawan</p>	<p>Ambulance : 2 Tenda RS Lapangan : 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>MDMC Jl. Wonodri Sendang Raya No.2, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242</p>	<p>30 relawan</p>		<ul style="list-style-type: none"> •